



Annual Report 2011
Laporan Tahunan 2011

Daftar Isi

Table of Content

Sekilas kinerja 2011 Performance At a Glance	2
Selayang Pandang Brantas Abipraya brantas Ab At a Glance	3
Pencapaian Tahun ini Achievement of This Year	5
Jejak langkah Milestone	10
Peristiwa Penting Event Highlights	12
Ikhtisar Keuangan Financial Highlights	14
Laporan Dewan Komisaris The Board of Commissioners' Report	20
Laporan Dewan Direksi The Board of Directors' Report	30
Pernyataan Tanggungjawab Atas Laporan Tahunan 2011 Responsibility Annual Report 2011	36
PROFIL PERUSAHAAN COMPANY PROFILE	51
Riwayat Perusahaan Company History in Brief	40
Struktur Organisasi Organization Structure	44
Visi – Misi Vision & Mission	46
Rencana, Strategi & Program Plans, Strategy & Programs	48
Profil Dewan Komisaris The Board of Commissioners' Profile	68
Profil Dewan Direksi The Board of Directors' Profile	70
Profil Pejabat 1 Tingkat Dibawah Direksi Officer One Level Under The Board of Directors	72
Sumber Daya Manusia Human Resource	74
Komposisi Pemegang saham Composition of Shareholders	80
Perusahaan Afiliasi & Yayasan Affiliated Companies & Foundation	84
Penghargaan & Sertifikat Award & Certification	85
ANALISA & PEMBAHASAN MANAJEMAN MANAGEMENT DISCUSSION & ANALYSIS	90
Tinjauan Industri Industry Overview	91
Tinjauan Operasi Operating View	93
Pemasaran Marketing	94
Produksi	95
Hasil Usaha Returns	98
Investasi Investment	
Tinjauan Keuangan Financial Review	99
Aspek Keuangan Financial Aspect	99
Aspek Operasional Operational Aspect	101
Aspek Administrasi Administrative Aspect	105
TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK GOOD CORPORATE GOVERNANCE	110
Pedoman Tata Kelola Perusahaan Brantas Abipraya Good Corporate Governance at Brantas Abipraya	111
Prinsip - Prinsip GCG GCG Principles	113
Struktur Tata Kelola Perusahaan Structure of Corporate Governance	118
Proses Tata kelola Perusahaan Corporate Governance Process	126
Organ Perusahaan Company Organ	140
Standar Akuntansi, Pengendalian Internal dan Eksternal Accounting Standard Internal and External	155
Etika Perusahaan Company Code of Conduct	159
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY	180
Aspek Ekonomi Economic Aspects	181
Aspek Sosial Social Aspects	187
LAPORAN KEUANGAN FINANCIAL REPORT	279

Sekilas Kinerja

Performance At A Glance

(dalam jutaan rupiah)

(in millions of rupiah)

No.	LAPORAN LABA / RUGI	2011	2010	2009	INCOME STATEMENT
1	Pendapatan Usaha	703.877,06	512.101,04	711.859,95	Revenue
2	Beban Kontrak	622.655,17	439.101,46	628.512,64	Contract Expenses
3	Laba Kotor	109.031,35	93.527,87	105.776,49	Gross Profit
4	Laba Usaha	65.491,75	55.350,20	73.252,09	Profit
5	Pendapatan (Beban) lain-lain	13.261,11	1.732,83	4.896,63	Other Incomes (Expenses)
6	Laba Sebelum Pajak	40.007,49	26.339,57	52.736,46	Profit Before Tax
7	Laba Bersih Setelah Pajak	26.012,73	16.988,89	34.020,17	Net Profit After Tax
NERACA		BALANCE SHEET			
8	Total Aset	640.115,73	647.272,74	637.749,73	Total Assets
9	Total Liabilitas	478.618,66	511.788,40	519.254,28	Total Liabilities
10	Ekuitas	161.497,07	135.272,74	118.495,45	Equity
RASIO-RASIO KEUANGAN		FINANCIAL RATIO			
11	Laba Sebelum Pajak / Pendapatan	5,68 %	5,14 %	7,41 %	Profit Before Tax/Revenue
12	Beban Kontrak / Pendapatan	88,46 %	85,75 %	88,29 %	Contract Expenses/Revenue
13	Laba Sebelum Pajak/Total Aset	6,25 %	4,07 %	8,27 %	Profit Before Tax/Total Assets
14	Rasio Lancar	141,73 %	122,33 %	151,53 %	Current Ratio
15	Rasio Kas	47,47 %	20,40 %	33,87 %	Cash Ratio
16	Hutang Terhadap Aset	74,77 %	79,07 %	81,42 %	Debt Towards Asset
17	Hutang Terhadap Modal	296,36 %	378,34 %	438,21 %	Debt Towards Equity
18	Hutang Terhadap Aset Tetap	188,65 %	210,01 %	226,59 %	Debt Towards Fixed Asset

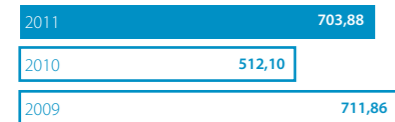
(dalam miliaran rupiah)

(in billion of rupiah)

Pendapatan Usaha

Revenue

+37,45%



Laba Kotor

Gross Profit

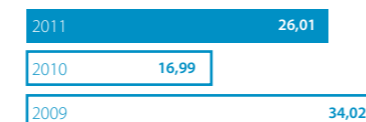
+41,80%



Laba Bersih Setelah Pajak

Net Income

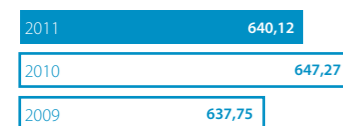
+53,09 %



Total Aset

Total Asset

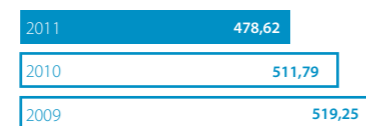
- 1,10 %



Total Liabilitas

Total Liabilities

- 6,48 %



Ekuitas

Equity

+ 19,39 %



Selayang Pandang Brantas Abipraya

Brantas Abipraya At A Glance



PT Brantas Abipraya (Persero) yang selanjutnya disebut Brantas merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor konstruksi. Saat ini, perusahaan yang dikenal sebagai perusahaan konstruksi umum ini tidak hanya menangani proyek-proyek irigasi, tetapi juga telah melaksanakan proyek bergengsi yang terletak di dalam dan di luar negeri. Proyek tersebut, antara lain bendungan, terowongan, jalan dan jembatan, bandara, bangunan, pembangkit listrik, dan banyak lagi.

Sesuai dengan misi perusahaan, dan untuk mengantisipasi pasar bebas di era globalisasi, dimana persaingan akan menjadi sangat sulit dihindarkan, Brantas terus mengembangkan rencana intensif agar menjadi perusahaan terkemuka dalam industri konstruksi. Guna mewujudkan rencana tersebut jajaran manajemen Brantas telah menetapkan visi dan misi korporasi sebagai berikut :

Visi : Menjadi perseroan nasional terkemuka dalam industri konstruksi.

Misi :

- Menyediakan produk dan jasa enjinerig dan pelaksanaan konstruksi yang bermutu tinggi dengan layanan terbaik bagi para pelanggannya.
- Menghasilkan laba, membangun citra, mengembangkan profesionalisme usaha berdasarkan prinsip-prinsip GCG (Good Corporate Governance), manajemen kesehatan

PT. Brantas Abipraya (Limited Liability Company) hereinafter referred to as Brantas is one of State-Owned Enterprises (SOES) in the construction sector. Currently, the company is well-known as a public construction company that does not only handle irrigation projects, but also it has performed a prestigious project in the home country or in overseas. The said projects are among others irrigation, tunnel, road, bridge, airport, construction, electricity power plant, and many more.

In accordance with the company's mission, and to anticipate a free market in the globalization era, where competition will be considerably avoidable, then Brantas keeps developing an incentive plan to become a well-known company in the construction industry. To actualize such a plan, the management of Brantas has defined vision and mission of the corporation as follows:

Vision: To become a well-known national company in the construction industry.

Mission:

- Providing engineering product and services and a high quality construction implementation with the best services for its customers.
- Generating profit, developing image and business professionalism based upon GCG (Good Corporate Governance) principles, occupational health and safety (OHS) and environmental conservation.

- dan keselamatan kerja (K3) serta pelestarian lingkungan.
- Peduli kepada usaha kecil, menengah dan koperasi serta masyarakat sekitar.

Keinginan menjadi perusahaan terkemuka dalam industri konstruksi ini harus didukung oleh fondasi yang kuat berupa strategi korporasi yang efektif dan komprehensif yang didukung oleh keuangan yang mapan, sistem manajemen yang baik serta SDM yang handal yang memiliki komitmen tinggi terhadap Perusahaan. Untuk itulah, perseroan memiliki motto "Semangat Memberikan Yang Terbaik" atau "Spirit of Giving The Best".

Perseroan menyadari sepenuhnya bahwa untuk memenangkan persaingan, seluruh staf harus ditingkatkan kemampuan mereka agar dapat bekerja secara efisien dan efektif sehingga dapat memenuhi tenggang waktu dan kualitas kerja yang baik untuk tiap proyek yang dikerjakan sesuai dengan biaya yang dikeluarkan. Dengan begitu Perseroan dapat meningkatkan kinerja dan citra perusahaan. Pengembangan perusahaan selama ini telah berjalan pada track yang ada dan itu terbukti membuahkan berbagai prestasi yang diakui banyak pihak. Prestasi itu berhasil diraih antara lain karena Brantas mengembangkan dan menerapkan secara konsisten sistem manajemen mutu berdasarkan ISO 9000 di semua unit kerja / usaha.

Setelah berhasil menerapkan sistem secara konsisten untuk beberapa kali, Brantas berhasil mendapatkan jaminan mutu ISO 9001:2000 sejak 22 Januari 1998. Sertifikat tersebut diberikan oleh Lloyd's Register Quality Assurance. Untuk mempertahankan prestasi yang sudah diraih, Perusahaan mengembangkan sistem berdasarkan pada kebijakan mutu. Semua anggota dan personil Brantas akan selalu melakukan pekerjaan dengan semangat untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi konsumen. Guna menghadapi tantangan ke depan yang makin kompleks, pada tanggal 12 Desember 2011, perusahaan mendirikan PT Brantas Energi yang bergerak di bidang pembangunan, perindustrian, perdagangan dan jasa dalam bidang ketenagalistrikan dan energi alternatif, dengan nilai investasi sebesar Rp. 51,480,000,000 atau setara dengan kepemilikan sebesar 99%.

- Caring to small, medium enterprises and cooperatives as well as people surrounding the company.

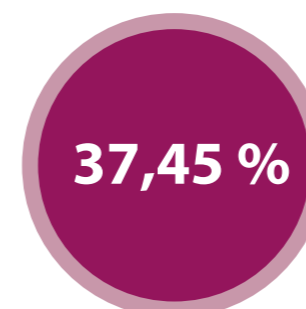
A desire to become a well-known company in the construction industry should be supported by a strong foundation in the form of an effective and comprehensive strategy supported by a stable finance, good management system either reliable HR which has a high commitment towards the Company. Hence, the company has a motto "Spirit of Giving The Best".

The company realizes that to win a competition, all staffs should improve their abilities so that they work efficiently and effectively in order to comply with grace period and good work quality for each project which is performed in accordance with the cost spent. As a matter of fact, the company can enhance its performance and image. The company development has been insofar running on the existing track and it is proven of generating various achievements admitted by numerous parties. Such achievements have been successfully achieved among others due to Brantas develops and applies consistently the quality management system based upon ISO 9000 in all working units/businesses.

After achieving such success in applying a consistent system, Brantas has several times obtained a quality assurance of ISO 9001:2000 since January 22, 1998. The certificate is provided by Lloyd's Register Quality Assurance. To maintain the achievement, the Company develops the system based upon a quality policy. All members and personnel of Brantas will always perform the work under a spirit to give the best services for the customers. To face a challenge ahead that is very competitive, on December 12, 2011, the company has established PT Brantas Energy having line of business in development, industrial, trading and services in the field of electrical and alternative energy under an investment value of Rp 52,480,000,000,- or equalize to the shareholding of 99%.

Pencapaian Tahun Ini

Achievement Of This Year



Pendapatan Meningkat Increased Revenue

Kinerja manajemen didorong untuk meningkatkan pendapatan. Tahun ini pendapatan mencapai 703,88 Miliar meningkat 34,45 % dibanding tahun 2010 sebesar 512,10 Miliar

The management performance is supported to increase the revenue. This year, the revenue achieved 703.88 Billion increased 34.45% compared to 2010 was 512.10 Billion.

Tahun 2011	703,88 miliar
Tahun 2010	512,10 miliar

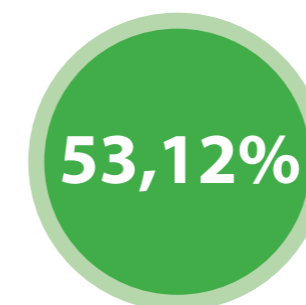


Kontrak Baru Meningkat Increase in New Contract

Perusahaan bertekad untuk menggenjot pendapatan dengan mengikuti lebih banyak lelang untuk memperoleh proyek baru. Kontrak baru pada tahun 2010 sebesar 1.605,12 miliar meningkat tajam 123,59 % dari tahun 2010 sebesar 717.88 miliar.

The company has a strong intention to boost the revenue by participating in numerous bids to obtain a new project. The new project in 2010 worth 1,605.12 billion increased significantly 123.59% from 2010 worth 717.88 billion.

Tahun 2011	1.605,12 Miliar
Tahun 2010	717,88 Miliar

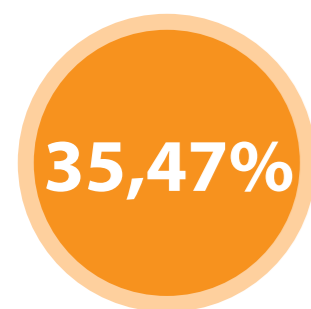


Labanya Meningkat Increase in Profit

Kenaikan pendapatan diikuti dengan kenaikan laba yang cukup signifikan. Laba tahun 2011 tercapai sebesar 26,01 miliar, meningkat 53,12 % dibandingkan tahun 2010 sebesar 16,99 Miliar

The increase in revenue is followed by the increase in profit which is significant enough. The profit in 2011 achieved 25.01 billion, increased 53.12% compared to 2010 worth 16.99 billion.

Tahun 2011	26,01 Miliar
Tahun 2010	16,99 Miliar

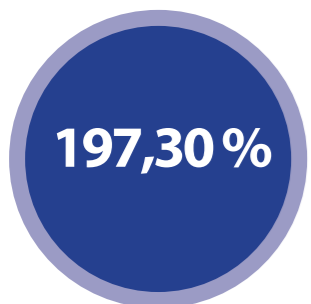


Laba Kerjasama Operasi (KSO) Join Operation

Pertumbuhan Proyek Kerjasama Operasi (KSO) bersinergi dengan profit BUMN dan Swasta lain menunjukkan peningkatan, sehingga laba Kerjasama Operasi (KSO) tahun 2011 naik 35,47 % atau sebesar 27,81 Miliar dibandingkan tahun 2010 sebesar 20,53 Miliar

The growth of the operational Cooperation Project (KSO) synergizes with profit of SOE and other Private parties indicates the increase, therefore, the Operational Cooperation profit (KSO) of 2011 increased 35.45% or 27.81 Billion compared to 2010 worth 20.53 Billion.

Tahun 2011	27,81 Miliar
Tahun 2010	20,53 Miliar



Investasi Terus Tumbuh Investment Keeps Growing

Dalam memenuhi tuntutan pasar & untuk mencapai target pendapatan, maka jajaran manajemen memutuskan untuk meningkatkan investasi menjadi 73,91 Miliar di tahun 2011, dibawah 197,30 % dibanding tahun 2010 sebesar 24,86 Miliar

In compliance with market demand and to reach the revenue target, hence, the management level decides increasing the investment at the target of 73.91 Billion in 2011, below 197.30% compared to 2010 worth 24.86 Billion.

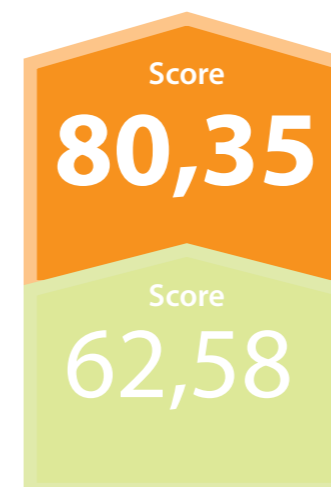
Tahun 2011	73,91 Miliar
Tahun 2010	24,86 Miliar



Tingkat Kesehatan Perusahaan Company's Health Rank

Tingkat kesehatan perusahaan tahun 2011, Brantas memperoleh predikat "AA" dengan capaian skor 94,25 untuk kinerja perusahaan dan masuk dalam kategori "sehat" Jika dibandingkan dengan tahun 2010 sebesar 85,75, pencapaian skor naik 9,91 %

In 2011, the company's health rank has acquired a predicate "AA" with a score achievement 94.25 for the company performance and nominated into "healthy" category. If compared to 2010 was 85.75, such score achievement increased 9.91%.

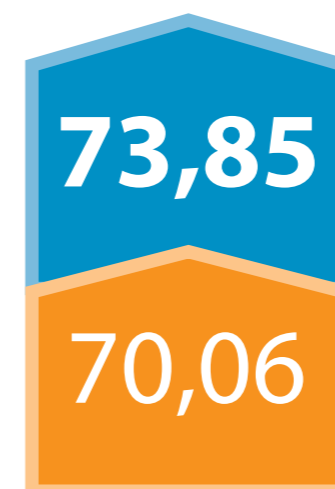


Pencapaian Skor KPI Achievement in KPI Score

Pengukuran kinerja perusahaan berbasis *Key Performance Indicators* (KPI), tercapai sebesar 80,35 meningkat 28,4 % dibandingkan tahun 2010 yang dicapai sebesar 62,58

A measurement of the company performance on the basis of Key Performance Indicators (KPI), achieved 80.35% increased 28.4% compared to 2010 which achieved 62.58%.

Tahun 2011	Score 80,35
Tahun 2010	Score 62,58



Skor GCG Meningkat Increase in GCG Score

Perusahaan senantiasa menjaga nilai-nilai integritas dengan menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan atau Good Corporate Governance (GCG) dalam seluruh aktivitasnya. Hasilnya, skor pencapaian GCG terus meningkat dan pada tahun 2011, skor GCG Brantas mencapai 73,85 dibandingkan tahun 2009 dengan skor 70,06.

The company always maintains integrity values by applying Good Corporate Governance (GCG) principles in any of its activity. As a result, the achievement score for the GCG keeps increasing and in 2011, the GCG score for Brantas achieved 73.85 compared to 2009 achieved 70.06.

Tahun 2011	Score 73,85
Tahun 2010	Score 70,06



3 Penghargaan 3 Awards

Perusahaan terus meningkatkan produktivitas. Kinerja Perusahaan telah berjalan pada jalur yang tepat. Terbukti selama tahun 2011, Brantas meraih 3 penghargaan bergengsi.

The company keeps improving productivity. The company performance has been on a right lane. It is proven that during 2011, Brantas achieved 3 prestigious awards.



Pembentukan Anak Perusahaan Subsidiary Establishment

Perusahaan telah mendirikan anak perusahaan bernama "Brantas Energi" pada bulan Desember 2011 yang akan membantu perusahaan untuk meningkatkan pendapatan, perusahaan ini bergerak di bidang Investasi *Hydroelectric Power Plant* dengan komposisi saham PT. Brantas Abipraya (persero) 99 % dan koperasi karyawan 1 %.

In December 2011, the company has established a subsidiary named "Brantas Energi" which will support the company in enhancing the revenue, this company has a line of business in investment of Hydroelectric Power Plant with share composition of PT Brantas Abipraya (Persero) at 99% and employee's cooperatives at 1%.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility

Aspek ekonomi dalam tanggung jawab sosial perusahaan yang dikelola secara profesional menjadi penting. Tidak semata-mata mendapatkan keuntungan (profit), tetapi juga memberikan perhatian kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat (people) dan kelestarian lingkungan (planet).

Economic aspect in the Corporate Social Responsibility that is professionally managed becomes an important thing. It does not only acquire profit, but also it pays attention to the people prosperity enhancement and environmental conservation (planet).

Aspek Ekonomi

Memaksimalkan pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar proyek diwujudkan melalui penyaluran dana program kemitraan sebesar Rp. 210 juta dengan daya serap 100% di tahun 2011

Economic Aspect

Maximizing the economic empowerment for community surrounding the project is actualized by fund distribution of partnership program worth Rp 210 million under absorption of 100% in 2011.

Aspek Sosial

Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar lokasi proyek secara berkesinambungan telah memberi kontribusi sosial berupa bantuan pendidikan sebesar Rp 195 juta.

Social Aspects

An effort to improve the community prosperity surrounding the project location in a sustainable manner has given a social contribution in the form of education aid worth Rp 195 million.



1980

PT Brantas Abipraya persero didirikan untuk menjadi perusahaan yang berorientasi laba yang berkantor pusat di Malang, Jawa Timur. Pembentukan ini disebabkan perluasan Kali Brantas Proyek Pengembangan Guru.

PT Brantas Abipraya established to be a profit oriented company having its head quarter in Malang, East Java. The establishment was resulted from an expansion of Kali Brantas Master Development Project.



1990

Selama pertumbuhan perusahaan, manajemen membuat perbaikan terus-menerus dan akhirnya mendapatkan kepercayaan untuk melaksanakan berbagai proyek. Setelah 10 tahun, perusahaan memulai kontrak kerja proyek non water sumber daya, seperti jalan, jembatan, bangunan, dan proyek pelabuhan udara.

During the company growth, the management made continuous improvement and finally gained trust to execute various projects. After 10 years, the company commenced job contract of nonwater resources projects, such as road, bridge, building, and airport projects.



1992

Pada tanggal 12 nya, Brantas berhasil untuk mendapatkan prestasi monumental. Saat itu dicatat mendapat kepercayaan untuk membangun PLTA Kotapanjang, Bangkinang, Riau. Jenis yang di Dam Gravity Beton. Diterapkan untuk proyek ini adalah metode Roller Beton (RCC) Terkompaksi. Ini adalah metode pertama yang akan digunakan dalam proyek konstruksi bendungan di Indonesia

On its 12th, Brantas succeeded to gain a monumental achievement. This moment was noted by the trust to build Kotapanjang HEPP, Bangkinang, Riau. The type of which is On Concrete Gravity Dam. Applied for this project was Roller Compacted Concrete (RCC) method. This was the first method to be used in dam construction project in Indonesia.



1995

Sebagai tantangan yang semakin ketat, manajemen memutuskan untuk memindahkan kantor pusat PT Brantas Abipraya (persero) ke Jakarta. Ini adalah tahap untuk mendukung semua kegiatan perusahaan dan menjadi dekat dengan pemerintah pusat dan pusat bisnis.

As the challenges are growing tighter, the management decided to move The Headquarter of PT Brantas Abipraya to Jakarta. This was a stage to support all the company activities and to be close to central government and business centres.



2008

Sebagai tantangan yang semakin ketat, manajemen memutuskan untuk memindahkan kantor pusat PT Brantas Abipraya (persero) ke Jakarta. Ini adalah tahap untuk mendukung semua kegiatan perusahaan dan menjadi dekat dengan pemerintah pusat dan pusat bisnis.

PT. Brantas Abipraya was proclaimed the only state-owned construction company as the most obedient tax-payer in 2008 - 2012 by the Directorate General of Taxation of the Ministry of Finance.

2010

Penghargaan oleh Majalah Info Bank untuk menjadi perusahaan milik negara dan konstruksi terbaik, berdasarkan pertumbuhan kinerja bisnis dan rasio keuangan.

Awarded by Info Bank Magazine to be the best state-owned and construction company, based on the business performance growth and financial ratio.



2011

Kementerian Pekerjaan Umum diberikan sebagai Kontraktor Hijau



dikategorikan dalam bangunan dengan lebih dari 8 lantai konstruksi

Diberikan oleh Asosiasi Konstruksi Indonesia (Ind abbr. AKI) untuk mencapai kontraktor yang paling dalam jumlah proyek bendungan.

The inaguration Gedung Kantor Pusat oleh Menteri Pekerjaan Umum.

- The Ministry of Public Works awarded as Green Contractor catagorized in building with more than 8 floors construction

- Awarded by Indonesian Construction Association (Ind abbr. AKI) for achieving the contractor is most in numbers of dam projects.

- The inaguration of Head Office Building by the Minister of Public Works.



Sebuah investasi baru di Pembangkit Listrik Tenaga Air sebagai salah satu diversifikasi usaha, yang disebut "Brantas Energy" sebagai anak perusahaan dari PT Brantas Abipraya.

A new investment in Hydroelectric Power Plant as one of business diversification, called "Brantas Energy" as a subsidiary of PT Brantas Abipraya.



Peristiwa Penting

Event Highlights



4 Februari 2011

Diversion Tunnel Breakthrough Bendungan Jatibarang
Breakthrough Diversion Tunnel Jatibarang Dam



20 Juni 2011

Pemberhentian dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris PT. Brantas Abipraya (Persero)

Termination and appointment for member of the Board of Commissioners of PT. Brantas Abipraya (Persero)

Pemberhentian dan pengangkatan anggota Dewan Direksi PT. Brantas Abipraya (Persero)

Termination and appointment for member of the Board of Directors of PT. Brantas Abipraya (Persero)



25 November 2011

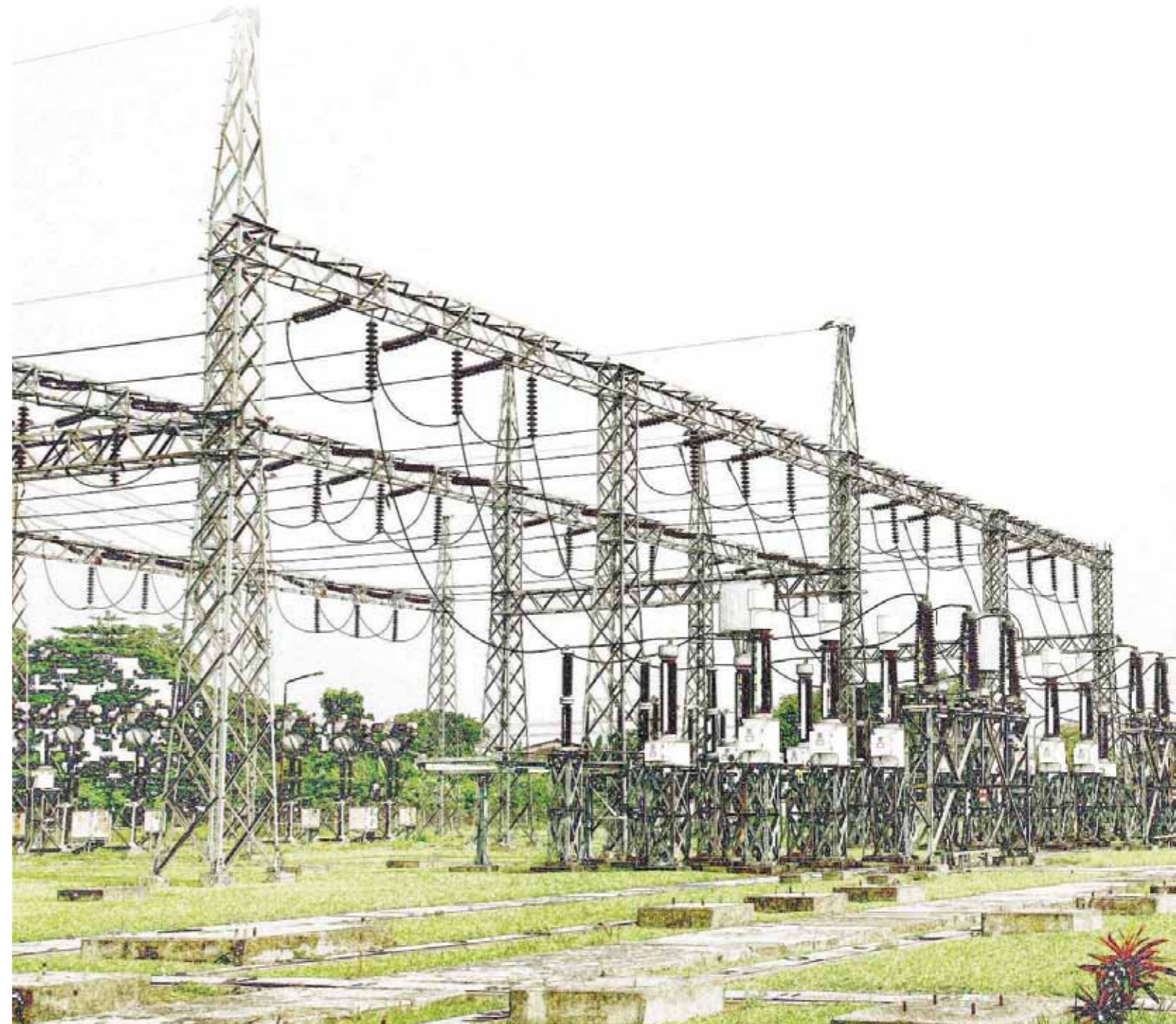
Peresmian gedung kantor pusat PT. Brantas Abipraya oleh Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto

Inauguration for building of head office of PT. Brantas Abipraya by the Minister of Public Works, Djoko Kirmanto



12 Desember 2011

Pembentukan anak perusahaan, PT. Brantas Energi
Subsidiary establishment, PT. Brantas Energi



Laporan Posisi Keuangan Komparatif

Statement of Comparative Financial Position

Dalam juta rupiah

In million of rupiah

URAIAN	TAHUN YEAR			DESCRIPTION
	2011	2010	2009	
Aset				Asset
Aset Lancar				Current Assets
Kas dan Setara Kas	129.552.744.554	67.290.407.480	91.316.084.047	Cash and Cash Equivalents
Piutang Usaha				Accounts Receivable
Pihak Yang Berelasi	111.481.992.970	79.505.138.632	86.578.558.382	Its related parties
Pihak Ketiga	5.041.096.222	26.912.503.142	7.723.247.913	Third Party
Piutang Lain - Lain				Receivables - Other
Pihak Ketiga	12.092.398.654	4.971.369.418	4.443.538.808	Third Party
Tagihan Bruto Kepada Pemberi Kerja				Gross Claims To Employer
Pihak Yang Berelasi	45.516.604.103	137.496.285.902	158.314.711.339	Its related parties
Pihak Ketiga	183.321.224	459.760.200	11.812.399.442	Third Party
Persediaan	31.057.815.057	26.785.142.231	7.923.375.797	Inventory
Uang Muka	14.607.526.324	19.533.440.743	6.972.376.705	advance
Beban Dibayar Dimuka	29.904.619.524	33.924.579.699	14.890.689.710	Prepaid Expenses
Pajak Dibayar Dimuka	4.867.056.370	5.270.217.088	16.141.180.761	Prepaid Taxes
Jaminan	2.102.288.227	1.426.375.447	2.472.138.470	assurance
Total Aset Lancar	386.407.463.230	403.575.219.983	408.588.301.375	Total Current Assets
Aset Tidak Lancar				Noncurrent Assets
Properti Investasi	151.989.480.000	151.554.480.000		Investment Property
Aset Tetap - Nett	101.718.787.028	89.543.790.174	74.506.052.431	Fixed Assets - Nett
Aset Lain-Lain - Nett		2.599.248.969	154.655.378.969	Other Asset
Total Aset Tidak Lancar	253.708.267.028	243.697.519.143	299.161.431.400	Total Non-Current Assets
Jumlah Aset	640.115.730.258	647.272.739.126	637.749.732.775	Total Assets

Laporan Posisi Keuangan Komparatif

Comparative Statements of Financial Position

Dalam juta rupiah

In million of rupiah

URAIAN	TAHUN YEAR			DESCRIPTION
	2011	2010	2009	
Liabilitas				Liabilities
Liabilitas Jangka Pendek				Short-Term Liabilities
Hutang Usaha				Accounts Payable
Pihak Yang Berelasi	6.347.335.660	8.102.112.761	4.478.478.146	Its related parties
Pihak Ketiga	118.484.714.796	82.629.833.822	99.389.906.255	Third Party
Hutang Bank - Jatuh Tempo Satu Tahun		39.654.612.650	22.510.283.595	Bank Loans - One Year Maturity
Hutang Non Bank	100.560.000.000	110.000.000	50.085.974.773	Non-Bank Debt
Surat Berharga Jangka Menengah		100.000.000.000	25.000.000.000	Medium-Term Securities
Hutang Pajak	2.927.546.201	4.102.843.517	7.079.215.855	Taxes Payable
Uang Muka Pemberi Kerja - Jatuh Tempo Satu Tahun	20.485.299.993	75.335.984.097	32.162.720.316	Advances Employer - One Year Maturity
Pendapatan Diterima Dimuka	5.167.248.884	2.899.201.202	5.571.190.563	Revenue Received in Advance
Beban Yang Masih Harus Dibayar	11.266.757.872	10.304.547.576	22.332.562.460	Accrued Expenses
Hutang Sewa Pembiayaan - Jatuh Tempo Satu Tahun	7.398.975.738	6.776.397.224	980.690.647	Finance Lease Payables - One Year Maturity
Hutang jangka Pendek Lainnya			52.797.228	Other short-term liabilities
Total Liabilitas Jangka Pendek	272.637.879.144	329.915.532.850	269.643.819.836	Total Short-Term Liabilities
Liabilitas Jangka Panjang				Long-Term Liabilities
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	9.600.069.532	11.383.674.819	11.936.710.124	Post-Employment Benefits Liability
Hutang Bank - Setelah Dikurangi Bagian Yang Jatuh Tempo Satu Tahun	136.469.931.211	100.486.293.704	139.280.144.184	Bank Debt - Net of Current Maturities of The One Year
Uang Muka Pemberi Kerja - Setelah Dikurangi Bagian Yang Jatuh Tempo Satu Tahun	55.569.939.429	65.953.255.797	86.130.719.088	Employer Advances - Net of Part A One-Year Maturity
Hutang Sewa Pembiayaan - Setelah Dikurangi Bagian Yang Jatuh Tempo Satu Tahun	4.340.838.875	4.049.638.875	12.262.891.286	Finance Lease Payable - Net of Current Maturities of The One Year
Total Liabilitas Jangka Panjang	205.980.779.047	181.872.863.195	249.610.464.682	Total Long-Term Liabilities
Ekuitas				Equity
Ekuitas Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk				The Equity Attributable to Owners of Parent Entity
Modal Saham - nilai nominal Rp 1.000.000 per saham				Capital Stock - par value of Rp 1,000,000 per share
Modal dasar - 40.000 saham				Authorized - 40,000 shares
Modal ditempatkan dan disetor 10.000 saham	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	Issued and paid 10,000 shares
Penyertaan Modal Negara	151.554.480.000	151.554.480.000		State Capital
Penyertaan Modal Negara Yang Belum Ditentukan Statusnya			151.554.480.000	Investment of the Yang Not Specified
Cadangan	7.585.411.200	7.585.411.200	7.585.411.200	status
Saldo Laba (Rugi)	(7.642.819.247)	(33.655.548.118)	(50.644.442.943)	reserve
KEPENTINGAN NON PENGENDALI	113			Retained Earnings (Loss)
Total Ekuitas	161.497.072.067	135.484.343.082		NON-CONTROLLING INTEREST
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	640.115.730.258	647.272.739.126	637.749.732.775	Total Equity
				TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Laporan Laba / (Rugi) Komperhensif

Profit / (Loss) Comprehensive

Dalam jutaan rupiah

In million of rupiah

URAIAN	2011	2010	2009	DESCRIPTION
PENDAPATAN USAHA	703,877,057,479	512,101,037,657	711.859.953.039	OPERATING REVENUES
BEBAN LANGSUNG	622,655,166,860	439,101,461,451	628.512.643.700	DIRECT COSTS
LABA KOTOR - SEBELUM BAGIAN LABA JOINT OPERATION	81,221,890,619	72,999,576,206	83.347.309.339	GROSS PROFIT - PROFIT BEFORE JOINT OPERATION
BAGIAN LABA JOINT OPERATION	27,809,457,827	20,528,291,730	22.429.180.616	THE PROFIT JOINT OPERATION
LABA KOTOR	109,031,348,446	93,527,867,935	105.776.489.955	GROSS PROFIT
BEBAN USAHA				OPERATING EXPENSES
Pegawai	27,334,941,706	24,097,834,707	20.139.915.259	employee
Umum	11,611,670,886	11,142,853,165	10.370.719.588	general
Penyusutan	1,623,433,757	807,714,785	742.534.150	shrinkage
Pemasaran	2,969,553,404	2,129,265,928	1.271.232.300	marketing
Jumlah Beban Usaha	(43,539,599,753)	(38,177,668,586)	(32.524.401.296)	Total Operating Expenses
LABA USAHA	65,491,748,693	55,350,199,350	73.252.088.659	OPERATING PROFIT
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN				INCOME (EXPENSE) OTHER
Pendapatan Lain-Lain	19,707,285,869	11,092,073,739	5.064.056.550	Miscellaneous Income
Beban Lain-Lain	6,446,180,127	(9,359,244,643)	(9.960.684.746)	Miscellaneous Expenses
Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-Lain	13,261,105,742	1,732,829,097	(4.896.628.195)	Total Income (Expenses) Other
LABA SEBELUM BEBAN BUNGA DAN PAJAK PENGHASILAN	78,752,854,436	57,083,028,447	68.355.460.464	EARNINGS BEFORE INTEREST AND TAXES
BEBAN BUNGA	(38,745,368,608)	(30,743,456,331)	(15.619.001.114)	INCOME
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN (BEBAN) MANFAAT PAJAK PENGHASILAN	40,007,485,828	26,339,572,115	52.736.459.349	INTEREST EXPENSE
Pajak Final	(13,994,756,956)	(9,350,677,290)	(18.634.669.107)	(EXPENSE) INCOME TAX BENEFIT
Pajak Kini				Final tax
Pajak Tangguhan	13,994,756,956	9,350,677,290		Current Tax
				Deferred Tax
LABA BERSIH	26,012,728,872	16,988,894,825	34.020.167.108	

Realisasi pendapatan 3 tahun terakhir

Dalam jutaan rupiah

Realization of revenue last 3 years

In millions of rupiah

URAIAN	2011	2010	2009	DESCRIPTION
Pendapatan Usaha				revenues
Jasa Konstruksi	689.352,45	494.405,90	701.820,77	Construction Services
Jasa Peralatan	14.524,61	17.795,14	10.039,18	Equipment Services
Jumlah Pendapatan Usaha	703.877,06	512.101,04	711.859,95	Total Operating Revenues
Pendapatan Lain-lain	19.707,29	11.092,07	5.064,06	Other Income
Total Pendapatan	723.584,35	523.193,11	716.924,01	Total Revenue

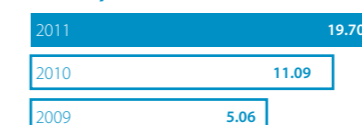
Realisasi pendapatan Usaha 3 tahun terakhir

+ 37,45 %



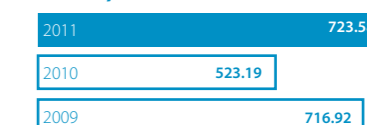
Realisasi pendapatan lain-lain 3 tahun terakhir

+ 77,67 %



Realisasi total pendapatan 3 tahun terakhir

+ 38,30 %



Beban Perusahaan 3 tahun terakhir

Dalam jutaan rupiah

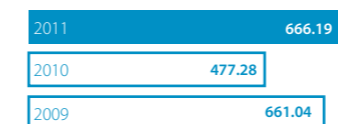
The Company Expenses the last 3 years

In millions of rupiah

URAIAN	2011	2010	2009	DESCRIPTION
Beban Operasional				Operating Expenses
Beban Kontrak	622.655,17	439.101,46	628.512,64	Load Contracts
Beban Usaha :				Operating Expenses:
Pegawai	27.334,94	24.097,83	20.139,92	employee
Umum	11.611,67	11.142,85	10.370,72	general
Penyusutan	1.623,43	807,71	742,53	shrinkage
Pemasaran	2.969,55	2.129,27	1.271,23	marketing
Jumlah Beban Usaha	43.539,60	38.177,67	32.524,40	Total Operating Expenses
Jumlah Beban Operasional	666.194,77	477.279,13	661.037,04	Total Operating Expenses
Beban Non Operasional				Non Operating Expenses
Beban Lain - lain	6.446,18	9.359,24	9.960,68	Other Expenses - Other
Beban Bunga	38.745,37	30.743,46	15.619,00	Interest Expense
Jumlah Beban Non Operasional	45.191,55	40.102,70	25.579,68	Total Non Operating Expenses
TOTAL BEBAN PERUSAHAAN	711.386,32	517.381,83	686.616,72	TOTAL Expenses Company

Beban Operasional Perusahaan 3 tahun terakhir

+ 39,58 %



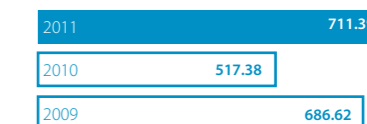
Beban Non Operasional Perusahaan 3 tahun terakhir

+ 12,69 %



Total Beban Perusahaan 3 tahun terakhir

+ 37,50 %



Laporan Arus Kas 3 Tahun Terakhir

Dalam jutaan rupiah

URAIAN	2011	2010	2009	DESCRIPTION
Arus Kas dari (untuk) Aktivitas Operasi	90.053,98	4.051,70	24.858,98	Cash flows from (to) Operating Activities
Arus Kas dari (untuk) Aktivitas Investasi	(25.484,45)	(23.246,30)	(17.254,83)	Cash flows from (to) Investing Activities
Arus Kas dari (untuk) Aktivitas Pendanaan	(2.307,20)	(4.831,08)	(24.798,20)	Cash flows from (to) Financing Activities
Kenaikan Bersih Kas & Setara Kas	62.262,34	(24.025,68)	(32.402,34)	Net Increase in Cash & Cash Equivalents
Kas & Setara Kas pada awal periode	67.290,41	91.316,08	58.913,74	Cash & Cash Equivalents at beginning of period
Kas & Setara Kas pada akhir periode	129.552,74	67.290,41	91.316,08	Cash & Cash Equivalents at end of period

Cash Flows Graph 3 Years

In millions of rupiah

Laporan Perubahan Ekuitas

Perubahan Ekuitas Komparatif 3 Tahun

dalam jutaan rupiah

KETERANGAN	2011	2010	2009	DESCRIPTION
Saldo per awal periode	135.484,34	118.495,45	(67.079,20)	Balance at the beginning of periode
Laba bersih tahun berjalan	26.012,73	16.988,89	34.020,17	Net income current year
Penyertaan Modal Pemerintah	-	-	151.554,48	Government Equity
Saldo per akhir periode	161.497,07	135.484,34	118.495,45	Balance at end of period

Statement of Changes in Equity

Comparative Changes in Equity 3 Year

in million of rupiah

Rasio Keuangan Selama 5 Tahun Terakhir

Dalam jutaan rupiah

RASIO-RASIO KEUANGAN	2011	2010	2009	FINANCIAL RATIO
RENTABILITAS / RENTABILITY				PROFITABILITY / RENTABILITY
Laba Sebelum Pajak / Pendapatan	5,68 %	5,14 %	7,41 %	Profit Before Tax / Revenue
Beban Kontrak / Pendapatan	88,46 %	85,75 %	88,29 %	Cost of Revenue / Revenue
Laba Sebelum Pajak / Total Asset	6,25 %	4,07 %	8,27 %	Income Before Tax / Total Asset
LIKUIDITAS / LIQUIDITY				LIQUIDITY / Liquidity
Rasio Lancar	141,73 %	122,33 %	151,53 %	Current Ratio
Rasio Kas	47,47 %	20,40 %	33,87 %	Cash Ratio
SOLVABILITAS / SOLVABILITY				SOLVENCY / SOLVABILITY
Rasio Hutang Terhadap Aset	74,77 %	79,07 %	81,42 %	Liabilities/Assets
Rasio Hutang Terhadap Modal	296,36 %	378,34 %	438,21 %	Liabilities/Equity
Rasio Hutang Terhadap Aset Tetap	188,65 %	210,01 %	226,59 %	Liabilities/Fixed Assets

Financial Ratios Over 5 Years

In millions of rupiah



“Dewan Komisaris memberikan apresiasi kepada manajemen PT. Brantas Abipraya (Persero) yang telah mendukung diterapkannya pengendalian kinerja yang berbasis Key Performance Indicator (KPI) dan telah diterapkannya Good Corporate Governance (GCG)”

“The Board of Commissioners gives an appreciation to the management of PT. Brantas Abipraya (Persero) which has supported an application for performance control on the basis of Key Performance Indicator (KPI) and Good Corporate Governance (GCG) which have been applied”



Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa Brantas telah mengalami peningkatan kinerjanya sebagaimana tercermin dalam laporan ini. Brantas pada tahun 2011 telah mengalami kemajuan dan peningkatan serta keberhasilan dalam pengembangan usaha. Keberhasilan tersebut, tidak lepas dari kerja keras dari semua jajaran Perusahaan.

Dewan Komisaris memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran Direksi. Dalam laporan keuangan Perseroan 2011, kinerja keuangan menunjukkan adanya peningkatan yang sangat signifikan. Ini ditandai dengan peningkatan laba bersih setelah pajak mencapai Rp. 26,012 milyar atau tumbuh 53 % dibandingkan dari tahun sebelumnya.

Praise and grateful we pray to God the Almighty that Brantas has experienced its performance improvement as reflected in this report. In 2011, Brantas has experienced a progress and improvement as well as success in the business development. Such success is not apart from a hard work from all levels in the Company.

The Board of Commissioners gives a highly appreciation to all the Board of Directors. In the Financial Statement of the Company of the year 2011, a financial performance shows an enormously significant increase. It is marked by an increase in net profit after tax attains to Rp 26.012 billion or increases 53% as compared to previous year.

Semua capaian yang diperoleh pada tahun 2011 ini merupakan modal yang sangat berharga untuk memacu seluruh karyawan dan manajemen dalam meningkatkan kinerja dan kapasitas serta kapabilitas seluruh sumber daya Brantas sehingga diharapkan pada tahun-tahun mendatang bisa meraih keberhasilan yang lebih baik lagi.

Dewan Komisaris memberikan apresiasi kepada manajemen Brantas yang telah mendukung diterapkannya pengendalian kinerja yang berbasis Key Performance Indicator (KPI) dan telah diterapkannya Good Corporate Governance (GCG), Sesuai dengan fungsi dan tugas Dewan Komisaris sebagai pengendali dan pengawas melalui pertemuan yang rutin antara Direksi dan Dewan Komisaris sesuai amanah Anggaran Dasar Perseroan.

Dewan Komisaris juga telah meminta perhatian Direksi terhadap beberapa hal seperti manajemen, organisasi dan

All achievements reached in this 2011 constitutes an enormously precious capital to spur all employees and management in improving performance and capacity as well as capability to all Brantas resources in the expectation that in the upcoming years, a better success can be reached out again.

The Board of Commissioners gives the appreciation to Brantas management which has supported an application for the performance control on the basis of Key Performance Indicator (KPI) and Good Corporate Governance has been also applied thereto in accordance with function and task of the Board of Commissioners as a controlling and supervising board carried out by a routine meeting convened between the Board of Directors and the Board of Commissioners in conformance to the mandate of the Company's Articles of Association.

sumber daya manusia. Dalam membangun pola manajemen yang berorientasi pada hasil yang dapat diukur sesuai KPI yang telah ditetapkan.

Dalam upaya meningkatkan kapabilitas dan kompetensi sumber daya manusia, perlu segera dibangun, dibenahi dan dipelihara sistem database kepegawaian; sistem dan prosedur kerja, pola karier yang mendorong motivasi karyawan untuk bekerja; sistem kepegawaian dan remunerasi yang fair dan transparan; sistem dan mekanisme pendidikan dan latihan yang menunjang dan memacu kemampuan teknis dan manajerial sumber daya manusia sehingga tercipta iklim kerja yang semakin kondusif.

Selain itu, penerapan prinsip-prinsip GCG yang telah dimulai sejak beberapa waktu lalu perlu terus dikembangkan implementasinya agar diperoleh manfaat yang kongkrit. Sedangkan pengendalian internal perusahaan bertujuan untuk mendapatkan keyakinan mengenai keandalan laporan keuangan, keefektifan dan efisiensi operasi serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Direksi telah menerbitkan Pedoman GCG, yang merupakan dasar dan acuan dalam pengelolaan Perseroan. Diharapkan seluruh aktivitas Perseroan akan selaras dengan standar GCG. Pedoman GCG memuat prinsip-prinsip yang berlaku bagi seluruh aktivitas Perseroan. Direksi perlu secara konsisten menginformasikan Pedoman GCG ini kepada seluruh pihak yang berkepentingan sehingga dapat memahami dan memaklumi standar kerja Perseroan yang sesuai dengan GCG. Keberhasilan penerapan GCG ini bukan hanya karena tersedianya sarana/acuan tata kelola Perseroan seperti Pedoman GCG, Pedoman Etika dan Perilaku, Piagam Komite Audit, Piagam Satuan Pengawasan Intern, dan sebagainya, melainkan terletak pada komitmen dari pimpinan tertinggi Perseroan yang diikuti oleh seluruh staf dan karyawan serta didukung oleh Dewan Komisaris. Pedoman GCG ini merupakan acuan langkah awal dalam pengelolaan Perseroan yang sehat dan beretika serta memberikan gambaran yang objektif dan transparan kepada stakeholders Perseroan.

Also, the Board of Commissioners has asked for the BoD (Board of Directors) attention towards several issues such as management, organization and human resources. In developing a management pattern on the outcome-oriented which is measurable in accordance with KPI defined.

In the effort of improving capability and competency of the human resources, it is immediately to build, restructure and maintain the employment database system; work system and procedure, career pattern which triggers the employee's motivation to work; a fair and transparent rank and remuneration system; system and mechanism of education and training which support and spurs technical capability and managerial human resources in order to create a conducive work climate.

In addition thereto, such application for the GCG principles has been commenced since several last times which should be developed continuously the implementation to gain a concrete advantage. Meanwhile, an internal control of the company aims at gaining assurance with regard to a reliable financial statement, operating effectiveness and efficiency as well as compliance with applicable laws and regulations. The BoD has issued the GCG Guidelines which constitutes a basis and hint for the Company management. All the Company's activities are expected in line with the GCG standard. The GCG principles contain the principles applicable for all the Company's activities. The BoD should be consistently informing the GCG Guidelines to the entire concerned parties in order to comprehend the Company's work standard in accordance with the GCG. Such success in applying this GCG is not because of availability of means/ management hints of the Company such as the GCG Guidelines, Ethics and Attitude Guidelines, Audit Committee Award, Internal Surveillance Unit Award and so forth, but it also depends on the commitment of the highest chairman of the Company followed by all staffs and employees as well as supported by the Board of Commissioners. The GCG Guidelines constitute a hint for initial step in terms of healthy and ethical management of the Company and to give an objective and transparent picture to the Company's stakeholders.

Khusus untuk program Kemitraan dan Bina Lingkungan, Dewan Komisaris mengharapkan agar melalui berbagai kegiatan yang digelar sungguh bisa merupakan suatu wujud peran serta Perseroan dalam menjalankan fungsi tanggung jawab sosialnya atau Corporate Social Responsibility (CSR) untuk pengembangan masyarakat. Berkenaan dengan hal tersebut di atas dan sehubungan juga dengan adanya kewajiban untuk menjalankan program CSR sesuai Pasal 74, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan, maka Dewan Komisaris meminta agar di waktu mendatang pelaksanaan program CSR atau PKBL ini dapat lebih meningkatkan program yang ada. Tujuan lebih jauh, dengan program CSR tersebut, manfaatnya langsung dapat dirasakan oleh masyarakat luas, khususnya mereka yang berada di sekitar proyek yang dikerjakan oleh Brantas

Disamping itu pada tahun 2011 telah banyak saran dan rekomendasi Dewan Komisaris yang telah ditindaklanjuti oleh Direksi dan Seluruh Manajemen Brantas. Untuk masa mendatang, sesuai dengan aspirasi pemegang saham, Dewan Komisaris akan lebih berperan dan memberikan masukan dan pengawasan kepada Direksi. Semua itu akan menjadi masukan-masukan penting agar tercipta akuntabilitas, transparansi, pertanggungjawaban sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.

Dengan keberhasilan yang diperoleh pada tahun 2011, dapat dijadikan sebagai tolok ukur dalam mencapai pertumbuhan usaha pada masa yang akan datang. Dewan Komisaris berharap seluruh manajemen dan staf dapat mewujudkan visi dan misi perseroan di masa mendatang.

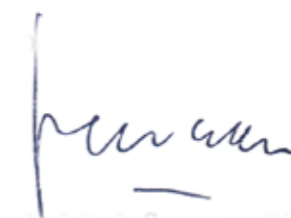
Akhirnya dalam kesempatan ini, Dewan Komisaris menyampaikan terima kasih kepada Direksi dan segenap karyawan atas dukungan dan kerja sama yang telah ditunjukkan dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing. Semoga Tuhan selalu menyertai kita semua.

Particularly for Partnership and Environmental Development Program, the Board of Commissioners expects through various activities, such as an actualization of the Company's participation in running its function of Corporate Social Responsibility (CSR) for the community development. In connection with the foregoing issues and in corresponding to the obligation to carry out the CSR program in accordance with Article 74, Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company, then the Board of Commissioners expects that the implementation for the CSR program or PKBL will improve the existing programs. A further objective of the CSR program is direct benefit can be utilized by the community particularly for those living surrounding Brantas projects.

In addition thereto, in 2011, numerous suggestions and recommendations of the Board of Commissioners have been carried out by the BoD and the Management of Brantas. For the upcoming expectation in accordance with shareholders' aspiration, the Board of Commissioners will play more roles and give input and surveillance to the BoD. All will be important inputs in order to create accountability, transparency, accountability in accordance with the GCG principles.

Upon such success achieved in 2011, it can be a benchmark in reaching out the business growth in the future. The Board of Commissioners expects to all management and staffs in order to actualize the company's vision and mission in the future.

Ultimately, on this occasion, the Board of Commissioners conveys a grateful to the BoD and the entire employees upon their support and cooperation which have been shown in executing the task and function respectively. May God keep blessing us.



Prof. Dr. Ir. Soenarno, Dipl. HE
Komisaris Utama | President Commissioner

Dewan Komisaris periode 2004 - 2011

The Board of Commissioner's 2004 - 2011

3

2

1



1. Komisaris Utama | President Commissioner
Soenarno

2. Komisaris | Commissioner
Hartik Aningsih

3. Komisaris | Commissioner
Basoeki Hadimoeljono

4

1

2

3



1. Komisaris Utama | President Commissioner
Soenarno

2. Komisaris | Commissioner
Ramli Ibrahim

3. Komisaris | Commissioner
M. Basoeki Hadimoeljono

4. Komisaris | Commissioner
Adhy Duriat Soemono



INDONESIA POWER **PLTA WADASLINTANG**

PLTA WADASLINTANG
SUBSISTEM PLTA WADASLINTANG
INDONESIA POWER

NO	LOKASI	STATUS
1	Subsistem Wadaslintang	Wadai
2	Subsistem Wadaslintang	Wadai
3	Subsistem Wadaslintang	Wadai
4	Subsistem Wadaslintang	Wadai
5	Subsistem Wadaslintang	Wadai
6	Subsistem Wadaslintang	Wadai
7	Subsistem Wadaslintang	Wadai
8	Subsistem Wadaslintang	Wadai
9	Subsistem Wadaslintang	Wadai
10	Subsistem Wadaslintang	Wadai

INDONESIA POWER
LINDUNGI PEKERJA DAN UJWA USHAH DARI HIV/AIDS
USP MRICA - SUB UNIT PLTA WADASLINTANG

“Sejalan dengan visi Perusahaan, yaitu menjadi perseroan nasional terkemuka dalam industri konstruksi, guna menunjang pertumbuhan usaha, Brantas Abipraya secara terus menerus melakukan evaluasi dan pembenahan sumber daya perusahaan”

“In line with the Company's vision, to become a national well-known company in the construction industry in order to support the business growth, Brantas Abipraya keeps performing the evaluation and restructure to the company's resources”



Tahun 2011 ditandai dengan kondisi perekonomian dunia yang tidak terlalu menggembirakan akibat krisis berkepanjangan yang melanda negara-negara di kawasan Eropa dan Amerika Serikat. Tentu saja perkembangan ekonomi di Indonesia tidak bisa lepas dari pengaruh krisis tersebut. Namun demikian kita masih layak bersyukur bahwa pertumbuhan pasar konstruksi di Indonesia masih cukup menjanjikan, khususnya terkait dengan pembangunan proyek-proyek infrastruktur.

Di tengah suasana persaingan yang semakin ketat, Brantas masih dapat meraih pendapatan usaha atau sales lebih dari Rp. 703 milyar, meningkat 37% dibanding tahun 2010. Sedangkan net profit mencapai Rp 26 milyar lebih atau meningkat 53% dibanding tahun 2010. Pencapaian lain yang perlu dicatat adalah pengukuran kinerja perusahaan sesuai Kepmen BUMN No.KEP-100/MBU/2002, untuk tahun 2011

The year 2011 was marked by an economic condition which was not very good due to a continuous crisis hit the countries in Europe and South America. Obviously, the economic improvement in Indonesia cannot be apart from such crisis influence. Nevertheless, we should be still grateful that the construction market growth in Indonesia is still promising particularly related to development of the infrastructure projects.

Amid a tight competition condition, Brantas can still attain the business revenue or sales more than Rp 703 billion which increased 37% compared to 2010. Meanwhile, the net profit attained more than Rp 26 billion or increased 53% compared to 2010. Other attainments that are necessary to be recorded is the company performance measurement corresponds to the Ministerial Decree of SOE No.Kep-100/MBU/2002, for the

Brantas memperoleh predikat Sehat AA dengan score 94,25 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu Sehat AA dengan score 85,75.

Semua ini dapat dicapai berkat kerja keras dari seluruh jajaran manajemen dan karyawan, serta dukungan dari segenap stakeholder Brantas. Untuk itu pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh stakeholder Brantas atas dukungan yang telah diberikan kepada kami selama ini. Kami berharap dukungan tersebut akan tetap berlangsung untuk tahun-tahun mendatang.

Sejalan dengan visi Perusahaan, yaitu menjadi perseroan nasional terkemuka dalam industri konstruksi, guna menunjang pertumbuhan usaha, Brantas secara terus menerus melakukan evaluasi dan pembenahan sumber daya perusahaan. Pada tahun 2011 ini pembenahan lebih diutamakan pada sumber daya manusia dan sumber daya

year 2011, Brantas gained a predicate Healthy AA with score 94.25 increased as compared to the previous year with score 85.75.

All can be achieved due to a hard work of all management and employees as well as support from all stakeholders of Brantas. Hence, on this occasion, we would like to thank to all stakeholders of Brantas for their supports insofar. We expect that such support will carry on for the upcoming years.

In line with the Company's vision, to become a national well-known company in the construction industry in order to support the business growth, Brantas Abipraya keeps performing the evaluation and restructure to the company's resources. In this year 2011, such restructure is prioritized on the human and financial resources. Such endeavor is

keuangan. Upaya tersebut diharapkan akan dapat dilihat hasilnya pada tahun 2012 mendatang. Untuk menunjang pertumbuhan perolehan kontrak, telah dilakukan upaya diversifikasi pasar. Sepanjang tahun 2011, Brantas telah berhasil memasuki pasar-pasar baru, di antaranya pasar proyek EPC dari PT. Perhutani, Institut Pertanian Bogor, dan Pemda Riau.

Sesuai dengan misi perusahaan, dan untuk mengantisipasi pasar bebas di era globalisasi, dimana persaingan akan menjadi sangat sulit dihindarkan, Brantas terus mengembangkan rencana intensif. Keinginan menjadi perusahaan terkemuka dalam industri konstruksi ini harus didukung oleh fondasi yang kuat berupa strategi korporasi yang efektif dan komprehensif yang didukung oleh keuangan yang mapan, sistem manajemen yang baik serta SDM yang handal yang memiliki komitmen tinggi terhadap Perusahaan. Perseroan menyadari sepenuhnya bahwa untuk memenangkan persaingan, seluruh staf harus ditingkatkan kemampuan mereka agar dapat bekerja secara efisien dan efektif sehingga dapat memenuhi tenggang waktu dan kualitas kerja yang baik untuk tiap proyek yang dikerjakan sesuai dengan biaya yang dikeluarkan. Dengan begitu Perseroan dapat meningkatkan kinerja dan citra perusahaan. Pengembangan perusahaan telah berjalan pada track yang ada dan itu terbukti membuahkan berbagai prestasi yang diakui banyak pihak.

Guna menghadapi tantangan ke depan yang makin kompleks, pada tanggal 12 Desember 2011, Perusahaan mendirikan PT Brantas Energi yang bergerak di bidang pembangunan, perindustrian, perdagangan dan jasa dalam bidang ketenagalistrikan dan energi alternatif. Selain itu, Direksi menerbitkan Pedoman Good Corporate Governance (GCG). Pedoman ini merupakan penjabaran dari kaidah-kaidah GCG, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktik GCG pada Badan Usaha Milik Negara, Anggaran Dasar Brantas, Visi dan Misi Perseroan serta praktik-praktik terbaik dalam GCG.

hoped able to be seen its outcome in the upcoming 2012. To support the growth for contract obtainment, a market diversification effort has been carried out. During 2011, Brantas has successfully entered into new markets, i.e. EPC project market from PT. Perhutani, Bogor Institute of Agriculture, and Regional Government of Riau.

In conformance to the company's mission, and to anticipate a free market in the globalization era where competition will be considerably avoidable competition, Brantas keeps developing an intensive plan. A desire to become a well-known company in the construction industry should be supported by a strong foundation in the form of an effective and comprehensive corporation strategy supported by a stable finance, good management system as well as reliable HR having a high commitment towards the Company. The Company realizes fully that to win such competition, all staffs have to improve their abilities in order to work efficiently and effectively in the purpose of fulfilling grace period and good performance quality for respective project carried out in accordance with the cost spent. Therefore, the company can improve its performance and image. A company development has been running on the existing tract and is proven of generating various achievements admitted by numerous parties.

To face the upcoming challenge which is getting complicated, on December 12, 2011, the Company established PT Brantas Energi having business line in development, industrial, trading and services in the field of electrical and alternative energy. In addition thereto, the BoD issues Good Corporate Governance (GCG) Guidelines. Such Guidelines constitute an elucidation of the GCG principles, Law Number 1 of 1995 concerning Limited Liability Company, Ministerial Decree of State-Owned Enterprises Number Kep-117/M-MBU/2002 concerning Practical Application for GCG to the State-Owned Enterprises, Articles of Association of Brantas, Company's Vision and Mission and the best practices in the GCG.

Pedoman GCG ini merupakan acuan bagi peraturan Perseroan yang lebih detail sesuai dengan kebutuhan unit-unit organisasi dalam Perseroan. Mengingat lingkungan bisnis yang dinamis, maka Perseroan akan selalu mengkaji Pedoman GCG ini secara berkesinambungan sebagai upaya mencapai standar kerja yang terbaik bagi Perseroan. Dengan itu semua diharapkan dapat mendorong optimalisasi nilai Perusahaan agar Perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik nasional maupun internasional. Dengan begitu, mampu mempertahankan keberadaannya secara berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan Perusahaan.

Implementasi GCG secara konsisten akan membuat organ Perusahaan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial Perusahaan terhadap Pemangku Kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perusahaan.

Demikian, semoga apa yang dapat kami capai sepanjang tahun 2011 ini akan merupakan awal bagi langkah besar Brantas untuk menuju masa depan yang lebih baik. Akhirnya, dengan ridho Tuhan Yang Maha Kuasa, marilah kita melangkah ke depan, dengan penuh semangat dan tekad yang bulat, dengan penuh keikhlasan dan ketulusan, cita-cita yang mulia, untuk berbuat yang terbaik kepada Perusahaan yang kita cintai ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan bimbingan, petunjuk, dan lindungan-Nya kepada kita sekalian.

The guidelines constitute a detailed hint for the Company regulation in accordance with the needs of organization units in the Company. In view of a dynamic business environment, hence, the Company will always sustainably assess the GCG Guidelines as an effort to reach out the best performance standard for the Company itself. Therefore, all is expected able to encourage an optimization of the Company value so that the Company has a strong competitiveness either national or international market. Hence, it will be capable of sustaining its existence in a sustainable manner to reach out the Company's purpose and goal.

A consistent implementation towards the GCG will cause the Company's organ make a decision and run an act based upon a high moral value and compliance with laws and regulations, as well as awareness to the Corporate Social Responsibility against the Interest Stakeholders or environmental conservation surrounding the Company.

Thus, what we can achieve during 2011 which will be a huge initial step for Brantas towards a better future. Eventually, under the blessing of God the Almighty, let's step ahead with full of spirit and firm willpower under full sincerity, as well as magnificent will to perform the best effort for the beloved Company.

May God the Almighty always bestow His guidance, way, and guard to all of us.



Bambang E. Marsono
Direktur Utama | President Director

Dewan Direksi periode 2004 - 2011

The Board of Director's 2004 - 2011



1. Direktur Utama | President Director
Suyono Sontosumarto

2. Direktur Adm dan Keuangan | HRD & Finance Director
Sukarno Jososaputro

3. Direktur Pemasaran | Marketing Director
C. Thomas Pangaribuan

4. Direktur Operasi | Operation Director
Bambang Risanto

4

1

2

3




- 1. Direktur Utama | President Director**
H. Bambang E. Marsono
- 2. Direktur Operasional I | Operational Director I**
C. Thomas Pangaribuan
- 3. Direktur Adm dan Keuangan | HRD & Finance Director**
Sukarno Jososaputro
- 4. Direktur Operasional II | Operational Director II**
Eko Djati Tunggulgeni

* C. Thomas Pangaribuan menjabat sampai tahun 2014 | * C. Thomas Pangaribuan will serve until 2014
Sukarno Jososaputro menjabat sampai tahun 2014 | * Sukarno Jososaputro will serve until 2014

Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2011

Laporan Tahunan ini, berikut laporan keuangan dan informasi lain yang terkait, merupakan tanggung jawab Manajemen PT Brantas Abipraya (Persero) dan telah disetujui oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan membubuhkan tandatangannya masing-masing dibawah ini.

Jakarta, Maret 2011
PT Brantas Abipraya (Persero)
Dewan Direksi PT Brantas Abipraya (Persero)



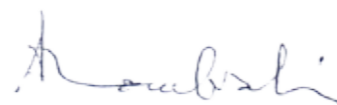
Prof. Dr. Ir. Soenarno, Dipl. HE
Komisaris Utama | President Commissioner



Dr. Ir. M. Basoeki Hadimoeljono, Msc
Komisaris | Commissioner



Komisaris | Commissioner
Adhy Duriat Soemono



Komisaris | Commissioner
Ramli Ibrahim



H. Bambang E. Marsono
Direktur Utama | President Director



Eko Djati Tunggulgeni
Direktur Operasional II | Operational Director II



C. Thomas Pangaribuan
Direktur Operasional I | Operational Director I



Sukarno Jososaputro
Direktur Adm dan Keuangan | HRD & Finance Director

Responsibility Statement on Annual Report 2011

This Annual Report along with financial statement and other related information constitute responsibility of the Management of PT Brantas Abipraya (Persero) and have been approved by all members of the Board of Commissioners and Board of Directors by signing respectively hereunder.





Profil Perusahaan

Company Profile

Nama Name

PT. Brantas Abipraya (Persero)

Bidang Usaha Business Fields

Konstruksi / Construction

Status Perusahaan Company Status

Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/State Enterprise

Pemilik Owner

100% dimiliki oleh Negara Republik Indonesia/
100% owned by the Republic of Indonesia

Tanggal Pendirian Date of Incorporation

12 November 1980

Dasar Hukum Pendirian Legal Bases of Incorporation

Akta No 88 Tahun 1980 Kartini Muljadi, SH
Akta Perubahan No. 15 Tanggal 12 Agustus 2008, Tjipto Pranowo, SH

Produk Products

1. DAM/WEIR
2. Irrigation & River Improvement
3. Tunnel Work
4. Dredging & Reclamation
5. Road & Bridge
6. Building
7. Mechanical & Electrical
8. Drilling & Grouting
9. Power Plant
10. Equipment

Jaringan Kantor Office Network

5 Kantor Wilayah, 7 Kantor Cabang | Regional Office 5, 7 Branch Offices

Kantor Pusat Head Office

Jl. D.I. Panjaitan Kav. 14, Cawang,
Jakarta Timur 13340
Telp : (021) 851 6290
Fax : (021) 851 6095
Email : bap@brantas-abipraya.com
www.brantas-abipraya.co.id



Sejarah Brantas sebagai perusahaan konstruksi nasional berawal dari hasil pemekaran Proyek Induk Pengembangan Wilayah Sungai Kali Brantas yang lebih dikenal dengan sebutan Proyek Brantas. Gagasan pengembangan proyek Brantas tersebut bermula dari pemikiran almarhum Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik Ir. Sutami dalam inspeksi kerjanya pada tahun 1970.

Dalam inspeksi tersebut, Ir. Sutami mengemukakan tentang perlunya dipersiapkan suatu wadah untuk mengelola proyek-proyek yang akan segera selesai seperti Proyek Karangates dan Proyek Selorejo. Setelah melalui berbagai persiapan maka berdirilah Brantas berdasarkan akta notaris Kartini Muljadi, S.H., No. 88 tanggal 12 November 1980.

Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir dengan akta notaris Tjipto Pranowo, S.H., di Jakarta No.15 tanggal 12 Agustus 2008. Perubahan

The history of Brantas as a national construction company has been initiated from a blossoming outcome of the River Brantas Area Development Project better known as Brantas Project. An initiative on Brantas project development was initiated from the initiative of the late Minister of Public Works and Electricity, Ir. Sutami in the inspection of his work in 1970.

In the said inspection, Ir. Sutami uttered about the importance to manage projects that would be over such as Karangates and Selorejo Projects. After various preparations were carried out, then Brantas was established based upon a notarial deed of Kartini Muljadi, S.H., No.88 dated November 1980.

The Company's articles of association has been amended several times, the recent one has been amended by the notarial deed of Tjipto Pranowo, S.H., in Jakarta No.15 dated

tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman dan HAM dengan Surat Kepmen No.AHU.62129.AH.01.02 tahun 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Brantas yang berdiri menjadi sebuah perusahaan yang berbasis profit oriented ini waktu didirikan berkantor pusat di Malang, Jawa Timur. Seiring dengan perkembangan perusahaan, manajemen terus berbenah dan mendapatkan kepercayaan untuk mengerjakan berbagai macam proyek. Setelah 10 tahun berdiri, perusahaan mulai mendapatkan kontrak pekerjaan dalam bidang non pengairan (non water resources project) seperti bidang proyek jalan dan jembatan, proyek gedung dan proyek bandar udara.

Dalam usinya yang ke-12, tepatnya pada tahun 1992, Brantas berhasil menorehkan prestasi yang monumental. Itu ditandai

August 12, 2008. The said amendment was approved by the Minister of Justice and Human Right under his Decree No.AHU.62129.AH.01.02 year 2008 concerning Approval on the Deed of Amendment to the Company's Articles of Association.

Brantas which has been established to become an oriented-profit based company, at the time of establishment, the head office was located in Malang, East Java. In line with the company improvement, the management keeps restructuring and gaining a trust to carry out various kinds of projects. After 10 years of its establishment, the company has commenced obtaining a work contract in the field of non-water resources project such as road, bridge, construction and airport projects.

At the age of 12 years, in 1992, Brantas successfully achieved a monumental achievement. It was marked by obtaining

dengan adanya kepercayaan untuk membangun PLTA Kotapanjang, Bangkinang, Riau. PLTA dengan tipe On Create Gravity Dam ini dalam pembangunannya diterapkan metode RCC (Roller Compacted on Create). Metode ini menjadi yang pertama digunakan dalam proyek pembangunan dam di Indonesia.

Seiring dengan perputaran zaman dan makin beratnya tantangan yang dihadapi, pada tahun 1995 manajemen memutuskan untuk memindahkan kantor, dari Malang ke Jakarta. Ini harus dilakukan guna menunjang kegiatan perusahaan agar dapat lebih berkembang dan mendekati pada pusat pemerintahan.

Keputusan memindahkan perusahaan ke Jakarta, merupakan keputusan yang tepat. Buktinya keberadaan Brantas makin diakui dan dipercaya oleh banyak pihak dengan makin berkembangnya perusahaan. Penilaian yang positif dari stakeholder dan lembaga terkait pun muncul. Pada tahun 2008, Brantas mendapatkan piagam penghargaan sebagai salah satu wajib pajak patuh dari Direktorat Jenderal Pajak dan penghargaan ini terus berlanjut hingga tahun 2011.

Tidak berhenti di situ, pada usianya yang ke-30, pada tahun 2010, Brantas mendapatkan piagam penghargaan sebagai perusahaan BUMN dan konstruksi terbaik. Penilaian itu didasarkan pada kinerja pertumbuhan usaha dan rasio keuangan dari majalah Info Bank.

Setahun kemudian, Brantas pun mendapat penghargaan dari AKI (Asosiasi Konstruksi Indonesia) sebagai kontraktor Indonesia yang paling banyak mengerjakan bendungan. Ini jelas menunjukkan prestasi yang mengembirakan sekaligus bukti bahwa Brantas sudah berjalan tepat pada jalurnya. Atas profesionalisme yang ditunjukkan seluruh karyawan Brantas disertai dengan hasil proyek yang sempurna, maka Konstruksi Indonesia 2011 (Departemen Pekerjaan Umum) memberikan proyek konstruksi kategori bangunan gedung >8 lantai (green building). Dan peresmian gedung kantor pusat oleh Menteri Pekerjaan Umum.

Menatap perkembangan dan tantangan masa depan yang makin kompleks, manajemen membuat langkah strategis pada tahun 2011. Itu diwujudkan dengan melakukan diversifikasi usaha, yakni di bidang investasi PLTM dan membentuk anak perusahaan dengan nama "Brantas Energi".

a trust to build PLTA (Water Power Plant) of Kotapanjang, Bangkinang and Riau. In its development, this PLTA under the type On Create Gravity Dam applies RCC (Roller Compacted on Create) method. Such method becomes the first one that is used in the dam construction project in Indonesia.

In line with a cycling era and hard challenge to be faced, in 1995, the management decided moving the office from Malang to Jakarta. It should be carried out in order to support the company activities so that it will develop more and close to the central government.

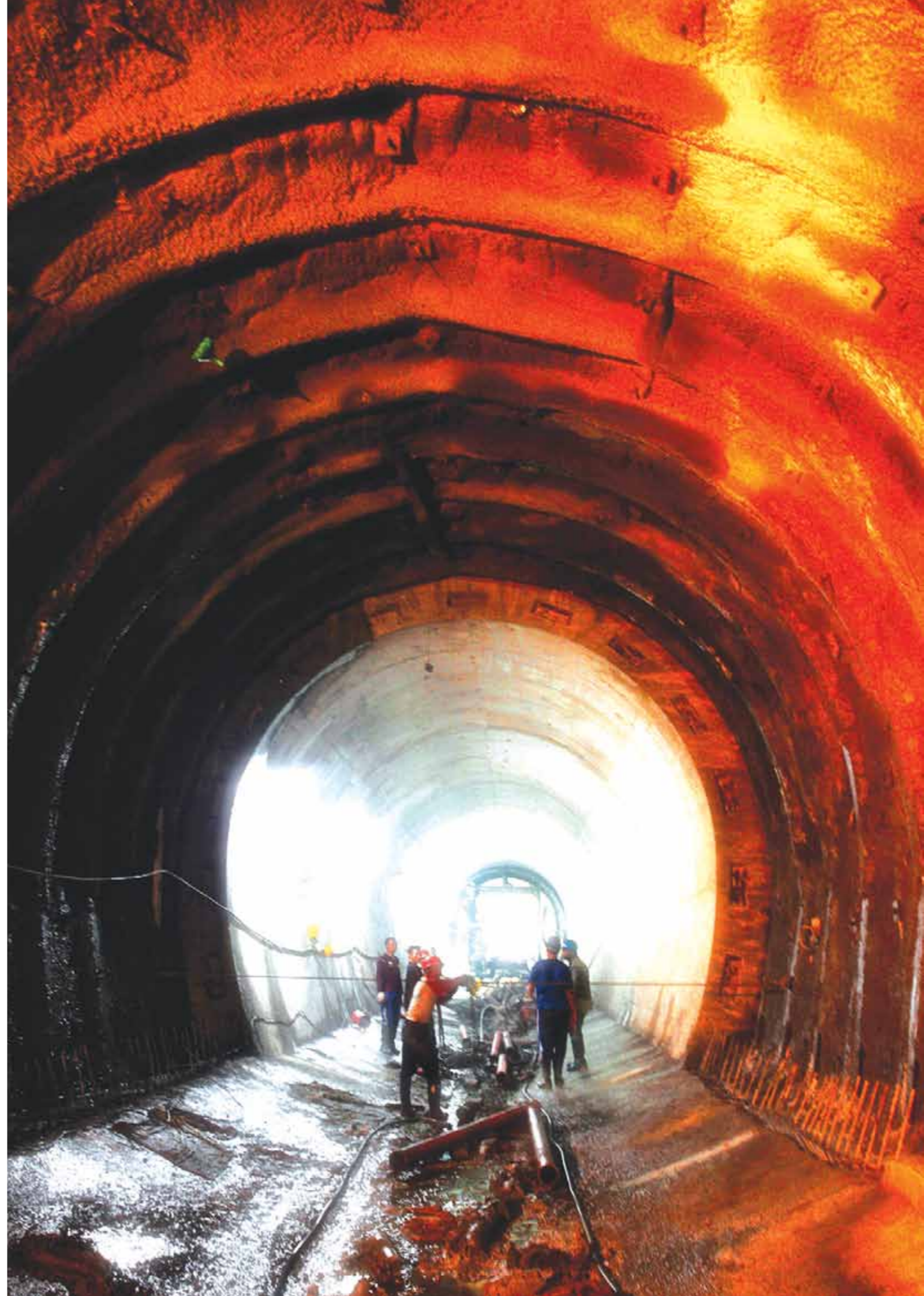
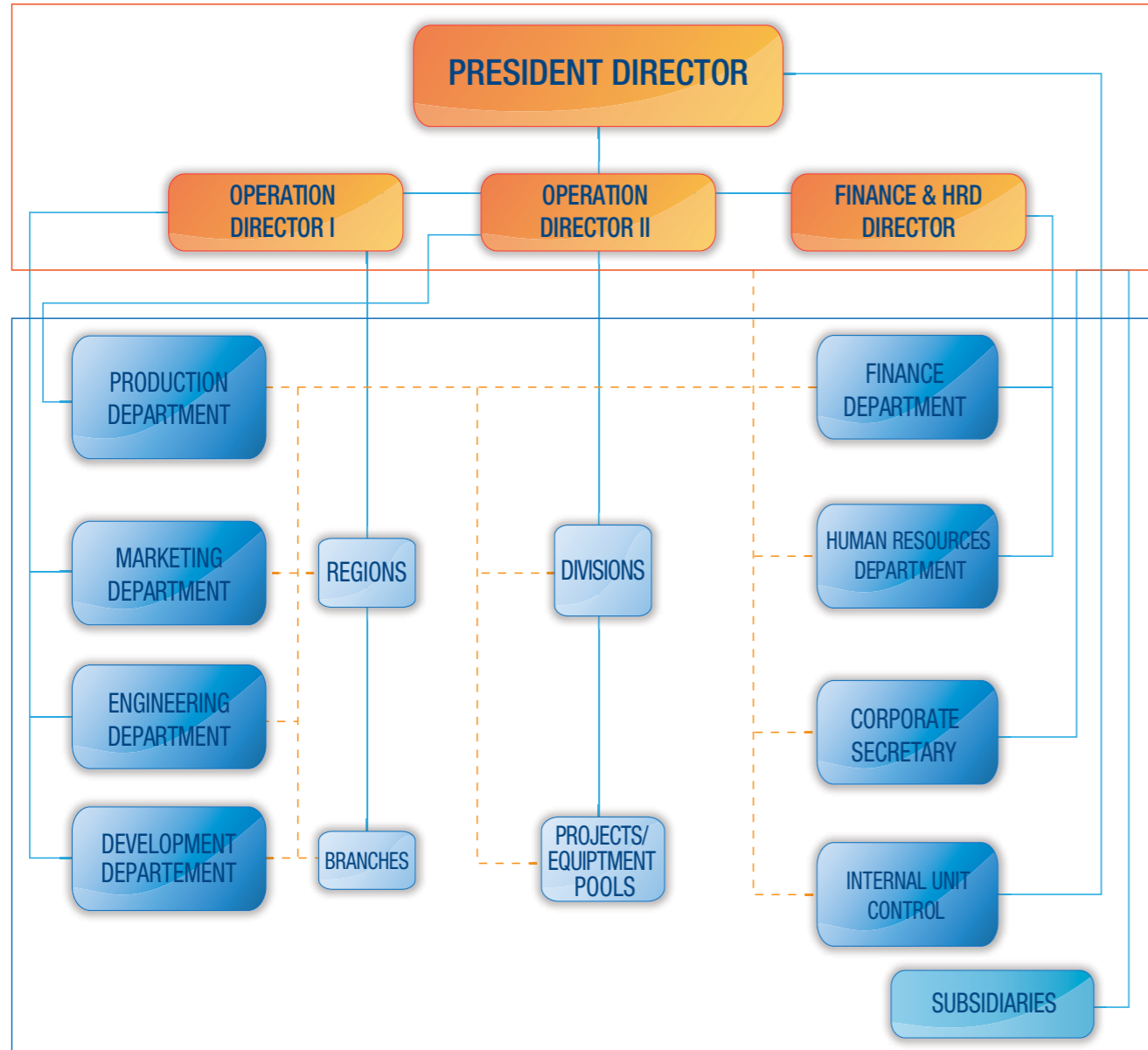
The decision to move the company to Jakarta is the right decision. As a proof, the existence of Brantas is admitted and trusted by numerous parties which can be seen that the company is getting developed. A positive recognition from the stakeholders and related institutions has also come up. In 2008, Brantas achieved an award as one of obedient taxpayers from Directorate General of Tax and this award is continuously achieved up to 2011.

It doesn't stop on that point, at the age of 30 years, in 2010, Brantas achieved the award as the best construction company. Such valuation is based upon a business growth performance and financial ratio as valued by Info Bank magazine.

A year later, Brantas also achieved the award from AKI (Indonesian Construction Association) as the Indonesian contractor which works mostly for the dam project. It is obviously indicating a pleased achievement and a proof that Brantas has run on the right lane. Upon its professionalism as shown to all employees and also a perfect project outcome, therefore, Indonesia Construction 2011 (Department of Public Works) awarded a construction project under category of 8 storied-building so-called green building. And the inauguration of the head office building was inaugurated by the Minister of Public Works.

In 2011, in facing the improvement and the upcoming challenge which is getting complicated, the management created a strategy step. It was actualized by performing a business diversification, i.e. in the field of PLTM investment and establishing subsidiary named "Brantas Energi".





Visi

"Menjadi Perseroan Nasional terkemuka dalam industri konstruksi"

Misi

- Menyediakan produk dan jasa engineering dan pelaksanaan konstruksi yang bermutu tinggi dengan layanan terbaik bagi para pelanggannya
- Menghasilkan laba, membangun citra, mengembangkan profesionalisme usaha berdasarkan prinsip-prinsip GCG (Good Corporate Governance), manajemen kesehatan dan keselamatan kerja (K3) serta pelestarian lingkungan
- Peduli kepada usaha kecil, menengah dan koperasi serta masyarakat

Moto

Motto Perseroan adalah : "Semangat Memberikan Yang Terbaik" atau "Spirit of Giving the Best"

Budaya Perseroan

Sebagai pedoman berperilaku bagi seluruh jajaran Perseroan dalam bekerja dan berinteraksi di dalam lingkungan Perseroan maka PT. Brantas Abipraya telah merumuskan, mengembangkan dan mensosialisasikan Budaya Perseroan, yang terdiri dari Falsafah Kerja dan 7 Nilai.

Falsafah Kerja

Insan Brantas adalah manusia pembelajar, berintegritas dan profesional yang mampu memanfaatkan dan mengembangkan ketrampilan bisnis, manajemen dan teknologi untuk kemajuan Perseroan, kesejahteraan karyawan, kemaslahatan umat manusia dan menjaga kelestarian lingkungan.

Nilai-Nilai dalam Budaya Perseroan :

1. Jujur

- Menyampaikan data / informasi secara transparan, tepat waktu dan benar.
- Tidak menyalahgunakan jabatan, wewenang dan aset Perseroan.
- Menjunjung tinggi etika bisnis yang berlaku umum.
- Obyektif dalam memandang/menilai setiap masalah dan berlaku adil dalam melaksanakan kewajiban dan hak.
- Berani menyampaikan dan menerima pendapat.

Vision

"To become a National well-known company in the construction industry"

Mission

- Providing the engineering products and services and high quality construction execution with the best services for its customers.
- Generating profit, building image, developing business professionalism based on the GCG (Good Corporate Governance) principles, occupational health safety (OHS) management as well as environmental conservation.
- Matter to small and medium enterprises and cooperatives and community

Moto

The Company's motto: "Spirit of Giving the Best"

Corporate Culture

As an attitude guideline for the entire levels of the Company in terms of working and interacting within the environment of the Company, then PT. Brantas Abipraya has decided, developed and socialized the Company's Culture covering the Work Philosophy and 7 Values.

The Work Philosophy

Brantas' Human is the learning, integrated and professional human who is capable of utilizing and developing business skill, management and technology for the advancement of the Company, employee's prosperity, human being advantages and of protecting environmental conservation.

Cultural values in the Company:

1. Honest

- Delivering data/information in a transparent, punctual and right manner.
- Not misusing designation, authority and company's asset.
- Highly upholding business ethics.
- Objectively handling each problem and treating fair in exercising obligation and right.
- Dare to convey and accept any opinion.

2. Kreatif

- Menjadi insan pembelajar yang mandiri serta aktif menyumbangkan pikiran untuk kemajuan Perseroan.
- Proaktif mengidentifikasi potensi dan mencegah timbulnya masalah serta mampu menemukan solusi yang efektif dan efisien.
- Mampu meningkatkan kualitas produk dan layanan melalui pengembangan teknologi dan metode konstruksi yang unggul.

3. Tangguh

- Memiliki daya juang yang tinggi dan semangat pantang menyerah.
- Mengerahkan seluruh potensi dan daya upaya dalam mengemban tugas dan tanggung jawab.
- Memanfaatkan setiap peluang dan mengendalikan setiap risiko.

4. Tanggung Jawab

- Memenuhi komitmen kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan Perseroan.
- Memenuhi semua rencana kerja dan target-target yang ditetapkan dengan memberdayakan seluruh aset Perseroan secara efektif dan efisien.
- Disiplin menjalankan semua aturan dan memegang teguh rahasia Perseroan.

5. Konseptual

- Bekerja dengan konsep yang jelas, sistematis dan terukur dengan berpedoman kepada Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP) serta Rencana Jangka Panjang Perseroan (RJPP).

6. Efisien

- Berperilaku hemat untuk memperoleh sebesar-besarnya keuntungan bagi Perseroan dengan memperhitungkan cost / benefit dalam setiap tindakan.

7. Kerja Sama

- Menyadari interdependensi masing-masing fungsi dalam organisasi.
- Melaksanakan fungsi masing-masing dan membangun sinergi antar fungsi dalam organisasi.
- Memiliki komitmen terhadap keberhasilan unit kerjanya sendiri dan unit kerja lain untuk pencapaian target Perseroan.

2. Creative

- Becoming an active and independent learning human in contributing idea for the Company's advancement.
- Proactively identifying potency and preventing any problem arising as well as capable of finding an effective and efficient solution.
- Able to improve product quality and services through technology development and reliable construction method.

3. Taft

- Possessing high struggle and firm spirit
- Activating all potencies and efforts in exercising task and responsibility.
- Utilizing each opportunity and controlling each risk.

4. Responsible

- Fulfilling commitment to the interest parties with the Company.
- Fulfilling all work plans and targets defined by empowering all of the Company's assets in an effective and efficient manner.
- Undertaking all rules in a discipline manner and keeping in secret the Company's secrecy.

5. Conceptional

- Working with a clear, systematical and measured concept based upon the Company Work Plan and Budget (RKAP) and the Company Long-Term Plan (RJPP).

6. Efficient

- Applying economic principles to gain a profit as much as possible for the Company by considering cost/benefit in each act performed.

7. Cooperation

- Realizing interdependency of each function within the organization.
- Executing function respectively and building a synergy between the function and organization.
- Having a commitment towards the success of his/her working unit and other working units in the achievement of the Company's target.

Prakiraan Situasi Dan Kondisi Umum Tahun 2011

Situasi Eksternal

Kabinet Indonesia Bersatu jilid II telah berjalan satu tahun. Meskipun banyak kemelut sosial, politik maupun ekonomi namun pada kenyataannya indikator – indikator makro ekonomi tahun 2010 mengalami perbaikan – perbaikan. Diharapkan indikator-indikator makro ekonomi tahun 2011 lebih baik lagi dibanding tahun 2010.

Pembangunan infrastruktur di tahun 2011 akan mendapat perhatian yang lebih besar dari Pemerintah, dibanding dengan tahun 2010. Keterlambatan tender-tender proyek Pemerintah tahun 2010 yang mengakibatkan terlambatnya produksi diharapkan tidak terjadi lagi di tahun 2011. Pasar konstruksi sektor pemerintah tahun 2011 diharapkan naik cukup banyak dibanding tahun 2010. Anggaran pembangunan sektor Pekerjaan Umum mengalami kenaikan dari tahun 2010 sebesar Rp. 35 triliun, menjadi Rp. 50 triliun ditahun 2011. Sektor ini merupakan pasar andalan bagi Perusahaan.

Pasar konstruksi sektor swasta sudah mulai diperoleh di tahun 2010 diharapkan meningkat di tahun 2011, walaupun pasar ini belum menjadi sasaran utama perusahaan.

Kondisi Internal

Dengan telah positifnya ekuitas Perusahaan maka peluang – peluang untuk mendapatkan fasilitas – fasilitas perbankan menjadi lebih terbuka. Dengan demikian penyediaan modal kerja untuk mendukung produksi diharapkan menjadi lebih mudah. Disamping itu kesempatan untuk mengikuti tender – tender proyek besar juga lebih terbuka. Meskipun demikian kesulitan-kesulitan dan keterbatasan-keterbatasan masih akan dialami oleh Perusahaan ditahun 2011 mendatang dibidang pemasaran, produksi maupun pengelolaan sumber daya.

a. Bidang Pemasaran

Perusahaan memiliki reputasi yang sangat baik khususnya dalam hal membangun prasarana sumber daya air, bahkan dikenal sangat ahli dalam

Forecast for General Situation and Condition of 2011

External Situation

United Indonesian Cabinet II has been running one year. Although social, political or economic crisis has hit but in fact, the economic macro indicators of 2011 have experienced improvements. The economic macro indicators of 2011 are expected much better than 2010.

The infrastructure development in 2011 will be paid attention more by the Government compared to 2010. Delay on the Government project bids of 2010 causing production delay is expected not to reoccur in 2011. The construction market of the government sector of 2011 is expected to increase more compared to 2010. The development budget for the Public Works sector experienced an increase of the year 2010 worth Rp 35 trillion, turned into Rp 50 trillion in 2011. This sector is a reliable market for the Company.

The construction market for the private sector is obtained in 2010 which is expected to increase in 2011, although this market has not been a main target for the company.

Internal Condition

A positive equity performed by the Company, therefore, opportunities to obtain banking facilities are more opened. Thus, a provision for the work capital to support the production is hoped easier. In addition thereto, the opportunity to participate in the huge project bids is also opened. However, difficulties and limitations will be still experienced by the Company in the upcoming 2011 in the field of marketing, production or resources management.

a. Marketing

The company has an enormously good reputation particularly in developing water resources infrastructure, as known expert in the field of

membangun bendungan – bendungan besar. Perusahaan juga memiliki akses pasar yang cukup baik, terutama pada pasar sektor pemerintah. Kesempatan untuk mengikuti tender proyek-proyek yang bernilai besar sudah lebih terbuka dengan adanya ekuitas Perusahaan yang sudah positif lebih dari Rp 100 milyar, meskipun di beberapa segmen pasar masih terkendala oleh pengalaman kerja. Disamping itu masalah minimnya dukungan fasilitas perbankan yang dialami Perusahaan ditahun – tahun yang lalu diharapkan tidak terjadi lagi di tahun 2011 ini.

b. Bidang Produksi

Dengan berbekal sisa kontrak yang cukup besar yang berasal dari tahun 2010 dan sebelumnya, maka telah terbuka kesempatan untuk berproduksi sejak awal tahun. Kendala pembebasan tanah di proyek – proyek Cisokan dan Bintang Bano diharapkan sudah bisa diselesaikan sebelum Januari 2011. Demikian juga kendala – kendala design proyek – proyek Bintang Bano dan Bajul Mati juga sudah bisa diselesaikan sebelum Januari 2011. Tender – tender proyek baru diharapkan sudah dimulai sejak awal 2011, bahkan sejak akhir 2010, sehingga kesempatan berproduksi ditahun 2011 menjadi lebih luas. Kesulitan likuiditas yang masih menjadi kendala utama ditahun – tahun yang lalu diharapkan tidak terjadi lagi ditahun 2011 ini, sehingga kecepatan produksi bisa optimal. Mutu pekerjaan sejauh ini tidak ada keluhan dari pengguna jasa.

c. Bidang Keuangan

Dengan telah positifnya ekuitas Perusahaan sejak tutup buku 2009, maka kesempatan mendapatkan dukungan kredit modal kerja maupun fasilitas – fasilitas perbankan lainnya lebih terbuka, sehingga masalah – masalah finansial terutama kesulitan likuiditas seperti lalu tidak terjadi lagi di tahun 2011 ini. Namun demikian, besarnya beban bunga kredit bank yang sudah tidak produktif (non performing loan) yang besarnya mencapai Rp.9.8 milyar per tahun akan menjadi beban tetap yang tidak produktif.

building huge dams. Also, the company has a good market access, particularly in the government sector market. The opportunity to participate in the project bid at the huge value has been opened due to the Company's equity that has been positive more than Rp 100 billion, even though in several market segments are still under barrier of work experience. Additionally, a problem on minimum banking facility support experienced by the Company in the previous years is expected not to reoccur in this year 2011.

b. Production

With remaining huge contract of 2010 and previous years, therefore, an opportunity has been opened to produce since the beginning of the year. A barrier of land exemption at Cisokan and Bintang Bano projects is expected to be accomplished before January 2011. Also, the barriers of the project designs for Bintang Bano and Bajul Mati are expected to be accomplished before January 2011. New project bids have been commenced since the beginning of 2011 and the last 2010, therefore, an opportunity to produce becomes wider. A liquidity trouble which still becomes a main barrier of the previous years, it is expected not to reoccur in 2011, thereby, the production acceleration will be optimal. The work quality has been insofar good and away from complaint of the service users.

c. Finance

Because of the positive equity of the Company since closing the 2009, then, opportunity to acquire a support for the work capital credit or other banking facilities are more opened so that the financial problems particularly the liquidity trouble of the last years will not occur anymore in this year 2011. Nevertheless, a huge bank credit interest (non performing loan) which attains Rp 9.8 billion per annum will be non-productive fixed expenses.

d. Bidang Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang dimiliki Perusahaan dari segi jumlah cukup untuk menunjang tercapainya target-target perusahaan tahun 2011. Namun karena masih kurang sesuainya profil pendidikan dan profil kompetensi SDM terhadap tuntutan pekerjaan maka sumber daya manusia ini belum bisa sepenuhnya bisa diandalkan untuk menghadapi tuntutan pertumbuhan perusahaan yang lebih besar di masa depan. Recruitment pegawai baru untuk memperbaiki profil pendidikan dan profil kompetensi ini, telah dilakukan secara bertahap sejak tahun 2007, namun pegawai - pegawai baru tersebut baru siap menjadi kepala proyek setidaknya setelah 5 tahun. Pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi juga selalu dilakukan.

e. Bidang Sumber Daya Alat

Alat-alat konstruksi yang dimiliki perusahaan rata-rata sudah cukup tua. Namun dengan dukungan maintenance, repair dan recondition yang terencana, serta dukungan alat-alat konstruksi milik mitra usaha, sumber daya alat ini diharapkan mampu mendukung target produksi tahun 2011. Peremajaan alat konstruksi juga sudah dimulai tahun 2007, namun karena keterbatasan likuiditas, maka investasi alat-alat baru sampai dengan tahun 2010 masih sangat terbatas.

f. Bidang Struktur Organisasi dan Sistem

Struktur Organisasi dan sistem tata kelola yang ada saat ini masih sesuai dan mampu menjawab tantangan eksternal maupun pertumbuhan usaha. Saat ini Perusahaan telah menerapkan sistem manajemen ISO-9001:2000, OHSAS-18001:1999 dan SMK3, serta ISO 14000, dan semuanya telah bersertifikat. Disamping itu Perusahaan juga telah menerapkan prinsip – prinsip Good Corporate Governance (GCG), dan telah memiliki Board of Manual maupun Code Of Conduct sebagai pedoman penerapan GCG tersebut. Dalam rangka menilai penerapan prinsip – prinsip GCG ini, telah dilakukan assesment oleh pihak BPKP maupun BPK.

d. Human Resources

The human resources owned by the Company seen from the number are sufficient to support the company targets of 2011. Nevertheless, due to less conformity for the education and competency profiles of the HR towards the work demand, then the human resources could not have been fully relied on to face more demands for the company growth in the future. New employee recruitment that aims at improving the education and competency profile has been gradually performed since 2007, but the new employees will be ready to be posted as a project leader at least after 5 years of his service. The education and training to improve the competency is also conducted.

e. Equipment Resources

The construction equipment owned by the company has been old enough. However, under a planned maintenance, repair and recondition and construction of the business partners, such equipment resources are expected able to support the production target of 2011. Rejuvenation to the construction equipment has been also commenced since 2007, but due to the limited liquidity, then the new equipment investment up to 2010 has been still limited.

f. Organization and System

The Organization Structure and management system that are currently managed still correspond and capable of answering the external challenge or business growth. Currently, the Company has applied the management system of ISO-9001:2000, OHSAS-18001:1999 and SMK3, as well as ISO 14000, and all has been certified. In addition thereto, the company has also applied the Good Corporate Governance (GCG) principles and has owned the Board of Manual or Code of Conduct as a guideline to apply for the GCG. In the purpose of assessing the application for the said GCG principles, an assessment has been performed by BPKP or BPK.

Asumsi - Asumsi

RKAP tahun 2011 disusun berdasarkan asumsi - asumsi sebagai berikut :

- a. Tingkat pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2011 sebesar 6,3%
- b. Tingkat laju inflasi tahun 2011 sebesar 5,3 %
- c. Tingkat suku bunga kredit bank sebesar 13 % per tahun
- d. Nilai tukar US Dollar terhadap rupiah berada pada kisaran Rp. 9.250 per US Dollar.
- e. Pemerintah tidak menaikkan harga BBM di tahun 2011.

Sasaran – Sasaran Perusahaan Tahun 2011

Berdasarkan prakiraan situasi eksternal, kondisi internal dan asumsi - asumsi tersebut di atas, maka perusahaan menetapkan sasaran tahun 2011 sebagai berikut :

Assumptions

RKAP of 2011 is composed based upon the following assumptions hereof:

- a. National economic growth rate of 2011 at 6.3%.
- b. Inflation rate of 2011 at 5.3%
- c. Bank credit interest rate at 13% per annum
- d. USD exchange rate towards rupiah at the range Rp 9.250 per US Dollar.
- e. Government did not increase fuel price in 2011.

The Company's Targets in 2011

Based upon forecast for the external situation, internal condition and assumptions above, then the company defines the 2011 targets as follows:

No.	BIDANG	SASARAN 2011
1	Pemasaran	Mengikuti kualifikasi sebesar Rp. 20.09 triliun Tingkat kelulusan 100 %
	a. Prakualifikasi	
	b. Tender	Mengikuti Tender sebesar Rp. 14.06 triliun, Tingkat kemenangan 15.49 %
	c. Nilai Kontrak	Sisa Nilai Kontrak Lama Rp. 2.43 triliun Nilai Kontrak Baru Rp. 1.83 triliun Jumlah Rp. 4.26triliun
2	Produksi	Produksi dari Kontrak Lama Rp. 1.10 triliun
	a. Produksi (incl.JO)	Produksi dari Kontrak Baru Rp. 0.45 triliun Jumlah Rp. 1.55 triliun
	b. Biaya Produksi	Biaya Produksi Kontrak Lama Rp. 0.99 triliun Biaya Produksi Kontrak Baru Rp. 0.39 triliun Jumlah Rp. 1.38 triliun
3	Teknologi	Pembuatan referensi petunjuk kerja / construction method. Peningkatan pemanfaatan IT
4	Penelitian dan Pengembangan	Study kasus masalah engenering dan management pada proyek-proyek yang bermasalah.
5	Logistik	Efisiensi pengadaan material dengan cara sentralisasi untuk material yang memungkinkan, misal : besi beton dll.

6	Manajemen, Organisasi & Sistem	Memantapkan / melanjutkan restrukturisasi organisasi yang sudah dilakukan mulai tahun 2005. Memperbaiki prosedur - prosedur dan instruksi kerja dalam sistem manajemen mutu ISO 9001-2008 Memantapkan pelaksanaan OHSAS & SMK3 Meningkatkan penerapan Good Corporate Governance
7	Sumber Daya Manusia	Jumlah SDM tahun 2011 : 316 orang Produktivitas per orang Rp. 4.90 milyar Biaya Diklat sebesar Rp. 1.80 milyar Biaya Sertifikasi keahlian Rp. 0.25 milyar
8	Satuan Pengawasan Intern	- Audit Internal = 49 obyek - Audit eksternal : - ISO 9001:2000 = 2 kali - OHSAS 18001 = 2 kali - KAP = 1 kali
9	Keuangan & Akuntansi	
	a. Modal Kerja	- Mendapatkan tambahan kredit modal kerja sebesar Rp. 50 milyar sehingga menjadi Rp 450 miliar - Mendapatkan tambahan dukungan non cash loan menjadi sebesar Rp 1triliun
	b. Bunga Bank	- Bunga bank dan Biaya Adm. Kredit maksimum Rp 35 milyar
	c. Biaya Tak Langsung	- Beban Administrasi & Umum Rp 35 miliar
10	Investasi	Rencana investasi tahun 2011 sebesar Rp. 29.50 milyar
11	Pajak, Deviden dan Devisa	-PPH sebesar Rp 28.80 milyar -PPN sebesar Rp. 120.00 milyar -Deviden sebesar Rp.-- milyar -Devisa sebesar Rp.-- milyar
12	Tingkat Kinerja Perusahaan	Tingkat Kinerja Perusahaan tahun 2011 diproyeksikan Sehat (AAA) dengan total skor 95.75
13	Dana Pensiun	Memenuhi kewajiban pembayaran iuran tambahan sesuai perhitungan aktuaris.
14	Kemitraan dan Bina Lingkungan (termasuk CSR)	Penyisihan dana dari perusahaan : - Kemitraan Rp. 0 juta - Bina Lingkungan Rp. 500.00 juta Penyaluran Dana : - Kemitraan Rp.210.00 juta - Bina Lingkungan Rp. 2.75 juta
15	Restrukturisasi dan Privatisasi	- Fokus kepada SBU - Peningkatan pengendalian proyek untuk meningkatkan profit - Program Privatisasi tahapan penyehatan perusahaan dalam bidang usaha dan tata kelola

Strategi – Kebijakan Dan Program

Strategi Umum Perusahaan

Tahun 2009 adalah tahun pertama kali penjualan tembus diatas Rp 1000 miliar, dan Perusahaan berhasil membukukan laba bersih setelah pajak diatas target RKAP yaitu sebesar Rp 34 milyar dan berhasil mencapai tingkat kesehatan "Sehat AA". Tahun 2010, Perusahaan banyak sekali menghadapi kendala eksternal yang diluar kendali Perusahaan, antara lain pembebasan tanah yang belum selesai diproyek – proyek besar yang sudah dikontrak, design yang belum selesai pada proyek – proyek besar yang sudah dikontrak, serta terlambatnya tender proyek – proyek baru sampai akhir tahun. Akibat adanya kendala eksternal tersebut diatas maka Perusahaan hanya mampu mencapai volume penjualan sebesar Rp 824 miliar, jauh dibawah target RKAP, sehingga target laba setelah pajak juga tidak tercapai karena beban tetap yang harus ditanggung.

Dengan memperhatikan kinerja Perusahaan tahun 2010, situasi eksternal tahun 2011 yang diharapkan lebih kondusif, dan kondisi internal Perusahaan yang telah lebih sehat sebagaimana telah diuraikan di atas maka Perusahaan menetapkan strategi umum tahun 2011 yang belum beranjak dari strategi tahun sebelumnya yaitu "STABILISATION" dengan mengembalikan target – target Perusahaan pada alur RJPP. Dengan strategi ini Perusahaan akan lebih berkonsentrasi dalam membangun sumber daya Perusahaan, dan meningkatkan daya saing untuk menghadapi pertumbuhan usaha yang lebih besar ditahun-tahun yang akan datang.

Meskipun dalam penetapan target, Perusahaan menargetkan penjualan tahun 2011 sebesar Rp. 1.55 triliun atau naik 87.95% dari prognosa tahun 2010 sebesar Rp. 824 milyar, tapi hal ini lebih dimaksudkan untuk menangkap peluang-peluang yang sedang terbuka, dan mengembalikan target – target Perusahaan pada alur RJPP.

Strategy, Policy and Program

General Strategy of the Company

In 2009 was the first sale breaking through over Rp 1,000 billion, and the Company successfully gained the profit after tax over RKAP target worth Rp 34 billion and also successfully attained a health rank under category "Healthy AA". Meanwhile, in 2010, the Company frequently faced an external obstruction beyond the Company control, i.e. unfinished land exemption in the huge projects that was under contract, unfinished design in the huge projects that was under contract, as well as delay on new project bid up to the end of year. Due to the foregoing external obstructions, the Company only reached the sales volume worth Rp 824 billion far below the RKAP target, therefore, the profit target after tax was not successfully attained since the permanent expenses had to be borne.

In observance of the Company performance 2010, and external situation of 2011 are expected more conducive and internal condition of the Company will be healthier as elaborated above, therefore, the Company defines a general strategy for 2011 which has not moved from the previous strategy namely "STABILIZATION" by returning the Company targets on the RJPP track. Along with such strategies, the Company is expected to concentrate more on developing the Company's resources and enhancing competitiveness to face a bigger business growth in the upcoming years.

Even though, in the target determination, the Company has target for the 2011 sales worth Rp 1.55 trillion or increases 87.95% of the 2010 prognosis worth Rp 824 billion, however, it is intended to catch opened opportunities and to return the Company's targets on the RJPP track.

Strategi Per Bidang

a. Bidang Pemasaran

Fokus kepada "core competency" yaitu proyek-proyek sumber daya air, serta proyek-proyek dimana perusahaan telah memiliki pengalaman, keahlian dan sumber daya alat, baik milik sendiri ataupun milik mitra pendukung. Fokus pada proyek-proyek pemerintah, BUMN, dan swasta yang diyakini terjamin sumber pembiayaannya serta cara pembayaran yang tidak memberatkan perusahaan.

b. Bidang Operasi / Produksi

Peningkatan efisiensi biaya produksi melalui penyempurnaan metode kerja, manajemen proyek serta efektifitas sistem pengendalian dengan IISCS. Membina hubungan kerja dengan mitra kerja sehingga Perusahaan dapat memanfaatkan secara optimal sumber daya milik mitra kerja sebagai support terhadap kekurangan sumber daya perusahaan. Menjaga posisi cash flow semua proyek agar selalu positif agar tidak memberatkan cash flow perusahaan.

c. Bidang Teknologi / Peralatan Produksi

Menyempurnakan metode konstruksi yang telah dimiliki disesuaikan dengan perkembangan teknologi. Menempatkan pengelolaan alat konstruksi di bawah satu divisi yang khusus mengurus alat-alat konstruksi. Memperbaiki produktifitas alat yang dimiliki. Meningkatkan rasio kesiapan alat dan rasio pemakaian alat konstruksi yang dimiliki perusahaan. Melakukan peremajaan alat sesuai kebutuhan mendesak dan cash flow perusahaan.

d. Bidang Logistik

Meningkatkan kemampuan pengadaan terpusat dan meningkatkan kontrol Divisi / Kantor Pusat terhadap pengadaan barang dan jasa untuk keperluan pelaksanaan proyek, terutama untuk major item, tanpa menghambat waktu pengadaan.

Per Sector Strategy

a. Marketing

Focusing on "core competency" where the water resources projects and the projects in which the company has owned experience, expertise and equipment resources either self-property or property of supporting partner. Focusing on the government, SOE and private company projects are believed that it is secure in terms of financing and payment which will be safe for the company.

b. Operation/Production

Improvement on production cost efficiency is carried out by perfection to the work method, project management and control system effectiveness with IISCS. Building work relations towards work partner to optimally utilize resources owned by the work partner as a support to the lack of the company resources. Maintaining cash flow position for all projects in a positive position in order not to incriminate the company cash flow.

c. Technology / Production Equipment

Perfecting construction method which has been owned to be adjusted to the technology improvement. The construction equipment management under a special division which takes care of the construction equipments. Improving the equipment productivity. Improving ratio on equipment readiness and construction equipment use owned by the company. Performing rejuvenation to the equipment in accordance with urgent needs and the company cash flow.

d. Logistics

Improving integrated procurement competency and controlling over Division/Head Office towards the goods and services procurement for the needs of project implementation particularly for major items without hampering the procurement time.

e. Bidang Penelitian dan Pengembangan

Tahun 2011 perusahaan belum akan melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan secara khusus. Sementara kegiatan ini dilakukan di masing-masing proyek dengan sasaran memperbaiki / menyempurnakan metode-metode konstruksi yang sedang dipakai di proyek.

f. Bidang Manajemen Organisasi dan Sistem

Menyempurnakan sistem dan struktur organisasi sebagai kelanjutan dari restrukturisasi yang telah dimulai awal tahun 2005. Menyempurnakan sistem manajemen ISO 9001 – 2008, OHSAS 18001:1999 dan SMK3, serta ISO 14000. Menjamin penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam pengelolaan perusahaan.

g. Bidang Sumber Daya Manusia

Memperbaiki profil SDM meliputi komposisi teknik & non teknik, profil pendidikan, serta profil keahlian pegawai, penempatan & pembentukan tim proyek yang solid. Meningkatkan kompetensi SDM melalui program pendidikan dan pelatihan, pembinaan dan rotasi. Membekali kepala proyek dengan ketrampilan teknologi, manajemen dan bisnis yang memadai. Melengkapi SDM dengan sertifikasi keahlian yang diperlukan dalam pemasaran.

h. Bidang Pengawasan Intern

Membuat Satuan Pengawasan Intern lebih proaktif sehingga terjadinya penyimpangan dapat diketahui secara lebih dini, dan dapat diminimalkan.

i. Bidang Keuangan dan Akuntansi

Meningkatkan ketersediaan modal kerja yang bersumber dari dalam perusahaan (percepatan termin, dan penjualan aset-aset tidak produktif) dan sumber eksternal (kredit bank, supplier) serta meningkatkan pengendalian pembelanjaan proyek, BAU dan pengeluaran-pengeluaran lainnya. Menyempurnakan sistem akuntansi sesuai prinsip-prinsip standar akuntansi, dan mengintegrasikannya dalam program IISCS.

e. Research and Development

In 2011, the company will not carry out any research and development activity specifically, whereas this activity is carried out by each project in the target of improving/perfecting the construction methods which are being used in the project.

f. Organization and System Management

Perfecting the system and organization structure as a continuation of the restructure which has been commenced at the beginning of 2005. Perfecting the management system of ISO 9001 – 2008, OHSAS 18001:1999 and SMK3, as well as ISO 14000. Ensuring application for the Good Corporate Governance principles within the company management.

g. Human Resources

Improving HR profile covers composition of the engineering and non-engineering, education profile, and employee expertise profile, placement and formation of solid project team. Improving HR competency through education and training, development and rotation programs. Supporting the project leader with an adequate technology, management and business skill. Furnishing the HR with expertise required in marketing.

h. Internal Surveillance

Creating more proactive internal Surveillance Unit to find out early deviation.

i. Finance and Accountancy

Improving availability of work capital from the internal company (term acceleration, and non-productive assets sales) and external resources (bank credit, supplier) as well as improving control over project expenses, BAU and other expenses. Perfecting accountancy system in accordance with the accountancy standard principles and integrate in the IISCS program.

Melaksanakan sistem perpajakan dan selalu mengikuti perkembangan / peraturan perpajakan untuk menghindari kerugian akibat pajak.

Implementing taxation system and updating taxation improvement/regulation to avoid any loss due to tax.

j. Bidang Investasi

Investasi dilakukan dengan pertimbangan yang sangat berhati-hati, hanya untuk hal-hal yang benar-benar menguntungkan perusahaan dan dengan mempertimbangkan cash flow perusahaan

j. Investment

The investment is carried out by a very careful consideration for only the things that benefit to the company and by considering the company cash flow.

Kebijakan Dan Program

Kebijakan-kebijakan dan program-program masing-masing bidang secara ringkas diuraikan pada matriks keterkaitan antara sasaran, strategi, kebijakan dan program berikut ini :

Policy and Program

The policies and programs of each field are briefly elaborated on the following relatedness matrix among target, strategy, policy and program hereof:

Rencana Kerja Dan Anggaran Perusahaan 2011

Untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan strategi dan kebijakan - kebijakan yang telah ditetapkan, maka perusahaan menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan 2011 untuk masing-masing bidang sebagai berikut :

The 2011 Work Plan and Budget of the Company

To achieve the goals that have been established in accordance with the strategies and policies - policies that have been set, the company set a Work Plan and Budget 2011 for each of the following areas:

Bidang Pemasaran

a. Kualifikasi

Tahun 2011 perusahaan merencanakan untuk mengikuti kualifikasi proyek dengan total nilai Rp 20.09 triliun atau naik 44.06 % terhadap prognosa tahun 2010 sebesar Rp 13.95 triliun

Field Marketing

a. Qualification

In 2011 the company plans to qualify projects with a total value of Rp20.09 trillion, up 44.06% on prognosis in 2010 amounted to Rp 13.95 trillion

Dalam jutaan rupiah in million of rupiah

URAIAN	PROGNOSA 2010	RKAP 2011	%	DESCRIPTION
Diikuti	13,951,429.00	20,099,092.80	144.06	Participated
Lulus	4,387,943.00	20,099,092.80	458.05	Passed
Tidak Lulus	4,020,448.00	-	-	Failed

b. Kegiatan Tender

Untuk menunjang target perolehan nilai kontrak baru, perusahaan merencanakan mengikuti tender proyek dengan nilai total Rp. 14.06 triliun atau naik 75.79 % terhadap prognosa tahun 2010 sebesar Rp. 7.99 triliun

b. Tender activity

To support an obtainment target for the new contract value, the company plans to participate in project tender with total value Rp 14.06 trillion or increases 75.79% towards the prognosis of 2010 worth Rp 7.99 trillion.

Dalam jutaan rupiah

in million of rupiah

URAIAN	PROGNOSA 2010	RKAP 2011	%	DESCRIPTION
Tender diikuti	7,998,379.18	14,060,000.00	175.79	Tender participated
Tend. diumumkan	6,798,622.30	11,800,000.00	173.56	Tender announced
Tend. Dimenangkan	1,245,645.69	1,828,000.00	146.75	Tender won
Perolehan Kontrak Baru melalui tender	1,245,645.69	1,828,000.00	146.75	Obtainment for New Contract with tender
Perolehan Kontrak Baru tanpa melalui tender	93,146.31	-	-	Obtainment for New Contract without tender
Perolehan Ko.Baru	1,338,792.00	1,828,000.00	136.54	Obtainment for New Contract

c. Nilai Kontrak Yang Ditangani

Total nilai kontrak yang ditangani tahun 2011 direncanakan sebesar Rp. 4.26 triliun atau naik 31.06. % terhadap prognosa 2010 sebesar Rp. 3.25 triliun

c. The Contract Value Handled

Total contract value handled in 2011 is planned Rp 4.26 trillion or increases 31.06% towards prognosis of the 2010 worth Rp 3.25 trillion.

Dalam jutaan rupiah

in million of rupiah

URAIAN	PROGNOSA 2010	RKAP 2011	%	DESCRIPTION
Kontrak Lama	1,915,189.78	2,436,793.57	127.24	Previous Contract
Kontrak Baru	1,338,792.00	1,828,000.00	136.54	New Contract
J U M L A H	3,253,981.78	4,264,793.57	131.06	TOTAL

d. Nilai Kontrak Menurut Segmen

Berdasarkan segmen jenis proyek, maka rencana nilai kontrak yang ditangani tahun 2011 dapat dibagi sebagai berikut :

d. Contract Value Based on Segment

Based on segment of the project type, therefore, the contract value plan handled in 2011 can be divided into as follows:

URAIAN	PROGNOSA 2010		RKAP 2011		%	DESCRIPTION
	%	Rp	%	Rp		
Pengairan	60.43	1,966,435.78	56.23	2,398,028.22	121.95	irrigation
Jalan / Jembatan	24.70	803,663.00	27.91	1,190,271.35	148.11	Roads / Bridges
Gedung / Bangunan	1.20	39,000.00	0.91	39,000.00	100.00	Building / Construction
Kelistrikan	13.67	444,883.00	11.43	487,494.00	109.58	Electrical
Prasarana Perhubungan						Transportation infrastructure
Lain-lain				150,000.00		Other
J U M L A H	100.00	3,253,981.78	96.48	4,264,793.57	131.06	TOTAL

Bidang Produksi

a. Nilai Produksi

Tahun 2011 perusahaan menargetkan produksi sebesar Rp.1.55 triliun atau naik 89.67% terhadap prognosa 2010 sebesar Rp. 817.18 milyar.

Dalam jutaan rupiah

URAIAN	PROGNOSA 2010			RKAP 2011		%	DESCRIPTION
	Nilai Kontrak	Produksi	%	Nilai Kontrak	Produksi		
Kontrak Lama	1,915,189.78	533,257.00	27.84	2,436,793.57	1,100,705.63	45.17	contract Duration
- Non JO	1,659,601.55	277,668.77		2,150,242.33	814,154.39		- Non JO
- JO	255,588.23	255,588.23		286,551.24	286,551.24		- JO
Kontrak Baru	1,338,792.00	291,431.21	21.77	1,828,000.00	449,294.37	24.57	New Contract
- Non Jo	1,273,676.97	226,316.18		1,764,551.24	385,845.61		- Non Jo
- JO	65,115.03	65,115.03		63,448.76	63,448.76		- JO
JUMLAH	3,253,981.78	824,688.21	25.34	4,264,793.57	1,550,000.00	36.34	TOTAL
- Non JO	2,933,278.52	503,984.95		3,914,793.57	1,200,000.00		Non - JO
- JO	320,703.26	320,703.26		350,000.00	350,000.00		- JO

in million rupiah

Production

a. Production Value

In 2011, the company has target the production worth Rp 1.55 trillion or increases 89.67% towards the prognosis of the 2010 worth Rp 817.18 billion.

b. Biaya Produksi

Beban biaya produksi di proyek terdiri dari biaya langsung dan overhead proyek tahun 2011 dibandingkan dengan prognosa tahun 2010 adalah sebagai berikut :

Dalam jutaan rupiah

No	URAIAN	Produksi	Biaya Langsung	Overhead Proyek	Jumlah Biaya	%	DESCRIPTION
PROGNOSA 2010		prognosis 2010					
1	Proyek Lama	533,257.00	426,664.66	36,414.77	463,079.43	86.84	Old project
2	Proyek Baru	291,431.21	245,561.82	18,205.20	263,767.02	90.51	New Project
	JUMLAH	824,688.21	672,226.48	54,619.97	726,846.45	88.14	TOTAL
RKAP 2011		RKAP 2011					
1	Proyek Lama	1,100,705.63	913,620.19	77,975.22	991,595.41	90.09	Old project
2	Proyek Baru	449,294.37	366,251.80	27,152.79	393,404.59	87.56	New Project
	JUMLAH	1,550,000.00	1,279,872.00	105,128.00	1,385,000.00	89.35	TOTAL

in million rupiah

b. Production Cost

Production expenses within the project consist of direct cost and overhead project of the 2011 compared to prognosis of the 2010 are as follows:

c. Piutang Usaha

Realisasi piutang usaha tahun 2010 ini diperkirakan mencapai Rp.142.71 milyar atau 17.46 % dari target penjualan 2010 sebesar Rp. 817.18 milyar. Untuk menjaga likuiditas Perusahaan maka dalam tahun 2011 piutang usaha akan dibatasi sebesar Rp.197.50 milyar atau 12.74 % dari rencana penjualan tahun 2011 sebesar Rp. 1.55 triliun.

Dalam jutaan rupiah

No.	URAIAN	PROGNOSA	RKAP	%	DESCRIPTION
1	Penjualan	824,688.21	1,550,000.00	187.95%	sale
2	Piutang Usaha :	175,713.48	197,500.00	112.40%	Accounts Receivable:
	a. Piutang dalam proses penagihan	41,297.78	53,384.29	129.27%	a. Account Receivables under Invoicing progress
	b. Pekerjaan dalam pelaksanaan (WIP)	114,411.71	116,412.18	101.75%	b. Work in Project (WIP) (WIP)
	c. Retention Money	20,003.99	27,703.53	138.49%	c. retention Money
3	Prosen Piutang Usaha terhadap Penjualan	21.31%	12.74%		3. Percentage of Account Receivables towards Sales

in million rupiah

c. Accounts Receivable

Realization of the account receivables in this 2011 is estimated to attain Rp 142.71 billion or 17.46% of the sales target in 2010 worth Rp 817.18 billion. To keep the Company liquidity, then in 2011 the receivables will be limited to Rp 197.50 billion or 12.74% of the sales plan in 2011 worth Rp 1.55 trillion.

Bidang Teknologi / Peralatan Konstruksi

Rencana kerja dibidang pengembangan teknologi masih terbatas pada pengembangan metode konstruksi dan anggarannya langsung menjadi beban biaya proyek.

Sedangkan dibidang peralatan konstruksi rencana kerja tahun 2011 menyangkut jumlah alat, tingkat kesiapan dan tingkat pemakaian alat adalah sbb. :

Technology / Construction Equipment

The work plan in the field of technology development is still limited to the construction method development and its direct budget turns into the project expenses.

Meanwhile, in the field of the construction equipment, the work plan of 2011 relating to number of equipment, readiness and equipment use are as follows:

URAIAN	PROGNOSA 2010		RKAP 2011		DESCRIPTION
	UNIT	BLN ALAT	UNIT	BLN ALAT	
Jumlah Alat	267	1.602,00	292	1.752,00	Number of Equipment
Jumlah Siap Pakai	187	1.309,00	212	1.484,00	Number of Ready Use in Percentage
Prosen	70,04 %	81,71 %	72,60 %	84,70 %	
Jumlah Terpakai	161	1.207,50	187	1.402,50	Number of Equipment Used in Percentage
Prosen	60,30 %	75,37 %	64,04 %	80,05 %	

Target pendapatan alat tahun 2011, biaya repair & maintenance serta overhead proyek adalah sbb. :

Revenue Target on equipment of 2011, repair and maintenance cost as well as overhead project are as follows:

Dalam jutaan rupiah

in million rupiah

URAIAN	PROGNOSA 2010		RKAP 2011		DESCRIPTION
	Rp	%	Rp	%	
Pendapatan	73,485.43	100.00	91,856.79	100.00	revenue
- Intern	67,097.25	91.31	83,871.56		- Intern
- Ekstern	6,388.18	8.69	7,985.23		- External
Intern & Ekstern					Internal & External
- Biaya Operasi + Dep. Alat	63,886.88	86.94	77,224.46	84.07	- Operating Costs + Dep. tool
- Biaya Repair & Maintenance	5,643.45	7.68	7,109.72	7.74	- Repair & Maintenance Costs
- OH Proyek	1,918.00	2.61	2,608.27	2.84	- OH Project
Kontribusi	2,037.10	2.77	4,914.34	5.35	contribution

Anggaran biaya peralatan proyek tersebut di atas sudah masuk dalam biaya langsung proyek bidang produksi

The cost budget for the project equipment included direct project cost in the field of production

Bidang Sumber Daya Manusia

a. Jumlah SDM

Jumlah sumber daya manusia tahun 2011 direncanakan 316 orang atau naik dibandingkan prognosa tahun 2010 sebesar 288 orang. Sedangkan produktivitas per orang tahun 2011 direncanakan Rp. 4.90 milyar / orang atau naik 71.29% terhadap prognosa 2010 sebesar Rp. 2.86 milyar / orang.

Human Resources

a. Number of HR

Number of HR in 2011 is planned 316 people or increases as compared to prognosis of 2010, namely 288 people. Meanwhile, productivity per person of 2011 is planned Rp 4.90 billion/person or increases 71.29% towards prognosis of 2010 worth Rp 2.86 billion/person.

No	URAIAN	PROGNOSA 2010	RKAP 2011	%	DESCRIPTION
1	Jumlah Awal	282 Orang	288 Orang	102.13	Number of Initial
2	Penambahan	21 Orang	40 Orang	190.48	Addition
3	Pengurangan	15 Orang	12 Orang		Reduction
4	Jumlah Akhir	288 Orang	316 Orang	109.72	Final Total
5	Produktivitas	2,863.50 Orang	4,905.00 Orang	171.29	Productivity

b. Program Peningkatan Kompetensi

Jumlah jam pendidikan dan pelatihan tahun 2011 direncanakan 8.848 jam atau naik menjadi 5.6 % terhadap prognosa 2010 sebesar 8.377 jam, hal ini untuk meningkatkan kompetensi pegawai. Sedangkan dari segi biaya diklat & sertifikasi keahlian tahun 2011 direncanakan sebesar Rp. 2.05 milyar atau mengalami kenaikan sebesar 36.66 % terhadap prognosa 2010 sebesar Rp. 1.50 milyar

b. Competence Enhancement Program

Number of education and training hours of 2011 is planned 8,848 hours or increases 5.6% towards prognosis of 2010 totaling 8,377 hours. It is intended to enhance the employee competency. Meanwhile, seen from the education and training cost and expertise certification of 2011 was planned Rp 2.05 billion or increased 36.66% towards prognosis of 2010 worth Rp 1.50 billion.

No	URAIAN	PROGNOSA 2010	RKAP 2011	%	DESCRIPTION
1	Jumlah Jam Diklat	8,377 jam	8,848 jam	105.60	Total Education and Training Hours
2	Biaya Diklat	1,015.00	1,806.00	177.93	Education and Training Cost
3	Biaya Sertifikasi Keahlian	486.000	250.00	51.44	Expertise Certification Cost

c. Dana Pensiun

Untuk memperbaiki struktur pendanaan Dana Pensiun yang menjamin seluruh pegawai, mulai tahun 2011 perusahaan membiayai setoran iuran tambahan berdasarkan perhitungan aktuaris, + sebesar Rp. 1.5 milyar disamping iuran wajib tahun 2011 sebesar 19.7 %.

c. Pension fund

To improve the funding structure for the Pension Fund which secures all employees, commencing 2011, the company has financed an additional contribution based on actuary worth Rp 1.5 billion besides obligatory contribution of 2011 at 19.7%.

Iuran tambahan (sebagai akibat dari PSL) sebesar Rp 3.77 milyar hanya diperuntukkan untuk 87 karyawan organik peserta pensiun (TO atau Tenaga Organik menurut istilah yang lama). Per tanggal 1 Januari 2009 jumlah peserta pensiun meliputi seluruh karyawan tetap yang berjumlah 281 orang, atau ada tambahan 194 orang. Kewajiban aktuarial yang muncul sebesar Rp 11.06 milyar (peserta baru diperhitungkan masa kerja sejak tanggal bekerja).

The additional contribution (as consequence of PSL) worth Rp 3.77 billion is only intended for 87 organic employees of the pension participant (TO or Organic Personnel according to old term). Since January 1, 2009, number of the pension participants has covered all permanent employees in total 218 people or any addition of 194 people. An actuary obligation arises worth Rp 11.06 billion (new participant is considered the work period since the employment date).

Bidang Pengawas Intern

Program audit internal maupun eksternal tahun 2011 direncanakan sbb. :

Internal Audit

Internal and external audit program in 2011 is planned as follows :

URAIAN	PROGNOSA 2010	RKAP 2011	%	DESCRIPTION
Internal				Internal
Kantor Pusat	11	12	109.09 %	Head Office
Kantor Wilayah	5	5	100.00 %	Regional Office
Depo	2	3	150.00 %	Storehouse
Proyek	25	31	124.00 %	Project
Eksternal				External
KAP	1	1	100.00 %	KAP
BPKP				BPKP

Bidang Keuangan & Akuntansi

a. Kredit Bank & Beban Bunga

Kredit bank dan beban bunga tahun 2011 untuk menunjang operasional perusahaan direncanakan sbb. :

URAIAN	PROGNOSA 2010		RKAP 2011		DESCRIPTION
	JUMLAH KREDIT	BEBAN BUNGA	JUMLAH KREDIT	BEBAN BUNGA	
Kredit Lama (Bank)	83,101.00	6,811.32	85,000.00	9,237.00	Old Credit (Bank)
- Mandiri	50,571.00	3,871.00	52,470.00	5,997.00	- Independent
- BSM	32,530.00	2,940.32	32,530.00	3,240.00	- BSM
- Bukopin	-	-	0.00	0.00	- Bukopin
RDI	-	-	-	-	RDI
Kredit Baru (Produktif)	145,321.89	23,188.68	365,000.00	25,763.00	New Credit (Earning)
Jumlah	228,422.89	30,000.00	450,000.00	35,000.00	number

b. Arus Kas

Arus Kas keluar & masuk perusahaan tahun 2011 direncanakan sebagai berikut :

No	URAIAN	PROGNOSA 2010	RKAP 2011	%	DESCRIPTION
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasional	190,321.95	44,200.85	23.22	Cash Flow from Operational Activity
2	Arus Kas dari Aktivitas Investasi	(153,515.61)	26,510.61	(17.27)	Cash Flow from Investment Activity
3	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	(50,222.17)	(58,611.71)	116.70	Cash Flow from Funding Activity
4	Kenaikan (Penurunan) bersih Kas & setara Kas	(13,415.83)	12,099.75	(90.19)	Net Increase (Decrease) on Cash & cash equivalent
5	Kas & Setara kas pada Awal Periode	91,316.08	77,900.25	85.31	Cash and cash equivalent on Initial Period
6	Kas & Setara kas pada Akhir Periode	77,900.25	90,000.00	115.53	Cash and cash equivalent at End of Period

c. Biaya Umum

Biaya tetap perusahaan / biaya administrasi & Umum tahun 2011 direncanakan sbb. :

Finance & Accounting

a. Bank Credit & Interest Charge

The bank credit and interest charge of 2011 to support operation for the company which is planned as follows:

b. Cash Flow

The company cash flow of 2011 is planned as follows:

c. General Costs

Fixed cost of the company/administration and general cost of 2011 is planned as follows:

URAIAN	PROGNOSA 2010	RKAP 2011	%	DESCRIPTION
Biaya Pegawai	21,502.38	23,623.33	109.86 %	Employee costs
Biaya Tak Langsung	12,297.62	11,376.67	92.51 %	Indirect Costs

c. Biaya Investasi

Investasi tahun 2011 dilakukan dengan analisis yang sangat berhati-hati mengingat keterbatasan likuiditas perusahaan. Investasi 2011 akan difokuskan pada rekondisi alat-alat konstruksi yang telah dimiliki dan pembelian alat-alat baru. Sedangkan sumber dana investasi dibatasi berasal dari penyusutan dan leasing.

c. Investment Costs

The investment of 2011 is carried out by a very careful analysis in view of the limited liquidity of the company. The investment of 2011 will be focused on reconditioned construction equipments which have been owned and purchase for the new equipments. Meanwhile, the investment fund sources are limited from depreciation and leasing.

URAIAN	PROGNOSA 2010	RKAP 2011	%	DESCRIPTION
Tanah	-	-	-	Land
Bangunan	18,357.00	4,841.00	26.37	Construction
Peralatan Proyek	6,443.00	20,659.00	-	Project Equipment
Peralatan Kantor	-	4,000.00	-	Others (Overhaul)
Lain-lain (Overhaul)	-	-	-	Other (Overhaul)
Jumlah	24,800.00	29,500.00	118.95	Total Amount

Sumber pembiayaan investasi berasal dari penyusutan dan pinjaman / leasing, sebagai berikut :

Source of investment financing from depreciation and loan leasing as follows:

URAIAN	PROGNOSA 2010	RKAP 2011	%	DESCRIPTION
Penyusutan Peralatan	9,832.29	15,808.75	160.78	Equipment Depreciation
Kredit	-	-	-	credit
Pinjaman / Leasing	14,967.71	13,691.25	91.47	Loans / Leasing
Jumlah	24,800.00	29,500.00	118.95	Total Amount





Soenarno
President Commissioner

Lahir di Purwodadi, 19 Mei 1942. Saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama PT Brantas Abipraya (Persero) sejak Juni 2004. Sebelumnya menjabat sebagai Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah. Lulus menjadi sarjana teknik sipil dari Universitas Gadjah Mada pada 1967 kemudian melanjutkan pendidikan magister teknik sipil di LESS CAR, Amerika Serikat lulus pada 1985. Pendidikan doctor ekonomi diselesaikan pada 1989 di IKIP Malang.

Born in Purwodadi, on May 19, 1942. Currently, he serves as President Commissioner of PT Brantas Abipraya (Persero) since June 2004. Previously, he served as Minister of Resettlement and Regional Infrastructure. Graduated as Bachelor of Civil Engineering from Gajah Mada University in 1967 then continuing his education of magister of civil engineering in LESS CAR, the United States of America in 1985. He completed his economic doctor in 1989 at IKIP Malang.



Ramli Ibrahim
Commissioner

Lahir di Sigli, 23 September 1951. Saat ini menjabat sebagai Komisaris PT Brantas Abipraya (Persero) sejak Juni 2011. Sebelumnya pada 2007-2009 menjabat sebagai Deputy Pengawasan Badan Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh & Nias. Lulus menjadi sarjana ekonomi dari Unsyiah pada 1978. Kemudian melanjutkan pendidikan magister manajemen agribisnis di Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor lulus pada 1997.

Born in Sigli, on September 25, 1951. Currently, he serves as Commissioner of PT Brantas Abipraya (Persero) since June 2011. Previously in 2007-2009, he served as Deputy Supervision of Executive Agency for Rehabilitation and Reconstruction of Aceh and Nias. Graduated as Economic Bachelor from Unsyiah in 1978. He was then continuing his education of Magister of Agribusiness Management at Post-Degree of Bogor Institute of Agriculture and graduated in 1997.

Lahir di Surakarta, 5 November 1954. Saat ini menjabat sebagai Komisaris PT Brantas Abipraya (Persero) sejak 2004. Sebelumnya menjabat sebagai Inspektur Jenderal Inspektorat Jenderal Departemen Pekerjaan Umum. Lulus menjadi sarjana teknik geologi dari Universitas Gadjah Mada pada 1979. Pendidikan master of civil eng Colorado State University, Amerika Serikat lulus pada 1989 dan langsung dilanjutkan untuk program doctor di universitas yang sama lulus pada 1992.

Born in Surakarta, on November 5, 1954. Currently, he serves as Commissioner of PT Brantas Abipraya (Persero) since 2004. Previously, he served as Inspector General of the Ministry of Public Works. Graduated as Bachelor of Geological Engineering from Gajahmada University in 1979. He continued his Education of Master of civil engineering of Colorado State University, the United States of America in 1989 then directly continued a doctor program at the same university and graduated in 1992.



M. Basoeki Hadimoeljono
Commissioner

Lahir di Semarang 6 Januari 1951. Saat ini menjabat sebagai Komisaris PT Brantas Abipraya (Persero) sejak Juni 2011. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Direktur Logistik Deputy Logistik dan Peralatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Lulus menjadi sarjana teknik sipil dari Institut Teknologi Bandung pada 1978. Pendidikan pasca sarjana Land & Water Development IHE Delft, Belanda lulus pada 1982.

Born in Semarang on January 6, 1951. Currently, he serves as Commissioner of PT Brantas Abipraya (Persero) since June 2011. Previously, he ever served as Logistics Director, Deputy Logistics and Equipment at National Agency for Disaster Mitigation (BNPB). Graduated as bachelor of civil engineering from Bandung Institute of Technology in 1978. Education of post-degree for Land and Water Development of IHE-Delft in the Netherlands graduated in 1982.



Adhy Duriat Soemomo
Commissioner



Bambang E. Marsono
President Director

Lahir di Cilacap, 15 September 1953. Saat ini menjabat sebagai Direktur Utama PT Brantas Abipraya (Persero) sejak 20 Juni 2011. Sebelumnya menduduki posisi Direktur Pemasaran PT Waskita Karya (Persero). Lulus menjadi sarjana teknik sipil dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 1979. Kemudian melanjutkan pendidikan magister di Institute Manajemen Prasetya Mulya dan lulus pada tahun 1995. Kini sedang menyelesaikan program doktor di Universitas Negeri Jakarta.

Born in Cilacap on September 15, 1953. Currently, he serves as President Director of PT Brantas Abipraya (Persero) since June 20, 2011. Previously, he served as Marketing Director of PT Waskita Karya (Persero). Graduated as bachelor of civil engineering from Gajah Mada University in 1979. Afterward, he continued his education of magister at Management Institute of Prasetya Mulya and graduated in 1995. Currently, he completes his doctor program at State University of Jakarta.



C. Thomas Pangaribuan
Operational Director I

Lahir di Medan, 23 Februari 1960. Saat ini menjabat sebagai Direktur Operasi I PT Brantas Abipraya (Persero) sejak tahun 2004. Sebelumnya menduduki posisi Direktur Pemasaran PT Brantas Abipraya (Persero). Lulus menjadi sarjana teknik sipil dari ITN Malang. Kemudian melanjutkan pendidikan magister manajemen Universitas Islam Sumatera Utara dan lulus pada tahun 2003.

Born in Medan, February 23, 1960. Currently, he serves as Director of Operations I of PT Brantas Abipraya (Limited) since June 2004. Previously, he occupied as the Marketing Director of PT Brantas Abipraya (Limited). Graduated as bachelor of civil engineer from ITN Malang. Then he continued to study a magister management at the North Sumatra Islamic College duated in 2003.



Ekodjati Tunggulgeni
Operational Director II

Lahir di Jember, 24 Desember 1963. Saat ini menjabat sebagai Direktur Operasi II PT Brantas Abipraya (Persero) sejak Juni 2011. Sebelumnya menduduki posisi Kepala Divisi Produksi I PT Brantas Abipraya (Persero). Lulus menjadi sarjana teknik pengairan dari Universitas Brawijaya pada tahun 1988. Kemudian melanjutkan pendidikan magister teknik di Universitas Tarumanegara dan lulus pada tahun 2006.

Born in Jember on December 24, 1963. Currently, he serves as Operation Director II of PT Brantas Abipraya (Persero) since June 2011. Previously, he served as Head of Production Division I of PT Brantas Abipraya (Persero). Graduated as bachelor of irrigation engineering from Brawijaya University in 1988. Then, he continued education of civil magister at Tarumanegara University and graduated in 2006.



Sukarno Jososaputro
HRD & Finance Director

Lahir di Karanganyar, 22 November 1952. Saat ini menjabat sebagai Direktur Keuangan & SDM PT Brantas Abipraya (Persero) sejak Juni 2004. Sebelumnya menduduki posisi General Manajer Keuangan PT Wijaya Karya (Persero). Lulus menjadi sarjana ekonomi manajemen dari Universitas Satya Negara Indonesia. Kemudian melanjutkan pendidikan Business Administration New Port University School Of Business Administration – California

Born in Karanganyar, 22 November 1952. Currently, he serves as Director of Finance & HR of PT Brantas Abipraya (Limited) since June 2004. Previously he occupied as the General Manager of PT Brantas Abipraya (Limited). He was graduated as bachelor of economic management from the University of Satya Negara Indonesia. Then he continued to study Business Administration New Port University School Of Business Administration - California

Profil Pejabat 1 Tingkat di bawah Direksi

Officers One Level under the Board of Directors

Kantor Pusat

Head Offices

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA
1	Subardjono	Sekretaris Perusahaan	Sekretariat Perusahaan
2	Aman Prayogo	Kepala SPI	Satuan Pengawasan Intern
3	Nurtjahja	General Manager	Departemen Pemasaran
4	Sunarko Ambarmojo	General Manager	Departemen Teknik
5	Sutjipto	General Manager	Departemen Pengembangan
6	Sugeng Rochadi	General Manager	Departemen Produksi
7	Sudiwantoko	General Manager	Departemen Keuangan
8	Prawinto Aji	General Manager	Departemen Sumberdaya Manusia

Kantor Divisi

Division Offices

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA
9	M. Zainul Fatah	Kepala Divisi	Divisi I
10	Syarif	Kepala Divisi	Divisi II
11	Pramono	Kepala Divisi	Divisi III
12	Budi Sumardjono	Kepala Divisi	Divisi Peralatan

Kantor Wilayah

Regional Offices

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA
13	Agus Subiyantoro	Kepala Wilayah	Wilayah I, Medan
14	Nurtjahja	General Manager	Departemen Pemasaran
14	Dandung Pamularno	Kepala Wilayah	Wilayah III, Surabaya
15	Herman Dwi Haryanto	Kepala Wilayah	Wilayah IV, Makassar
16	Yusup Wibisono	Kepala Wilayah	Wilayah V, Samarinda



Kejujuran

- Menyampaikan data/informasi secara transparan, tepat waktu dan benar.
- Tidak menyalahgunakan jabatan, wewenang dan aset Perseroan.
- Menjunjung tinggi etika bisnis yang berlaku umum.
- Obyektif dalam memandang/menilai setiap masalah dan berlaku adil dalam melaksanakan kewajiban dan hak.
- Berani menyampaikan dan menerima pendapat.

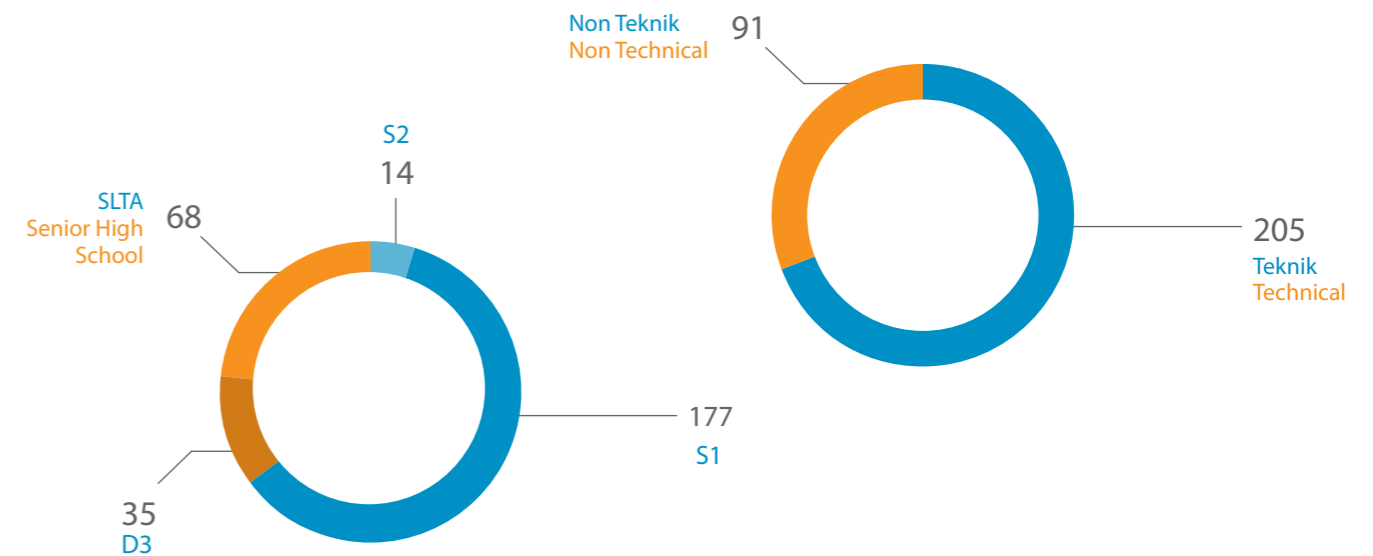
Honest

- Delivering data/information in a transparent, punctual and right manner.
- Not misusing designation, authority and company's asset.
- Highly upholding business ethics.
- Objectively handling each problem and treating fair in exercising obligation and right.
- Dare to convey and accept any opinion.



Sumber daya manusia di PT Brantas Abipraya (Persero) dapat digambarkan dalam berbagai komposisi. Jumlah karyawan hingga akhir 2011 adalah 296 orang, dengan komposisi sebagai berikut :

Human resources of PT Brantas Abipraya (Persero) can be elaborated in various compositions. Total employees up to the end of 2011 are 296 people with the following composition here of:



Komposisi Karyawan Berdasarkan
Jenjang Pendidikan

Employee Composition Based on
Education Background

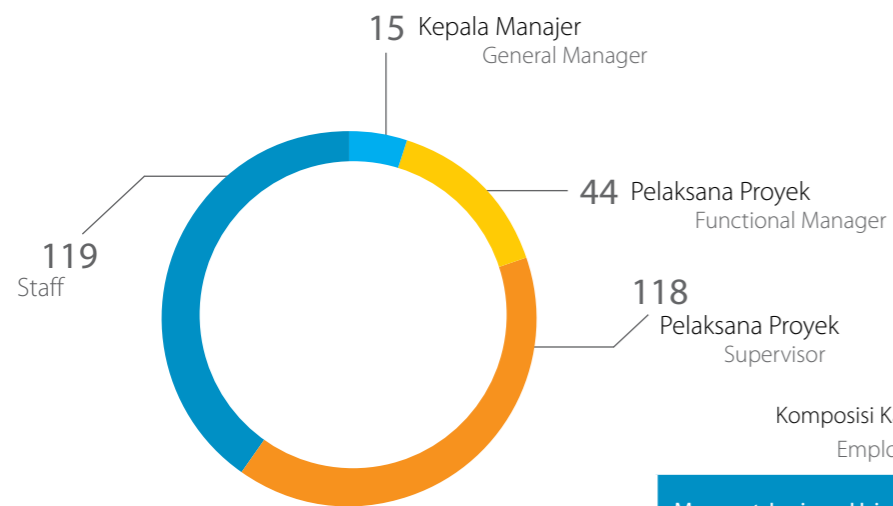
Menurut Kompetensi	Jumlah Total	Based On Competence
S2	14	S2
S1	177	S1
D3	35	D3
SLTA	68	Senior High School
JUMLAH	294	TOTAL

Komposisi Karyawan Berdasarkan Bidang
Employee Composition Based on Field

Menurut Kompetensi	Jumlah Total	Based On Competence
Teknik	205	Technical
Non Teknik	91	Non technical
Jumlah	296	Total

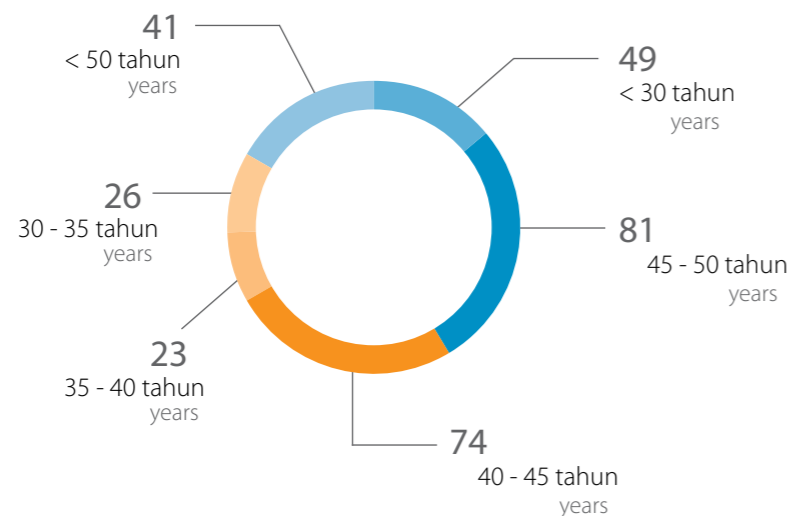
Komposisi Karyawan Berdasarkan Level Organisasi
Employee Composition Based on Organization Level

Menurut Jenjang Manajemen	Jumlah Total	Based On Management Level
General Manager	15	General Manager
Functional Manager	44	Functional Manager
Supervisor	118	Supervisor
Staff	119	Staff
Jumlah	296	Total



Komposisi Karyawan Berdasarkan Kelompok Usia
Employee Composition Based on Age

Menurut Jenjang Usia	Jumlah Total	Based on Age
> 50	41	> 50
45 - 50 tahun	81	45 - 50 years
40 - 45 tahun	74	40 - 45 years
35 - 40 tahun	23	35 - 40 years
30 - 35 tahun	26	30 - 35 years
< 30 tahun	49	< 30 years
Jumlah	294	Total



Pendidikan SDM dilakukan untuk membekali pegawai yang telah diidentifikasi untuk dipromosikan ataupun dirotasi pada pekerjaan baru yang lebih tinggi levelnya di samping untuk terus meningkatkan potensinya. Pelatihan SDM dilakukan untuk meningkatkan kinerja pegawai. Sedangkan Pengembangan dilakukan untuk meningkatkan kompetensi pegawai agar mampu mengemban tugas dan tanggung jawab baru sebagai peningkatan kinerja dan promosi.

The HR education is carried out to support the employees who have been identified to get promoted or oriented on a new higher work level besides continuing to improve their potencies. The HR training is carried out to improve the employees' performance. In the meantime, such development is carried out to improve the employee's competency so that they are capable of performing a new duty and responsibility as an improvement for performance and promotion.

Dengan Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan tersebut, diharapkan pegawai dapat tumbuh dan berkembang untuk menghadapi lingkungan usaha yang kompetitif dan penuh tantangan.

The Education, Training and Development are expected that the employees can be developed to face a competitive business and full challenge.



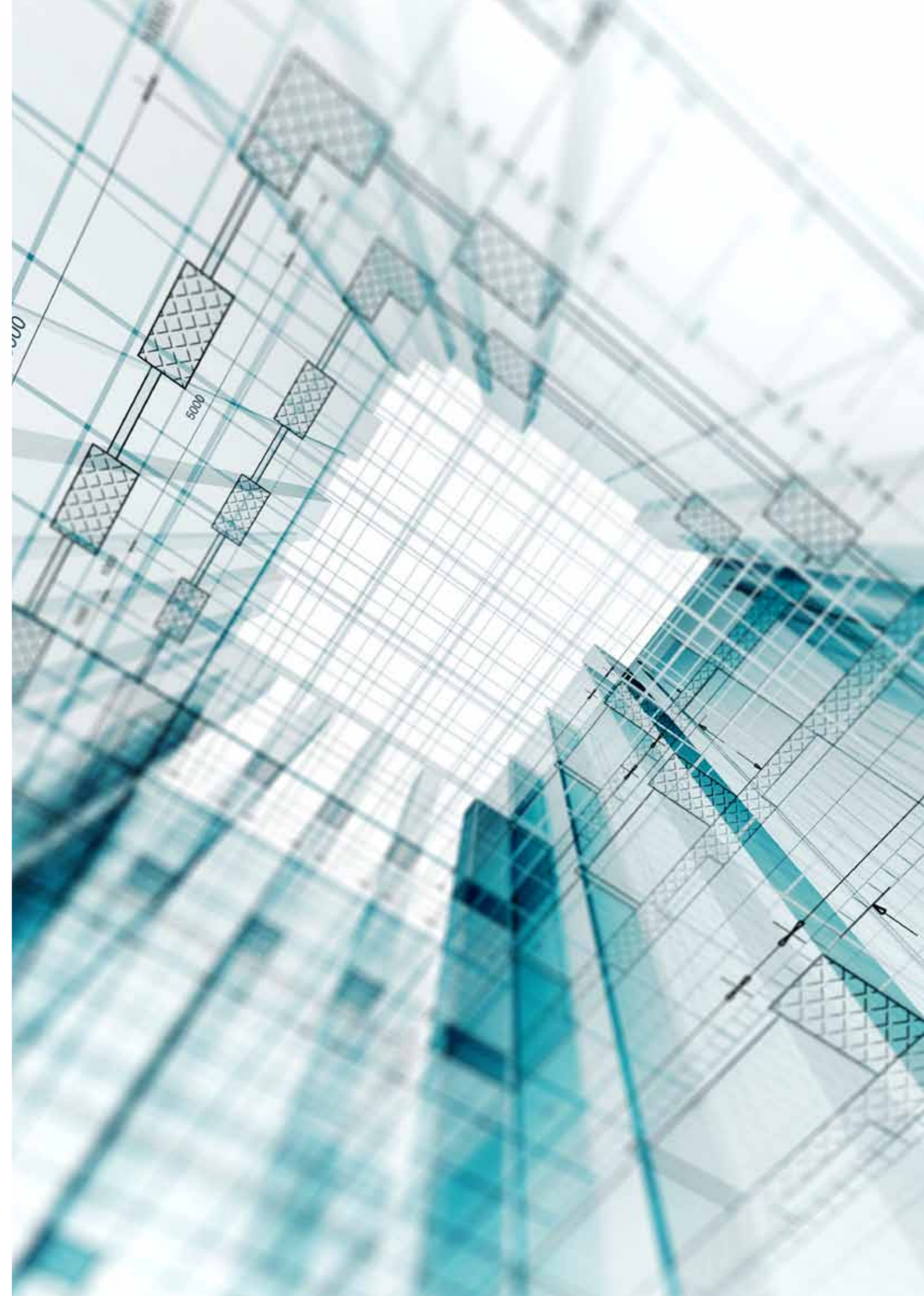


Sumber Daya Manusia, merupakan salah satu aset yang terpenting bagi Perseroan. Oleh karenanya, Perseroan telah menyusun program peningkatan Sumber Daya Manusia, baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya. Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM melalui pengembangan Sistem Informasi Manajemen SDM, pelatihan dan pengembangan pegawai, serta penugasan pegawai dalam pengambilan gelar S2 baik di Dalam Negeri maupun di Luar Negeri.

Dalam sistem remunerasi pegawai, secara konsisten Perseroan melakukan penilaian karya pegawai setiap tahun. Penilaian tersebut digunakan sebagai dasar untuk menentukan grade setiap pegawai secara tepat dan adil, sehingga pegawai merasa termotivasi untuk memberikan yang terbaik bagi Perseroan. Di samping itu, penerapan reward & punishment juga dijalankan, baik terhadap pegawai secara individu maupun kepada kelompok kerja. Bagi yang memberikan kinerja yang luar biasa, diberikan apresiasi dengan kenaikan grade maupun bentuk lainnya, sedangkan bagi yang menyumbang kinerja kurang, juga diberikan sanksi baik melalui penurunan grade maupun bentuk lainnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

The Human Resources constitute one of the important assets for the Company. Hence, the Company has composed an improvement program for the Human Resources in terms of quantity or quality. The quality improvement and HR competency are carried out by developing the Information System on HR Management, training and employee development as well as employee assignment in taking the title of Post-Degree either carried out in the home country or in Overseas.

In the employment remuneration system, the Company consistently conducts an employment assessment every year. Such assessment is used as a basic to determine grade for each employee in a right and fair manner so that the employees are motivated to give their best effort for the Company. In addition thereto, an application for reward and punishment are also performed either towards the employee individually or to the working unit. For those giving a remarkable performance are awarded an appreciation by increasing grade or any other form whatsoever, meanwhile, for those contributing a less performance, they are also imposed a sanction in the form of decreasing grade or any other form whatsoever in accordance with applicable provision.



Komposisi pemegang Saham

Composition of Shareholder

PT Brantas Abipraya (Persero) adalah perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia dan belum mencatatkan sahamnya di pasar modal.

Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan dengan Akta Notaris Nomor 15 tanggal 12 Agustus 2008 yang dibuat di hadapan Notaris Nanda Tjipto Pranowo, SH., pada Pasal 4 menyebutkan sebagai berikut:

1. Modal dasar perseroan berjumlah sebesar Rp 40.000.000.000,- (empat puluh miliar) yang terbagi atas 40.000 (empat puluh ribu) saham, masing-masing bernilai nominal Rp 1.000.000,-
2. Dari modal tersebut telah ditempatkan/diambil bagian dan telah disetor penuh oleh Negara Republik Indonesia sebanyak 10.000 saham atau seluruhnya sebesar Rp 10.000.000.000,-
3. 100% dari nominal setiap saham yang telah ditempatkan tersebut diatas atau seluruhnya berjumlah Rp 40.000.000.000,- telah disetor penuh oleh Negara Republik Indonesia ke dalam kas perseroan, dengan cara sebagai berikut:
 - Sebesar Rp 10.000.000.000,- telah ditempatkan dan disetor dengan uang tunai sebagai setoran modal lama
 - Modal dalam portepel Rp 30.000.000.000
4. Penyertaan Modal Pemerintah
Penyertaan modal Negara sebesar Rp 151,554,480,000 berupa tanah Kementerian Pekerjaan Umum seluas 24.464 m² yang terletak di Jl. Yos Sudarso Jakarta Utara sesuai dengan surat Kepala Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian Pekerjaan Umum No.TN.01.11.Ka.PBMN/751 tanggal 4 Maret 2010 perihal Penyertaan Modal Negara atas Tanah Kementerian Pekerjaan Umum kepada PT Brantas Abipraya (Persero).

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2010 tanggal 24 Agustus 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT Brantas Abipraya (Persero), per 31 Desember 2011 nilai sebesar Rp 151,554,480,000 telah dimasukkan sebagai Penyertaan Modal Negara.

PT Brantas Abipraya (Persero) is the company whose shares are owned by the Government of the Republic of Indonesia and its share has not been registered in the capital market. Amendment to the Company's Articles of Association under Notarial Deed Number 15 dated August 12, 2008 drawn up before Notary Nanda Tjipto Pranowo, SH, whereby in Article 4 states as follows;

1. Authorized capital of the company totaling Rp 40,000,000,000,- (forty billion) divided into 40,000 (forty thousand) shares, each at the face value Rp 1,000,000,-
2. Of the said capital has been subscribed/taken up its division and fully paid up by the State of the Republic of Indonesia worth Rp 10,000 shares or entirely Rp 10,000,000,000,-
3. 100% of the face value of each share has been subscribed abovementioned or entirely Rp 40,000,000,000,- has been fully paid up by the State of the Republic of Indonesia
 - Rp 10,000,000,000,- has been subscribed and paid up by cash as a payment for previous capital.
 - Capital in the portfolio Rp 30,000,000,000,-
4. State equity participation amounting to Rp 151,554,480,000 Ministry of Public Works as land measuring 24,464 m², located on Jl. ODOT North Jakarta in accordance with the letter of the Head of State Property Management of the Ministry of Public Works No.TN.01.11.Ka.PBMN/751 dated March 4, 2010 concerning the Investment of the Ministry of Public Works Land PT Brantas Abipraya (Limited).

In accordance with the Regulation of the Government of the Republic of Indonesia Number 63 Year 2010 dated August 24, 2010 The addition of the Investment of the Republic of Indonesia to the Company's Capital Stock (Persero) PT Brantas Abipraya, per December 31, 2011 amounting to Rp 151,554,480,000 was entered as the State Capital.





Nama Name

PT. Brantas Energi

Bidang Usaha Business Fields

Investasi Hydroelectric Power Plant

Status Perusahaan Company Status

Swasta

Pemilik Owner

99 % dimiliki oleh PT Brantas Abipraya (Persero)

1 % Koperasi Karyawan

Tanggal Pendirian Date of Incorporation

12 Desember 2011

Dasar Hukum Pendirian Legal Bases of Incorporation

Akta No 6 Tahun 2011 Suparmin, SH, M. Kes

Susunan Perseroan Office Board

Komisaris Utama : Suyono
Sukarno Joso Saputro
Direktur Utama : Subjipto
Direktur Keuangan : Drs. Suliyantoro

Kantor Pusat Head Office

Jl. D.I. Panjaitan Kav. 14, Cawang,
Jakarta Timur 13340
Telp : (021) 851 6290
Fax : (021) 851 6095
Email : bap@brantas-abipraya.com
www.brantas-abipraya.co.id



Sertifikat Assurance No. JKT 0402635
Masa berlaku Sertifikat s/d 31 July 2011

Assurance Certificate No. JKT 0402635
Valid up to July 31, 2011

Sertifikat No. OSH 00385 dari Sucofindo
Masa berlaku Sertifikat s/d 08 Desember 2011

Certificate No. OSH 00385 from Sucofindo
Valid up to December 8, 2011



No. Registrasi EMS 00100 dari Sucofindo
Masa berlaku Sertifikat 29 Maret 2010 s/d 28 Maret 2013

Registration No. EMS 00100 from Sucofindo
Valid from March 29, 2010 to March 29, 2013



No. Registrasi CSI.K3.SE.0002/2009
dari Menteri Tenaga dan Transmigrasi Republik Indonesia

Registration No. CSI.K3.SE.0002/2009
From the Minister of Manpower and Transmigration of
the Republic of Indonesia



Regional and Branch Offices:

Main Office

Jl. D.I. Panjaitan Kav - 14
Cawang, Jakarta Timur 13340
Phone : (021) 851 6290
Fax : (021) 851 6095
Website : www.brantas-abipraya.com

Medan

Jl. Kasuari No. 8 Medan 20122
Phone : (061) 845 4391-2
Fax : (061) 845 4393

Jakarta

Jl. D.I Panjaitan Kav -14
Cawang, Jakarta 13340
Phone : (021) 857 6633
Fax : (021) 851 6095

Riau and Sumatra Barat

Jl. Nuri 21 Sukajadi
Pekanbaru-Riau
Phone : (0761) 205 97
Fax : (0761) 205 97

Semarang

Perum Perwira Diponegoro VIII No. 90
Banyumanik - Semarang
Phone : (024) 746 6304
Fax : (024) 746 6304

Palembang

Jl. Dwikora II / Jl. Pertiwi
No. 1274 B Rt. 10 Palembang
Phone : (0711) 369 928
Fax : (0711) 369 928

Banjarmasin

Perumahan Citra Raya Angkasa Blok D
No. 9 Landasan Ulin, Banjar Baru 70724
Phone : (0511) 705 865
Fax : (0511) 705 865

Samarinda

Jl. Kebahagiaan No. 23 Samarinda
Phone : (0541) 736 162
Fax : (0541) 736 162

Makassar

Jl. Boulevard Blok A-3 No. 1
Panakkukang Mas, Makassar 90114
Phone : (0411) 454 490
Fax : (0411) 441 840

Surabaya

Jl. Jemur Sari Utara II No. 32
Surabaya 60237
Phone : (031) 841 2335
Fax : (031) 841 2335

Bali

Jl. Turi No.8 Kesiman, Denpasar Timur
Phone : (0361) 228 501
Fax : (0361) 228 501



LIVING ROOM

DINING ROOM

DEPOSIT

LAUNDRY ROOM

KITCHEN

HOUSEKEEPING ROOM

FAMILY ROOM

Quick Response and Quality Assurance

Analisa dan Pembahasan Manajemen
Management Discussion and Analysis

Kreatif

- Menjadi insan pembelajar yang mandiri serta aktif menyumbangkan pikiran untuk kemajuan Perseroan.
- Proaktif mengidentifikasi potensi dan mencegah timbulnya masalah serta mampu menemukan solusi yang efektif dan efisien.
- Mampu meningkatkan kualitas produk dan layanan melalui pengembangan teknologi dan metode konstruksi yang unggul.

Creative

- Being an independent self-learning human with enthusiasm to contribute to the corporate progress.
- Proactive in identifying potential while preventing problems from arising and able to find effective and efficient solution
- Able to improve product and service quality through construction technology and methodology excellently



Tinjauan Industri Industry Overview

Setelah krisis keuangan global yang melanda dunia menjelang akhir tahun 2008, tren pertumbuhan ekonomi dunia mulai merambat naik sepanjang tahun 2009. Meskipun beberapa negara seperti Amerika Serikat dan Eropa belum menunjukkan pemulihan ekonomi yang bermakna, beberapa negara seperti China dan India serta negara - negara kawasan ASEAN telah memperlihatkan pertumbuhan yang mulai membaik.

Gambaran ekonomi berbagai kawasan di dunia pada tahun 2011 menunjukkan indikasi perlambatan ekonomi global. Krisis utang yang membelit perekonomian di kawasan Eropa dan permasalahan fiskal yang dihadapi Amerika Serikat menjadi faktor penyebab tertahannya ekspansi ekonomi global dan menimbulkan gejala di pasar keuangan global. Kuatnya indikasi perlambatan ekonomi global mendorong proses lambatnya tekanan inflasi. Seiring dengan meningkatnya risiko perlambatan ekonomi global, laju pengetatan kebijakan moneter di negara berkembang mulai tertahan, sementara kebijakan moneter di negara maju masih cenderung akomodatif untuk menopang aktivitas perekonomian.

Meskipun demikian kondisi ekonomi negara Asia secara umum tetap menunjukkan hasil positif meskipun ada sedikit perlambatan. Perlambatan terjadi pada negara - negara Asia dengan penggerak ekonomi didominasi oleh ekspor, khususnya ke negara - negara maju seperti Eropa dan Amerika Serikat. Potensi krisis yang lebih besar dari pasar keuangan global juga sempat membuat khawatir investor di Indonesia, baik dalam pasar modal maupun pasar uang.

Akan tetapi dengan besarnya ekonomi domestik dan rasio utang terhadap pendapatan domestik bruto yang rendah, Indonesia relatif paling sedikit terkena dampak apabila terjadi krisis ekonomi global. Dengan dukungan stabilitas makro dan sistem keuangan yang terjaga, kinerja perekonomian Indonesia selama tahun 2011 masih cukup baik. Pertumbuhan ekonomi di Triwulan IV - 2011 tumbuh sebesar 6,5% dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika

After the global monetary crisis near the closing of 2008, the world's trend of economic growth started to bounce back during 2009. Nonetheless, such top achievers as the US and Europe have not yet shown any significant rebounds, other powers like China and India, followed with southeastern neighbors have actually waved a good sign of growth.

Economic overview in many parts of the world in 2011 showed an indication of global economic slowdown. The debt crisis that struck European economy and the fiscal faced by the United States impeded the global economic expansion and caused turmoil in the global financial markets. Strong evidence of slowdown affected a slow process of inflation pressure. In line with the increased risk of a global economic slowdown, the pace of monetary tightening in developing countries began to hold back, while monetary policy in advanced economies tended to remain accommodative to support economic activity.

Nonetheless, economic conditions in general, Asian countries continued to show positivity in the face of slight slowdown. The slowdown occurred in Asian countries whose economic locomotives were dominated by exports, especially to the developed countries like Europe and the United States. The potential for an even greater crisis than the global financial markets had also alarmed investors in Indonesia, both in the capital and money markets.

However, given the vast domestic economy and low ratio of debt against gross domestic product, Indonesia is relatively the least affected in any event of global economic crisis. Given the support of macro stability and a maintained financial system, Indonesia's economic performance during 2011 remained outstanding. Economic growth in the fourth Quarter - 2011 rose by 6.5% and the exchange rate against the US dollar was strengthened. Given the Indonesia's

Serikat cenderung menguat. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia, industri konstruksi juga mencatat kinerja yang cukup menggembirakan di tahun 2011, dalam semester pertama sektor konstruksi menorehkan kinerja yang baik, ditandai dgn kenaikan pendapatan sebesar 37,45 % dari Rp 512,10 miliar di tahun 2010 menjadi Rp 703,80 miliar di tahun 2011.

Pertumbuhan paling spektakuler terjadi pada proyek jalan/jembatan, pendapatannya melompat hingga 455,80 % untuk kontrak lama dan 567,55 % untuk kontrak baru. Lompatan yang sangat menggembirakan setelah mengalami penurunan di tahun 2010.

Proyek pengairan membukukan kenaikan 20,61 % di kontrak lama dan 14,92 % di kontrak baru, sementara kelistrikan mencatatkan kenaikan 3,17 % di kontrak lama. Pendapatan proyek - proyek kerjasama operasi KSO atau Joint Operasi tahun 2011 naik 37,05 % dibanding tahun 2010. Berdasarkan total pendapatan, kontribusi terbesar berasal dari proyek pengairan yang mencapai 67,39 % dari total pendapatan di luar proyek Joint Operation atau mencapai Rp 474,31 miliar. Sedangkan dari total pendapatan (termasuk JO) mencapai 41,89 %.

Kenaikan pendapatan tsb menunjukkan masih luasnya pangsa pasar konstruksi yang memungkinkan perkembangan yang berkesinambungan dari tahun ke tahun. Diharapkan pertumbuhan konstruksi bisa menjadi penggerak perekonomian Indonesia. Pertumbuhan rata-rata industri konstruksi di Indonesia sebesar %, trend positif tersebut bisa dikatakan cukup memacu pergerakan ekonomi Indonesia.

economic growth, the construction industry also stroke promising performance in 2011, in the first half of the construction sector recorded a well performance, marked with 37.45% revenue increase from Rp 512.10 billion in 2010 to Rp 703.80 billion in 2011.

The most impressive growth occurred to roads/bridges projects, whose revenue bounced by 455.80% for old contract and to 567.55% for the new contract, an enormous rebound after a decline in 2010.

Irrigation projects hit a 20.61% rise in the old contract, and 14.92% in the new contract, while electricity recorded a 3.17% increase in the old contract. The Joint Operation projects' revenues in 2011 increased by 37.05% compared to that in 2010. Referring to the total revenues, the largest contribution was from the irrigation project, reaching 67.39% of the total project revenues other than the Joint Operations or Rp 474.31 billion. In the meantime, the total revenue (including JO) reached 41.89%.

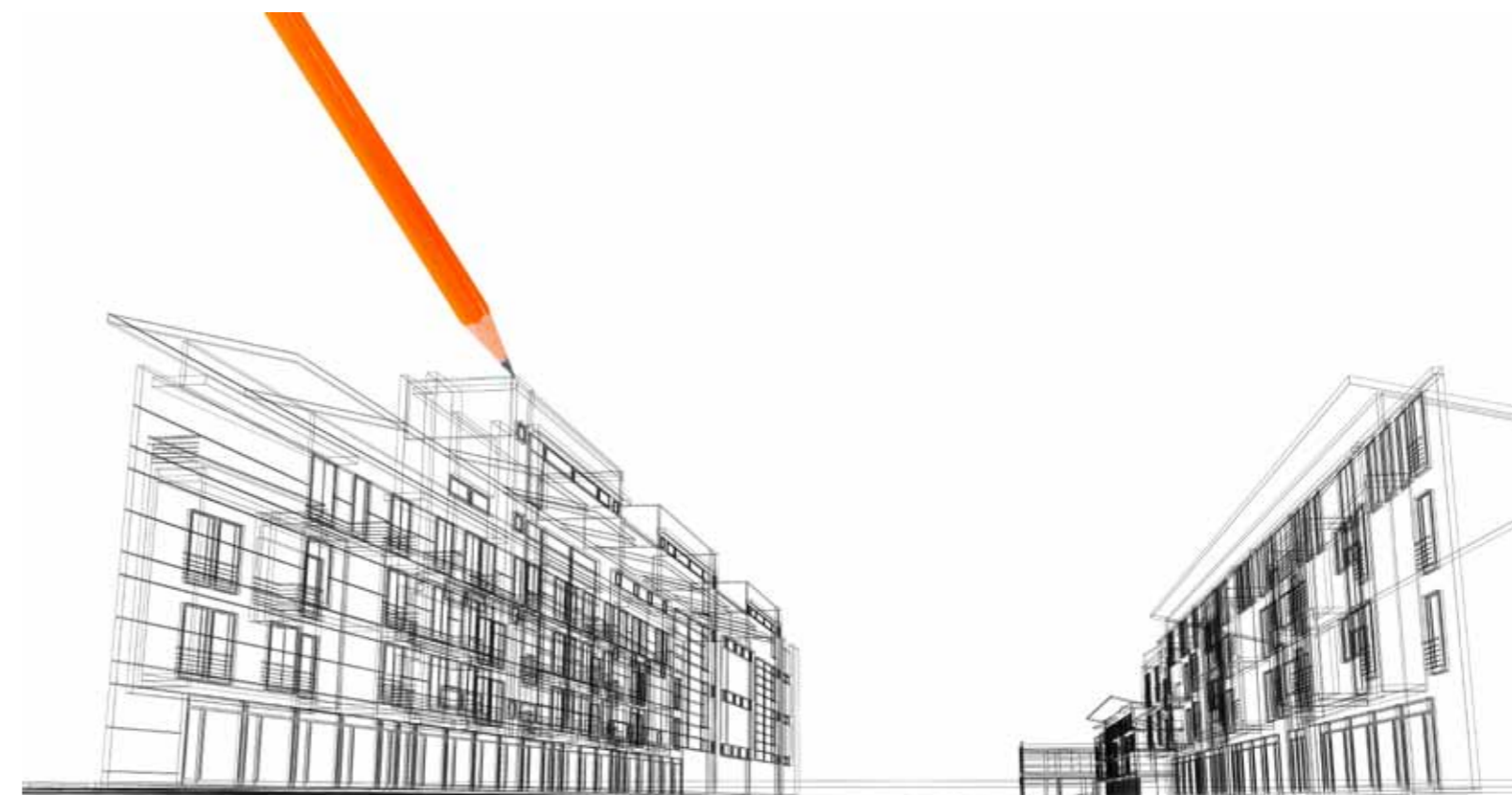
Such revenue increase shows how huge the construction market is to enable a sustainable development year by year. It is hoped that the construction growth may inspire the Indonesian economy as a whole. The average growth of construction industry in Indonesia is ...%, which can be said to be sufficient to boost Indonesian economy.

Seiring dengan pertumbuhan industri konstruksi di Indonesia, perolehan kontrak baru Brantas juga mengalami peningkatan yang cukup tajam di tahun 2011 yaitu sebesar Rp 1.605,12 miliar meningkat 123,59 % dibanding tahun 2010 sebesar Rp 717,84 miliar. Pendapatan (Produksi) di luar proyek JO juga meningkat 37,45 % dari Rp 512,10 miliar tahun 2010 menjadi Rp 703,88 miliar di tahun 2011. Sedangkan pendapatan (produksi) termasuk proyek JO meningkat 37,30 % dari Rp 824,72 miliar di tahun 2010 menjadi Rp 1.132,33 miliar di tahun 2011. Peningkatan pendapatan tersebut membawa dampak positif bagi pencapaian laba sebelum pajak di tahun 2011 sebesar Rp 26,01 miliar meningkat cukup signifikan yaitu 53,12 % dibanding tahun 2010 sebesar Rp 16,99 miliar.

Berdasarkan neraca dan laba rugi tahun 2011, tingkat kesehatan perusahaan sesuai dengan ketentuan Menteri Badan Usaha Milik Negara yang dinyatakan dalam Surat Keputusan No KEP-100/MBU/2002 tanggal 04 Juni 2002 berada dalam kondisi Sehat (AA) dengan nilai bobot 94,25. Kondisi tersebut sama dengan tahun 2010 yaitu kondisi sehat (AA) dengan bobot 85,75.

Given the growing construction industry in Indonesia, the acquisition of Brantas' new contracts also occurred to significantly increase in 2011 hitting USD 1,605.12 billion; a 123.59% increase compared to the year 2010 at Rp 717.84 billion. The revenue (Production) outside JO projects also increased by 37.45%, from Rp 512.10 billion in 2010 to Rp 703.88 billion in 2011. Meanwhile, including JO projects increased by 37.30% from Rp 824.72 billion in 2010 to Rp1,132.33 billion in 2011. These revenue increases gave a positive impact on the achievement of pre-tax profit in 2011 amounted to Rp 26.01 billion, which is a significant increase by 53.12% as compared to the year 2010 at Rp 16.99 billion.

Based on the 2011 balance sheet and profit-loss data, the company with reference to the provisions set forth by the State Minister of State-Owned Enterprises through a Decree No. KEP-100/MBU/2002 dated June 4, 2002 found to be in sound condition (AA) reaching a weight of 94.25. This is comparable to that in 2010 that also found to be in sound condition (AA) reaching a weight of 85.75.



Pemasaran

Marketing

Realisasi & RKAP Pemasaran Tahun 2011 & 2010

Realization & RKAP for Marketing in 2011 & 2010

No	Uraian	RKAP Tahun 2011	Realisasi Tahun 2011	Realisasi Tahun 2010	Persentase		Description
					% Di atas (di bawah)	% Naik (Turun) Realisasi Tahun 2010	
1	Lelang yang diikuti	14.060.000	7.072.782	7.223.238	(49,70)	(2,08)	Tender followed
2	Lelang yang diumumkan	11.800.000	6.989.662	6.422.931	(40,77)	8,82	Tender announced
3	Lelang yang dimenangkan	1.282.000	1.280.455	717.873	(29,95)	78,37	Tender award
4	% Lelang yang dimenangkan	15,49 %	18,32 %	11,18 %	18,25	63,91	Tender award
5	Tanpa Lelang	2.260.000	324.664	93.146	(85,63)	248,55	Without Tender
6	Perolehan Proyek Baru	1.828.000	1.605.119	717.873	(12,19)	123,59	New Projects Acquired

Realisasi perolehan Kontrak Baru tahun 2011 sebesar Rp. 1.605.119 juta atau hanya mencapai 87,81% dari RKAP sebesar Rp. 1.828.000 juta, dan naik dari realisasi tahun 2010 yang sebesar Rp. 887.246 juta atau 123,59 %.

Acquisition of New Contract in 2011 was realized at Rp. 1,605,119 million or reached 87.81% of RKAP totaling Rp. 1,828,000 million, and bounced from that in 2010 of Rp. 887,246 million or by 123.59%.

Realisasi Lelang Yang Dimenangkan tahun 2011 sebesar Rp. 1.280.455 juta atau hanya mencapai 70,05 % dari RKAP sebesar Rp. 1.828.000 juta, dan naik sebesar Rp 562.582 juta atau 78,37 % dari realisasi tahun 2010 yang sebesar Rp 717.873 juta.

Tender award in 2011 was realized at Rp. 1,280,455 million or reached 70.05% of RKAP totaling Rp. 1,828,000 million, also an increase by Rp 562,582 million or 78.37% of that in 2010 of Rp 717,873 million.

Realisasi kegiatan kualifikasi dalam tahun 2011 lebih kecil dari target RKAP dikarenakan bergesernya jadwal pelaksanaan kualifikasi beberapa proyek ke tahun berikutnya. Adapun ketidaklulusan kualifikasi disebabkan adanya beberapa persyaratan administrasi belum dapat dipenuhi, antara lain syarat kemampuan keuangan dan pengalaman kerja Realisasi tender yang lebih kecil dibanding rencananya dikarenakan mundurnya jadwal pelaksanaan tender beberapa proyek ke tahun berikutnya. Realisasi yang tercapai lebih rendah dari RKAP juga dikarenakan ketatnya tender dalam tahun 2011, akibat terbatasnya proyek.

The realized qualification activities in 2011 were lower than the targets due to the schedule shift of RKAP qualification to a number of projects in the subsequent year. Failure to qualify in this connection was caused by unsatisfactory administrative requirements, including the financial ability and actual tender experience which were lesser than what was planned due to the delayed schedule of several projects implementation to the next year. Lower realization than the RKAP was also due to tight tender in 2011, due to limited projects.

Produksi

Production

Realisasi & RKAP Produksi Tahun 2011 & 2010

Realization & RKAP for Production in 2011 & 2010

Dalam jutaan rupiah

in million rupiah

No	Uraian	RKAP Tahun 2011	Realisasi Tahun 2011	Realisasi Tahun 2010	Persentase		Description
					% Di atas (di bawah)	% Naik (Turun) Realisasi Tahun 2010	
A	Kontrak Lama						
1	Pengairan	505.344	272.270	225.741	(46,12)	20,61	Irrigation
2	Jalan / Jembatan	195.000	102.546	18.450	(47,41)	455,80	Road/Bridge
3	Gedung / Bangunan	-	-	-	-	-	Building/ Construction
4	Kelistrikan	113.810	41.741	40.458	(63,32)	3,17	Electricity
5	Prasarana Perhubungan	-	-	-	-	-	Transportation Infrastructure
6	Jasa Lainny	-	-	-	-	-	Other Services
	Sub Total	814.154	416.556	284.649	(48,84)	46,34	Sub Total
B	Kontrak Baru						
1	Pengairan	225.096	202.040	175.813	(10,24)	14,92	Irrigation
2	Jalan / Jembatan	155.194	81.748	12.246	(47,33)	567,55	Road/Bridge
3	Gedung / Bangunan	-	3.533	-	-	-	Building/ Construction
4	Kelistrikan	-	-	-	-	-	Electricity
5	Lain - Lain	5.556	-	21.598	(100,00)	(100,00)	Transportation Infrastructure
6	Jasa Lainnya	-	-	17.795	-	(100,00)	Other Services
	Sub Total	385.846	287.321	227.452	(25,53)	26,32	
	Total (Tanpa Proyek JO)	1.200.000	703.877	512.101	(41,34)	37,45	Total (Excl. JO Projects)
	Produksi Proyek JO	350.000	428.451	312.621	22,41	37,05	JO Project Production
Total		1.550.000	1.132.328	824.722	(26,95)	37,30	TOTAL

Realisasi Produksi tahun 2011 sebesar Rp 703.877 juta atau hanya mencapai 58,66 % dari RKAP tahun 2011 yang sebesar Rp 1.200.000 juta, dan naik dari realisasi tahun 2010 sebesar Rp 191.776 juta atau 37,45 %, diluar realisasi produksi proyek-proyek kerja sama operasi (Joint Operation / JO) sebesar Rp 428.451 juta. Sehingga total realisasi produksi tahun 2011 termasuk proyek-proyek JO sebesar Rp 1.132.328 juta, dibawah RKAP tahun 2011 sebesar Rp 1.550.000 atau hanya mencapai 73,05% dari RKAP tahun 2011.

The production in 2011 was realized at Rp 703,877 million, or reached 58.66% of 2011 RKAP totaling Rp 1,200,000 million, and bounced from that in 2010 of Rp 191,776 million, or by 37.45% excluding the realized production of Joint Operation projects worth Rp 428,451 million. Hence, the total actual production in 2011 including JO projects was Rp 1,132,328 million, lower than 2011 RKAP worth Rp 1.55 million or reached only 73.05% of 2011 RKAP.

Tidak tercapainya Produksi / Pendapatan disebabkan :
Kontrak baru tahun 2011 diperoleh pada triwulan keempat 2011 sehingga kesempatan untuk memproduksi sangat sempit. Musim penghujan tahun 2011 praktis terjadi sepanjang tahun dengan intensitas curah hujan yang sangat tinggi sehingga sangat mengganggu kecepatan produksi dan mengakibatkan juga naiknya biaya produksi.

Pembebasan lahan di beberapa proyek besar belum berhasil diselesaikan, sehingga pekerjaan tidak / belum bisa dilaksanakan, misalnya Jalan masuk ke PLTA Cisokan, Bendungan Bintang Bano, dan lain – lain.

Non-achievement of Production/Revenue is due to:

The new contract in 2011 was acquired only in the fourth quarter that there was extremely narrow opportunity left to produce. The rainy season in 2011 practically occurred throughout the year with such a high rate of rainfall that obstructed the production and resulted in higher costs.

Land acquisition in a number of major projects has remained unsolved that no activities can be carried out, such as the access to Cisokan Hydropower, Bintang Bano Dam, for example, and others.

Tidak tercapainya target penjualan tersebut disebabkan oleh:

- Terlambatnya perolehan kontrak – kontrak baru tahun 2011
- Kondisi cuaca / hujan yang ekstrem
- Beberapa lokasi proyek tidak bisa dikerjakan karena pembebasan lahan belum selesai
- Adanya perubahan design proyek yang sangat mendasar, sehingga proyek tersebut belum dapat dikerjakan

Non-achievement of such sales target is due to:

- Delayed new contract acquisition for 2011
- Extreme condition/rainy weather
- Some of project locations cannot be accessed for land acquisition issues
- Material change of project design that no activities can be done

Hasil Usaha

Returns

Realisasi & RKAP Laba / Rugi Tahun 2011 & 2010

Realization & RKAP for Profit/Loss in 2011 & 2010

No	Uraian	RKAP Tahun 2011	Realisasi Tahun 2011	Realisasi Tahun 2010	Persentase		Description
					% Di atas (di bawah)	% Naik (Turun) Realisasi Tahun 2010	
1	Pendapatan Usaha	1.200.000	703.877	512.101	(41,34)	37,45	Profit
2	Beban Langsung	1.056.000	622.655	439.101	(41,04)	41,80	Direct Cost
3	Laba Kotor Usaha	144.000	81.222	73.000	(43,60)	11,26	Gross Profit
4	Bagian Laba JO	21.000	27.809	20.528	32,43	35,47	JO Profit Share
5	Laba Kotor Usaha setelah JO	165.000	109.031	93.528	32,43	35,47	Gross Profit after JO
6	Beban Usaha	32.000	43.540	38.178	24,40	14,04	Business Cost
7	Laba Usaha	130.000	65.492	55.350	(49,62)	18,32	Business Profit
8	Pendapatan (Biaya) Lain-lain	(15.000)	13.261	1.733	(188,41)	665,21	Other Revenue (Cost)
9	Laba (rugi) sebelum beban bunga dan PPh	115.000	78.753	57.083	(31,52)	37,96	Profit (loss) before tax and interest
10	Beban Bunga	35.000	38.745	30.743	10,70	26,03	Interest
11	Laba Sebelum PPh	80.000	40.007	26.340	(49,99)	51,89	Profit before tax
12	Beban Pajak	28.800	13.995	9.351	(51,41)	49,66	Tax
13	Laba (Rugi) Bersih	51.200	26.013	16.989	(49,19)	53,12	Net Profit (Loss)

Realisasi laba bersih tahun 2011 perusahaan sebesar Rp 26.013 juta berada dibawah RKAP tahun 2011 sebesar Rp 51.200 juta atau hanya mencapai 50,81% dan naik dari realisasi laba bersih tahun 2010 sebesar Rp 9.024 juta atau naik sebesar 53,12 %.

The net revenue in 2011 was realized at Rp 26,013 million or lower than 2011 RKAP totaling Rp 51,200 million, or only reached 50.81% and bounced from that in 2010 of Rp 9,024 million, which means an increase by 53.12%.

Posisi Keuangan Konsolidasi

Consolidated Financial Position

Realisasi & RKAP Posisi Keuangan Tahun 2011 & 2010

Realization & RKAP Financial Position Year 2011 & 2010

No	Uraian	RKAP Tahun 2011	Realisasi Tahun 2011	Realisasi Tahun 2010	Persentase		Description
					% Di atas (di bawah)	% Naik (Turun) Realisasi Tahun 2010	
1	Aset Lancar	526.907	386.407	403.575	(26,66)	(4,25)	Current Asset
2	Aset Tidak Lancar	102.156	253.708	243.698	148,35	4,11	Non-Current Asset
3	Jumlah Aset	629.063	640.116	647.273	1,76	(1,11)	Asset Amount
4	Liabilitas Lancar	184.726	272.929	329.916	47,75	(17,27)	Current Liability
5	Liabilitas Tidak Lancar	258.000	205.690	181.873	(20,28)	13,10	Non-Current Liability
6	Jumlah Liabilitas	442.726	478.679	511.789	8,11	(6,48)	Liability Amount
7	Jumlah Ekuitas	186.337	161.497	135.484	(13,33)	19,20	Equity Amount
8	Jumlah Liabilitas & Ekuitas	629.063	640.116	647.273	1,76	(1,11)	Liability & Equity Amounts

Realisasi Jumlah aset tahun 2011 sebesar Rp 640,116 juta berada diatas RKAP tahun 2011 sebesar Rp 629,063 juta atau naik sebesar 1.76% dari RKAP tahun 2011, dan turun dari realisasi tahun 2010 sebesar (Rp 647,273 juta) atau turun sebesar (1.10%) dari realisasi tahun 2010. Realisasi total aset diatas target RKAP, hal ini disebabkan penambahan modal dari PMN yang realisasi 2011 sebesar Rp. 151,99 milyar dan entitas penyertaan anak perusahaan sebesar Rp 51,49 milyar serta tingginya piutang usaha atas proyek – proyek loan yang belum dapat cair pada akhir tahun.

The total asset in 2011 was realized at Rp. 640,116 million or higher than the 2011 RKAP totaling Rp 629,063 million or an increase of 1.76% from 2011 RKAP, but a decrease to that in 2010 of (Rp647,273 million), or a drop by (1.10%) of the 2010 realization. Such higher rate of total assets realization than the RKAP was due to the capital addition from PMN whose 2011 realization was Rp. 151.99 billion and investments entities in subsidiary amounted to Rp 51.49 billion plus high account receivables of the loan project for which no disbursement can be made at the end of the year.

Investasi

Realisasi & RKAP Investasi 2011 & 2010

No	Uraian	RKAP Tahun 2011	Realisasi Tahun 2011	Realisasi Tahun 2010	Persentase		Description
					% Di atas (di bawah)	% Naik (Turun) Realisasi Tahun 2010	
1	Tanah	-	-	-	-	-	Land
2	Bangunan / Gedung	13.450	15.055	18.357	11,93	(17,99)	Building/ Construction
3	Peralatan Proyek	16.050	7.374	6.423	(54,06)	14,81	Project Equipment
4	Kendaraan Operasional	-	-	-	-	-	Operational Vehicle
5	Peralatan Kantor	-	-	18	-	(100,00)	Office Equipment
6	Lain-lain (Overhaul)	-	-	-	-	-	Others (Overhaul)
7	Penyertaan Anak Perusahaan	-	51.480	-	-	-	Subsidiary Share
TOTAL		29.500	73.909	24.861	150,54	197,29	TOTAL

Realisasi Investasi tahun 2011 sebesar Rp 73.909 juta di atas RKAP tahun 2011 sebesar Rp 29.500 juta atau 150,54 % dan naik sebesar Rp 49.048 juta atau 197,29 % dari realisasi tahun 2010.

Sumber dana untuk investasi tersebut diambil dari akumulasi penyusutan dan leasing. Kenaikan investasi di atas RKAP dikarenakan adanya penyertaan pada anak perusahaan yang dilakukan pada Desember 2011.

The investment in 2011 was realized at Rp73,909 million or higher than 2011 RKAP totaling Rp 29,500 million or 150.54% and an increase of Rp 49,048 million or 197.29% from that in 2010.

The funds for the investment were sourced from accumulated depreciation and leasing. Increase in investments which was higher than RKAP was due to the investments in subsidiaries performed in December 2011.

Uraian Kinerja Keuangan

Description of Financial Performance

Kinerja keuangan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) nomor: KEP-100/MBU/2002 tanggal 04 Juni 2002 PT. BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO) untuk tahun 2011 dengan skor 94,25 dikategorikan Sehat (AA).

Financial performance based on Minister Decree of State-Owned Enterprises (SOE) number: KEP-100/MBU/2002 dated June 4, 2002 PT. BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO) for the year 2011 gaining a score of 94.25, which was categorized as Fit (AA).

Realisasi & RKAP Kinerja Keuangan tahun 2011 & 2010

Realization & RKAP for Financial Performance in 2011 & 2010

Kategori Kinerja	Bobot	Realisasi 2011	RKAP 2011	Realisasi 2010	Performance Category
Aspek Keuangan	70	64,25	66,75	56,75	Financial Aspect
Aspek Operasional	15	15	14	14,00	Operational Aspect
Aspek Administrasi	15	15	15	15,00	Administrative Aspect
Jumlah	100	94,25	95,75	85,75	TOTAL

Aspek Keuangan

Financial aspects

Realisasi & RKAP Penilaian Aspek Keuangan 2011 & 2010

Realization & RKAP Financial Aspect Assessment in 2011 & 2010

No	Indikator	Bobot	RKAP 2011	Realisasi 2011	Realisasi 2010
1	Return On Equity (ROE)	20	20	20	20
2	Return On Investment (ROI)	15	15	12	7,5
3	Cash Ratio	5	5	5	3
4	Current Ratio	5	5	5	4
5	Collection Periods	5	4,5	5	5
6	Inventory Turn Over	5	5	5	5
7	Total Modal Sendiri Terhadap Total Aset	10	7,25	7,25	7,25
8	Total Modal Sendiri Terhadap Total Aset	10	7,25	7,25	7,25
Jumlah Nilai Aspek Keuangan		-	66,75	64,25	56,75

Aspek Keuangan

Financial aspects

Penjabaran Penilaian Aspek Keuangan Tahun 2011

Detailed Financial Aspect Assessment of 2011

No	Indikator	Jumlah	Hasil Ratio	Bobot
1	Return On Equity (ROE) = $\frac{\text{Earnings After Tax (EAT)}}{\text{Shareholder Equity}} \times 100\%$	$\frac{25.860,58}{135.332,19}$	19,11 %	20
2	Return On Investment (ROI) = $\frac{\text{EBIT} + \text{Decreciation}}{\text{Capital Employed}} \times 100\%$	$\frac{88.854,61}{640.115,73}$	13,88 %	12
3	Cash Ratio = $\frac{\text{Cash and Short Securities}}{\text{Current Liabilities}} \times 100\%$	$\frac{129.552,74}{272.929,08}$	47,47 %	5
4	Cash Ratio = $\frac{\text{Current Asset}}{\text{Current Liabilities}} \times 100\%$	$\frac{386.407,47}{272.929,08}$	141,58 %	5
5	Collection Periods = $\frac{\text{Trade Receivable}}{\text{Net Sales}} \times 365 \text{ hari}$	$\frac{162.223,01}{1.132.327,76}$	52,29	5
6	Inventory Turn Over = $\frac{\text{Inventories}}{\text{Net Sales}} \times 365 \text{ hari}$	$\frac{162.223,01}{1.132.327,76}$	10,01	5
7	Total Asset Turn Over (TATO) = $\frac{\text{Total Income}}{\text{Capital Employed}} \times 100\%$	$\frac{1.132.175,62}{640.115,73}$	176,87 %	5
8	Total Modal Sendiri Terhadap Total Aset = $\frac{\text{Total Stockholder's Equity}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$	$\frac{161.497,07}{640.115,73}$	25,23 %	7,25
Jumlah Nilai Aspek Keuangan				64,25

Aspek Operasional

Operational aspects

Realisasi & RKAP Penilaian Aspek Operasional
tahun 2011 & 2010

Realization & RKAP Assessment of Operations
in 2011 & 2010

No	Indikator	Bobot	RKAP 2011	Nilai	Nilai Bobot Riil 2011	Nilai Bobot Riil 2010
1	Pelaksanaan Proyek a. Penyelesaian tepat waktu	3	3	119,39	3	3
	b. Penyelesaian tepat mutu	3	3	127,99	3	3
2	Produktivitas & Efisiensi Produksi a. Pencapaian Target	3	3	87,81	3	2
	b. Pencapaian target RBP	3	3	11.888,34	3	3
3	Peningkatan SDM Realisasi peningkatan pendidikan	3	3	112,50	3	3
	Jumlah Aspek Operasional	15	14	-	15	14

Dari data realisasi proyek-proyek yang diselesaikan dalam tahun 2011 dapat diketahui nilai indikator pelaksanaan proyek untuk unsur penyelesaian proyek tepat waktu adalah sebagai berikut :

Data from the realization of projects completed in the year 2011 can be seen the value of the indicator elements of the project to completion on time is as follows:

No	Nama Proyek	Jadwal Sesuai Kontrak	Realisasi	Kategori	Nilai %
1	Irigasi Komerting ICB 5	30-Oct-12	Dalam Pelaksanaan	Terlambat	96,10
2	Irigasi Komering ICB 6	18-Dec-12	Dalam Pelaksanaan	Lebih Cepat	103,97
3	Rehb. Jaringan AMS 17 D.I Alabio	31-Dec-12	Dalam Pelaksanaan	Terlambat	89,33
4	Irigasi Air Lakitan 2	27-May-12	Dalam Pelaksanaan	Terlambat	99,87
5	Drainase Aceh Paket AFD4	29-Aug-12	29-Aug-12	Tepat Waktu	100,00
6	Jl. Pandau Jaya-Tanah Merah, Kampar	7-Aug-12	7-Aug-12	Tepat Waktu	100,00
7	Irigasi Air Lakitan 3	19-Feb-13	Dalam Pelaksanaan	Lebih Cepat	143,18
8	Embung Limpato	15-Oct-13	Dalam Pelaksanaan	Lebih Cepat	112,82
9	Bendung Marangkayu 6	15-Nov-13	Dalam Pelaksanaan	Terlambat	94,22

10	Pergudangan Samarinda	14-Oct-11	14-Oct-11	Tepat Waktu	100,00
11	Pemb. JL. Lampeong-Batas Kaltim	18-Nov-11	18-Nov-11	Teat Waktu	100,00
12	Pemb. JL. Simpang Blusuh	30-Nov-11	30-Nov-11	Tepat Waktu	100,00
13	Pemb. Jl. Teraju Batas BALAI BEKUAK	9-Dec-11	9-Dec-11	Tepat Waktu	100,00
14	Normalisasi Sungai Sunter	11-Aug-14	Dalam Pelaksanaan	Lebih Cepat	749,37
15	Ruko Ancol Pademangan	24-Mar-12	Dalam Pelaksanaan	Terlambat	95,36
16	Pemb. JL. Sp. Blusuh - Batas Kalteng (APBD-P)	14-Jan-12	14-Jan-12	Tepat Waktu	100,00
17	Pemb. JL. Pergudangan Tahap 3 (APBD-P)	30-Dec-11	30-Dec-11	Tepat Waktu	100,00
18	Gedung IPB	18-Jan-12	Dalam Pelaksanaan	Terlambat	45,25
19	Bendung Karet Waledan	26-Dec-13	Dalam Pelaksanaan	Lebih Cepat	334,14
20	Citarum Paket 3	29-Dec-13	Dalam Pelaksanaan	Tepat Waktu	100,00
21	BPLS 4	1-Dec-11	1-Dec-11	Tepat Waktu	100,00
22	Jl. Air Terang Modo	1-Jun-11	1-Jun-11	Tepat Waktu	110,00
23	Proyek Bencana Alam Merapi 2	1-Feb-11	1-Feb-11	Tepat Waktu	100,00
24	Proyek Merapi 3	1-Jun-11	1-Jun-11	Tepat Waktu	100,00
25	Mitigasi Boster 3	1-Dec-11	1-Dec-11	Tepat Waktu	100,00
26	Breakwater Pantai Ternate	1-Aug-11	1-Aug-11	Tepat Waktu	100,00
27	Jembatan Wariki V	1-Nov-11	1-Sep-11	Lebih Cepat	110,00
28	Irigasi Wundulako	1-Dec-11	1-Sep-11	Lebih Cepat	110,00
29	Proyek Merapi 4	1-Oct-11	1-Oct-11	Tepat Waktu	100,00
30	Drainasi Primer Kota Tegal	1-Dec-11	1-Dec-11	Tepat Waktu	100,00
31	Proyek Merapi 5	1-Dec-11	1-Dec-11	Tepat Waktu	100,00
32	Rumah Pompa Surakarta	1-Dec-11	1-Dec-11	Tepat Waktu	100,00
33	Jatibarang Tunnel	0-Jan-00	0-Jan-00	Lebih Cepat	105,00
34	Jalan Lakuan-Buol	0-Jan-00	0-Jan-00	Lebih Cepat	110,00
35	Bendung Gerak Tempe Porsi	0-Jan-00	0-Jan-00	Lebih Cepat	110,00

36	Jatibarang JO Integrated	0-Jan-00	0-Jan-00	Terlambat	95,00
37	Bulukumba	0-Jan-00	0-Jan-00	Lebih Cepat	110,00
38	Bendung Gerak Tempe KSO	0-Jan-00	0-Jan-00	Lebih Cepat	110,00
39	Irigasi Sangkub	1-Jan-00	0-Jan-00	Terlambat	95,00
40	Jatibarang Porsi	0-Jan-00	0-Jan-00	Terlambat	95,00
41	Jalan Oransbari-Larenski	0-Jan-00	0-Jan-00	Lebih Cepat	110,00
42	Mini Hydro Ndungga	26-Nop-12	Dalam Pelaksanaan	Terlambat	77,76
43	Mini Hydro Santong	26-Nop-12	Dalam Pelaksanaan	Terlambat	70,70
44	Mini Hydro Prafi	26-Nop-12	Dalam Pelaksanaan	Terlambat	71,15
Total Skor					119,39

Dari data realisasi proyek-proyek yang diselesaikan dalam tahun 2011 dapat diketahui nilai indikator produktivitas dan efisiensi produksi untuk unsur pencapaian target RBP adalah sebagai berikut :

Data from the realization of projects completed in the year 2011 can be seen the value of production efficiency and productivity indicators for RBP target elements are as follows:

No	Nama Proyek	% RBP	% Realisasi	% Realisasi Terhadap RBP
1	Irigasi Komerting ICB 5	10,44	8,19	78,46
2	Irigasi Komering ICB 6	0,41	0,29	70,27
3	Rehb. Jaringan AMS 17 DI Alabio	8,51	14,00	164,48
4	Irigasi Air Lakitan 2	14,98	12,44	83,03
5	Drainase Aceh Paket AFD4	4,41	3,09	70,11
6	Jl. Pandau Jaya-Tanah Merah, Kampar	3,38	3,38	100,00
7	Irigasi Air Lakitan 3	8,24	9,54	115,81
8	Embung Limpato	13,22	19,21	145,31
9	Bendung Marangkayu 6	8,00	5,66	70,73
10	Pergudangan Samarinda	13,41	12,33	91,92
11	Pemb. JL. Lampeong-Batas Kaltim	9,82	10,35	105,44

12	Pemb. JL. Simpang Blusuh	6,56	8,63	131,70
13	Pemb. Jl. Teraju Batas Balai Bekuak	14,50	10,21	70,40
14	Normalisasi Sungai Sunter	22,31	26,31	117,92
15	Ruko Ancol Pademangan	1,77	1,24	70,03
16	Pemb. JL. Sp. Blusuh - Batas Kalteng (APBD-P)	14,34	14,24	99,30
17	Pemb. JL. Pergudangan Tahap 3 (APBD-P)	14,54	17,44	119,94
18	Gedung IPB	2,35	10,33	440,09
19	Bendung Karet Waledan	9,00	9,47	105,25
20	Citarum Paket 3	20,45	20,45	100,00
21	BPLS 4	14,08	24,90	176,79
22	Jl. Air Terang Modo	(5,18)	6,91	(133,55)
23	Proyek Bencana Alam Merapi 2	25,96	31,18	120,12
24	Proyek Merapi 3	28,00	32,03	114,39
25	Mitigasi Boster 3	10,00	10,33	103,28
26	Breakwater Pantai Ternate	13,20	15,10	114,41
27	Jembatan Wariki V	11,07	12,18	110,01
28	Irigasi Wundulako	16,30	19,69	120,75
29	Proyek Merapi 4	23,97	28,43	118,60
30	Drainasi Primer Kota Tegal	9,51	13,12	137,99
31	Proyek Merapi 5	25,12	29,08	115,77
32	Rumah Pompa Surakarta	4,40	12,46	283,55
33	Jatibarang Tunnel	19,04	19,17	100,68
34	Jalan Lakuan-Buol	1,72	(0,62)	(35,86)
35	Bendung Gerak Tempe Porsi	26,00	21,22	81,60
36	Jatibarang JO Integrated	1,50	5,17	344,68
37	Bulukumba	(42,19)	(37,87)	89,74

38	Bendung Gerak Tempe KSO	5,01	11,42	227,86
39	Irigasi Sangkub	4,00	7,52	187,76
40	Jatibarang Porsi	4,88	12,21	250,41
41	Jalan Oransbari-Larenski	10,00	10,00	100,00
42	Mini Hydro Ndungga	(10,63)	(4,21)	39,64
43	Mini Hydro Santong	(5,29)	(1,05)	19,93
44	Mini Hydro Prafi	(9,19)	(8,47)	92,15
Jumlah Rata - rata				118,88

Aspek Administrasi

Realisasi & RKAP Penilaian Aspek Administrasi tahun 2011 & 2010

Administrative Aspects

Realization & RKAP Assessment of Administrative in 2011 & 2010

No	Indikator	Bobot	RKAP 2011	Realisasi 2011	Realisasi 2010
1.	Laporan Perhitungan tahunan	3	3	3	3
2.	Rancangan RKAP	3	3	3	3
3.	Laporan Periodik Kinerja PKBL	3	3	3	3
4.	a. Efektivitas Penyaluran Dana	3	3	3	3
	b. Tingkat Kolektibilitas	3	3	3	3
Jumlah Aspek Administrasi		15	15	15	15



Ringkasan Kinerja Keuangan Berdasarkan Key Performance Indicators

Financial Performance Overview Based on Key Performance Indicators

Kategori Kinerja	Bobot KPI	Pencapaian Target
CUSTOMER	8,00	11,00
BISNIS PROSES	20,00	16,96
KUALITAS	8,00	7,96
SDM	12,00	7,48
LEADERSHIP	12,00	11,62
FINANCIAL PERFORMANCE	40,00	25,33
Total Skor KPI (TSK)	100,00	80,35

Kinerja Keuangan Berdasarkan Target-Target Key Performance Indicators (Kpi)

Berdasarkan surat Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) nomor : S-676/MBU/2004 tanggal 22 Desember 2004 perihal Penerapan Key Performance Indicators (KPI) , dan berdasarkan RUPS Pengesahan RKAP Perusahaan Tahun 2011 Nomor : RIS-05/D3.MBU/2011 tanggal 12 Januari 2011 yang memuat Kontrak Manajemen antara PT. Brantas Abipraya (Persero) dan Kuasa Pemegang Saham PT Brantas Abipraya (Persero). KPI dan Kontrak Manajemen merupakan komplemen dari penilaian tingkat kesehatan BUMN, sehingga Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor : KEP 100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 masih berlaku.

Realisasi pencapaian target sebagaimana tertuang dalam kontrak manajemen sebesar 80,35 dari target 100 atau mencapai 80,35%, sehingga secara keseluruhan dikategorikan dibawah KPI yang ditargetkan dalam RUPS. Pencapaian nilai kinerja berdasarkan aspek customer pada tahun 2011 sebesar 11 % yang berarti diatas bobot yang ditargetkan sebesar 8 %, sedangkan pada aspek bisnis proses sebesar 16,96 % yang berarti dibawah bobot yang ditargetkan sebesar 20 %, aspek

Financial Performance-Based Target Target Key Performance Indicators (Kpi)

Based on Letter of Ministry of State-Owned Enterprise (BUMN) Number: S-676/MBU/2004 dated 22 December 2004 regarding Application of Key Performance Indicators (KPI), and based on GMOS for Endorsement of Enterprise RKAP of 2011 Number: RIS-05/D3.MBU/2011 dated 12 January 2011 specifying a Management Contract between PT. BrantasAbipraya(Persero) and Authorized Shareholder of PT BrantasAbipraya (Persero). KPI and Management Contract constitute a complement of the SOE soundness assessment that the Ministerial Decree of SOE Number: KEP 100/MBU/2002 dated June 4, 2002 remains applicable.

The realization of target achievement as specified in the management contract at 80.35% of 100 or at a proportion of 80.35%, so that in overall it is categorized under KPI as targeted in the GMOS. The performance score achievement based on customer aspects during 2011 was at 11%, meaning above the targeted weight of 8%, while business process aspect hit 16.96%, meaning below the targeted weight at 20%, quality hit 7.96% or below the targeted weight of 8%, HR

kualitas sebesar 7,96 % yang berarti dibawah bobot yang ditargetkan sebesar 8 %, aspek SDM sebesar 7,48 % yang berarti dibawah bobot yang ditargetkan sebesar 12 %, aspek leadership sebesar 11,62 % yang berarti dibawah bobot yang ditargetkan sebesar 12 %, dan aspek financial performance sebesar 25,33 % yang berarti dibawah dari bobot yang ditargetkan sebesar 40 %.

BAGIAN LABA JOINT OPERATION

Bagian Laba Joint Operation selama tahun 2011 sebesar Rp 27.809 juta lebih tinggi sebesar Rp 6.809 juta atau 32,43 % bila dibandingkan dengan RKAP yang sebesar Rp 21.000 juta. Sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2010 sebesar Rp 20.528 juta, terdapat kenaikan sebesar Rp 7.281 juta atau 35,47 %.

hit 7.48% or below the targeted weight of 12%, leadership hit 11.62% or below the targeted weight of 12%, and financial performance aspect at 25.33%, meaning below the targeted weight of 40%.

PROFIT SHARE OF JOINT OPERATION

The Profit Share of Joint Operation during 2011 climbed up at Rp 27,809 million or increased by Rp 6,809 million or 32.43% compared to the RKAP amount of Rp 21,000 million. Whilst, compared to the 2010 realization of Rp 20,528 million, there is an increase by Rp 7,281 million or 35.47%.





Progress Through Commitment

Tata Kelola Perusahaan yang Baik
Good Corporate Governance

Tangguh

- Memiliki daya juang yang tinggi dan semangat pantang menyerah.
- Mengerahkan seluruh potensi dan daya upaya dalam mengemban tugas dan tanggung jawab.
- Memanfaatkan setiap peluang dan mengendalikan setiap risiko.

Strong

- Having high fighting spirit and unyielding spirit.
- All the potential and effort in carrying out the duties and responsibilities.
- Utilize every opportunity and control any risks.



PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN PT. BRANTAS ABIPRAYA

Pedoman Good Corporate Governance (GCG) PT. Brantas Abipraya (Persero) merupakan penjabaran dari kaidah-kaidah GCG, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktik GCG pada Badan Usaha Milik Negara, Anggaran Dasar Brantas (yang perubahannya telah disahkan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-62129.AH.01.02 Tahun 2008), Visi dan Misi Perseroan serta praktik-praktik terbaik dalam GCG.

Pedoman GCG ini merupakan dasar dan acuan dalam pengelolaan Perseroan. Diharapkan seluruh aktivitas Perseroan akan selaras dengan standar GCG. Pedoman GCG memuat prinsip-prinsip yang berlaku bagi seluruh aktivitas Perseroan. Brantas akan secara konsisten menginformasikan Pedoman GCG ini kepada seluruh pihak yang berkepentingan sehingga dapat memahami dan memaklumi standar kerja Perseroan yang sesuai dengan GCG.

Pedoman GCG ini merupakan acuan bagi peraturan Perseroan yang lebih detail sesuai dengan kebutuhan unit-unit organisasi dalam Perseroan. Mengingat lingkungan bisnis yang dinamis, maka Brantas akan selalu mengkaji Pedoman GCG ini secara berkesinambungan sebagai upaya mencapai standar kerja yang terbaik bagi Perseroan.

Keberhasilan penerapan GCG ini bukan hanya karena tersedianya sarana/acuan tata kelola Perseroan seperti Pedoman GCG, Pedoman Etika dan Perilaku (Code of Conduct), Piagam Komite Audit (Audit Committee Charter), Piagam Satuan Pengawasan Intern (Internal Audit Charter), dan sebagainya, melainkan terletak pada komitmen dari pimpinan tertinggi Perseroan yang diikuti oleh seluruh staf dan karyawan serta didukung oleh Dewan Komisaris. Pedoman GCG ini merupakan acuan langkah awal dalam pengelolaan Perseroan yang sehat dan beretika serta memberikan gambaran yang objektif dan transparan kepada stakeholders Perseroan.

GOOD CORPORATE GOVERNANCE AT PT. BRANTAS ABIPRAYA

The Good corporate Governance (GCG) Guidelines of PT. Brantas Abipraya (Persero) entail a broad description of GCG rules, Law Number 1 of 1995 regarding Limited Liability Company, Ministerial Decree of State-Owned Enterprise Number Kep-117/M-MBU/2002 regarding Application of GCG Practices in State-Owned Enterprise, Articles of Association (of which its amendment is authorized by the Minister of Law and Human Rights through a Decree Number AHU-62129. AH.01.02 of 2008), corporate Vision and Mission and best practices of GCG.

This GCG Guidelines constitutes a foundation and hint for the company management. A fine-tuned company activity with such GCG standard is expected. The GCG Guidelines contains principles that apply to the entire company activities. Brantas will consistently inform the GCG Guidelines to all related parties in order to grasp knowledge and understanding of the corporate standard of the work in conformity to the GCG.

This GCG Guidelines must be referred for more detailed company regulations matching the needs of the organizational units under the Company. Given the dynamic business environment, Brantas will at all time review the GCG Guidelines on continual basis in order to achieve the best work standard for the Company.

A successful application for this GCG is not only due to availability of corporate governance facility/reference such as GCG Guidelines, Code of Conduct, Audit Committee Charter, Internal Audit Charter, and the like, but also the corporate top leader as followed by the entire staffs and employees with a full support of the Board of Commissioners. This GCG Guidelines constitutes a reference for the primary steps in sound and ethical management while providing the Company stakeholders with an objective and transparent overview.

Manajemen dan seluruh karyawan Persero Brantas mempunyai komitmen bersama menjalankan proses bisnis mengacu kepada persyaratan standar Sistem Manajemen Mutu ISO-9001:2000, OHSAS 18001:1999 dan SMK3, ISO 14000, serta prinsip-prinsip GCG, untuk membangun Perseroan yang tangguh dan mampu memberikan pelayanan yang memuaskan kepada pelanggan, keuntungan dan nilai tambah bagi Pemegang Saham, peningkatan kompetensi dan kesejahteraan bagi para karyawannya serta mampu memenuhi harapan Stakeholder lainnya.

A. Keselamatan, Kesehatan & Keamanan Lingkungan (K3L)

Manajemen dan seluruh karyawan bertanggung jawab dan terlibat langsung di dalam pemeliharaan dan penyempurnaan K3L di area kerjanya masing-masing, dengan maksud untuk:

- Mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan gangguan kesehatan kerja
- Mengeliminasi kerugian waktu dan sumber daya Perseroan yang diakibatkan oleh K3L
- Memelihara dan menyempurnakan Keamanan Kerja, Keselamatan, Kesehatan Karyawan dan Lingkungan.

B. Mutu Produk dan / atau Pelayanan

Kendali proses dan mutu secara efektif dan efisien ditetapkan dan secara terus menerus disempurnakan. Setiap pemilik proses di semua tingkatan harus bertanggung jawab untuk melaksanakan, mengendalikan dan menyempurnakan mutu prosesnya dalam memenuhi persyaratan pelanggan.

C. Biaya

Pengendalian biaya didasarkan pada pengendalian proses, aktifitas (proses) yang tidak memberi nilai tambah dan yang tidak sesuai, akan disempurnakan secara terus menerus dengan maksud untuk :

- Memelihara dan menyempurnakan mutu proses dan mutu produk

The Brantas management and employees share a commitment to provide the business process with reference to the certified Quality Management System requirement of ISO-9001:2000, OHSAS 18001:1999 and SMK3, ISO 14000, as well as the GCG principles in order to build a strong Company that is able to provide services for the customer's satisfaction, profit and added value for the Shareholders, improved competence and wealth for the employees while meeting the expectation of other Stakeholders.

A. Environmental Safety, Health & Security (K3L)

The management and employees are responsible and directly involved in the nurturing and perfection of K3L in their respective working areas for the purpose of:

- Avoiding any accident and health disorder at work
- Eliminating possible corporate time and resources losses due to K3L
- Nurturing and perfection of Environmental and Employment Security, Safety, and Health.

B. Quality Product and/or Service

Effective and efficient quality and process control is defined and refined on continual basis. Each of the process owners at respective levels must be responsible for the implementation, control, and refinement of their process quality to meet the customers' requirements.

C. Cost

The cost control is based on the process control in which any unsuitable activity with fewer added values will be continually perfected for the purpose of:

- Nurturing and perfection of quality process and product

- Menurunkan biaya proses
- Meningkatkan nilai tambah

D. Penyerahan

Tim manajemen proyek melaksanakan dan menyerahkan pekerjaan dengan tepat waktu, tepat jumlah dan tepat mutu seperti disyaratkan dalam kontrak, serta peraturan-peraturan lain yang terkait.

E. Sumber Daya Manusia

Membangun sikap mental dan kompetensi seluruh karyawan sesuai dengan budaya Perseroan dan prinsip manajemen yang baik, untuk mencapai Sasaran Perseroan serta harapan Stakeholder.

Dalam setiap aktivitasnya, Brantas senantiasa mengacu kepada prinsip-prinsip GCG

PRINSIP-PRINSIP GCG

A. Transparansi (Tranparancy)

Transparansi ialah keterbukaan dalam mengemukakan informasi material dan relevan mengenai Perseroan. Transparansi ini diwujudkan oleh Brantas dengan selalu berusaha untuk memelopori pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan kepada berbagai pihak yang berkepentingan serta dalam pengungkapannya tidak terbatas pada informasi yang bersifat wajib. Pengungkapan informasi tersebut dilakukan Brantas dengan tetap mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disarankan oleh praktik terbaik GCG.

Implementasi prinsip transparansi yang dilakukan PT Brantas Abipraya antara lain :

1. Laporan Tahunan Brantas memuat informasi penting dalam pengelolaan Perseroan, antara lain tetapi tidak terbatas kepada :
 - a. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Usaha, dan Strategi Perseroan;
 - b. Kondisi keuangan hasil audit oleh eksternal auditor

- Reducing the process cost
- Improving added value

D. Delivery

The project management team will implement and deliver works in such a timely manner at an appropriate quantity and quality as required by the contract as well as other applicable rules and regulations.

E. Human Resources

Building the employees' mental attitude and competence in accordance with the corporate culture and sound management principles toward achieving the corporate targets and Stakeholders' expectation.

In each of its activities, Brantas keeps referring to the GCG principles

GCG PRINCIPLES

A. Transparency

Transparency signifies openness in disclosing material and relevant information as to the Company. This is embodied by Brantas through its best efforts at all time to pioneer the disclosure of both financial and non-financial information to whomever it may concern without limiting to that with obligatory nature. Such disclosure of information is applied by Brantas while remain in compliance with the applicable rules and regulations and as suggested by the GCG best practices.

In relation to the principle of transparency, PT Brantas Abipraya reflects it in several issues as follows:

1. Brantas Annual Report entails material information with respect to company management, including but not limited to:
 - a. corporate Vision, Mission, Objective, Target, and Strategy;
 - b. Financial condition audited by External Auditors

- | | |
|--|--|
| c. Susunan pengurus (Direksi dan Komisaris) | c. Organization Structure (the Board of Directors and the Board of Commissioners) |
| d. Informasi Pemegang Saham Pengendali | d. Majority Stakeholders Information |
| e. Kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta anggota keluarganya dan Perseroan lainnya yang memiliki benturan kepentingan | e. Shareholding by the members of both the Board of Directors and the Board of Commissioners as well as their relatives and other Companies having conflict of interests |
| f. Sistem manajemen risiko | f. Risk management system |
| g. Sistem pengawasan dan pengendalian internal | g. Internal control system |
| h. Sistem dan pelaksanaan GCG dan tingkat kepatuhannya | h. GCG system and implementation and compliance level |
| i. Kejadian-kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi Perseroan | i. Key issues affecting the company condition |
| j. Biodata anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris | j. Curriculum vitae of the members of both the Board of Directors and the Board of Commissioners |
| k. Remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris | k. Remunerations of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners |
| l. Rapat-rapat yang diadakan oleh Direksi dan Dewan Komisaris | l. Meetings held by the Board of Directors and the Board of Commissioners |
2. Perseroan akan mengungkapkan informasi penting kepada stakeholder antara lain:
- | | |
|--|--|
| a. Laporan triwulanan yang berisi laporan rutin manajemen, disampaikan kepada Pemegang Saham | a. Quarterly Report containing regular management description, submitted to the Stakeholders |
| b. Prosedur pengadaan dan hubungan dengan rekanan; | b. Procedures for procurement and relationship with partners; |
| c. Ketaatan dalam pembayaran pajak; | c. Tax compliance; |
| d. Mekanisme manajemen SDM, sesuai dengan PKB. | d. HR management mechanism in accordance with the PKB. |

B. Keadilan (Fairness)

Keadilan ialah kesetaraan dalam pemenuhan hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Brantas menjamin bahwa setiap pihak yang berkepentingan mendapatkan perlakuan yang adil sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

B. Fairness

Fairness signifies the equal satisfaction of rights of the stakeholders arising from agreement as well as applicable laws and regulations. Brantas warrants that any concerned party is treated as fair to the broadest extent of applicable laws and regulations.

Implementasi Brantas pada prinsip keadilan antara lain :

1. Pemegang Saham berhak menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Perseroan akan memperlakukan semua rekanan secara adil dan transparan;
3. Perseroan akan memberikan kondisi kerja yang baik dan aman bagi setiap pegawai sesuai dengan kemampuan Perseroan dan peraturan perundang undangan yang berlaku.
4. Perseroan akan memperlakukan setiap pegawai secara adil dan bebas dari bias karena perbedaan suku, agama, asal-usul, jenis kelamin atau hal-hal lain yang tidak ada kaitannya dengan kinerja.

C. Akuntabilitas (Accountability)

Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ dan seluruh jajaran Perseroan sehingga pengelolaan Perseroan terlaksana secara efektif. Brantas meyakini bahwa akuntabilitas berhubungan dengan keberadaan sistem yang mengendalikan hubungan antara individu dan / atau organ yang ada di Perseroan maupun hubungan antara perseroan dengan pihak yang berkepentingan.

Brantas menerapkan prinsip akuntabilitas sebagai salah satu solusi mengatasi agency problem yang timbul sebagai konsekuensi logis perbedaan kepentingan individu dengan kepentingan Perseroan maupun kepentingan Perseroan dengan pihak yang berkepentingan. Akuntabilitas dapat dicapai melalui pengawasan efektif yang didasarkan pada keseimbangan kekuasaan antara Organ Perseroan (RUPS, Komisaris dan Direksi).

RUPS sebagai organ tertinggi yang memegang semua kekuasaan yang tidak diberikan kepada organ yang lain. Komisaris melakukan tugas pengawasan dan pemberian nasihat. Direksi bertanggung jawab dalam pengurusan Perseroan. Sedangkan akuntabilitas seluruh jajaran Perseroan berarti setiap orang bertanggungjawab atas setiap tugas yang diamanatkan kepadanya.

The implementation of fairness principles at Brantas includes as follows:

1. The stakeholders have rights to attend and vote in the GMOS (General Meeting of Shareholders) subject to applicable rules;
2. The Company will ensure a fair and transparent treatment to its partners;
3. The Company will ensure a good and secure working condition for every employee subject to corporate ability and applicable laws and regulations.
4. The Company will ensure a fair and unbiased treatment to its employees regardless of their race, faith, origin, gender and other unrelated backgrounds to performance.

C. Accountability

Accountability signifies a clarified function, performance and liability of the Organ and the Company at all levels toward an effective corporate implementation. Brantas believes that it closely relates to an embodiment of a system that controls over relationship between individuals and/or organs within the Company and between the Company and other related parties.

Brantas applies this principle as one solution to agency problems arising as a logical consequence of diverse interests either between individuals and the Company or between the Company and other related parties. The accountability can be achieved through an effective control building upon a balanced power among the company organs (GMOS, the Board of Commissioners, and the Board of Directors).

Being the highest in the hierarchy, the GMOS holds a full power which is not given to any other organs. The Board of Commissioners undertakes control and endorsement tasks. Meanwhile, the Board of Directors is responsible for the company management activities. On the other hand, the corporate accountability at all levels indicates that each person is responsible for respective job assigned to him/her.

Brantas menerapkan akuntabilitas dengan mendorong seluruh individu dan / atau organ Perseroan menyadari hak dan kewajiban, tugas dan tanggung jawab serta kewenangannya.

Brantas applies the accountability by encouraging corporate personnel and/or organs to recognize their rights and obligations, tasks and responsibilities and authorities.

Implementasi Brantas pada prinsip Akuntabilitas adalah :

The implementation of accountability principles at Brantas includes as follows:

1. Perseroan menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ Perseroan (Direksi, Dewan Komisaris, SPI, SEKPER dan Organ Struktural lainnya) dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai Perseroan (corporate values), dan strategi Perseroan.
2. Perseroan terus berupaya agar semua organ Perseroan dan semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan GCG.
3. Perseroan menciptakan sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan Perseroan.
4. RUPS antara lain berwenang untuk mengesahkan rencana jangka panjang, rencana anggaran tahunan, menyetujui laporan tahunan, menetapkan pembagian keuntungan dan deviden yang dibayarkan
5. Rincian tugas Dewan Komisaris sebagaimana butir 1 sekurang-kurangnya mencakup pengawasan terhadap pengurusan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi serta memberi nasihat kepada Direksi termasuk rencana pengembangan, rencana jangka panjang, rencana kerja dan anggaran tahunan Perseroan, pelaksanaan ketentuan Anggaran Dasar dan tindak lanjut Keputusan RUPS.
6. Rincian tugas Direksi sebagaimana butir 1 meliputi pengurusan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dan senantiasa berusaha untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas Perseroan untuk menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan.

1. The Company defines a clear job description for each of the company organs (the Board of Directors, the Board of Commissioners, SPI, Corporate Secretary and other Structural Organs) and employees in accordance with the corporate values and strategy.
2. The Company keeps striving for the best efforts both the company organs and the employees build capacity that suits their tasks, responsibilities, and functions in the GCG implementation.
3. The Company creates an effective internal control system throughout the company management.
4. The GMOS authorities includes validating the long-term and annual budget plans, approving the annual report, and determining the share of paid profit and dividend
5. The Board of Commissioners' job description as mentioned above at least includes the provision of control over the company management carried out by the Board of Directors and recommendation for the same including the development plan, long-term plan, work plan and corporate annual budget, implementation of articles of association and follow-up of the GMOS Resolutions.
6. The Board of Directors' job description as mentioned above includes the company management activities in line with the agreed purposes and objectives and continues to improve efficiency and effectiveness of the Company in order to operate, maintain and manage the corporate wealth.

D. Pertanggungjawaban (Responsibility)

Pertanggungjawaban yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan Perseroan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Brantas bertanggung jawab untuk mematuhi hukum dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan yang berhubungan dengan ketenagakerjaan, perpajakan, persaingan usaha yang tidak sehat, kesehatan dan keselamatan kerja, dan lain sebagainya.

D. Responsibility

Responsibility in this particular signifies the suitability of the company management with applicable laws and regulations and sound company core values. Brantas is responsible for complying with the applicable laws including regulations with respect to employment, taxation, business competition, health and safety, and others.

Implementasi Brantas pada prinsip Pertanggungjawaban adalah :

The implementation of the responsibility principles at Brantas includes as follows:

1. Melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik;
2. Mematuhi ketentuan undang-undang keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan;
3. Melaksanakan kewajiban pembinaan masyarakat sekitar, misalnya dengan ikut melakukan pembinaan usaha kecil dan koperasi.
4. Melaksanakan Undang-Undang Tenaga Kerja (UU No.13 tahun 2003), UU Jasa Konstruksi No.19 tahun 1999 beserta peraturan pelaksanaannya.
5. Community Development (0,3% anggarannya) Kepedulian terhadap masyarakat dalam meningkatkan kehidupan (pendidikan, kesehatan, fasilitas keagamaan) bagi masyarakat tidak mampu.
6. Melaksanakan undang-undang dan peraturan pemerintah lainnya yang menyangkut kegiatan Perseroan serta seluruh peraturan Perseroan yang berlaku.

1. Well fulfillment of taxation liability;
2. Compliance with work and environmental safety and health laws;
3. Fulfillment of liability to develop the surrounding community, for example by participating in developing small businesses and cooperation.
4. Compliance with the Labor Law (Law No.13 of 2003), Construction Service Law No.19 of 1999 as complemented with respective implementing regulations.
5. Community Development (0.3% of budget) Social responsibility to improve the community livelihood (education, health, faith-related facilities) for the poor.
6. Compliance with other laws and regulations with respect to company activities and with other applicable corporate rules.

E. Kemandirian (Independency)

Kemandirian adalah sesuatu keadaan dimana Perseroan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh / tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip korporasi yang sehat. Kemandirian ini oleh Brantas diimplementasikan dengan selalu menghormati hak dan kewajiban, tugas dan tanggung jawab serta kewenangan masing-masing Organ Perseroan. Brantas meyakini bahwa dengan implementasi prinsip kemandirian secara optimal,

E. Independency

This principle reflects a state in which the Company is managed in such a professional manner without conflict of interest and influence/duress by any party whatsoever potentially violating either applicable laws or sound corporate principles. At Brantas, it is applied by respecting the rights and obligations, tasks and responsibilities and authorities of each of the company organs. Brantas believes that given an optimized implementation of this principle, the entire company organs are able to perform well at

seluruh Organ Perseroan dapat bertugas dengan baik dan maksimal dalam membuat keputusan dan pengelolaan yang terbaik bagi Perseroan.

Implementasi Brantas pada prinsip kemandirian antara lain :

1. Diantara organ Perseroan saling menghormati hak, kewajiban, tugas, wewenang serta tanggungjawab masing-masing, tidak saling mendominasi satu sama lain.
2. Selain organ Perseroan tidak boleh mencampuri pengurusan Perseroan;
3. Komisaris, Direksi serta pegawai perseroan dalam pengambilan keputusan selalu menghindari terjadinya benturan kepentingan.

STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN

A. PEMEGANG SAHAM DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

Pengertian :

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ Persero yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Persero dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris. Pemegang Saham PT Brantas Abipraya adalah Negara Republik Indonesia. Menteri Negara BUMN bertindak selaku RUPS dan Pemegang Saham PT Brantas Abipraya (Persero).

Umum :

1. RUPS dalam Perseroan terdiri dari RUPS tahunan dan RUPS lainnya yang disebut RUPS Luar Biasa yang dapat diadakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
2. RUPS merupakan forum bagi Komisaris dan Direksi untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas serta kinerjanya kepada Pemegang Saham.
3. RUPS menyetujui/mengesahkan Laporan Tahunan, RKAP, dan RJPP dengan tepat waktu.

their best in the company decision making as well as management.

The implementation of independency principles by Brantas includes as follows:

1. Mutual respect between company organs in terms of their respective rights and obligations, tasks and responsibilities and authorities rather than dominating each other.
2. No other than the company organs may interfere with the company management;
3. Avoidance of conflict of interests between the Boards of Commissioners and the Board of Directors as well as employees in the decision making process.

STRUCTURE OF CORPORATE GOVERNANCE

A. SHAREHOLDERS AND GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (GMOS)

Definition:

The General Meeting of Shareholders (GMOS) is a company organ with the highest controlling power having every authority unlike that given to either the Board of Directors or the Board of Commissioners. The Shareholder of PT Brantas Abipraya is the Government of the Republic of Indonesia. The Minister of State-Owned Enterprise shall act as the GMOS and Shareholder of PT Brantas Abipraya (Persero).

General:

1. The GMOS comprises both annual and extraordinary GMOS in which the latter may be held from time to time as deemed necessary.
2. The GMOS serves as a forum for the Board of Commissioners and the Board of Directors to present their accountability report on their task implementation and performance to the Shareholders.
3. The GMOS gives sanction/validation upon the Annual Report, RKAP, and RJPP in punctual manner.



4. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan oleh RUPS, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan (acquit et decharge) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut ternyata (tergambar) dalam laporan tahunan termasuk laporan keuangan serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Pemegang Saham memiliki mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dan Direksi.
6. Pemegang Saham memiliki mekanisme penilaian kinerja Perseroan dan penilaian kinerja masing-masing Komisaris dan Direksi.
7. Pemegang saham tidak diperkenankan mencampuri kegiatan operasional Perseroan yang menjadi tanggung jawab Direksi.

4. The approval for the Annual Report, including financial report validation by the GMOS, indicates an acquit et de charge for the two Boards' members on their management and control activities performed during the passing year, to the extent that such performance is best illustrated in the annual report, which includes executive and financial summaries, and in compliance with the applicable provisions.
5. The Shareholders have a special mechanism for the Board of Commissioners and the Board of Directors assignment and removal.
6. The Shareholders have a special mechanism for performance evaluation of either the corporate or the Board of Commissioners and the Board of Directors.
7. The Shareholders may not interfere with the corporate operational activities for which the Board of Directors is responsible.

Hak – Hak :

1. Menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS.
2. Memperoleh penjelasan lengkap dan informasi yang akurat berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS.
3. Memperoleh informasi material mengenai Perseroan secara tepat waktu dan teratur.
4. Menerima pembagian dari keuntungan Perseroan dalam bentuk deviden dan pembagian keuntungan lainnya.

B. KOMISARIS

Pengertian :

Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perseroan.

Umum :

1. Anggota Komisaris diangkat berdasarkan pertimbangan integritas, dedikasi, memahami masalah masalah manajemen Perseroan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perseroan, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
2. Sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari anggota Komisaris berasal dari luar Perseroan yang bebas sehingga diharapkan dapat membangun peningkatan profesionalisme di Perseroan.
3. Komposisi Dewan Komisaris seyogyanya mencerminkan berbagai keahlian yang saling mendukung pelaksanaan tugas Komisaris. Apabila diperlukan, Komisaris dapat membentuk komite-komite atau mendatangkan staf ahli yang diperlukan untuk membantu tugasnya atas beban Perseroan.
4. Komisaris memiliki Sekretaris Komisaris yang dapat menjalankan fungsi kesekretariatan secara memadai.

The Rights:

1. To attend and vote in the GMOS.
2. To obtain complete explanation and accurate information with respect to the implementation of the GMOS.
3. To obtain material information with respect to the company in punctual and periodic manner.
4. To receive shared corporate profit in the form of dividend as well as other types of profit distribution.

B. THE BOARD OF COMMISSIONERS

Definition:

The Board of Commissioners is the company organ assigned to provide control and recommendation for the Board of Directors in the execution of company management.

General:

1. The members of the Board of Commissioners are appointed in the considerations of integrity, dedication, understanding on the company management issues in relation to any management functions, having excellent knowledge of the company business field, and being able to dedicate sufficient time to carry out their tasks.
2. No less than 20% (twenty percent) of the Board members come from independent persons outside the Company that an improved professionalism within the Company can be expected.
3. The Board of Commissioners should reflect a broad extent of expertise for mutual support in their task implementation. When necessary, the Board of Commissioners may either form committees or introduce expert staff as required to facilitate their tasks at the company expenses.
4. The Board of Commissioners has the Board of Commissioners' Secretary to carry out satisfactorily administrative functions.

5. Untuk membantu tugas-tugas pengawasan Perseroan, Komisaris wajib membentuk Komite Audit.

Tugas dan Tanggung Jawab :

1. Komisaris wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan.
2. Komisaris berhak memperoleh informasi Perseroan secara tepat waktu dan lengkap.
3. Dalam melaksanakan tugasnya, Komisaris harus mematuhi Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.
4. Komisaris harus memantau efektivitas pelaksanaan GCG yang diterapkan Perseroan.

C. DIREKSI

Pengertian :

Direksi adalah organ Perseroan yang bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan, serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Umum :

1. Anggota Direksi diangkat berdasarkan pertimbangan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perseroan.
2. Komposisi Direksi harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif, tepat dan cepat serta dapat bertindak secara independen dalam arti tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugasnya secara mandiri dan kritis.

5. In order to help the company control activities, the Board of Commissioners shall introduce an Audit Committee.

Tasks and Responsibilities:

1. The Board of Commissioners in good faith and full responsibility is to carry out their tasks for the best interests of the Company.
2. The Board of Commissioners reserves the rights to obtain information with respect to the company in punctual and complete manner.
3. In performing their tasks, the Board of Commissioners must comply with the articles of association as well as applicable laws and must realize such principles as professionalism, efficiency, transparency, independency, accountability, responsibility and fairness.
4. The Board of Commissioners must monitor the effectiveness of the GCG implementation by the Company.

C. THE BOARD OF DIRECTORS

Definition:

The Board of Directors is the company organ responsible for the company management for the best interests of the Company while acting as its representatives whether inside or outside the court.

General:

1. The Board members are appointed in considerations of their expertise, integrity, leadership, experience, good attitude and eminent dedication for the company progress and development.
2. The Board must be such composed that an effective, appropriate and quick decision making can be realized in addition to independence in that every action is free of interests which may alter their ability to carry out their tasks in an independent and critical manner.

- Paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah anggota Direksi harus berasal dari kalangan di luar Perseroan yang bebas dari pengaruh anggota Komisaris dan anggota Direksi lainnya serta Pemegang Saham.
- Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang tersebut, maka pembagian tugas dan wewenang di antara Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
- Pendalaman pengetahuan sebagai bagian dari program peningkatan kompetensi bagi tiap anggota Direksi sangat penting untuk menjamin agar Direksi tetap mengikuti perkembangan baru dalam industri jasa konstruksi.

Tugas dan Tanggung Jawab :

- Direksi bertugas untuk mengelola Perseroan dan wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham.
- Direksi dalam mengurus Perseroan melaksanakan petunjuk yang diberikan oleh RUPS sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan dan/atau Anggaran Dasar.
- Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran dan perhatian secara penuh pada tugas, kewajiban, dan pencapaian tujuan Perseroan.
- Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya dan secara tanggung renteng bertanggung jawab atas keputusan Direksi.
- Direksi wajib membantu dan memberi dukungan sepenuhnya kepada SPI dalam melaksanakan tugasnya, serta melakukan tindak lanjut atas hasil temuan SPI.

- No less than 20% (twenty percent) of the Board members come from outside the company circle to ensure freedom of influences by the members of the Board of Commissioners, fellow members of the Board of Directors, and the Shareholders.
- The job and authority distribution of each member is determined by the GMOS. In respect of the GMOS does not determine such job and authority distribution, it shall thus be determined based on the resolution of the Board of Directors.
- Intensified know-how as part of the competence improvement program for each member is highly essential to ensure that the Board is kept updated with the new development in the construction service industry.

Tasks and Responsibilities:

- The Board of Directors is to undertake the company management and account for their task implementation to the Shareholders.
- In carrying out the company management activities, the Board is to perform as guided by the GMOS to the extent that no laws and/or articles of association are violated.
- Each of the Board members in good faith and full responsibility is to perform their tasks for the best interests of the Company and in compliance with the applicable laws and regulations.
- In implementing their task, the Board members dedicate all efforts, thoughts and attentions fully on their tasks and liabilities as well as achievement of the company objectives.
- Each of the Board members takes full and personal responsibility if found to be at fault or negligence in their performance and is severally responsible for the Board's decision making.
- The Board facilitates and fully supports the SPI in carrying out their tasks and takes follow-up actions upon the SPI findings.

D. Komite Audit

Pengertian :

Komite Audit adalah organ pendukung yang dibentuk Komisaris untuk membantu dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan Perseroan. Salah seorang anggota Komite adalah anggota Komisaris yang sekaligus berkedudukan sebagai Ketua Komite.

Tugas Pokok dan Fungsi :

- Komite Audit bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Komisaris dalam melaksanakan tugasnya.
- Komite Audit bertugas membantu Komisaris dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas Auditor Eksternal dan Auditor Internal (SPI).
- Komite Audit bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan, dan bertanggungjawab langsung kepada Komisaris.
- Anggota Komite Audit harus memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup di bidang pengawasan/pemeriksaan dan di bidang-bidang lainnya yang dianggap perlu sehingga dapat melaksanakan fungsinya secara optimal.
- Ruang lingkup tugas, wewenang, dan tanggung jawab Komite Audit akan diuraikan lebih rinci dalam Piagam Komite Audit (Audit Committee Charter).

E. SATUAN PENGAWASAN INTERN (SPI)

Pengertian :

Satuan Pengawasan Intern merupakan aparat pengawas intern Perseroan yang bertanggungjawab kepada Direktur Utama.

Tugas Pokok dan Fungsi :

- SPI bertugas membantu Direktur Utama dalam melaksanakan pemeriksaan intern keuangan dan pemeriksaan operasional Perseroan serta menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya pada Perseroan serta memberikan saran-saran perbaikan.

D. Audit Committee

Definition:

The Audit Committee serves as a supporting organ introduced by the Board of Commissioners to assist in the company management control function. One member of this Committee is of the Board of Commissioners to act as a committee chairman.

Main Task and Function:

- The Audit Committee works as a team to assist the Board of Commissioners' task implementation.
- The Audit Committee assists the Board of Commissioners in ensuring an effective internal control system and effective task implementation either External or Internal Auditor (SPI).
- The Audit Committee is independent in its task implementation and reporting and be responsible directly to the Board of Commissioners.
- The Audit Committee must reflect good integrity and knowledge in addition to sufficient work experience in the field of control/audit and other specialties as deemed necessary in order to perform its function optimally.
- The scope of work, authority and responsibility of Audit Committee is described in more details in the Audit Committee Charter.

E. INTERNAL CONTROL UNIT (SPI)

Definition:

The Internal Control Unit comprises the company control apparatus responsible to the President Director.

Main Task and Function:

- The SPI assists the President Director in the internal audit of company financial and operational and in the assessment of company control, management and implementation and gives recommendations for improvement.

2. SPI memberdayakan diri sebagai strategic business partner bagi Direksi dengan memberikan masukan masukan dan pertimbangan terhadap hal-hal strategis yang dihadapi Perseroan.
3. SPI didukung oleh personil dengan kualitas, kompetensi, dan kuantitas yang memadai untuk pelaksanaan tugasnya.
4. Untuk menjaga kualitas hasil audit, SPI bekerja secara independen sesuai dengan Standar Profesi Auditor Internal dan Pedoman Kerja SPI.
5. SPI wajib menyampaikan laporan hasil pemeriksaan dan pekerjaan lainnya kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Komite Audit/Komisaris dan pihak-pihak lain yang dianggap tepat.
6. Personil SPI senantiasa mengembangkan keahlian dan pengetahuan guna menjamin kualitas auditnya.
7. Kedudukan, wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban an SPI dituangkan dalam internal Audit Charter (Piagam Audit SPI).

2. The SPI empowers itself as a strategic business partner for the Board of Directors by providing feedback and considerations with respect to strategic issues dealt with by the Company.
3. The SPI is supported by personnel with adequate quality, competence and quantity to perform their tasks.
4. To maintain the quality audit result, the SPI will work independently subject to the Internal Auditor Professional Standard as well as the SPI Work Guidelines.
5. The SPI submits the audit result as well as other report and deliveries to the President Director with a carbon copy to the Audit Committee/Board of Commissioners and other concerned parties as deemed appropriate.
6. The SPI personnel at all time develops their expertise and knowledge to ensure a quality audit.
7. The position, authority, responsibility and accountability of SPI are specified in the Internal Audit Charter.

- Komisaris, Direksi, dan pihak yang berkepentingan di Perseroan (stakeholders).
- Auditor Eksternal tidak boleh memberikan jasa lain di luar audit selama periode audit.
 - Auditor Eksternal tidak boleh mempunyai kepentingan keuangan yang material baik langsung maupun tidak langsung dan hubungan bisnis dengan Perseroan.
3. Audit oleh Auditor Eksternal dilakukan sesuai dengan standar audit dan kode etik profesi.
 4. Auditor Eksternal harus memberitahu Direksi dan atau Komisaris melalui Komite Audit bila menemukan kejadian atau indikasi pelanggaran di dalam Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 5. Memberitahukan kepada Pemegang Saham dan atau instansi pemerintah sebagai regulator/pengawas selambat-lambatnya tiga hari kerja jika ditemukan adanya pelanggaran dan hal-hal yang dapat membahayakan keadaan keuangan Perseroan dan kepentingan publik lainnya.
 6. Kecuali disyaratkan dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Auditor Eksternal harus merahasiakan informasi yang diperoleh sewaktu melaksanakan tugasnya

- as the Board of Commissioners, the Board of Directors and related stakeholders.
- The External Auditor provides no other services than audit during the audit period.
 - The External Auditor may not have any material financial interest and business relationship to the Company either directly or not.
3. An audit by any External Auditor shall be carried out in accordance with the audit standard and professional code of conduct.
 4. The External Auditor must notify the Board of Directors and/or Commissioners through the Audit Committee upon finding either event or indication of breach in the Company to any applicable laws and regulations.
 5. Notify the Shareholders and/or the public regulator/ inspector within no later than three business days upon finding of violation and issues harming the company financial status as well as other public interests.
 6. Except otherwise required in the articles of association and applicable laws, the External Auditor must keep confidential information obtained during performing their audit tasks.

F. AUDITOR EKSTERNAL

Pengertian :

Auditor Eksternal adalah pihak yang independen dan profesional yang melakukan audit keuangan atas laporan keuangan Perseroan untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran, ketaat-azasan dan kesesuaian laporan keuangan Perseroan dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas Pokok dan Fungsi :

1. Auditor Eksternal dapat juga melakukan audit non keuangan, seperti audit khusus, audit mutu, audit investigasi, dsb.
2. Untuk menjaga independensinya, maka :
 - Auditor Eksternal bertanggungjawab kepada Pemegang Saham
 - Auditor Eksternal harus bebas dari pengaruh dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan

F. EXTERNAL AUDITOR

Definition:

External Auditor is an independent and professional outside party performing audit on the corporate financial report to provide opinions as to the objectivity, compliance and suitability of such report with the Indonesian Financial Accounting Standard as well as applicable laws and regulations.

Main Task and Function:

1. The External Auditor also performs audits for non-financial aspects such as special, quality and investigation audits, etc.
2. To ensure their independence:
 - The External Auditor reports to the Stakeholders
 - The External Auditor must be free of interference and have no conflict of interests with such entities

G. SEKRETARIS PERSEROAN

Pengertian :

Sekretaris Perseroan merupakan penghubung (liaison officer) antara Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham serta wakil Perseroan dalam berhubungan dengan regulator, lembaga atau asosiasi lain yang berkaitan dengan Perseroan.

1. Sekretaris Perseroan diangkat dan diberhentikan oleh Direksi serta bertanggungjawab kepada Direksi.
2. Sekretaris Perseroan harus memiliki kualifikasi akademis yang memadai agar dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik.

G. CORPORATE SECRETARY

Definition:

The corporate secretary serves as a liaison officer between the Board of Directors, the Board of Commissioners, and Shareholders as well as corporate representatives in dealing with the regulators and other institutions or associations with respect to the Company.

1. The corporate secretary is appointed and dismissed by and be responsible to the Board of Directors.
2. The corporate secretary must have adequate academic qualification in order to perform well in fulfilling his/her task and responsibility.

3. Sekretaris Perseroan harus mempunyai pengalaman dan pengetahuan yang mendukung pelaksanaan fungsinya.
4. Sekretaris Perseroan mempunyai tugas menatausahakan serta menyimpan dokumen Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas pada Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus dan risalah rapat Direksi maupun RUPS.
5. Sekretaris Perseroan harus memastikan bahwa Perseroan mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan yang berlaku sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG dan wajib memberikan informasi yang berkaitan dengan tugasnya kepada Direksi.
6. Sekretaris Perseroan bertanggungjawab atas pengelolaan informasi Perseroan.

3. The corporate secretary must have supporting experience and knowledge in order to perform his/her function.
4. The corporate secretary is to carry out the corporate administration and document storage, including but not limited to the List of Shareholders, Special List, and minutes of the Board of Directors and GMOS meetings.
5. The corporate secretary must ensure that the Company complies with applicable rules on the transparency underlying the application of GCG principles and must provide information with respect to his/her tasks to the Board of Directors.
6. The corporate secretary is responsible for the management of company information.

6. Komisaris dan Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.
7. Bagi anggota Komisaris dan/atau Direksi yang berhenti sebelum ataupun setelah masa jabatannya berakhir harus menyusun pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya dan menyampaikannya kepada Pemegang Saham/RUPS untuk dimintakan pengesahannya.

6. The Board of Commissioners and Board of Directors may from time to time be discharged based on the GMOS Resolutions by stating the reasons.
7. Any member(s) of the Board of Commissioners and/or Board of Directors that resigns at an earlier stage of their official period must prepare their implementation report to submit to the Shareholders/GMOS for validation as required.

PROSES TATA KELOLA PERUSAHAAN

A. PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KOMISARIS DAN DIREKSI

1. Pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dan Direksi dilakukan oleh RUPS melalui proses yang transparan.
2. Mekanisme uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) dilakukan secara transparan, profesional, mandiri, dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Calon anggota Direksi yang telah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) wajib menandatangani kontrak manajemen sebelum ditetapkan pengangkatannya sebagai anggota Direksi.
4. Komisaris dan Direksi yang telah menyelesaikan masa jabatannya dapat dipertimbangkan untuk diangkat kembali selama satu kali masa jabatan berdasarkan penilaian kinerja pada periode sebelumnya.
5. Komisaris yang diangkat harus menyusun Term of Reference (TOR) yang memuat rencana kerja, sasaran/target yang ingin dicapai dan mengkomunikasikannya kepada Pemegang Saham.

CORPORATE GOVERNANCE PROCESS

A. APPOINTMENT AND DISCHARGE OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS

1. The appointment and discharge of the Board of Commissioners and the Board of Directors is to be carried out by GMOS through a transparent process.
2. The fit and proper test mechanism must take into consideration the principles of transparency, professionalism, independence and accountability.
3. The candidate member of the Board of Directors, upon notification of having passed the fit and proper test, must sign a management contract prior to his/her official inauguration.
4. The Board of Commissioners and the Board of Directors whose official period has expired may be considered for reappointment for next official period subject to the evaluation of their performance during the preceding period.
5. The selected Board of Commissioners must prepare Term of Reference (TOR) containing their work plan, target and communicate it to the Shareholders.

B. PROGRAM PENGENALAN PERSEROAN

1. Komisaris dan/atau Direksi yang baru wajib diberikan program pengenalan mengenai Perseroan yang bersangkutan.
2. Tanggungjawab untuk mengadakan program pengenalan Komisaris yang baru berada pada Komisaris Utama.
3. Tanggung jawab untuk mengadakan program pengenalan Direksi yang baru berada pada Direktur Utama.
4. Program pengenalan meliputi:
 - Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh Perseroan.
 - Gambaran mengenai Perseroan.
 - Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit.
 - Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Komisaris dan Direksi.

B. COMPANY INTRODUCTION PROGRAM

1. Newly assigned Board of Commissioners and/or Board of Directors is to be provided with the related company introduction program.
2. The responsibility for the implementation of company introduction program to the newly assigned Board of Commissioners is assumed by the Chief Commissioner.
3. The President Director is responsible for carrying out an introductory program to the newly assigned Board of Directors.
4. The Company Introduction Program includes:
 - Adaptation of GCG principles by the Company.
 - Description about the Company.
 - Description about the delegated authority, internal and external audit, internal control system and policy, including Audit Committee.
 - Description about the tasks and responsibilities of the Board of Commissioners and Board of Directors.

C. RJPP, RKAP, dan SCI

1. Direksi wajib menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP) dan Rencana Jangka Panjang Perseroan (RJPP) dengan disetujui Komisaris, dan disahkan oleh RUPS.
2. Direksi wajib mengirimkan usulan RKAP kepada Komisaris dan Pemegang Saham untuk dimintakan pengesahan kepada RUPS Tahunan selambat-lambatnya 60 hari sebelum tahun buku baru mulai berlaku.

C. RJPP, RKAP, AND SCI

1. The Board of Directors must prepare the Company Work Plan and Budget (RKAP) and Company Long-Term Plan (RJPP) to be approved by the Board of Commissioners and validated by the GMOS.
2. The Board of Directors must submit the proposed RKAP to the Board of Commissioners and Shareholders for validation by the Annual GMOS by no later than 60 days prior to the new fiscal year becomes effective.

3. Komisaris memberikan masukan-masukan pada saat penyusunan RJPP dan RKAP, serta melakukan pembahasan bersama-sama dengan Direksi sebelum memberikan persetujuannya.
4. RUPS Tahunan mengesahkan RKAP tahun buku berikutnya yang diadakan selambat-lambatnya pada hari ke-30 bulan pertama setelah tahun buku baru dimulai.
5. Direksi bertanggung jawab atas pelaksanaan RJPP dan RKAP serta melaksanakan evaluasi dan pengendaliannya..
6. Setiap perubahan RKAP harus disetujui oleh RUPS, kecuali ditentukan lain dalam keputusan RUPS.
7. Komisaris memantau pelaksanaan RKAP dan kesesuaiannya dengan RJPP, serta memberikan masukan-masukan dalam upaya pencapaiannya.
8. Perjanjian Penunjukan Anggota Direksi (Statement of Corporate Intent/SCI) ditandatangani oleh anggota Direksi yang bersangkutan dan kuasa Pemegang Saham pada saat penunjukan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi, yang memuat persyaratan penunjukan dan pemberhentian termasuk peran dan tanggung jawab

3. The Board of Commissioners is to give feedback and recommendations during the RJPP and RKAP preparation, and shall enter into a discussion with the Board of Directors before any approval is given.
4. The Annual GMOS must validate the next fiscal year's RKAP by no later than the 30th day of the first month of the new fiscal year.
5. The Board of Directors must be responsible for the execution of RJPP and RKAP as well as their evaluation and control.
6. Any amendment of RKAP must be approved by the GMOS, except otherwise provided for in the GMOS Resolutions.
7. The Board of Commissioners must monitor the execution of RKAP and its compatibility with RJPP in addition to providing feedback and recommendations for achievements.
8. The Statement of Corporate Intent/SCI is to be ratified by the respective members of the Board of Directors and Shareholder representatives by the time the respective member is assigned as the member of the Board of Directors, and shall contain the requirements for assignment and discharge including their roles and responsibilities.

D. KONFLIK KEPENTINGAN

1. Konflik kepentingan adalah situasi dimana seseorang karena kedudukan atau wewenang yang dimiliki di Perseroan, mempunyai kepentingan pribadi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas yang diamanatkan oleh Perseroan secara objektif. Konflik kepentingan menimbulkan adanya perbedaan antara kepentingan ekonomis pribadi atau keluarga dengan kepentingan ekonomis Perseroan.
2. Pemegang Saham tidak diperkenankan mencampuri kegiatan operasional Perseroan yang menjadi tanggung jawab Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. CONFLICT OF INTERESTS

1. Conflict of interests represents a situation in which a person for his/her position or authority in the Company shows personal interests affecting the objective implementation of the tasks assigned by the Company. It creates variation between personal economic interests and that of the Company.
2. The Shareholders may not interfere with the corporate operational activities for which the Board of Directors is responsible as stated in the Articles of Association and applicable laws and regulation.

3. Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai anggota Direksi pada BUMN, BUMD, badan usaha milik swasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
4. Komisaris dan Direksi wajib melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain.
5. Komisaris tidak boleh mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuan untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis dalam hubungan satu sama lain dan terhadap Direksi.
6. Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai anggota Direksi pada BUMN, BUMD, badan usaha milik swasta, jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/ lembaga pemerintah pusat dan daerah, serta jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan, kecuali persetujuan RUPS.
7. Komisaris dan Direksi dilarang melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dan mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan Perseroan yang bersangkutan, selain gaji dan fasilitas yang diterimanya sebagai Direksi dan Komisaris, yang ditentukan oleh RUPS.
8. Antara para anggota Direksi maupun anggota Komisaris dan antara anggota Komisaris dengan anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda (menantu atau ipar).
9. Jajaran/Karyawan PT Brantas Abipraya tidak boleh merangkap jabatan lain pada usaha swasta yang dapat menimbulkan benturan kepentingan secara langsung maupun tidak langsung dengan kepentingan Perseroan.
10. Apabila terjadi sesuatu hal dimana kepentingan Perseroan berbenturan dengan kepentingan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, maka yang berhak mewakili Perseroan adalah :
 - a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan yang ditunjuk oleh anggota Direksi lain yang tidak mempunyai benturan kepentingan.

3. The Board of Commissioners is forbidden to take concurrent membership in any other State or Regional Owned Enterprise, or any private enterprise, and other official position that may cause conflict of interests.
4. The Board of Commissioners and the Board of Directors report to the Company on their shareholding or that of their relatives in the Company or any other Company.
5. The Board of Commissioners may not have interests which may alter their ability to carry out their tasks in an independent and critical manner in the relationship with each other and with the Board of Directors.
6. The Board of Commissioners may not take concurrent membership of the Board of Directors in any other State or Regional Owned Enterprise, any private enterprise, other structural or functional position in either central or regional government instance, and other official position that may create conflict of interests, except approved by GMOS.
7. The Board of Commissioners and Board of Directors may not deal with transaction with conflict of interests and take personal advantages from the company activities other than remuneration and allowances they earn from being the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors as determined by GMOS.
8. Between the members either the Board of Directors or the Board of Commissioners and vice versa may exist up to the third degree, either straight or to the side line as well as related by marriage (son/daughter in law or brother/sister in law) are disallowed having the blood relatives.
9. PT Brantas Abipraya employees are disallowed taking concurrent assignment in any private enterprise that may create conflict of interests, whether directly or not, with the company interests.
10. In any event that the company interests should conflict with that of the members of Board of Directors and/or the members of Board of Commissioners, those eligible to represent the Company shall be:
 - a. Other members of the Board of Directors having no conflict of interests with the Company as appointed by the rest of the Board of Directors members that have no conflict of interests.

- b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
 - c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan Perseroan dengan Perseroan.
11. Dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan dan tidak ada satupun anggota Dewan Komisaris, maka Perseroan diwakili oleh pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS.

E. MANAJEMEN RISIKO

1. Penilaian risiko merupakan suatu rangkaian tindakan yang dilaksanakan Direksi dalam rangka identifikasi, analisis, dan menilai risiko yang dihadapi Perseroan untuk mencapai sasaran usaha yang ditetapkan.
2. Proses analisis risiko meliputi estimasi atas signifikansi dampak yang akan timbul, penilaian mengenai tingkat kemungkinan terjadinya risiko dan penetapan langkah yang diperlukan untuk mengatasi risiko tersebut.
3. Direksi melakukan identifikasi dan kajian terhadap potensi risiko yang dihadapi Perseroan.
4. Direksi menetapkan strategi dan kebijakan penanganan pengelolaan risiko serta melakukan pengawasan atas pelaksanaannya.
5. Direksi mengungkapkan kebijakan yang diterapkan Perseroan menyangkut pengelolaan risiko dalam Laporan Tahunan.
6. Direksi menyusun pedoman penanganan masalah dengan stakeholders yang berkaitan dengan pengelolaan jasa konstruksi dan jasa lainnya, misalnya proses tender dan hubungan dengan mitra kerja.
7. Direksi memberikan informasi hasil analisis risiko yang dilakukan kepada Komisaris sesuai dengan tingkat kebutuhan.

- b. The Board of Commissioners in the event that all of the Board of Directors members have conflict of interests with the Company; or
 - c. Any other party appointed by the GMOS in the event that all members of the Board of Directors or the Board of Commissioners have conflict of interests with the Company.
11. In the event that all of the members of the Board of Directors have conflict of interests with the Company but none of the members of the Board of Directors does, the Company, thus, shall be represented by other parties appointed by the GMOS.

E. RISK MANAGEMENT

1. The risk assessment comprises a set of actions taken by the Board of Directors in order to identify, analyze, and assess the risk the Company may come across in achieving the determined business targets.
2. The process includes estimating the significance of impact that may arise, assessment on the risk event likelihood and determining the required steps to overcome such risk.
3. The Board of Directors shall conduct identification and review on the potential risk for the Company.
4. The Board of Directors is to determine the risk management strategy and policy and supervise their implementation.
5. The Board of Directors must elaborate the policy applied by the Company with respect to the risk management in the Annual Report.
6. The Board of Directors must prepare the guidelines for problem solving with the stakeholders with respect to the management of construction and other services, i.e. bidding process and relation with partners.
7. The Board of Directors must provide the Board of Commissioners with the result of risk analysis carried out in accordance with the requirement level.

8. Komisaris memantau pelaksanaan pengelolaan risiko Perseroan dan memberikan masukan untuk perbaikan.
9. Dalam melaksanakan tugasnya SPI juga melakukan kajian terhadap kecukupan pengelolaan risiko yang diterapkan Perseroan sebagai bahan kajian risiko kepada Direksi.

F. PENGAMBILAN KEPUTUSAN

1. Semua keputusan dalam rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan jika tidak dicapai kata sepakat maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak/voting.
2. Jika terdapat pendapat yang berbeda dalam rapat (dissenting opinion) harus didokumentasikan dalam notulen rapat.
3. Setiap keputusan yang diambil harus memperhatikan kepentingan stakeholders Perseroan, risiko yang melekat, dan kewenangan yang dimiliki oleh setiap pengambil keputusan.
4. Hak mengemukakan pendapat dijunjung tinggi dalam upaya memberikan masukan peningkatan kinerja Perseroan.
5. Keputusan-keputusan yang mengikat dapat pula diambil tanpa diadakan rapat Komisaris/Direksi, sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
6. Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi harus konsisten dalam menjalankan keputusan-keputusan yang telah ditetapkan.

G. MEDIA KOMUNIKASI DAN INFORMASI

1. Pemegang Saham, Komisaris, dan stakeholders lainnya berhak memperoleh informasi yang lengkap, akurat dan tepat waktu mengenai Perseroan secara proporsional.
2. Direksi bertanggungjawab untuk memastikan agar informasi mengenai Perseroan diberikan kepada

8. The Board of Commissioners monitors the risk analysis implementation
9. The Company is to give recommendations for improvement.

F. DECISION MAKING

1. All decisions in any meeting are made through consultation for consensus and when agreement cannot be reached, it is to be made by voting.
2. Any event of dissenting opinions in a meeting should be documented in the minutes of meeting.
3. Each decision must be made by taking into account the best interests of the stakeholders, key risks, and authority held by each of the decision maker.
4. The right for opinion is highly upheld to ensure a provision of feedback for the improvement of company performance.
5. Binding decisions may also be made without the Board of Commissioners/the Board of Directors holding any meeting, provided that all of the Board members approve the method used and the materials on which the decision is made.
6. The Shareholders and the Board of Commissioners and the Board of Directors must show consistency in applying the decisions that have been made.

G. COMMUNICATION AND INFORMATION MEDIA

1. The Shareholders, the Board of Commissioners, and other stakeholders reserve the right to proportionally obtain complete, accurate, and punctual information with respect to the Company.
2. The Board of Directors is responsible to ensure the provision of complete, accurate and punctual

Komisaris dan Pemegang Saham secara lengkap, akurat, dan tepat waktu.

3. Direksi melakukan komunikasi secara efektif dengan unit kerja, sesama Direksi, Komisaris, dan Pemegang Saham melalui media komunikasi yang tepat dan efisien.
4. Direksi menetapkan kebijakan mengenai pengelolaan informasi termasuk klasifikasi kerahasiaan informasi.
5. Sekretaris Perseroan memastikan informasi yang dikelola valid, lengkap, akurat, tepat waktu dan relevan dalam membantu pengambilan keputusan.
6. Perseroan senantiasa mengoptimalkan penggunaan media komunikasi dan informasi yang tersedia.

information with respect to the Company for the Shareholders.

3. The Board of Directors establishes effective communication with the working units, fellow Board of Directors, the Board of Commissioners, and Shareholders through appropriate and efficient media.
4. The Board of Directors determines the policy on information management including confidentiality classification
5. The corporate secretary ensures that valid, complete, accurate, punctual and relevant information is managed in order to facilitate the decision making.
6. The Company at all time optimizes the use of available media of communication and information.

H. PENDELEGASIAN WEWENANG

1. Direksi mendelegasikan sebagian wewenang pengelolaan Perseroan kepada jajaran di bawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan pertimbangan untuk menunjang kelancaran tugas dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas.
2. Kepala unit kerja harus melaksanakan wewenang yang didelegasikan tersebut dengan penuh tanggung jawab dan memberikan laporan pelaksanaannya secara berkala kepada Direksi.
3. Pendelegasian wewenang dikaji secara periodik untuk disesuaikan dengan tuntutan perkembangan Perseroan.
4. Pendelegasian wewenang yang dilakukan tidak melepaskan tanggung jawab Direksi.

H. DELEGATION OF AUTHORITY

1. The Board of Directors delegates part of company management authorities to the ranks below subject to applicable laws and regulations in consideration of supporting an accelerated task implementation while improving efficiency and effectiveness.
2. The head of working unit must carry out such delegated authority in full responsibility and the report of which must be provided for the Board of Directors on a regular basis.
3. The delegation of the authority must be reviewed on a periodic basis for adjustment with the company development demand.
4. The delegation of the authority must not waive the Board of Directors' responsibility.

I. PENGELOLAAN KEUANGAN

1. Keuangan Perseroan harus dikelola secara Professional dengan mempertimbangkan risiko serta menggunakan prinsip kehati-hatian.

I. FINANCIAL MANAGEMENT

1. The corporate financial must be managed in such a professional manner taking into account any potential risks while utilizing the principles of precaution.

2. Direksi bertanggung jawab untuk :

- Menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.
 - Meningkatkan pendapatan bersih Perseroan dengan meningkatkan efisiensi penggunaan dana, meminimalkan biaya dan meningkatkan penjualan jasa Perseroan.
3. Penyusunan anggaran dilakukan melalui koordinasi antar unit untuk mensinergikan usulan anggaran setiap unit.
 4. Penetapan anggaran harus mempertimbangkan kebutuhan, sumber daya Perseroan, keterbatasan keterbatasan, serta analisis peluang pasar terhadap kemungkinan pencapaiannya (realistis).
 5. Evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran dan analisis terhadap variace yang terjadi dilakukan secara berkala di masing-masing unit dan/atau Perseroan secara menyeluruh.
 6. Perseroan menetapkan kebijakan yang jelas dalam hal pelimpahan wewenang pemberian otorisasi terhadap pengeluaran uang.
 7. Kegiatan Perseroan dilaksanakan dengan mengacu kepada anggaran yang telah ditetapkan.
 8. Kegiatan Perseroan diluar anggaran yang telah ditetapkan harus dilaporkan kepada Komisaris.
 9. Setiap unit kerja harus mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan di unit kerjanya masing-masing.
 10. Pemantauan pengelolaan keuangan oleh Direksi dilakukan oleh Komisaris.

2. The Board of Directors is responsible for:

- The preparation of financial report in accordance with the national accounting standard as applicable.
 - The increase of net profit of the Company by improving efficiency in the use of budget, reducing cost, and improving the sale of services offered by the Company.
3. The budget preparation through coordination between units to synergize the financial plan proposed by each unit.
 4. The budget decision must take into consideration the company needs, resources, limitations, and realistic market analysis.
 5. The evaluation of budget implementation and analysis of arising variances are carried out on a periodic basis both in respective unit and throughout the company.
 6. The Company determines a clear policy with respect to the delegation of authority and authorization of expenditures.
 7. The company activities are carried out with reference to the agreed budget.
 8. The company activities excluded in the agreed budget must be reported to the Board of Commissioners.
 9. Each working unit is responsible for their respective financial management.
 10. The Board of Commissioners is to monitor the financial management by the Board of Directors.

J. SUKSESI MANAJEMEN

1. Direksi menetapkan persyaratan jabatan dan proses seleksi untuk Kepala Biro / Divisi / Wilayah / Cabang dan jabatan lain dibawahnya sesuai dengan kebutuhan Perseroan dalam menjalankan strategi.

J. MANAGEMENT SUCCESSION

1. The Board of Directors defines job requirements as well as selection process for Heads of Bureau/Division/ Regional/Branch and other respective subordinate offices as required by the Company in carrying out its strategy.

2. Penetapan untuk jabatan satu tingkat dibawah Direksi harus dilaporkan kepada Komisaris.
3. Direksi menetapkan program pengembangan kemampuan karyawan Perseroan baik fungsional maupun struktural secara transparan.
4. Komisaris memantau pengisian formasi jabatan satu tingkat dibawah Direksi dalam upaya menjaring dan mengusulkan calon anggota Direksi kepada RUPS.
5. Penempatan dalam jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai kompetensi, prestasi kerja dan syarat-syarat objektif.

K. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERSEROAN

1. Direksi menetapkan dan menjalankan program Perseroan yang terkait dengan tanggung jawab sosial Perseroan secara periodik dan melaporkannya kepada Komisaris serta Pemegang Saham.
2. Direksi harus memastikan bahwa Perseroan melaksanakan tanggung jawab sosialnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Komisaris memantau dan memberikan masukan terhadap pelaksanaan program Perseroan yang terkait dengan tanggung jawab sosial Perseroan.
4. Pelaksanaan program Perseroan yang terkait dengan tanggung jawab sosial Perseroan dimuat dalam Laporan Tahunan Perseroan.
5. Direksi wajib memastikan bahwa aset-aset dan lokasi usaha serta fasilitas Perseroan lainnya, memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan pelestarian lingkungan, kesehatan, dan keselamatan kerja.

L. PENGENDALIAN INTERNAL

1. Direksi harus menetapkan Sistem Pengendalian Internal yang efektif untuk mengamankan investasi dan aset Perseroan.
2. SPI melakukan penelaahan terhadap kecukupan sistem

2. The discharge of any one-level subordinate office must be reported to the Board of Commissioners.
3. The Board of Directors defines the employee capacity building program for both functional and structural lines in a transparent manner.
4. The Commissioner monitors the staffing formation one level below the Board of Directors in an attempt to select and propose membership candidate of the Board of Directors to the GMOS.
5. The office deployment is done by taking into consideration competence-based professionalism, work achievements, and objective requirements.

K. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

1. The Board of Directors is to define and carry out the programs with respect to the corporate social responsibility on a periodic basis and provide related report to the Board of Commissioners and Shareholders.
2. The Board of Directors must ensure that the Company has conducted its social responsibility in accordance with applicable laws and regulations.
3. The Board of Commissioners is to monitor and provide feedback to the program implementation with respect to the corporate social responsibility.
4. The program implementation with respect to the corporate social responsibilities to be included in the company annual report.
5. The Board of Directors must ensure that the company assets and business locations and other facilities are in compliance with the applicable laws and regulations with respect to conservation and occupational health and safety.

L. INTERNAL CONTROL

1. The Company is to create an effective internal control system to safeguard the company investments and assets.
2. SPI is to study an adequacy of the company internal

pengendalian internal Perseroan termasuk dalam penyusunan Laporan Keuangan Perseroan.

3. Sistem Pengendalian Internal antara lain mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - Lingkungan pengendalian internal.
 - Pengkajian dan pengelolaan risiko usaha.
 - Aktivitas pengendalian.
 - Sistem informasi dan komunikasi.
 - Monitoring.
4. Direksi menindaklanjuti laporan hasil audit yang dilaksanakan SPI maupun Auditor Eksternal dan melaporkan perkembangan tindak lanjut tersebut kepada Komisaris.
5. Komisaris memantau perkembangan tindak lanjut atas laporan hasil audit SPI maupun Auditor Eksternal.
6. Komisaris memberikan penilaian dan masukan terhadap laporan hasil audit SPI dan Auditor Eksternal yang mencakup materi laporan, sasaran audit, ruang lingkup audit.
7. Komisaris mengawasi dan memantau kepatuhan Direksi dan tim manajemen dalam menjalankan peraturan perundang-undangan.

M. PELAPORAN

1. Dalam waktu lima bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup, Direksi wajib menyampaikan laporan tahunan yang telah ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Komisaris kepada RUPS untuk memperoleh pengesahan.
2. Direksi wajib mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara tepat waktu, akurat, jelas dan secara objektif.
3. Laporan Tahunan disamping memuat hal-hal yang

control over system including that in the preparation of the company financial statement.

3. The Internal Control System includes such issues as the following:
 - Internal Control Environment
 - Business risk analysis and management.
 - Control activities
 - Information and communication system.
 - Monitoring.
4. The Board of Directors must follow up the audit reports submitted by either SPI or External Auditor and report the follow-up progress to the Board of Commissioners.
5. The Board of Commissioners is to monitor the follow-up actions for either SPI or External Auditor's report.
6. The Board of Commissioners must provide evaluation and feedback against the audit reports submitted by either SPI or External Auditor which include the report materials, audit targets, and scope of auditing work.
7. The Board of Commissioners is to supervise and monitor the Board of Directors and management team's compliance with the laws and regulations.

M. REPORTING

1. Within five months after the closing of current fiscal year, the Board of Directors must submit an annual report signed by all of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners to the GMOS for validation purpose.
2. The Board of Directors must disclose material information in the company annual and financial statement in accordance with applicable laws and regulations in such a timely, accurate, clear-cut and objective manner.
3. The annual report must not only contain issues

telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, juga memuat mengenai perkembangan dan upaya Perseroan dalam penerapan GCG.

4. Komisaris wajib membahas laporan tahunan secara bersama-sama dengan Direksi, sebelum menyetujui dan menyampaikannya kepada RUPS.
5. Dengan ditandatangani bersama laporan tahunan, semua anggota Direksi dan Komisaris bertanggung jawab atas isi laporan tahunan dimaksud.
6. Komisaris menyampaikan laporan pelaksanaan kerja Komisaris yang telah dilakukan dan program kerja Komisaris untuk periode selanjutnya kepada Pemegang Saham.
7. Komisaris menyampaikan laporan penilaian kinerja masing-masing Direksi kepada Pemegang Saham.
8. Direksi menyampaikan laporan khusus kepada Komisaris dan Pemegang Saham setiap ada kejadian penting dan/atau atas permintaan Komisaris/ Pemegang Saham.
9. Direksi menyampaikan Laporan Manajemen setiap triwulan kepada Komisaris paling lambat satu bulan setelah triwulan berakhir.
10. Direksi menetapkan mekanisme penyampaian laporan pertanggungjawaban setiap unit kerja dalam suatu sistem pengendalian internal yang memadai.

N. RUPS, RAPAT LAINNYA dan RISALAH RAPAT

1. RUPS Tahunan diselenggarakan sebanyak dua kali, yaitu selambat-lambatnya pada hari ketiga puluh bulan pertama dan dalam bulan Juni setelah penutupan tahun buku.
2. RUPS Luar Biasa diadakan setiap saat, jika dianggap perlu oleh Direksi dan/atau Komisaris dan/atau Pemegang Saham.
3. Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan untuk kepentingan Perseroan berwenang menyelenggarakan RUPS lainnya.

determined by applicable laws and regulations, but also that with respect to the corporate progress and actions in the implementation of GCG.

4. The Board of Commissioners must discuss the annual report with the Board of Directors before any approval and submission to the GMOS.
5. Upon mutual ratification of the annual report, all of the members of both Boards are responsible for the content of the said annual report.
6. The Board of Commissioners must submit their program implementation reports which also include the program for next period to the Shareholders.
7. The Board of Commissioners must submit the performance evaluation report of the Board of Directors to the Shareholders.
8. The Board of Directors must submit their special reports to the Board of Commissioners and Shareholders in any event of special occasion and/or as requested by the Board of Commissioners and Shareholders.
9. The Board of Directors must submit their management reports on quarterly basis to the Board of Commissioners by no later than one month since the closing of the last quarter.
10. The Board of Directors defines an accountability report submission mechanism for each working unit in an adequate internal control system.

N. GMOS, OTHER MEETINGS AND MINUTES OF MEETING

1. Annual GMOS is conducted two times, i.e. no later than the thirtieth day of the first month and in June after the fiscal year closing.
2. Extraordinary GMOS is conducted when deemed necessary by the Board of Commissioners and/or the Board of Directors and/or the Shareholders.
3. The Board of Directors organizes Annual GMOS and for the company benefit is authorized to hold another GMOS.

4. Rapat Komisaris dan Rapat Direksi harus diadakan secara berkala, yaitu sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan.
5. Rapat Gabungan Komisaris dan Direksi dilaksanakan tiga bulan sekali. Dalam kondisi tertentu, Rapat Gabungan dapat diadakan diluar jadwal tersebut untuk membahas hal-hal penting dan mendesak yang memerlukan persetujuan Komisaris. Risalah rapat dibuat oleh Sekretaris Dewan Komisaris.
6. Risalah rapat harus dibuat untuk setiap rapat dan dalam risalah rapat tersebut harus dicantumkan pendapat yang berbeda (dissenting comments) dengan apa yang diputuskan dalam rapat (bila ada).
7. Sekretaris Perseroan mendokumentasikan risalah Rapat Direksi maupun RUPS dan menyediakannya bila diminta oleh Pemegang Saham, Komisaris dan/atau Direksi.

O. PENILAIAN KINERJA

1. Pemegang Saham menilai kinerja Perseroan, Komisaris dan Direksi melalui mekanisme RUPS.
2. Komisaris menetapkan indikator penilaian kinerja untuk masing-masing Direksi dan menginformasikannya kepada Direksi yang bersangkutan dan Pemegang Saham.
3. Komisaris menyusun rencana kerja dan target kerja setiap awal tahun, melakukan evaluasi sendiri (self assessment) atas pencapaiannya.
4. Komisaris melaporkan kepada Pemegang Saham apabila terjadi gejala kemunduran kinerja Perseroan.
5. Direksi menetapkan tolok ukur kinerja masing-masing unit kerja untuk mendukung kinerja Perseroan.
6. Penilaian kinerja terhadap Divisi/Biro/Wilayah/Cabang dilakukan setiap tahun dan secara transparan.
7. Komisaris meminta/mendapatkan laporan kinerja teknologi informasi dari Direksi.

4. Each Board meets on a periodic basis, i.e. at least once in a month.
5. A joint meeting of the two Boards is to be held once in every three months. On a special condition, joint meeting may occur outside the above schedules in order to discuss urgent issues for which the Board of Commissioners' approval is required. The minutes of meeting must be made by the Board of Commissioners' Secretary.
6. Minutes must be made for each meeting in which dissenting comments over what have been decided in the meeting, if any, shall be specified.
7. The corporate secretary documents the minutes of either the Board of Directors meeting or GMOS and makes them available upon request by the Shareholders and the Board of Commissioners and/or Directors.

O. PERFORMANCE EVALUATION

1. The Shareholders evaluate the performance of the Company and the two Boards through the GMOS.
2. The Board of Commissioners defines the performance evaluation indicators for each of the members of the Board of Directors and informs them to the concerned BoD as well as Shareholders.
3. The Board of Commissioners is to prepare the work plan and work target in the beginning of each year, and carry out a self-assessment on their achievements.
4. The Board of Commissioners must report to the Shareholders in any event of performance backward symptom of the Company.
5. The Board of Directors defines the performance benchmarks for each working unit in favor of the corporate performance.
6. The performance evaluation for the Heads of Division/ Bureau/Regional/Branch is done every year in a transparent manner.
7. The Board of Commissioners may obtain information technology performance report from the Board of Directors.

- Komisaris menilai pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan manajemen risiko.

P. PROSES PENUNJUKAN DAN PERAN AUDITOR EKSTERNAL

- Auditor Eksternal harus ditunjuk oleh RUPS dari calon yang diajukan oleh Komisaris.
- Komisaris wajib menyampaikan kepada RUPS menyangkut alasan pencalonan dan besarnya honorarium/ imbal jasa yang diusulkan untuk Auditor Eksternal Perseroan.
- Direksi dapat mengusulkan calon-calon Auditor Eksternal kepada Pemegang Saham melalui Komisaris.
- Auditor Eksternal melakukan audit terhadap laporan keuangan Perseroan untuk memberikan pendapat atas kewajaran penyajian laporan keuangan secara independen dan profesional.
- Perseroan harus menyediakan bagi Auditor Eksternal semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan.
- Auditor Eksternal menyampaikan laporan hasil audit kepada Direksi dan Komisaris secara tepat waktu.

Q. MEKANISME KERJA KOMITE AUDIT, SPI, DAN AUDITOR EKSTERNAL

- Komite Audit bertugas membantu Komisaris dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas Auditor Eksternal dan Auditor Internall (SPI).
- Auditor Eksternal harus memberitahu Direksi dan atau Komisaris melalui Komite Audit bila menemukan kejadian atau indikasi pelanggaran di dalam Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Komisaris memantau perkembangan tindak lanjut atas laporan hasil audit SPI maupun Auditor Eksternal.
- Komite Audit melakukan penilaian atas proses penunjukan pemenang tender Auditor Eksternal yang dilakukan oleh panitia tender.

- The Board of Commissioners is to evaluate the Board of Directors' accountability in the implementation of risk management.

P. SELECTION PROCESS AND ROLE OF EXTERNAL AUDITOR

- The External Auditor is selected by GMOS from the candidates proposed by the Board of Commissioners.
- The Board of Commissioners presents to the GMOS on the selection rationales and proposed amount of honorary of the company External Auditor.
- The Board of Directors may propose any candidate for External Auditor to the Shareholders through the Board of Commissioners.
- The External Auditor is to perform audit of the company financial statement to provide opinions on the objectiveness of the financial statement presentation in an independent and professional manner.
- The Company must provide the External Auditor with the entire accounting records as well as supporting data as required.
- The External Auditor submits the audit report to the two Boards in a punctual manner.

Q. PERFORMANCE MECHANISM OF AUDIT COMMITTEE, SPI, AND EXTERNAL AUDITOR

- The Audit Committee assists the Board of Commissioners in ensuring an effective internal control system and effective task implementation either External or Internal Auditor (SPI).
- The External Auditor must notify the Board of Directors and/or Commissioners through the Audit Committee upon finding either event or indication of breach in the Company to any applicable laws and regulations.
- The Board of Commissioners is to monitor the follow-up actions for either SPI or External Auditor's report.
- The Audit Committee evaluates the process of award of External Auditor selection carried out by the bid committee.

R. BUDAYA DAN ETIKA KERJA

- Direksi wajib membuat suatu pedoman tentang perilaku etis (code of conduct) yang memuat nilai-nilai etika berusaha.
- Nilai-nilai budaya yang dianut oleh Perseroan harus mendukung visi, misi, tujuan dan strategi Perseroan serta harus diterapkan terlebih dahulu oleh jajaran pimpinan Perseroan untuk selanjutnya meresap kedalam jajaran Perseroan.
- Setiap insan Perseroan wajib menjunjung tinggi nilai-nilai etika yang dibangun dalam Perseroan.
- Budaya kerja dibangun untuk menjaga berlangsungnya lingkungan kerja yang profesional, jujur, terbuka, peduli, dan tanggap terhadap setiap kegiatan Perseroan serta kepentingan pihak stakeholders.
- Budaya kerja dikembangkan untuk memotivasi karyawan dalam bekerja.
- Seluruh insan Perseroan harus menerapkan budaya kerja dan sikap mental dasar Perseroan secara konsisten dan melakukan evaluasi secara periodik.
- Anggota Komisaris, Direksi, dan karyawan Perseroan dilarang untuk memberikan, atau menerima baik langsung ataupun tidak langsung sesuatu yang berharga kepada pelanggan atau seorang pejabat Pemerintah untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pemberian atau penerimaan suatu tanda terima kasih dalam kegiatan usaha, seperti hadiah, sumbangan atau entertainment tidak boleh dilakukan pada suatu keadaan yang dapat dianggap sebagai perbuatan yang tidak patut.
- Direksi menetapkan kebijakan tentang batas maksimal suatu tanda terima kasih yang diterimanya sebagaimana tersebut pada butir 8 di atas.

R. CULTURE AND CODE OF CONDUCT

- The Board of Directors prepares guidance for the code of conduct containing ethical principles of business.
- The cultural values adopted by the Company must be in favor of its vision, mission, objective and strategy and must first be exercised by the company leaders to inspire the entire corporation.
- Each of the company personnel must uphold the core values developed within the Company.
- The working culture is developed to preserve a professional, fair, transparent, prudent and responsive environment to any of the company activities as well as stakeholder's benefits.
- The working culture is developed to motivate the employees in their daily tasks.
- All company personnel must exercise the company working culture and key mental attitude in a consistent manner and evaluate them on a periodic basis.
- The two Boards' members and the employees are prohibited offering or accepting explicitly or implicitly anything of value to and from any customer or government official to influence or as a return for what has been done or any other actions as provided in applicable laws and regulations.
- In no way such an offering or acceptance to show gratitude in any business activity, i.e. gift, donation or entertainment should be done in any circumstance likely to be considered inappropriate.
- The Board of Directors determines policies on a maximum limit of acceptable expression of gratitude as stated in point 8 above.

S. PEMANTAUAN KETAATAN GCG

1. Perseroan harus secara aktif mengungkapkan sejauh mana pelaksanaan prinsip GCG dan masalah yang dihadapi.
2. Pemegang Saham berpartisipasi dalam melaksanakan penerapan GCG sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.
3. Direksi dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, dan prinsip GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, serta kewajaran.
4. Tim GCG yang dibentuk Direksi memastikan ketaatan terhadap aturan GCG dan secara berkala melaporkannya kepada Direksi dan Komisaris
5. SPI melakukan penilaian terhadap pelaksanaan penerapan GCG secara periodik dan melaporkan hasilnya kepada Direksi dan Komisaris.
6. Komisaris memantau efektivitas pelaksanaan praktik-praktik GCG yang diterapkan Perseroan dan melaporkannya kepada Pemegang Saham.

ORGAN PERSEROAN

A. HUBUNGAN ANTAR ORGAN PERSEROAN

Brantas meyakini bahwa hubungan yang wajar antar Organ Perseroan sangat berpengaruh positif terhadap keberhasilan pengelolaan Perseroan dan implementasi GCG. Dengan demikian, Brantas secara tegas memisahkan fungsi dan tugas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Komisaris dan Direksi sebagai Organ Perseroan.

Brantas mendorong Organ Perseroan agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tugas dilandasi oleh itikad baik dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggungjawab perseroan terhadap pihak yang berkepentingan (stakeholder) maupun pelestarian lingkungan.

S. MONITORING GCG COMPLIANCE

1. The Company must dynamically reveal the extent to which the GCG principles have been adapted as well as the problems encountered.
2. The Shareholders participate in the GCG implementation in agreement with their authorities and responsibilities.
3. The Board of Directors in carrying out their tasks must adapt the principles of professionalism and efficiency as well as that of GCG, i.e. transparency, accountability, responsibility, independency, and fairness.
4. The GCG team introduced by the Board of Directors must ensure compliance with the GCG rules and report the same on a periodic basis to the Board of Commissioners and the Board of Directors.
5. SPI must carry out evaluation to the GCG implementation on a periodic basis and report the same on a periodic basis to the Board of Commissioners and the Board of Directors.
6. The Board of Commissioners is to monitor the effectiveness of the GCG practices applied by the Company and report the same to the Shareholders.

COMPANY ORGAN

A. RELATIONSHIP BETWEEN COMPANY ORGANS

Brantas believes that a fair relationship between the company organs will give a positive influence to a successful company management and GCG implementation. Hence, Brantas clearly distributes the tasks and functions between the three company organs of General Meeting of Shareholders (GMOS), the Board of Commissioners and the Board of Directors.

Brantas also encourages the company organs to show a good faith at all time in their decision making and tasks performance abiding by the applicable laws and regulations with awareness of both company responsibility to the stakeholder and environmental conservation.

PT. Brantas Abipraya akan mendorong hubungan yang wajar antar Organ Perseroan. Masing-masing Organ Perseroan selalu menghormati dan bertindak sesuai fungsi dan peranan masing-masing, berhubungan atas dasar prinsip kesetaraan dan saling menghargai.

B. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

RUPS merupakan wadah bagi pemegang saham dalam mempengaruhi Perseroan. RUPS merupakan forum bagi Komisaris dan Direksi dalam melaporkan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas serta kinerjanya kepada Pemegang Saham. Agenda yang dibahas didalam RUPS antara lain adalah :

1. Penetapan arah dan strategi jangka pendek, jangka panjang Perseroan,
2. Pertanggungjawaban Direksi / Komisaris
3. Penilaian kinerja operasional dan keuangan,
4. Penetapan anggota Komisaris dan Direksi
5. Penetapan remunerasi Komisaris dan Direksi
6. Agenda lain yang diusulkan oleh Pemegang Saham/ Dekom/Direksi.

Rapat Umum Pemegang Saham terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa. Brantas berkewajiban untuk memberikan penjelasan yang lengkap dan informasi yang akurat kepada setiap Pemegang Saham berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS. Berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS :

1. Perseroan memberikan panggilan kepada Pemegang Saham, memberikan informasi mengenai agenda RUPS, termasuk usulan yang diajukan oleh Direksi;
2. Pemegang Saham mendapatkan penjelasan mengenai hal-hal lain dalam agenda RUPS yang diberikan sebelum dan / atau pada saat RUPS berlangsung;
3. Perseroan menjamin keputusan RUPS yang diambil melalui prosedur yang transparan dan adil;

PT. Brantas Abipraya encourages a fair relationship between the company organs. Each of the company organs must at all time show a mutual respect and take any action according to their respective functions and roles, deal with each other on the principles of equality and mutual consideration.

B. GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (GMOS)

The GMOS serves as a forum for the Shareholders to influence the Company. The GMOS also serves as a forum for the Board of Commissioners and the Board of Directors to present their accountability reports on their task implementation and performance to the Shareholders. The agenda of discussion during the GMOS will include:

1. Definition of both short and long-term direction and strategy of the Company,
2. Accountability of the two Boards
3. Operational and financial performance evaluation,
4. Introduction of members of the two Boards
5. Introduction of remunerations of the two Boards
6. Other agenda as proposed by the Shareholders and the two Boards.

The GMOS comprises the Annual GMOS and Extraordinary GMOS. Brantas is obliged to provide complete explanation and accurate information for each of the Shareholder with respect to the GMOS implementation. In relation to the GMOS implementation:

1. The Company issues invitation to the Shareholders, provide information as to the GMOS agenda, including recommendations proposed by the Board of Directors;
2. The Shareholders is explained on additional issues to the GMOS agenda given beforehand and/or during the GMOS implementation;
3. The Company ensures that GMOS Resolutions are agreed through a transparent and fair process;

- | | |
|---|---|
| <p>4. Perseroan memberikan risalah RUPS bagi setiap Pemegang Saham jika diminta. Risalah RUPS yang dibuat akan memuat pendapat yang mendukung maupun yang tidak mendukung terhadap keputusan yang dibuat;</p> | <p>4. The Company provides minutes of the GMOS for each of the Shareholder upon request. Minutes of the GMOS should contain opinions in favor of as well as opinions against the resolution reached;</p> |
| <p>5. Perseroan mengungkapkan kepada Pemegang Saham sistem penentuan gaji dan fasilitas bagi setiap anggota Komisaris dan Direksi serta rincian mengenai gaji dan tunjangan yang diterima oleh anggota Komisaris dan Direksi.</p> | <p>5. The Company provides the explanation for the Shareholders as to the judgment system of remuneration and facility given to each of the member of the Board of Commissioners and the Board of Directors along with a detailed summary of their take home pay.</p> |

TANGGAL	RAPAT	AGENDA	KEPUTUSAN RAPAT
12 Januari 2011	RUPS tentang Pengesahan RKAP Tahun 2011	<ol style="list-style-type: none"> Pengesahan RKAP Tahun 2011 Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (RKA PKBL) tahun 2011 Persetujuan pengagungan asset untuk memperoleh fasilitas kredit berupa tanah eks. Penyertaan Modal Negara (PMN) dan Perluasan Gedung Kantor Pusat PT Brantas Abipraya. Persetujuan prinsip penjualan aset tidak produktif berupa peralatan proyek, tanah serta tanah dan bangunan Penandatanganan Kontrak Manajemen (Key Performance Indicators/KPI) 	<ol style="list-style-type: none"> Menyetujui & mengesahkan RKAP Tahun 2011 Menyetujui & mengesahkan RKA PKBL Tahun 2011 Menyetujui pengagungan asset perusahaan berupa tanah eks. Penyertaan Modal Negara beserta peralatan lainnya untuk memperoleh fasilitas kredit CL sebesar Rp.450 milyar dan kredit NCL sebesar Rp. 1 triliun Menyetujui secara prinsip rencana penjualan asset tidak produktif. Penandatanganan Kontrak Manajemen antara Direksi dan Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham.
13 Juni 2011	RUPS tentang Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2010	<ol style="list-style-type: none"> Persetujuan laporan Tahunan Perseroan termasuk Pengesahan laporan Keuangan Tahun Buku 2010 Persetujuan & Pengesahan PKBL Tahun Buku 2010 Penetapan penggunaan laba Bersih Perseroan tahun buku 2010 Penetapan Gaji/Honorarium, fasilitas dan tunjangan lainnya untuk Tahun Buku 2011 serta tantiem bagi anggota Direksidan Dewan Komisaris Perseroan tahun 2010 Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan serta Pelaksanaan PKBL Perseroan Tahun Buku 2011 	<ol style="list-style-type: none"> Menyetujui & Mengesahkan Laporan Tahunan tahun Buku 2010 Menyetujui & Mengesahkan Laporan PKBL tahun Buku 2010 Menetapkan penggunaan laba Bersih Perseroan sebesar Rp.16.99 Milyar Penetapan Gaji/Honorarium di tetapkan kemudian hari, , fasilitas dan tunjangan lainnya mengacu pada PerMen BUMN No.Per-07/MBU/2010 tgl.27 Desember 2010 Melimpahkan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan kantor Akuntan Publik sebagai auditor independen.

C. KOMISARIS

Komisaris dalam menjalankan tugasnya berkewajiban :

- Memberikan pendapat dan saran kepada Pemegang Saham saat RUPS mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan yang diusulkan Direksi
- Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, melaporkan dengan segera kepada Pemegang Saham apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan atau hal-hal lain yang dipandang perlu untuk segera mendapat perhatian Pemegang Saham.
- Selalu berpegang teguh kepada Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Komisaris dapat menggunakan saran profesional yang mandiri dan / atau membentuk Komite Khusus atas biaya Perseroan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh Komisaris sendiri.

Implementasi pelaksanaan tugas Komisaris Brantas antara lain :

1. Komisaris bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap pengurusan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi serta memberi nasehat kepada Direksi terhadap rencana pengembangan Perseroan, rencana kerja dan anggaran tahunan Perseroan, pelaksanaan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan RUPS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Komisaris melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS;
3. Komisaris bertugas melaksanakan kepentingan perseroan dengan memperhatikan kepentingan para Pemegang Saham dan bertanggung jawab kepada RUPS;
4. Komisaris bertugas meneliti dan menelaah laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tersebut (sepanjang Komisaris setuju terhadap isi materi laporan tahunan);

C. THE BOARD OF COMMISSIONERS

The Board of Commissioners in carrying out their tasks is obliged to:

- Give opinion and recommendations to the GMOS on the Company Work Plan and Budget proposed by the Board of Directors.
- Keep informed on the company activity progress, immediately report to the Shareholders in any event of decreased performance of the Company or any other issues considered in need of attention of the Shareholders.
- Adhere at all time to the Articles of Association as well as applicable laws and regulations. The Board of Commissioners may make use of any independent professional advice and/or establish a Special Committee at the company expenses in agreement with the procedures determined by the Board of Commissioners.

The task implementation of the Board of Commissioners at Brantas will include:

1. The Board of Commissioners provides control over the company management activities carried out by the Board of Directors and recommendation for the same including the development plan, long-term plan, work plan and company annual budget, implementation of Articles of Association and the GMOS Decisions as well as applicable laws and regulations.
2. The Board of Commissioners carries out their tasks, authorities and responsibilities in conformity to the provisions set forth in both Articles of Association and GMOS resolutions;
3. The Board of Commissioners implements the corporate interests by taking into account the Shareholders interest while being responsible to the GMOS;
4. The Board of Commissioners studies and reviews the annual report prepared by the Board of Directors and then signs it (pending approval of material content of the report);

5. Komisaris memantau ketaatan Perseroan terhadap peraturan yang berlaku (compliance);
6. Komisaris melakukan evaluasi terhadap kemajuan penerapan praktik good corporate governance.

Kriteria Anggota Komisaris

Brantas menyadari sepenuhnya bahwa Pemegang Saham memiliki kewenangan penuh untuk mengangkat Komisaris. Namun demikian, untuk menjamin efektifitas tugas Dewan maupun anggota Komisaris, maka Perseroan perlu menetapkan kebijakan tentang kriteria anggota Komisaris yang sesuai kebutuhan. Brantas menetapkan kriteria komisaris antara lain sbb:

1. Mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit;
2. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindakan pidana yang merugikan keuangan negara dalam kurun waktu lima tahun sebelum pengangkatannya;
3. Tidak memiliki hubungan keluarga sedarah dengan anggota komisaris lain dan atau dengan anggota direksi sampai dengan derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda (menantu atau ipar);
4. Tidak boleh merangkap jabatan lain pada usaha swasta yang dapat menimbulkan berbenturan kepentingan secara langsung maupun tidak langsung dengan kepentingan Perseroan, kecuali dengan ijin dari RUPS dan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku;
5. Memiliki integritas pribadi dan dedikasi;
6. Memahami manajemen Perseroan yang berkaitan dengan strategi bisnis usaha Perseroan;
7. Memiliki pemahaman mengenai industri konstruksi;
8. Memiliki latar belakang pendidikan formal dan informal yang relevan dengan bisnis perseroan;

5. The Board of Commissioners monitors the corporate compliance;
6. The Board of Commissioners evaluates the implementation progress of good corporate governance.

Criteria for the Board of Commissioners Membership

At Brantas, it is well-recognized that the Shareholders hold a full authority to assign the membership of the Board of Commissioner. Nevertheless, to ensure an effective task implementation of the Board of Commissioners and its members, the Company needs to determine a policy regarding suitable criteria of the membership of the Board of Commissioners. At Brantas, such criteria are determined as follows:

1. Able to conduct legal action and never pronounced of bankruptcy or being fault to have caused bankruptcy of any company;
2. Never penalized due to any crime causing loss of state finance within a period of five years prior to their assignments;
3. No blood relatives between the members of either the Board of Directors or the Board of Commissioners and vice versa is allowed up to the third degree, either straight or to the side line as well as related by marriage (son/daughter in law or brother/sister in law);
4. No concurrent assignment in any private enterprise that may create conflict of interests, whether directly or not, with the company interests is allowed, except otherwise approved by the GMOS in accordance with applicable laws and regulations;
5. Dedicated personality with integrity;
6. Have good knowledge of company management relating to various business strategies of the Company;
7. Have good knowledge of construction industry;
8. Have both formal and informal education background relevant with the Company's business field;

9. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
10. Mampu bekerja sama sebagai dewan.

Komisaris Perseroan harus dapat bekerja sama dengan anggota Komisaris lainya dan dengan Direksi dengan tetap berpedoman pada tanggung jawab masing-masing. Bagi anggota Komisaris yang baru diangkat perlu diberikan program pengenalan berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke fasilitas Perseroan, kunjungan ke kantor wilayah dan kantor cabang atau program lainnya. Pengadaan program pengenalan ini merupakan tanggung jawab Komisaris Utama. Perseroan akan secara teratur mengadakan program pembelajaran yang berkelanjutan bagi Komisaris dengan agenda dan materi sesuai kebutuhan Komisaris.

Komisaris Independen

Meskipun Brantas belum menetapkan Komisaris Independen, namun Brantas menyadari pentingnya keberadaan Komisaris dari kalangan di luar yang independen. Selain persyaratan umum Komisaris tersebut di atas, Komisaris Independen harus memenuhi kriteria sbb. :

- a. Tidak memiliki keterkaitan finansial, baik langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan atau Perseroan yang menyediakan jasa dan produk kepada Brantas dan afliasinya;
- b. Tidak bekerja kepada pemerintah termasuk departemen, lembaga dan kemiliteran dalam kurun waktu tiga tahun terakhir;
- c. Tidak menjabat sebagai Direksi di Perseroan yang terafiliasi dengan Brantas;
- d. Tidak bekerja di Brantas atau afliasinya dalam kurun waktu tiga tahun terakhir;
- e. Bebas dari kepentingan dan aktifitas bisnis atau hubungan lain yang dapat menghalangi atau mengganggu kemampuan anggota Komisaris independen untuk bertindak atau perfikir secara bebas.

9. Dedicate sufficient time in their task implementation;
10. Able to cooperate as a board member.

The member must be able to cooperate with fellow members of the Board of Commissioners and the Board of Directors while taking into account their respective responsibilities. Newly assigned members must be provided with an introductory program comprising presentation, meeting, a visit to company facility as well as branch or regional offices, and other similar programs. Such introductory program will be the responsibility of Chief Commissioner. On a regular basis, the Company also conducts a sustainable training program for the Commissioners with suitable agenda and materials.

Independent Commissioner

In fact, no independent commissioner has yet to be designated, Brantas, however, realizes the significance of one from independent external entity. In addition to the above general requirements, independent commissioner must meet these criteria:

- a. Have no financial relation, both directly and indirectly, with the Company or with other Companies supplying their products and services for Brantas and its affiliates;
- b. Have no employment relationship with the government including the ministry, instance and military in the last three years;
- c. Have no concurrent position as Director in any company affiliated with Brantas;
- d. Have no employment in Brantas or its affiliates in the last three years;
- e. Free of other business interests, activities, or relationship that may impede or delay the members from independence of action and thought.

Rapat Komisaris

Komisaris mengadakan rapat sekurang-kurangnya satu kali sebulan. Rapat Komisaris terdiri dari rapat internal Komisaris dan atau rapat koordinasi dengan Direksi. Komisaris juga dapat mengadakan rapat sewaktu-waktu apabila dipandang perlu oleh Komisaris Utama atau atas usul sekurang-kurangnya 1/3 (satu per tiga) dari jumlah anggota Komisaris atau atas permintaan Direksi atau atas permintaan tertulis dari Pemegang Saham yang memiliki jumlah saham minimal 10% dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.

Rapat Komisaris membicarakan berbagai permasalahan bisnis Perseroan serta evaluasi terhadap kinerja Perseroan, atau pengelolaan Perseroan. Undangan rapat Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama atau salah satu Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama secara tertulis selambat-lambatnya tujuh hari sebelum terselenggaranya rapat. Undangan rapat dibuat mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat serta disertai bahan-bahan rapat undangan tersebut tidak disyaratkan apabila semua anggota hadir dalam rapat.

Rapat Komisaris adalah sah apabila dilakukan di wilayah Indonesia dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang mengikat apabila dihadiri atau diwakili oleh lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota Komisaris. Seorang anggota Komisaris dapat diwakili dalam rapat hanya oleh anggota Komisaris lainnya berdasarkan kuasa tertulis yang diberikan khusus untuk keperluan itu. Kuasa tersebut diartikan mempunyai semua wewenang pemberi kuasa kecuali disebutkan lain. Seorang anggota Komisaris hanya dapat mewakili seorang anggota Komisaris lainnya.

Seluruh Rapat Komisaris dibuatkan risalah rapat mencakup catatan atas segala sesuatu yang dibicarakan, argumentasi yang dikemukakan, keputusan yang diambil, serta pernyataan keberatan terhadap keputusan tersebut bila ada. Risalah tersebut ditandatangani oleh Ketua Rapat Komisaris dan oleh salah seorang anggota Komisaris yang ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang hadir. Salinan risalah tersebut berhak diterima oleh seluruh anggota Komisaris, walaupun yang bersangkutan tidak hadir dalam rapat.

Risalah rapat yang telah selesai dibuat harus dikirimkan selambat-lambatnya satu minggu setelah rapat. Revisi dan keberatan oleh peserta rapat atas risalah dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengiriman. Jika dalam jangka waktu tersebut tidak ada

The Board of Commissioners Meeting

The Board of Commissioners convenes a meeting at least once in a month. This meeting may comprise an internal meeting and coordination meeting with the Board of Directors. The Board of Commissioners may also hold meeting from time to time as deemed necessary by the Chief Commissioner or upon recommendation of no less than 1/3 (one thirds) of total members or upon request by the Board of Directors or upon request in writing by the Shareholders having at least 10% shares by specifying the issues to be discussed.

This meeting discusses various problems and evaluation with respect to either company performance or company management. The meeting invitation is issued by Chief Commissioner or one of the members assigned by the Chief Commissioner in writing by no later than seven days prior to the organization of meeting. The meeting invitation must specify the agenda, dates, time and venue of meeting while attaching related materials, no invitation will be needed should all of the members attend the meeting.

This meeting is considered valid if organized within any Indonesian jurisdiction and the decisions is so considered if attended or represented by more than ½ (a half) of the total members of the Board of Commissioners. A member can only be represented by another fellow member based on a written authority specifically issued for the purpose. Such authority means to hold a full authority of the endorser except otherwise specified. A member can only represent another fellow member.

To every Commissioner meeting, the minutes can be made to include records on any discussed topics, arguments proposed, decisions made, and statements of objection against such decisions, if any. The minutes will be signed by the meeting chairman and one of the Board members as appointed by and among those present in the meeting. A copy of the minutes of meeting must be distributed to all of the members of the Board of Commissioners, although the concerned may have not attended the meeting.

The minutes must be submitted by no later than one subsequent week. Revisions and objections by the meeting participants on the minutes can be submitted within a period of 14 (fourteen days) since the date of submission. In the event that within such period no response has been given, it can be concluded that the minutes have

tanggapan, maka disimpulkan risalah rapat tersebut sudah disetujui seluruh anggota Komisaris.

PT. Brantas Abipraya mengikuti prinsip GCG dalam praktik rapat Komisaris yang meliputi antara lain :

1. Setiap anggota Komisaris memiliki kesepakatan dan hak suara yang sama dalam mengemukakan pendapat. Tidak ada pihak yang mendominasi jalannya rapat;
2. Keputusan Rapat Komisaris diambil atas dasar musyawarah mufakat, jika tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak;
3. Seorang anggota Komisaris berhak mengeluarkan satu suara untuk anggota Komisaris lain yang diwakilinya, apabila pengambilan keputusan dilakukan melalui suara terbanyak;
4. Rapat Komisaris dapat mengundang Direksi dan/ atau pegawai Perseroan untuk memintai keterangan berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.

Kinerja Komisaris

Kinerja Komisaris dan anggota Komisaris akan dievaluasi setiap tahun oleh Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Kinerja Komisaris ditentukan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang terdapat dalam peraturan perundangan yang berlaku serta Anggaran Dasar Perseroan. Kriteria evaluasi formal disampaikan secara terbuka kepada Komisaris sejak pengangkatannya.

Hasil evaluasi terhadap kinerja Komisaris secara keseluruhan dan kinerja masing-masing anggota Komisaris secara individual akan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam skema kompensasi dan pemberian insentif bagi Komisaris. Hasil evaluasi kinerja masing-masing anggota Komisaris secara individual merupakan salah satu dasar pertimbangan bagi Pemegang Saham untuk menunjuk kembali anggota Komisaris yang bersangkutan. Hasil evaluasi kinerja Komisaris baik selaku Dewan maupun individu merupakan sarana penilaian serta peningkatan efektifitas Komisaris.

been agreed by the whole members of the Board of Commissioners.

PT. Brantas Abipraya follows the GCG principles in organizing the commissioners meeting, among others:

1. Each member reserves equal agreement and voting rights in expressing their opinions. No one should dominate the meeting;
2. The decision is made through deliberation for consensus, should no agreement be reached, it will be made by voting;
3. A member may take another vote in place of another member that he/she represented, if a decision is to be made by voting;
4. The Commissioner meeting may also involve the Board of Directors and/or employees for inquiries with respect to the issues to be discussed.

The Commissioner Performance

The performance of the Board of Commissioners and its members will be evaluated on an annual basis by the Shareholders through General Meeting of Shareholders (GMOS). The commissioner performance is measured by tasks, authority and responsibility as specified in the Articles of Association and laws applicable and regulations. The formal evaluation criteria must be openly addressed to the commissioners since their assignment.

The performance evaluation result either in overall or by individual member becomes an inseparable part of the compensation and incentive scheme for the commissioner. The performance evaluation result by individual member also underlies the Shareholders consideration to reassign the concerned member. The performance evaluation result either for the overall Board or individual member adds to an assessment tool for improved commissioner effectiveness.

Kriteria Kinerja Komisaris dinilai oleh Rapat umum Pemegang Saham, Kriteria evaluasi kinerja individu Komisaris antara lain meliputi :

1. Pemenuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan Perseroan, misal mengenai benturan kepentingan;
2. Komitmen dalam memajukan kepentingan Perseroan;
3. Kehadiran dalam rapat-rapat Komisaris maupun Komite;
4. Kontribusi dalam pelaksanaan tugas-tugas khusus;

Hubungan kerja Komisaris dengan Direksi

Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan, Komisaris menyelenggarakan pertemuan secara teratur dengan Direksi (rapat koordinasi) untuk membicarakan masalah Perseroan. Diluar pertemuan rutin tersebut, Komisaris berhak mengadakan pertemuan dengan Direksi apabila dibutuhkan. Dalam setiap pertemuan, informasi bagi Komisaris disiapkan dan diberikan secara tertulis oleh Direksi sebelum pertemuan sehingga memungkinkan Komisaris untuk mendalami permasalahan yang akan dibahas. Bila perlu Direksi dapat membantu membuat ringkasan permasalahan yang akan dibahas sepanjang tidak mempengaruhi esensi informasi.

Komisaris berhak meminta penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan kepada Direksi dan Direksi wajib memberikan penjelasan. Komisaris berhak memasuki bangunan-bangunan dan halaman-halaman atau tempat-tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa dokumen untuk keperluan verifikasi. Pelaksanaan hak Komisaris ini dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak boleh mengganggu pelaksanaan kegiatan operasional Perseroan.

The commissioner performance criteria are assessed by GMOS, which include:

1. Adherence to applicable laws and regulations and company policy, i.e. with respect to conflict of interests.
2. Commitment to promoting the corporate interests;
3. Presence in either Commissioner or Committee meetings;
4. Contribution in the implementation of special tasks;

The working relationship with the Board of Commissioners

As for the professional relationship of the Commissioners with the Directors in their implementation of controlling tasks, the Commissioners held coordination meetings with the Directors on a regular basis to discuss the corporate issues. Regardless, the Commissioners reserve the rights to hold the meeting with the Directors if considered necessary. In each meeting, the information for the Commissioners is prepared and provided in writing by the BoD before the meeting to enable the Commissioners to grasp the issues to be discussed. If necessary, the BoD may provide assistance by making summary of the issues to be discussed to the extent that it will not affect any essential information.

The Commissioners reserve the right to require explanation with respect to any issue as required from the BoD and the BoD must provide such explanation. The Commissioners reserve the right to enter any indoor or outdoor space or other premises used or controlled by the Company and reserve the right to inspect any documentation for a verification purpose. The exercise of these rights will be carried out in such a manner that they may not interfere with the company operational activities.

Komite-komite di bawah Komisaris

Komisaris berhak mendapatkan saran profesional yang independen atas beban perseroan untuk hal-hal yang menjadi tanggung jawab profesional Komisaris agar dapat menjalankan tugasnya secara efektif. Apabila diperlukan Komisaris berhak membentuk komite-komite sebagai alat bantu dalam menjalankan tugasnya. Komite-komite tersebut bertanggung jawab membantu Komisaris dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, serta membantu merumuskan kebijakan Komisaris sesuai ruang lingkup tugas komite yang bersangkutan.

Penetapan kebijakan tetap menjadi kewenangan Komisaris kecuali untuk hal-hal yang didelegasikan dalam Surat Keputusan Komisaris. Komite-komite tersebut diketuai oleh salah seorang anggota Komisaris. Komite-komite yang dapat dibentuk oleh Komisaris antara lain Komite Audit, Komite Risiko Usaha, Komite Nomisani serta Komite Remunerasi.

Komite Audit bertugas membantu Komisaris dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan audit internal.

Komite Risiko Usaha/Asuransi bertugas melakukan penilaian secara berkala dan memberikan rekomendasi tentang risiko usaha dan jenis serta jumlah asuransi yang ditutup oleh Perseroan dalam hubungannya dengan risiko usaha.

Komite Nominasi bertugas menyusun kriteria seleksi dan prosedur nominasi bagi anggota Komisaris, Direksi serta eksekutif puncak lainnya, membuat sistem penilaian dan memberikan rekomendasi tentang jumlah anggota Komisaris dan Direksi Perseroan. Komite Remunerasi bertugas menyusun sistem penggajian dan pemberian tunjangan bagi Komisaris, Direksi dan pegawai serta rekomendasi tentang :

1. Penilaian terhadap sistem remunerasi bagi Komisaris, Direksi dan pegawai tersebut;
2. Sistem pensiun; dan
3. Sistem kompensasi serta manfaat-manfaat lain yang didapatkan pegawai apabila Perseroan melakukan perampangan pegawai.

Committees under the Commissioner

The Commissioners reserve the right to obtain an independent professional advice at the company expenses with respect to issues for which they are professionally responsible to enable an effective task implementation. If necessary the Commissioners reserve the right to form committees to facilitate their task implementation. These committees are responsible for assisting the Commissioners in their tasks and responsibility implementation, and helps in the formulation of policies in accordance with the scope of work of the concerned committee.

The policy making must remain the Commissioners' authority except for the matters as delegated in the Resolution of Commissioners. These committees will be chaired by one member of the Board of Commissioners. The committees that can be established by the Commissioners are among others Audit Committee, Business Risk Committee, Nomination Committee, and Remuneration Committee.

The Audit Committee assists the Board of Commissioners in ensuring an effective internal control system and effective task implementation of either external or Internal Auditor.

The Business Risk/Insurance must carry out assessment on a periodic basis and give recommendations with respect to the business risk and type and number of assurance paid by the Company with respect to the business risk.

The nomination committee prepares a selection criteria and nomination procedure for the member of the Commissioners, BoD, and other top executives, defines assessment system and gives recommendations with respect to the number of members of the Commissioners and BoD. The remuneration committee defines the remuneration and allowance system for the Commissioners, BoD, and employees and gives recommendations with respect to:

1. Evaluation to such remuneration system for the Commissioners, BoD, and employees;
2. Pension system; and
3. Compensation system and other benefits for the employees if the Company should consider a layoff.

Komite-komite tersebut atau komite-komite lainnya dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan Perseroan serta disahkan dengan Surat Keputusan Komisaris. Komite ini dapat bersifat permanen atau sementara tergantung kebutuhan.

D. DIREKSI

Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan pengurusan Perseroan demi sebesar-besarnya kepentingan Perseroan. Direksi akan mengelola bisnis dan urusan perseroan dengan tetap memperhatikan keseimbangan kepentingan seluruh pihak yang berkepentingan dengan aktivitas Perseroan. Direksi akan bertindak secara cermat, berhati-hati dan dengan mempertimbangkan berbagai aspek penting yang relevan dalam pelaksanaan tugasnya. Direksi akan menggunakan wewenang yang dimiliki semata-mata untuk kepentingan Perseroan.

Direksi memiliki tugas dan wewenang antara lain memimpin dan mengurus perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektifitas Perseroan. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya, menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan.

Dalam melaksanakan tugasnya Direksi antara lain akan selalu :

1. Mematuhi Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku;
2. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
3. Menyiapkan secara tepat waktu rencana jangka panjang Perseroan, rencana kerja dan anggaran tahunan Perseroan, termasuk rencana-rencana lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha dan kegiatan Perseroan dan menyampaikannya kepada Komisaris untuk selanjutnya disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham guna mendapatkan pengesahan;
4. Mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi Perseroan sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu Perseroan;

These committees or that of others can be established as required by the Company and will be validated through a Resolution of Commissioners. This committee may be of either permanent or temporary nature according to the needs.

D. THE BOARD OF DIRECTORS

The Board of Directors in good faith and full responsibility performs the company management for the best interests of the Company. The Board of Directors manages the company business and dealings by keeping in mind balanced interests of the parties concerned with the company activities. The Board of Directors takes careful and cautious actions while taking into account various keys and relevant aspects in their task implementation. The Board of Directors makes use of authority given to them solely for the best interests of the Company.

The Board of Directors' job description includes leading and managing the Company in line with the company purposes and objectives and continuing to improve efficiency and effectiveness of the Company. The Board of Directors is fully responsible in their task implementation for the best interests of the Company to achieve its purpose and objectives, to control, nurture and look after the company wealth.

In implementing their tasks, the Board of Directors must always, among others:

1. Adhere at all time to the Articles of Association as well as applicable laws and regulations.
2. Take effort and make sure the operation of business and activities according to the company purpose and objectives;
3. Prepare in a punctual manner the company long-term plan, work plan and annual budget, including other plans in relation to the company business and activities and submit them to the Board of Commissioners to be subsequently presented to the General Meeting of Shareholders for approval;
4. Hold and maintain the company bookkeeping and administration according to prevalence for a Company;

5. Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian internal, terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan;
6. Memberikan pertanggungjawaban dan segala keterangan tentang keadaan dan jalannya Perseroan berupa laporan tahunan termasuk perhitungan tahunan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
7. Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Pemegang Saham;
8. Menyiapkan struktur organisasi Perseroan lengkap dengan perincian tugasnya;
9. Menjaga dan meningkatkan citra Perseroan.

Kriteria Anggota Direksi

Brantas menyadari sepenuhnya bahwa Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham memiliki kewenangan penuh untuk mengangkat Direksi. Namun demikian, untuk menjamin Dewan maupun anggota Direksi yang memiliki kinerja sesuai yang diharapkan, maka Perseroan perlu menetapkan kebijakan tentang kriteria anggota Direksi sesuai kebutuhan.

Brantas menerapkan kriteria Direksi Perseroan di antaranya meliputi:

1. Seseorang yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit, atau orang yang pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya.
2. Tidak memiliki hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ke tiga, baik menurut garis lurus maupun kesamping atau hubungan semenda

5. Prepare accounting system according to Financial Accounting standard and based on internal control principles, especially such function as management, recording, storage and supervision;
6. Provide accountability and any information on the company condition and operation comprising the annual report including annual calculation to the General Meeting of Shareholders;
7. Provide a periodic report according to method and schedule as stated in applicable provisions as well as other reports upon request by the Shareholders;
8. Prepare the company structure of organization completed with relevant job descriptions;
9. Retain and improve the company image.

Criteria for the Board of Directors Membership

Brantas fully recognizes that the Shareholders through the General Meeting of Shareholders hold full authority to assign the membership of the Board of Directors. Nevertheless, to ensure an effective task implementation of both the Board of Directors and its members, the Company requires determining a policy regarding suitable criteria of membership of the Board of Directors.

At Brantas, such criteria are determined as follows:

1. Any person able to conduct legal action and never pronounced of bankruptcy or being fault to have caused bankruptcy of any company, or any person never penalized due to any crime causing loss of state finance within a period of 5 (five) years prior to their assignments.
2. No blood relatives is allowed up to the third degree, either straight or to the side line as well as related by marriage (son/daughter in law or brother/sister in law)

- | | |
|---|---|
| (menantu atau ipar) dengan anggota Direksi lainnya dan anggota Komisaris; | with any member of either the Board of Directors or the Board of Commissioners; |
| 3. Memiliki integritas yang baik yang ditunjukkan dengan track record; | 3. Dedicated personality with integrity as evidenced in their track records; |
| 4. Memahami dan memiliki pengalaman dalam bisnis yang digeluti Perseroan dan atau pengalaman yang relevan dengan Kebutuhan Perseroan; | 4. Have good knowledge and experience of the company business field and/or experience relevant with the Company's requirement; |
| 5. Memiliki kualitas kepemimpinan yang baik; | 5. Have good leadership quality; |
| 6. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundangan yang berlaku termasuk Peraturan Perseroan dan arahan Pemegang Saham; | 6. Have commitment to compliance with applicable laws and regulations including the company policy as well as the Shareholders' directives. |
| 7. Mampu mewakili Perseroan dihadapan publik, Pemegang saham dan Stakeholders lainnya; | 7. Able to represent the Company before the public, Shareholders and other related Stakeholders; |
| 8. Memiliki dedikasi tinggi untuk memajukan Perseroan; | 8. Have elevated dedication to advance the Company; |
| 9. Memiliki watak baik dan mempunyai kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan jabatan yang didudukinya. | 9. Have good personality and ability to carry out tasks at their best efforts according to their positions. |

Program pengenalan yang diberikan kepada anggota Direksi, antara lain meliputi :

An introductory program given to the members of the Board of Directors includes:

- | | |
|--|--|
| 1. Direksi yang baru wajib diberikan program pengenalan mengenai Perseroan yang bersangkutan. | 1. Newly assigned Board of Directors must be provided with the related company introduction program. |
| 2. Tanggung jawab untuk mengadakan program pengenalan Direksi yang baru berada pada Direktur Utama. | 2. The President Director is responsible for carrying out an introductory program to the newly assigned Board of Directors. |
| 3. Tugas dan tanggung jawab Komisaris dan Direksi; | 3. Tasks and responsibilities of the Board of Commissioners and the Board of Directors. |
| 4. Program pengenalan meliputi: | 4. The Company Introduction Program includes: |
| <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh Perseroan. • Gambaran mengenai Perseroan. • Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit. | <ul style="list-style-type: none"> • Adaptation of the GCG principles by the Company. • Description about the Company. • Description about the delegated authority, internal and external audit, internal control system and policy, including Audit Committee. |

- Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Komisaris dan Direksi.

- Description about the tasks and responsibilities of the Board of Commissioners and the Board of Directors.

Rapat Direksi

Rapat Direksi diselenggarakan minimal 1 (satu) bulan sekali atau apabila dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Komisaris atau Pemegang Saham yang memiliki jumlah saham minimal 10% dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan. Dalam rapat Direksi dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan Perseroan sesuai dengan tugas, kewenangan serta kewajibannya, pembuatan keputusan yang dianggap perlu dan juga membuat evaluasi bisnis Perseroan.

Panggilan rapat Direksi dilakukan secara tertulis oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Perseroan dan disampaikan dalam jangka waktu sekurang kurangnya tiga hari sebelum rapat diadakan. Dalam panggilan tersebut harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. Panggilan rapat tersebut tidak disyaratkan apabila semua anggota Direksi hadir dalam rapat.

Rapat Direksi adalah sah apabila dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota Direksi atau wakilnya. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat hanya oleh anggota Direksi lainya berdasarkan kuasa tertulis yang diberikan khusus untuk keperluan itu. Seorang anggota Direksi hanya dapat mewakili seorang anggota Direksi lainnya.

Semua keputusan dalam rapat Direksi diambil dengan musyawarah untuk mufakat. Jika hal tersebut tidak dapat dilaksanakan, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak. Setiap anggota Direksi berhak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk anggota Direksi yang diwakilinya. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul tersebut dianggap ditolak, kecuali mengenai diri orang akan ditentukan dengan pemungutan suara secara tertutup. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.

The Board of Directors Meeting

The BoD meeting is held at least once in every month or as deemed necessary by one or more members of the Board of Directors or upon request in writing by the one or more members of the Board of Commissioners or Shareholders having at least 10% shares by specifying the issues to be discussed. The BoD meeting discusses issues with respect to the Company according to their tasks, authorities and responsibilities, decision making as deemed necessary, and preparation of the company business evaluation.

The meeting invitation is submitted in writing by one of the members entitled to represent the Company by no later than three days prior to the meeting. The meeting invitation specifies agenda, date, time and venue of the meeting. No meeting invitation is required should all the members of the Board of Directors be present in the meeting.

This meeting is considered valid if organized within any Indonesian jurisdiction and entitled to make a binding resolution if attended or represented by more than ½ (a half) of the total members of the Board of Directors or their representatives. A member can only be represented by another fellow member based on a written authority specifically issued for the purpose. A member can only represent another fellow member.

Any decision is made through deliberation for consensus. Should no agreement be reached, it is thus to be made by voting. Each member is entitled to have 1 (one) vote and another additional 1 (one) vote for any member whom he/she represented. In the event that the voting came to an even result, the proposed decision must, thus, be voided, voting that relates to any person must be done in private. Any blank or invalid vote must be considered nonexistence and not counted in determining the final votes resulted in the meeting.

Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang dapat menggambarkan jalannya rapat secara utuh, argumentasi yang dikemukakan kesimpulan yang diambil serta pernyataan keberatan pendapat jika ada. Setiap anggota Direksi berhak menerima salinan risalah rapat Direksi, meskipun yang bersangkutan tidak hadir dalam rapat tersebut. Keberatan dan usul revisi terhadap risalah rapat disampaikan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengiriman. Jika dalam jangka waktu tersebut tidak ada tanggapan, maka risalah rapat tersebut sudah disetujui seluruh anggota Direksi.

To every BoD meeting, the minutes can be made to describe the whole process, arguments proposed, conclusions made, and statements of objection, if any. Each member is entitled to a copy of the minutes of the meeting, although the concerned member may have not attended the meeting. Objections and proposed revision on the minutes can be submitted within a period of 14 (fourteen days) since the date of submission. In the event that within such period no response has been given, it can thus be agreed by the whole members.

TANGGAL	RAPAT	AGENDA	KEPUTUSAN RAPAT
17 & 18 Januari 2011	Rapat Kerja Perusahaan (RAKER)	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan Realisasi hasil usaha Tahun 2010. Pembahasan Rencana Kerja Tahun 2011 	<ol style="list-style-type: none"> Penetapan Realisasi hasil usaha per Bidang (Pemasaran, Operasional, Keuangan, SDM) sebagai dasar pembuatan Laporan Manejerial Perusahaan Tahun 2010 (Unaudit) Penetapan sasaran, strategi dan program kerja untuk menunjang kinerja tahun 2011
April, Juli & Oktober 2011	1. Rapat Konsultasi	<ol style="list-style-type: none"> Evaluasi Hasil Usaha Setiap Triwulan 	<ol style="list-style-type: none"> Kebijakan dan strategi operasional untuk mempertahankan dan meningkatkan hasil usaha perusahaan

Kebijakan Menggunakan Saran Profesional

Brantas memiliki kebijakan yang memungkinkan Direksi memperoleh saran profesional yang independen dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Agar direksi dapat melaksanakan tugasnya dengan baik untuk kepentingan Perseroan, Brantas memperbolehkan Direksi untuk mendapatkan saran profesional atas beban Perseroan.

Policy of Using Professional Advice

Brantas entails policy enabling the Board of Directors to obtain any independent professional advice in their implementation of tasks and responsibilities in accordance with applicable laws and regulations. In order to perform well in their tasks implementation for the company interests, Brantas allows the Board of Directors to obtain independent professional advice at the company expenses.

E. SEKRETARIS KORPORAT

Perseroan menyadari sepenuhnya pentingnya hubungan yang baik antara organ perseroan (RUPS, Komisaris dan Direksi) dan hubungan antara Perseroan dan stakeholders. Untuk melaksanakan tugas tersebut Perseroan menunjuk

E. CORPORATE SECRETARY

Good relationship between the company organs (GMOS, Commissioners, and BoD) is well-recognized by the Company, and so is that between the Company and the Stakeholders. To exercise this, the Company will assign a Corporate

seorang Sekretaris Korporat. Secara struktural Sekretaris Korporat bertanggung jawab kepada Direksi dan memiliki kewenangan yang memadai.

Tugas Sekretaris Korporat antara lain adalah :

- Memastikan bahwa perseroan taat terhadap berbagai peraturan yang berlaku dan melaksanakan GCG.
- Menangani kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan investor, saham, bursa, pasar modal dan Anak Perseroan.
- Menangani fungsi hubungan investor dan publikasi Perseroan.
- Menjalankan fungsi corporate legal affair atau legal counsel

Sekretaris Korporate harus selalu mengikuti perkembangan peraturan peraturan yang berlaku dan memastikan Perseroan untuk memenuhi dan mematuhi peraturan tersebut. Sekretaris Korporat akan memberikan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya kepada Direksi secara berkala dan kepada Komisaris apabila diminta.

Secretary. Structurally, the Corporate Secretary is responsible to the Board of Directors and have sufficient authority.

Tasks of the Corporate Secretary include:

- To ensure company compliance with applicable laws and regulations and implementation of the GCG.
- To deal with activities with respect to investors, shares, exchange, stock market and Subsidiaries.
- To deal with the investor relation function and company publication.
- To operate the company legal affairs or legal counsel functions.

The Corporate Secretary must always keep updated with new developments with respect to applicable laws and ensure the corporate compliance. The Corporate Secretary provides information with respect to his/her tasks implementation to the Board of Directors on a periodic basis and to the Board of Commissioners upon request.

STANDAR AKUNTANSI, PENGENDALIAN INTERNAL DAN EKSTERNAL

A. STANDAR AKUNTANSI

Brantas memastikan bahwa semua kebijakan dan peraturan yang berkaitan dengan akuntansi selalu merujuk dan memenuhi ketentuan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). PSAK tersebut mewajibkan Perseroan menyajikan Laporan Keuangan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, perubahan ekuitas dan arus kas dan pengungkapan lainnya dalam catatan atas laporan keuangan. Untuk hal-hal yang belum diatur dalam PSAK, pengungkapan yang dilakukan Perseroan senantiasa mempertimbangkan aspek relevansinya terhadap kebutuhan pengguna laporan keuangan dan dapat diandalkan.

Penyajian laporan keuangan (neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas) pada

ACCOUNTING STANDARD, INTERNAL AND EXTERNAL CONTROL

A. ACCOUNTING STANDARD

Brantas ensures that all policies and regulations with regards to accountancy at all time refer and are in compliance with the provisions set forth in the Statement of Financial Accounting Standard (PSAK). PSAK requires any Company to present their Financial Statements as objective as possible in terms of financial status and performance, changes in equity, and cash flow as well as other disclosures to record in the financial statement. For the issues not provided for in the PSAK, the company disclosure must always take into account its reliability and relevance with the need of the report users.

The financial report presentation (balance sheet, profit-loss statement, cash flow, and change in equity) in each fiscal year

setiap tahun buku, dilakukan Brantas untuk memenuhi kepentingan semua pihak yang terkait dengan Perseroan. Brantas memiliki komitmen untuk mengungkapkan laporan tersebut secara adil dan transparan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Untuk memenuhi semua prinsip di atas, Perseroan memiliki kebijakan yang menjamin keberadaan suatu sistem akuntansi dan kebenaran pencatatannya. Transaksi yang tercatat dalam sistem akuntansi sekurang-kurangnya telah mendapatkan persetujuan manajemen yang memiliki kewenangan untuk keperluan tersebut dan telah dibukukan dengan benar. Laporan Keuangan Perseroan secara wajar dan akurat menggambarkan transaksi yang sebenarnya tanpa sedikitpun bermaksud mengelabui pembaca laporan.

Semua pihak, baik Direksi dan Pegawai yang bertanggungjawab atas fungsi fungsi tersebut wajib memahami dan menjalankan kebijakan sistem pengendalian internal keuangan dan prosedur pencatatan akuntansi Perseroan.

B. SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Sistem Pengendalian Internal Keuangan diberlakukan untuk memberikan jaminan kebenaran informasi keuangan, efektivitas dan efisiensi proses pengelolaan Perseroan serta kepatuhan kepada perundang-undangan yang terkait.

Perseroan senantiasa memelihara sistem pengendalian internal yang dimaksud mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Lingkungan pengendalian internal dalam Perseroan yang disiplin dan terstruktur, yang terdiri dari :
 - Integritas, nilai etika dan kompetensi pegawai
 - Cara yang ditempuh manajemen dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawabnya;
 - Pengorganisasian dan pengembangan sumber daya manusia;
 - Perhatian dan arahan yang dilakukan oleh Direksi
2. Pengkajian dan pengelolaan risiko usaha yaitu suatu

is given by Brantas to satisfy the needs of all related parties. Brantas commits to the disclosure of such reports in a fair and transparent manner according to applicable provisions.

To meet all of the above principles, the Company has defined a policy that ensures the availability of accounting system with reliable accuracy. Any transaction recorded in the accounting system has obtained at least approval from the management with respective authority and has been expensed properly. The company financial statement will reasonably and accurately depict the actual transactions without any intention to mislead the readers.

All related personnel, either the BoD or employees responsible for these functions must understand and exercise the company policy of internal financial control and accounting procedures.

B. INTERNAL CONTROL SYSTEM

This financial control is made applicable to ensure accuracy of financial information, effective and efficient process of company management and compliance with applicable laws.

The Company must at all time retain such internal control system which include such issues as the following:

1. A well-organized and structured internal control environment within the Company, which consists of:
 - Staff integrity, ethical values and competence
 - Manner in which the management conducts their authority and responsibility;
 - Human resources organization and development;
 - Attention and directives done by the Board of Directors
2. Business risk analysis and management, i.e. a process to

proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai dan mengelola risiko usaha relevan;

3. Aktivitas pengendalian yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan dalam suatu proses pengendalian terhadap kegiatan Perseroan pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi Perseroan, antara lain mengenai kewenangan, otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, penilaian atas prestasi kerja, pembagian tugas dan keamanan terhadap asset Perseroan;
4. Sistem informasi dan komunikasi yaitu suatu proses penyajian laporan mengenai kegiatan operasional, finansial, dan ketaatan atas ketentuan dan peraturan yang berlaku pada Perseroan;
5. Monitoring yaitu proses penilaian terhadap kualitas sistem pengendalian internal termasuk fungsi internal audit pada setiap tingkat dan unit struktur organisasi Perseroan, sehingga dapat dilaksanakan secara optimal, dengan ketentuan bahwa penyimpangan yang terjadi dilaporkan kepada Direksi dan tembusannya disampaikan kepada Komite Audit.

Sedangkan menyangkut hubungan kerja antara SPI (Satuan Pengawas Intern) dengan Komite Audit antara lain meliputi :

1. Komite Audit mengevaluasi independensi, objektivitas dan efektivitas SPI
2. Komite Audit memonitor ketaatan terhadap Kode Etik Profesi Auditor
3. Komite Audit memberi pertimbangan kepada Komisaris tentang perubahan / pengangkatan dan pemberhentian Kepala SPI

C. AUDIT EKSTERNAL

Dalam hubungannya dengan Auditor Eksternal, Perseroan menetapkan kebijakan-kebijakan sebagai berikut :

1. Merupakan kewenangan RUPS untuk menunjuk Auditor Eksternal dari calon yang diajukan oleh Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Audit;
2. Komite Audit melalui Komisaris wajib menyampaikan kepada RUPS alasan pencalonan Auditor Eksternal tersebut;

identify, analyze, assess, and manage relevant business risks;]

3. Control activity reflects actions done during the control process against the company activities at each level and unit within the company structure of organization, which includes, among others, authorization, verification, reconciliation, achievement analysis, task distribution and company asset protection;
4. Information and communication system is a process through which the operational and financial activities, and compliance with laws and regulations applicable to the Company are presented;
5. Monitoring is a process in which the internal control system that includes the internal audit function at each company level and structure of organization is analyzed in order to achieve an optimized implementation, provided, however, that any irregularity must be reported to the Board of Directors with a carbon copy to the Audit Committee.

In the meantime, the professional relationship between the SPI (Internal Control Unit) and the Audit Committee includes as follows:

1. The Audit Committee evaluated the SPI's independency, objectivity and effectiveness
2. The Audit Committee monitors compliance with the Auditor's Professional Code of Conduct
3. The Audit Committee provides considerations to the Board of Commissioners as to the modification / assignment and discharge of SPI Chairman

C. EXTERNAL AUDITOR

In connection with the External Auditor, the Company determined such policies as the following:

1. It is GMOS authority to take any External Auditor out of candidates proposed by the Board of Commissioners as recommended by the Audit Committee;
2. The Audit Committee through the Board of Commissioners presents to the GMOS the rationales of such External Auditor nomination;

- Auditor Eksternal tersebut harus bebas dari pengaruh Komisaris, Direksi dan pihak yang berkepentingan di Perseroan;
- Perseroan wajib menyediakan bagi Auditor Eksternal semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan sehingga memungkinkan Auditor Eksternal memberikan pendapatnya tentang kewajaran, ketaataazasan, dan kesesuaian laporan keuangan Perseroan dengan standar akuntansi keuangan Indonesia;
- Penunjukan Auditor Eksternal dibatasi untuk maksimum 3 tahun buku berturut-turut oleh KAP & Partner yang sama

PENUTUP

- Code of Corporate Governance ini disusun dengan memperhatikan antara lain UU Nomor 40 Tahun 2007, UU Nomor 18 Tahun 1999, UU Nomor 19 Tahun 2003, PP 12 Tahun 1998, Keputusan Menteri BUMN Nomor : KEP-117/MBU/2002, KEP-101/MBU/2002, dan KEP-103/MBU/2002, serta Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan-peraturan lainnya. Code of Corporate Governance ini hanya memuat hal-hal penting yang akan menjadi acuan dalam tata kelola Perseroan. Hal-hal lain yang tidak dimuat dalam Code ini tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku.
- Code of Corporate Governance ini ditelaah dan dimutakhirkan secara berkala untuk disesuaikan dengan fungsi, tanggung jawab, dan wewenang organ-organ Perseroan serta perubahan lingkungan Perseroan.
- Setiap perubahan terhadap Code of Corporate Governance harus disetujui oleh Direksi dan Komisaris.
- Setiap pegawai dapat menyampaikan laporan tertulis mengenai dugaan pelanggaran terhadap penerapan Good Corporate Governance melalui Tim CG atau media lain yang ditetapkan / disediakan Perseroan untuk kepentingan tersebut.
- Code of Corporate Governance ini dinyatakan berlaku efektif sejak ditetapkan oleh Komisaris dan Direksi.

- The said External Auditor must be free of the Commissioners, Directors, and other concerned company personnel's influences;
- The Company is responsible for providing the External Auditor with every accounting record as well as supporting data as required to enable them to express their opinions as to fairness, compliance, and agreement of the corporate financial report with Indonesian Accounting Standard;
- The assignment of the External Auditor must be limited to 3 consecutive fiscal years by the same Public Accounting and Partner.

CONCLUSION

- This Code of Corporate Governance is prepared by taking into account among others the Law Number 40 of 2007, Law Number 18 of 1999, Law Number 19 of 2003, Government Regulation Number 12 of 1998, Ministerial Decrees of SOE Numbers: KEP-117/MBU/2002, KEP-101/MBU/2002, and KEP-103/MBU/2002, as well as the Articles of Association and other related regulations. This Code of Corporate Governance contains only primary issues to serve as references throughout the corporate governance. Other issues not provided for in this Code shall remain to refer to relevant and applicable laws and regulations
- This Code of Corporate Governance is reviewed and updated on a periodic basis to match the function, responsibility, and authority of the company organs as well as change in the company environment.
- Any modification to this Code of Corporate Governance must be approved by the Board of Directors and the Board of Commissioners.
- Each employee may submit report in writing with respect to alleged violation to the implementation of Good Corporate Governance through GCG team or other media as required / made available by the Company for such purpose.
- This Code of Corporate Governance is effective since its determination by the Board of Commissioners and Board of Directors.

- Code of Corporate Governance ini didistribusikan kepada seluruh pejabat Perseroan dengan mengacu kepada mekanisme distribusi dokumen Perseroan

ETIKA PERUSAHAAN

Dengan adanya Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor Kep-117/MMBU/ 2002 tentang Penerapan Praktik GCG pada BUMN, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar PT. Brantas Abipraya, Visi dan Misi Perseroan serta praktik-praktik terbaik GCG, diperlukan pula Pedoman Etika dan Perilaku (Code of Conduct). Ini merupakan penjabaran dari kaidah-kaidah GCG dan sebagai dasar serta acuan dalam pengelolaan Perseroan.

Pedoman Etika dan Perilaku ini merupakan prinsip-prinsip yang berlaku bagi seluruh aktivitas Perseroan, karena itu secara konsisten akan menginformasikan Code of Conduct ini kepada seluruh pihak yang berkepentingan sehingga mereka dapat mengetahui dan memahami standar kerja Perseroan yang sesuai dengan Pedoman Etika dan Perilaku. Code of Conduct ini merupakan acuan bagi peraturan Perseroan yang lebih detail sesuai kebutuhan unit-unit organisasi dalam jajaran PT Brantas Abipraya (Perseroan).

Brantas akan selalu mengkaji Pedoman Etika dan Perilaku ini secara berkesinambungan sebagai upaya mencapai standar kerja yang terbaik, dan setiap ada perubahan perbaikan akan selalu diberitahukan kepada semua pihak yang memerlukan.

Sebagai pedoman berperilaku bagi seluruh jajaran Perseroan dalam bekerja dan berinteraksi di dalam lingkungan Perseroan maka Brantas telah merumuskan, mengembangkan dan mensosialisasikan Budaya Perseroan, yang terdiri dari Falsafah Kerja dan Tujuh Nilai.

- This Code of Corporate Governance is distributed to all of the company officials with reference to the company document distribution mechanism.

COMPANY CODE OF CONDUCT

Given the Ministerial Decree of State-Owned Enterprise (SOE) Number Kep-117/MMBU/ 2002 on the Implementation of GCG Practice in SOE, the Law Number 40 of 2007 regarding Limited Liability Company, Articles of Association of PT. Brantas Abipraya, company vision and mission as well as GCG best practices, a Code of Conduct is also required thereto. This comprises a description of GCG principles and becomes the basis and reference for the company management.

This Code of Conduct comprises the principles applicable throughout the company activities and, therefore, the Company consistently socializes this Code of Conduct to all related parties in order for them to recognize and understand the company working standard in accordance with this Code of Conduct. This GCG Guidelines must be referred to for more detailed company regulations matching the needs of the organizational units under the Company.

Given the dynamic business environment, Brantas at all time reviews its GCG Guidelines on a continual basis in order to achieve the best work standard for the Company.

Being the code of conduct for the company personnel at all levels in their works and interaction within the company premises, Brantas has, thus, formulated, developed and socialized its Company Culture, which consists of Work Philosophy and Seven Values.

A. INTEGRITAS DALAM AKTIVITAS BISNIS dan PEKERJAAN

Perseroan menerapkan standar etika dalam melakukan seluruh aktivitas bisnis berdasarkan prinsip-prinsip good corporate governance. Brantas menjalankan operasional bisnis dengan lingkup kegiatan usaha utama di bidang konstruksi dan rancang bangun antara lain meliputi : (1) pekerjaan sipil umum; (2) pekerjaan bangunan gedung; (3) pekerjaan mekanikal dan elektrikal dan lain-lain.

Brantas juga melakukan diversifikasi usaha meliputi bidang lain yang terkait erat dengan core bisnis perusahaan. Seluruh unit kerja di Kantor Pusat, kantor Wilayah, Kantor Cabang, Proyek, Depo Alat dan unit kerja lain diwajibkan untuk melakukan sosialisasi Panduan GCG ini untuk mempertahankan kejujuran, integritas dan keadilan dalam seluruh aktivitas bisnis di lingkungan kerja masing-masing.

Brantas melarang seluruh jajaran Perseroan yang terdiri atas Komisaris, Direksi, seluruh unit kerja dari Kantor Pusat, Kantor Wilayah, Kantor Cabang, Proyek, Depo Alat dan unit kerja lain dan pihak yang terkait melakukan transaksi yang bertentangan dengan hukum dan prinsip-prinsip GCG.

Brantas menerapkan fungsi pengawasan menggunakan audit berdasarkan prinsip-prinsip yang benar dan berlaku umum serta senantiasa mengupayakan agar pelanggaran atas norma-norma dan peraturan yang berlaku dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan, baik administrasi maupun hukum. Setiap unit kerja berkewajiban untuk senantiasa menindaklanjuti setiap temuan hasil audit yang disampaikan oleh fungsi pengawasan.

Kebijakan Perseroan dalam menjaga integritas dalam aktivitas bisnis dan pekerjaan antara lain :

1. Seluruh individu dan atau organ Perseroan di lingkungan Brantas senantiasa wajib patuh terhadap hukum dan peraturan yang berlaku di manapun operasional Perseroan dijalankan;
2. Brantas senantiasa mengupayakan perolehan informasi melalui cara-cara yang sah dan menyimpan

A. INTEGRITY IN BUSINESS ACTIVITY AND WORK

The Company applies an ethical standard in carrying out the entire business activities based on the principles of good corporate governance. Brantas' business operations are delivered with construction and design as its main business field, which includes among other things: (1) general civil works; (2) building construction works; (3) mechanical and electrical works, and etc.

Brantas also diversifies its business to include other areas closely related to the corporate core of business. Across the working units in its Headquarter, Regional and Branch Offices, Projects, Equipment Storehouse, and other working units, a socialization of this GCG becomes imperative in order to retain honesty, integrity, and fairness throughout business activities in respective working units.

Brantas prohibits all company organs, which include the Board of Commissioners, the Board of Directors, all working units in our Headquarter, Regional and Branch Offices, Projects, Equipment Storehouse, and other working units as well as any related party to deal with any transaction that are against the law and the principles of GCG.

Brantas applies the control function through audit based on fit and proper and generally accepted principles while making all efforts that any violation to such applicable rules and regulation shall be subject to sanction as appropriate both administrative and legal nature. Each working unit is obliged to always take follow-up action to any finding resulted from audit conducted by the control function.

The Corporate Policy in maintaining integrity in business activity and work includes:

1. All individuals and or the company organs within Brantas must be in compliance at all time with the applicable laws and regulations at anywhere in which the company operation is carried out;
2. Brantas at all time makes every effort to obtain information in appropriate manner and retains and

serta menggunakannya sesuai dengan prinsip-prinsip etika usaha yang berlaku;

3. Brantas berketetapan tidak mentolerer tindakan ilegal, penggunaan praktik yang tidak adil dan perilaku yang tidak jujur dalam meraih laba.
4. Segenap jajaran Brantas harus menghindari benturan kepentingan dan mengutamakan kepentingan Perseroan.

B. MANAJEMEN RISIKO

Brantas menyadari bahwa jalannya operasional Perseroan tidak terlepas dari berbagai risiko, baik risiko yang berada di bawah kendali maupun risiko yang berada di luar kendali Perseroan. Oleh karena itu Brantas menyadari akan pentingnya pengelolaan risiko Perseroan secara terintegrasi, optimal dan berkesinambungan.

Brantas senantiasa menyelenggarakan pengendalian risiko dan pengelolaan kebijakan Perseroan secara terintegrasi dan kontinyu untuk mewujudkan operasional Perseroan yang sehat dan mampu menghasilkan laba yang optimal pada batas toleransi risiko yang ditetapkan.

Brantas berkewajiban untuk melakukan identifikasi terhadap kemungkinan munculnya risiko-risiko baik eksternal maupun internal. Atas dasar identifikasi itu, Perseroan akan melakukan upaya-upaya yang diperlukan untuk meminimalkan terjadinya risiko, misalnya dengan menutup asuransi yang relevan, ataupun merancang kontrak sedemikian rupa sehingga secara hukum Perseroan terlindungi dari risiko yang tidak perlu.

Brantas selalu memantau dan mengkaji risiko secara berkala sehingga diharapkan risiko-risiko tersebut dapat dikendalikan sedemikian rupa sehingga tidak mengurangi nilai Perseroan secara signifikan. Namun demikian, Perseroan juga menyadari adanya risiko yang berada di luar kendali yang tidak dapat dihilangkan sepenuhnya oleh upaya-upaya internal Brantas membentuk forum atau tim manajemen risiko yang memberi pertimbangan dalam pengambilan keputusan, dalam rangka menangani pekerjaan baru yang belum pernah dikerjakan oleh Perseroan sebelumnya.

makes use of it in accordance with applicable ethical business principles;

3. Brantas determines not to tolerate any unlawful action, unfair practice, and dishonesty in generating profits.
4. All Brantas personnel at all levels should avoid any conflict of interests while prioritizing the company best interests.

B. RISK MANAGEMENT

Brantas realizes that no company operation is free from risks, both within and beyond the control of the Company. Therefore, Brantas realizes the significance of company risk management in an integrated, optimized and sustainable manner.

Brantas continues exercising the company risk management and policy management in an integrated and continual manner to realize a sound corporate operation able to make optimized profits against the determined limit of risk tolerance.

Brantas has obligations to identify possibilities of either external or internal risks. Based on such identification, the Company will make necessary efforts to minimize risks, for example by closing any relevant insurance or designing contract in such a way that it is legally protected from any unnecessary risks.

Brantas at all time monitors and reviews any possible risks on a periodic basis that they can be controlled in such a way that no company values are significantly decreased. However, the Company also recognizes risks beyond control that is hard to eliminate by internal efforts. Brantas established risk management forum or team providing consideration for decision making, in order to deal with new projects that have never before done by the Company.

Brantas mempunyai komitmen untuk mengungkapkan secara transparan risiko-risiko yang secara signifikan dapat mempengaruhi nilai Perseroan. Dengan demikian pihak-pihak yang berkepentingan dengan Brantas dapat menghitung risiko-risiko yang relevan apabila melakukan transaksi bisnis dengan Perseroan.

Manajemen Risiko di Brantas antar lain meliputi :

1. Perseroan melakukan identifikasi risiko dengan seksama, baik risiko yang berada di bawah kendali Perseroan maupun risiko yang berada di luar kendali Perseroan;
2. Perseroan melakukan penanganan terhadap berbagai risiko berdasarkan skala prioritas dan sumber daya yang dimiliki;
3. Perseroan mengungkapkan risiko dan penanganannya dalam Laporan Tahunan.

C. HUBUNGAN DENGAN PEMEGANG SAHAM

Brantas akan memperlakukan Pemegang Saham secara adil sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemegang Saham yang memiliki saham dengan klasifikasi yang sama akan mendapatkan perlakuan yang setara dan dapat menggunakan hak-haknya sesuai Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap Pemegang Saham berhak mengeluarkan suara sesuai dengan klasifikasi dan jumlah saham yang dimilikinya. Setiap pemegang saham berhak memperoleh informasi material yang lengkap dan akurat mengenai Perseroan, kecuali untuk informasi di mana Direksi memiliki alasan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk tidak memberikannya.

Perseroan melarang Pemegang Saham campur tangan dalam kegiatan operasional Perseroan yang menjadi tanggung jawab Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Termasuk pengertian dalam campur tangan adalah tindakan atau arahan secara langsung memberi pengaruh terhadap tindakan pengurusan Perseroan atau terhadap pengambilan keputusan yang menjadi wewenang Direksi. Ketentuan ini dimaksudkan untuk dapat mempertegas

Brantas commits to a transparent disclosure of risks that significantly affect the company values. Hence, any related party will be able to analyze relevant risks when entering into a business dealing with the Company.

At Brantas, the Risk Management includes:

1. The Company carefully identifies risks, both within and beyond its control;
2. The Company deals with various risks based on priorities and resources at hand;
3. The Company discloses such risks along with methods through which they are managed in the Annual Report.

C. RELATIONSHIP WITH THE SHAREHOLDERS

The Shareholders are treated by Brantas in a fair manner in accordance with applicable laws and regulations. The Shareholders having share of similar classification are also treated equally and are able to exercise their rights in accordance with the Articles of Association as well as applicable laws and regulations.

Each Shareholder reserves the right to vote in agreement with their classification and volumes of shares. Each Shareholder reserves the right to obtain complete and accurate material information with respect to the Company, except for information where the Board of Directors are responsibly justified not to disclose them.

The Company prohibits the Shareholders to interfere with the company operational activities for which the Board of Directors is responsible as stated in the Articles of Association and applicable laws and regulation. Included in this definition is any direct act or referral to influence the company management dealings or toward any decision making under the authority of the Board of Directors. This provision is

kemandirian Perseroan sebagai badan hukum yang profesional sehingga dapat berkembang baik sesuai dengan tujuan usahanya.

Brantas akan berusaha keras agar Perseroan mengalami pertumbuhan yang berkesinambungan sehingga memberikan kontribusi yang optimal bagi Pemegang Saham. Penetapan deviden dilakukan oleh Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Pembagian deviden didasarkan pada kepentingan Perseroan, dengan melihat berbagai hal seperti kelangsungan usaha, strategi yang akan dan sedang dijalankan serta rencana investasi.

D. HUBUNGAN DENGAN PEMBERI PEKERJAAN (KLIEN)

Perseroan menempatkan Pemberi Pekerjaan (klien) sebagai mitra bisnis yang akan membantu pencapaian kinerja Perseroan. Kebijakan yang dijalankan Perseroan menjamin hubungan kerja sama secara umum dengan Pemilik Pekerjaan dilakukan secara profesional dan memenuhi prinsip kesetaraan. Perseroan menyediakan informasi material yang diperlukan tentang Perseroan secara benar, akurat dan tepat waktu sebagai dasar pengambilan keputusan bagi calon Pemberi Pekerjaan (klien) dalam berhubungan dengan Perseroan.

Perseroan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya selalu mengutamakan kualitas pekerjaan dan kepuasan Pemberi Pekerjaan (Klien) sejak dari perencanaan pekerjaan sampai pekerjaan selesai. Perseroan melakukan survei kepuasan yang dilakukan minimal 1 (satu) tahun sekali pada Pemberi Pekerjaan (Klien) pada proyek-proyek, yang telah selesai untuk mengetahui kepuasan Pemberi Pekerjaan (Klien) dari tahun ke tahun.

E. SISTEM PEMASARAN

Brantas melakukan pemasaran secara konsisten dengan program peningkatan kepuasan Pemberi Pekerjaan (klien) dari tahun ke tahun. Brantas selalu berupaya memberikan alternatif solusi kepada Pelanggan berdasarkan prinsip saling menguntungkan. Brantas memiliki sistem informasi yang tangguh yang memungkinkan pengambilan keputusan secara tepat dan cepat, sehingga kesempatan dalam memperoleh berbagai jenis pekerjaan atau proyek yang menguntungkan dapat dilakukan secara terintegrasi pada tingkat Perseroan.

intended to reinforce the independence of the Company as a legal and professional entity in order for the company to grow successfully in accordance with its business objectives.

Brantas strives in order that the Company retains a sustainable growth so as to provide optimized contribution to the Shareholders. The dividend allocation is determined by the Shareholders during the General Meeting of Shareholders. The dividend payment is done to the best interest of the Company while viewing various developments such as business continuity, future and ongoing strategy as well as investment plan.

D. RELATIONSHIP WITH THE CLIENT

The Company considers the client as a business partner that helps in the company performance achievements. The company policies ensure that the cooperative relationship with the Client is in overall done in a professional manner while following the principle of equality. The Company provides any necessary material information with respect to the Company in a proper, accurate and punctual manner to base the decision making by the Client in dealing with the Company.

The Company in carrying out its business activities at all time gives priority to quality work and the Client's satisfaction from the planning to the completion of any work. The Company has a satisfaction survey conducted at least once in every year to the Client against the completed projects to find out the client satisfaction year after year.

E. MARKETING SYSTEM

Brantas conducts a consistent marketing under the Client satisfaction improvement program year after year. Brant as at all time strives to provide alternative solutions to the client based on the principle of mutual benefits. Brantas has a strong information system that allows accurate and quick decision-making that the opportunity to acquire different types of favorable jobs or projects can be found integrated at the company level.

Berbagai informasi pasar dari berbagai sumber daya (departemen/instansi, konsultan, hubungan individual dan lain-lain) dikelola secara optimal oleh Perseroan dalam memperoleh berbagai jenis pekerjaan atau proyek yang saling menguntungkan dapat dilakukan secara teintegrasi pada tingkat Perseroan.

Brantas menyadari bahwa persaingan dalam Jasa Konstruksi cukup tajam dengan banyaknya perusahaan sejenis dan masuknya kontraktor asing akibat globalisasi, maka Brantas selalu melihat kemampuan perusahaan pesaing dan melihat pertumbuhan usaha dengan membandingkan kinerja tahun-tahun sebelumnya. Brantas menghargai prinsip-prinsip persaingan yang sehat dalam aktivitas bisnis.

F. HUBUNGAN DENGAN PENGGUNA AKHIR

Brantas selalu berusaha untuk memberikan pelayanan dengan kualitas terbaik kepada pengguna akhir produk Brantas. Brantas akan selalu berusaha meningkatkan kualitas produknya, dengan menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2000 (yang merupakan peningkatan dari Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:1994 dan Sistem Manajemen Mutu ISO 9002:1994), ISO 18001:2007 (OHSAS), SMK3, ISO 14001:2004 (Sistem Manajemen Lingkungan). Untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada pengguna, Perseroan melakukan berbagai pendekatan seperti :

1. Perseroan melakukan sertifikasi ISO 9001 : 2000 untuk sistem manajemen mutu; ISO 18001:2007 (OHSAS); SMK3; ISO 14001:2004 (Sistem Manajemen Lingkungan)
2. Perseroan memberikan layanan purna jual yang sesuai.

G. HUBUNGAN DENGAN REKANAN

Brantas menjalin kerjasama dengan mitra kerja dilandasi etiket baik dan saling menguntungkan yang dituangkan dalam kesepakatan secara tertulis, serta mematuhi setiap kesepakatan yang telah di tuangkan dalam kontrak kerjasama.

Brantas bertindak adil dengan memberikan kesempatan yang sama pada seluruh rekanan yang memiliki kualifikasi yang sama tanpa diskriminasi. Pertimbangan pemberian pekerjaan didasarkan atas kriteria yang antara lain meliputi :

1. Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis

A variety of market information from various resources (departments/agencies, consultants, individual relationship, etc.) are optimally managed by the Company in order to obtain various types of work and projects of mutual benefit that they can be performed at the company level.

Brantas realizes a sufficiently tight competition in the Construction Services with many companies of similar nature and the influx of foreign contractors due to globalization, Brantas at all time observes the competitors' ability and the business growth by comparing the performance of previous years. Brantas respects the principles of fair competition in business activity.

F. RELATIONSHIP WITH END USERS

Brantas always strives to deliver best quality service to the end user of its products. Brantas at all time makes efforts to improve the quality of its products by applying the Quality Management System of ISO 9001:1994 and that of ISO 9002:1994), ISO 18001:2007 (OHSAS), SMK3, ISO 14001:2004 (Environmental Management System). In order to provide the best services to the users, the Company carried out a series of approaches as follows:

1. Certification for ISO 9001: 2000 for quality management system; ISO 18001:2007 (OHSAS); SMK3; ISO 14001:2004 (Environmental Management System)
2. Provision of appropriate after sales services.

G. RELATIONSHIP WITH PARTNERS;

Brantas enters into cooperation with partners based on a mutual benefit and good faith as specified in a written agreement while abiding by any agreement established in the form of contract.

Brantas exercises fairness by giving an equal opportunity to all partners with similar qualifications rather than discrimination. Any award of contract is carried out in consideration of the following criteria hereof:

1. Have the technical and managerial expertise,

dan manajerial dalam bidang usaha yang dapat dibuktikan dengan kualifikasi yang dikeluarkan asosiasi yang bersangkutan;

2. Memiliki sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan;
3. Memiliki track record yang baik;
4. Tidak pernah membuat pernyataan yang tidak benar tentang kualifikasi yang dimilikinya;
5. Kerjasama yang saling menguntungkan. Namun Brantas dalam melaksanakan fungsinya sebagai good corporate citizen mempunyai komitmen untuk membina rekanan ekonomi lemah untuk berkembang secara bertahap melalui proses kualifikasi yang ditentukan oleh Perseroan.

H. SISTEM PENGADAAN DAN KONTRAK PEKERJAAN

Brantas menerapkan proses pengadaan sesuai good corporate governance dengan menjunjung prinsip-prinsip keterbukaan, efisiensi biaya, kompetitif, fairness sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Brantas mematuhi etika proses pengadaan dalam proses pengadaan barang dan jasa antara lain :

1. Melaksanakan tugas pengadaan barang dan jasa dengan tertib dan disertai tanggung jawab
2. Bekerja secara profesional, mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa.
3. Tidak mencampuri tugas dan kewenangan yang diberikan kepada tim pengadaan baik langsung maupun tidak langsung. Kontrak Pekerjaan antara Perseroan dengan rekanan memuat kesanggupan rekanan untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati, dan hak rekanan mendapatkan seluruh haknya berdasar kewajiban yang telah dilaksanakan sesuai yang

experience in similar field of business as evidenced with qualifications issued by relevant association;

2. Have resources required for the job implementation;
3. Have excellent track record;
4. Never made untrue statement of qualification;
5. Cooperation for mutual benefits. However, Brantas in performing its functions as a good corporate citizen committed to fostering small enterprise partners in order to enable them to eventually grow through a qualification process determined by the Company.

H. PROCUREMENT AND CONTRACTING SYSTEM

Brantas applies appropriate procurement process in compliance with the good corporate governance while upholding the principles of transparency, cost efficiency, competitiveness, and fairness in accordance with applicable laws and regulations. Brantas also complies with ethical process during the procurement of goods and services including among others:

1. Carry out the procurement tasks in an orderly and responsible manner
2. Exercise honest professionalism and independency, and keep confidential the procurement documents as it should prevent irregularities during the procurement of goods and services.
3. In no case interfere with the tasks and responsibilities given to the procurement team, both directly and indirectly. Contract between the Company and the partner includes the partner's ability to perform their obligations in accordance with the terms agreed upon, and the partner's exercise of its rights with reference to the obligations that have been made as

disepakati dalam kontrak serta sanksi atas tidak dipenuhinya kewajiban masing-masing.

agreed in the contract as well as sanctions for non-fulfillment of respective obligations.

I. SISTEM PENGADAAN DAN KONTRAK PEKERJAAN

Pegawai Brantas terdiri atas Pegawai tetap (KKWT) yang dikelompokkan Tenaga Organik (TO), Tenaga Bulanan (TB) dan Pegawai Tidak Tetap (KKWTT) yang terdiri dari Tenaga Harian (TH) dan Tenaga Honorar (TR). Terhadap klasifikasi pegawai tersebut, Perseroan mempunyai komitmen untuk memperlakukan seluruh pegawai sesuai dengan hak dan kewajibannya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajiban Karyawan ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja bersama sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan. Kontrak atau perjanjian antara perusahaan dengan karyawan dibuat secara tertulis dengan memuat hak dan kewajiban setiap pihak secara jelas.

Perusahaan mempunyai wewenang dalam menerima, mengangkat, menempatkan dan memberhentikan karyawan serta memberikan sanksi disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Brantas menerapkan sistem manajemen human assets berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, adil, motivatif dan bebas dari bias karena perbedaan suku, asal usul, jenis kelamin, agama dan asal kelahiran serta hal-hal yang tidak terkait dengan kinerja. Perseroan juga mengakui hak pegawai untuk berserikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Brantas selalu mengembangkan dan meningkatkan kualitas pegawai yang merupakan aset utama pada Perseroan dengan cara merealisasikan "Human Asset Development". Oleh karena itu pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam Perseroan merupakan hal yang penting.

Brantas selalu melakukan pembinaan dan pengembangan pegawai yang berpedoman pada Budaya Perseroan. Kebijakan Perseroan di bidang kepegawaian, Peraturan Pokok Kepegawaian dan Peraturan Pokok Organisasi. Perseroan juga menjamin bahwa peraturan peratur-

I. PROCUREMENT AND CONTRACTING SYSTEM

Brantas personnel consists of Full-time employees (KKWT) grouped into: Organic Staff (TO), Monthly Staff (TB) and Part-time employees (KKWTT) consisting of Daily Staff (TH) and Honorary Workers (TR). To such classification of the employee, the Company is committed to treating all employees in accordance with the rights and obligations set out in applicable laws and regulations.

The appointment, dismissal, status, rights and obligations of employees are defined through employment agreements in accordance with the labor laws and regulations. Contract agreement between the Company and employee is made in writing clearly indicating the rights and obligations of each party.

The Company has the authority to recruit, assign, post and dismiss any employee and give disciplinary action in accordance with applicable regulations.

Brantas applies human assets management system based on the principles of transparency, fairness, motivational and free of bias with respect to race, origin, gender, religion and origin of birth and others having no relevance with performance. The Company also recognizes the employees' right of association in accordance with applicable laws and regulations.

Brantas constantly develops and improves the quality of staff, which is a major asset to the Company, by realizing the "Human Asset Development". Therefore, the quality development and improvement of the human resources in the company becomes highly important.

Brantas at all time trains and develops its employee as guided by the Company Culture, company personnel policy, Principles of Employment and Principles of Organization. The Company also ensures that rules and regulations mentioned

tersebut di atas sesuai dengan standar good corporate governance.

Brantas mempunyai Kontror Pusat, Kantor Wilayah dan Kantor Cabang yang beroperasi diberbagai daerah dengan agama, budaya, tradisi, adat istiadat kondisi pegawai serta peraturan setempat yang berbeda-beda. Meskipun peka terhadap perbedaan-perbedaan tersebut, Brantas tetap menerapkan praktik-praktik yang didasarkan pada prinsip-prinsip good corporate governance.

Perseroan menetapkan beberapa kebijakan mengenai pegawai dan hubungan industrial antara lain :

1. Melakukan penataan pekerjaan dengan baik sehingga memotivasi dan memberdayakan pegawai;
2. Mengusahakan agar remunerasi yang diterima pegawai, secara umum mengikuti peraturan serta sebanding dan kompetitif dengan industri sejenis;
3. Memberikan kesempatan kepada pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan yang sejalan dengan kompetensi dan kebutuhan perseroan;
4. Meningkatkan disiplin pegawai agar mematuhi aturan dan kebijakan yang telah ditetapkan;
5. Menerapkan reward dan punishment secara adil sesuai prestasi atau tingkat kesalahan pegawai;
6. Memberikan hak kepada pegawai untuk berserikat sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
7. Menempatkan PKB sebagai komitmen Perseroan
8. Memberikan kondisi kerja yang baik dan aman bagi pegawai
9. Memberikan hak-hak purna bakti sesuai ketentuan yang berlaku.

Brantas menyadari sepenuhnya adanya perubahan lingkungan bisnis yang dinamis. Untuk itu segenap jajaran Brantas baik Komisaris, Direksi, dan pegawai akan selalu berusaha untuk menjalin kemitraan agar saling mendukung dalam mencapai tujuan dan kemajuan bersama. Brantas akan selalu berusaha meningkatkan mutu manajemen dan kualitas pegawai sehingga dapat bekerja secara efisien dan efektif.

above are in accordance with the standards of good corporate governance.

Brantas has Headquarter, Regional Office and Branch Offices operating in various regions with different beliefs, cultures, traditions, customs, employee conditions and local rules. Although these are sensitive differences, Brantas continues implementing the practices inspired by the principles of the good corporate governance.

The Company defines a series of policies regarding employee and industrial relations, which include as follows:

1. To carry out work reorganization in order to motivate and empower the employees;
2. To seek that the employee's remuneration will generally follow any applicable rules while comparable and competitive with similar industries;
3. To provide opportunities for employees to participate in education and training according to their competencies as well as company needs;
4. To improve the employee's discipline in order to realize compliance with the established rules and policies;
5. To apply fair reward and punishment according to employee's achievements or fault;
6. To provide the employees with their right of association subject to applicable laws and regulations;
7. To respect the PKB as the company commitment;
8. To provide favorable and safe working conditions for the employees;
9. To provide severance rights in accordance with applicable regulations.

Brantas is fully aware of dynamic changes in business environment. Therefore, all company organs at Brantas, whether the Board of Commissioners, the Board of Directors, or employees at all time seeks to establish partnerships for mutual support in achieving the company goals and progress. Brantas also strives at all time to improve the quality of management as well as employees for efficient and effective task implementation.

Pegawai juga memiliki berbagai kewajiban yang harus dipenuhi terhadap Perseroan. Kewajiban Pegawai terhadap Perseroan antara lain :

1. Setiap pegawai wajib mentaati PKB, nilai-nilai Perusahaan dan semua peraturan yang dikeluarkan Brantas;
2. Setiap pegawai wajib mendahulukan kepentingan Perseroan yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan tanggungjawabnya;
3. Setiap pegawai wajib mengerahkan segala daya dan upaya dalam melaksanakan tugas pekerjaan yang diserahkan kepadanya;
4. Setiap pegawai wajib menjaga harta milik dan nama baik Perseroan;
5. Setiap pegawai yang menjadi atasan wajib membina dan memberikan teladan pada pegawai di lingkungannya.

J. KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA PEGAWAI

Brantas senantiasa mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja. Perseroan menyadari bahwa pengelolaan kesehatan dan keselamatan kerja secara optimal sangat penting bagi keberhasilan jangka panjang.

Brantas menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Oleh karena itu Perseroan akan memastikan bahwa lokasi usaha serta fasilitas, sarana dan prasarana Perseroan lainnya, memenuhi peraturan perundangundangan yang berlaku berkenaan dengan kesehatan dan keselamatan kerja.

Kesehatan dan Keselamatan Kerja Pegawai diusahakan Perseroan dengan cara antara lain :

1. Melaksanakan berbagai implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK-3) sesuai dengan peraturan yang berlaku secara konsisten dalam upaya memberikan perlindungan optimal pada pegawai Perseroan dari hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan kesehatan pegawai;

The employees also have obligations to be fulfilled for the favor of Company. The employees' obligations to the Company include:

1. Each employee must comply with the Employment Contract, company values and all regulations issued by Brantas;
2. Each employee is required to advance the company interests related directly or indirectly to their responsibilities;
3. Each employee must give their best in carrying out their tasks and responsibilities.
4. Each employee must protect the company assets and reputation;
5. Each of the supervising employees must develop and give good examples to their subordinates.

J. OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

Brantas has at all time prioritized occupational health and safety. The Company realizes that an optimized occupational health and safety is a key to long-term success.

Brantas provides its employees with safe and healthy working environment. Therefore, the Company ensures that its business location and facilities, as well as other facilities and infrastructure comply with the relevant rules and regulations.

Such occupational health and safety is sought by the Company by way of among others:

1. Conducting a series of Occupational Health and Safety Management System (SMK-3) in accordance with applicable laws and regulations in a consistent manner in order to provide optimal protection for the employees from various threats;

2. Mengupayakan perbaikan berkelanjutan atas berbagai insfrastruktur yang berkaitan dengan K3;
3. Memperoleh beberapa sertifikasi yang berhubungan dengan K3 (SMK-3 untuk beberapa proyek, Zero Accident Award);
4. Menyertakan partisipasi Pegawai sebagai bagian dari upaya peningkatan pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja.

K. PENGELOLAAN LINGKUNGAN

Brantas menjalankan operasi Perseroan dengan mematuhi hukum maupun praktik standar industri konstruksi yang berlaku serta kebijakan dan standar sistem manajemen lingkungan dalam rangka perhatiannya terhadap perlindungan kelestarian lingkungan Brantas selalu mengevaluasi kebijakan tentang lingkungan Dalam menjalankan pekerjaan setiap pegawai melakukan identifikasi, kontrol dan menghindari atau meminimalkan penggunaan bahan-bahan yang memberikan dampak negatif pada lingkungan serta mengurangi limbah Sistem manajemen lingkungan akan dilakukan peningkatan secara berkelanjutan.

L. HUBUNGAN DENGAN MASYARAKAT

Brantas sangat menyadari bahwa di manapun Perseroan beroperasi selalu berhubungan dengan masyarakat sekitar yang memiliki karakteristik yang berbeda. Oleh karena itu Brantas mempunyai komitmen bahwa hubungan baik serta pengembangan masyarakat sekitar merupakan landasan pokok bagi keberhasilan jangka panjang Perseroan.

Dalam hubungan dan kemitraan dengan masyarakat sekitar, Brantas akan senantiasa menerapkan berbagai prinsip antara lain :

1. Beradaptasi dengan perkembangan nilai-nilai budaya luhur masyarakat sekitar.
2. Berpartisipasi aktif dalam membantu pengembangan masyarakat sebagai rasa tanggung jawab sosial Perseroan.

2. Making efforts to refurbish numerous K3-related infrastructures on a sustainable basis;
3. Obtaining a series of K3-related certifications (SMK-3 for a number of projects, Zero Accident Award);
4. Involving the employees in the efforts to improve the implementation of occupational health and safety.

K. ENVIRONMENTAL MANAGEMENT

Brantas performs the corporate operations according to the applicable law and acceptable practice of construction industry standards as well as the environmental management policies and standards that reflect its concerns to the conservation. Brantas at all time evaluates its policy with respect to environment. In carrying out their tasks, each employee must identify, control and avoid or minimize the use of hazardous materials while reducing wastes. The environment management system must be given improvement in a sustainable manner.

L. RELATIONSHIP WITH COMMUNITY;

Brantas is exceptionally aware that the company operation constantly deals with the communities with diverse characteristics. Therefore, Brantas commits that good relationship and development of surrounding community is a basic foundation for long-term company success.

As for the relationship and partnership with the communities, Brantas continues applying various principles such as:

1. Adapting to the development of cultural core values in the society.
2. Active participation in facilitating the community development as the corporate social responsibility.

M. HUBUNGAN DENGAN MASYARAKAT

Brantas memiliki kebijakan yang mengharuskan Komisaris, Direksi, dan Pegawai yang mewakili Perseroan dalam setiap urusan Pemerintah dan politik, untuk patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur keterlibatan Perseroan dalam urusan publik.

Brantas mengakui hak setiap orang untuk menyalurkan aspirasi politik sesuai dengan keyakinannya. Oleh karena itu Perseroan tidak memperbolehkan seorangpun melakukan pemaksaan kepada orang lain sehingga membatasi hak individu yang bersangkutan untuk menyalurkan aspirasi politiknya.

Brantas memiliki kebijakan untuk meminta agar pegawai yang aktif dalam politik sebagai pengurus politik dan/atau menjadi calon legeslatif salah satu partai politik dalam pemilu untuk mengundurkan diri dari Perseroan sebagai mana ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sesuai Surat Edaran Kementerian BUMN nomor : SE 15/MBU/2008 tanggal 31 Juli 2008.

Brantas melarang pemberian sumbangan untuk partai politik manapun sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang. Praktik yang diterapkan Brantas dalam kaitannya dengan keterlibatan dengan politik diantaranya menyatakan Perseroan tidak akan memberikan dana, aset atau fasilitas Perseroan untuk kepentingan partai politik, seorang atau lebih calon anggota legeslatif, eksekutif dan yudikatif kecuali dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

N. PERNYATAAN PALSU, KLAIM PALSU DAN KONSPIRASI

Setiap pihak di dalam Perseroan, yang berkaitan dengan proyek mulai penyiapan proposal, negosiasi dan administrasi termasuk akuntansi untuk biaya dan kewajiban, kajian serta penulisan laporan, harus menyadari pentingnya membuat pernyataan (lisan maupun tertulis) yang akurat dan klaim yang benar kepada Direksi, Komisaris, Pemegang Saham, Pemerintah maupun pihak lain.

M. RELATIONSHIP WITH COMMUNITY

Brantas' policy requires its Boards of Commissioners and BoD and employees representing the Company in any government and political affairs to abide by the laws and regulations governing company involvement in public affairs.

Brantas recognizes everyone's right of political aspirations according to their beliefs. Therefore, it allows no one to force each other by limiting the individual rights to channel their political aspirations.

Brantas' policy also requires any employee involved in politics, being whether political organizer and/or legislative candidate for any political party to resign from the Company as provided for in applicable laws and regulations and in accordance with Circular of Minister of SOE number: SE 15/MBU/2008 dated 31 July 2008.

Brantas prohibits donations to any political party as provided by law. Brantas' practices in relation to the political engagement demonstrate that no fund, asset or facility shall be provided by the Company for the benefit of any political party, one or more incumbents for legislative, executive and judicative unless conducted in accordance with applicable laws and regulations.

N. FAKE STATEMENT, FAKE CLAIM AND CONSPIRACY

Any corporate entity involved in any project from the proposal, negotiation to administration that includes accounting for costs and liabilities, report study and writing must be aware of the importance of accurate and honest statement (oral or written) to the Board of Directors and Commissioners, Shareholders, Government and other related parties.

Adanya kesengajaan dalam menyampaikan pernyataan atau klaim yang tidak benar atau yang menyesatkan atau yang melibatkan adanya konspirasi dengan orang lain untuk merugikan Perseroan dapat mengakibatkan dikenakannya hukuman administratif atau bahkan tuntutan pidana bagi yang terlibat, baik Komisaris, Direksi dan Pegawai maupun pihak lain sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Praktik yang dikategorikan dalam Pernyataan Palsu adalah :

1. Tindakan yang secara sadar dilakukan untuk melakukan rekayasa kejadian, perbuatan yang direncanakan dengan sadar untuk mengelabui pihak-pihak tertentu dengan maksud-maksud mengambil keuntungan pribadi atau kelompok serta merugikan perusahaan;
2. Tindakan yang secara sadar dilakukan untuk membuat pernyataan yang menyesatkan dan tidak benar dalam proses evaluasi, atau audit sehingga menyesatkan/merugikan perusahaan;
3. Tindakan yang secara sadar dilakukan untuk membuat laporan palsu dengan maksud untuk melakukan penggelapan, misalnya menyembunyikan masalah teknis yang serius atau tidak melaporkan adanya penundaan pada jadwal kerja yang telah ditetapkan;
4. Tindakan yang secara sadar dilakukan untuk memalsukan dokumen dan sertifikat untuk mengambil manfaat pribadi merugikan perusahaan. Praktik yang dikategorikan dalam Klaim Palsu adalah tindakan yang secara sadar dilakukan dalam upaya memasukkan tagihan atau permintaan pembayaran berdasarkan data yang diketahui palsu. Penerapan atas kriteria ini termasuk data yang berkaitan dengan dokumen pengiriman, tagihan rekanan atau sub kontraktor, dan lain-lain yang merupakan dasar untuk melakukan klaim kepada perusahaan.

Praktik yang dikategorikan dalam Konspirasi adalah tindakan yang secara sadar dilakukan dalam upaya merencanakan dan melakukan kerjasama atau persekongkolan dengan pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindak kecurangan, penyelewengan dan pelanggaran hukum dan atau peraturan Perseroan dengan maksud mengambil keuntungan pribadi atau kelompok dari perusahaan.

Any conscious provision of fake or misleading statement or claim or in which a conspiracy to the detriment of the Company is involved may be subject to administrative penalties or even criminal prosecution for those involved, whether a Commissioner, Director or Employees as well as other parties as provided for in applicable laws and regulations.

Practices that fall under Fake Statement category include:

1. Any deliberate act to engineer events, any act consciously planned to mislead certain parties in the intention to gain any personal or collective benefit while causing harm to the Company;
2. Any deliberate act to make misleading and untruthful statement during evaluation or audit process which causes harm to the Company;
3. Any deliberate act to make fake report with the intent to commit fraud, such as keeping serious technical problem secret or having not reported any delays of any agreed work schedule;
4. Any deliberate act to falsify any document or certificate with the intent to gain personal gain while causing harm to the Company; Practice categorized under Fake Claims includes any deliberate act attempting to submit invoices or payment requests based on knowingly fake data. These criteria are applied to include data with respect to shipping documents, bills of partners or sub-contractors, and others serving as the basis for any claim addressed to the company.

Practices categorized as conspiracy include any deliberate act made in an attempt to craft and enter into cooperation or collusion to commit fraud, manipulation and violations to either applicable laws and regulations or company rules with the intent to take personal or collective gain from the Company.

O. ETIKA BERUSAHA DAN ANTI KORUPSI

Dalam rangka mewujudkan komitmen perusahaan menjadi good corporate citizen, Brantas mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh semua pihak dalam menciptakan iklim bisnis yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Oleh karena itu Brantas akan senantiasa berupaya untuk menerapkan etika berusaha yang dilandasi nilai-nilai luhur dan prinsip-prinsip bisnis yang berlaku secara umum.

Dalam melaksanakan prinsip tersebut di atas, Brantas melarang anggota Komisaris, Direksi dan Pegawai untuk menerima sesuatu yang berharga baik langsung maupun tidak langsung, yang patut diduga merupakan penyuapan atas tugas / jabatan yang menjadi kewenangannya. Brantas membuat suatu pedoman tentang perilaku etis, yang memuat nilai-nilai etika berusaha.

P. HUBUNGAN DENGAN PEJABAT NEGARA

Adalah kebijakan Perseroan untuk mengembangkan dan memelihara hubungan baik dan komunikasi efektif dengan setiap pejabat negara yang memiliki wewenang pada bidang operasi Perseroan dalam batas toleransi yang diperbolehkan oleh hukum.

Setiap kontak dengan pejabat Pemerintah harus dipelihara sebagai hubungan yang bersifat objektif dan wajar (armslength) dan harus dihindari terjadinya penyimpangan.

Perlakuan terhadap pejabat negara harus dilakukan dalam koridor hukum yang berlaku, dengan cara yang etis dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Q. DATA PERUSAHAAN DAN KERAHASIAAN INFORMASI

Setiap pejabat yang mempunyai kewenangan harus menyampaikan informasi yang relevan kepada auditor dan bekerjasama sepenuhnya dengan auditor internal dan auditor eksternal dalam proses audit kepatuhan atau penyidikan lainnya.

Brantas memiliki kebijakan untuk melarang setiap anggota Komisaris, anggota Direksi, Auditor Internal, Auditor Eksternal, Komite Audit dan Pegawai mengungkapkan

O. BUSINESS ETHICS AND ANTI CORRUPTION

In order to realize the company commitment to being a good corporate citizen, Brantas supported any effort made by all entities to create a business that is free from corruption, collusion and nepotism (KKN). Therefore, Brantas has made any effort at all time to adapt business ethics based on the company values as well as commonly accepted business principles.

In favor of the above principles, Brantas prohibits commissioners, directors and employees from receiving anything of value, directly or indirectly, suspected to be of bribery in relation to their authorities. Brantas shall prepare guidance for the code of conduct containing ethical principles of business.

P. RELATIONSHIP WITH STATE OFFICIAL;

It is the company policy to develop and maintain good relationships and effective communications with any state officials having authority in the corporate area of specialty within a tolerated limit the law shall approve.

Any contact with Government officials must be preserved as arm's length relationship and any irregularities that may arise from which must be avoided.

The dealing with any state official should be done according to applicable law, in such an ethical manner while not conflicting with applicable laws and regulations.

Q. CORPORATE DATA AND CONFIDENTIAL INFORMATION

Any authorized staff must provide relevant information to and fully cooperate with either internal or external auditor during a compliance audit or any other investigation.

At Brantas, it is prohibited for any member of the Board of Commissioners, the Board of Directors, Internal Auditors, External Auditors, Audit Committee and Employee to disclose the company confidential information or customers to any

informasi yang bersifat rahasia mengenai Perseroan atau pelanggan ke luar Perseroan baik selama masa kerja atau sesudahnya. Mengingat bahwa pengungkapan informasi rahasia tersebut akan merugikan Perseroan atau pelanggan dan memberikan keuntungan kepada pihak lain, maka pengungkapan pemberian informasi rahasia menurut keperluannya harus melalui persetujuan dari Direksi.

Perseroan juga bekerja dengan data khusus milik pemberi pekerjaan, rekanan dan mitra usaha patungan. Hal ini merupakan kepercayaan yang sangat penting dan harus dijaga oleh Perseroan. Oleh karena itu tidak seorangpun boleh mengungkapkan informasi rahasia tersebut kepada pihak luar tanpa persetujuan Direksi, atau tidak seorangpun boleh mengungkapkan informasi rahasia tersebut kepada yang lain kecuali diwajibkan oleh hukum.

R. KETERBUKAAN INFORMASI

Perseroan akan mengungkapkan informasi penting yang relevan dalam Laporan kepada pihak-pihak yang berwenang (Laporan Tahunan, Laporan Semesteran dan lain-lain) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tepat waktu, akurat, jelas dan objektif.

Perseroan akan selalu berusaha untuk memelopori dan mengambil inisiatif dalam mengungkapkan informasi keuangan dan non keuangan penting bagi pengambilan keputusan pemilik modal, kreditur dan pihak berkepentingan lainnya baik pengungkapan yang bersifat wajib maupun yang bersifat sukarela. Pengungkapan informasi tersebut, oleh Brantas dilakukan melalui Laporan Tahunan maupun media lain yang dianggap perlu.

Disamping informasi sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang undangan yang berlaku (neraca, laba rugi, arus kas, perubahan modal dll.), Perseroan juga mengungkapkan berbagai informasi penting dalam Laporan Tahunan meliputi :

1. Tujuan, sasaran usaha dan strategi Perseroan selama tidak merugikan kepentingan Perseroan;
2. Penilaian Perseroan oleh Komite Audit, Auditor Eksternal, Pencapaian Kesehatan, KPI;

outside party either during or after their employment. Given that such disclosure may be detrimental to the Company or its customers while at the same time providing benefits to other party, thus, a prior approval of the Board of Directors shall be required.

The Company also copes with specific data owned by the client, associates and joint venture partners. This reflects a fundamental sense of trust to be maintained by the Company. Therefore, in no case should a person disclose confidential information to outside parties without any prior approval of the BoD, or in no case should person disclose confidential information to others unless otherwise required by law.

R. INFORMATION TRANSPARENCY

The Company discloses relevant material information in the report to any concerned authorities (Annual and Mid-Term Reports, and others) in accordance with applicable laws and regulation in a punctual, accurate, clear and objective manner.

The Company makes reasonable efforts to pioneer and takes initiative to disclose both financial and non-financial information for decision-making purpose of the Shareholders, creditors and other concerned parties through either mandatory or voluntary nature of disclosure. As for such disclosure, Brantas seeks to provide information through Annual Report and any other media as deemed necessary.

In addition to the information required by applicable laws and regulations (balance sheet, income statement, cash flows, changes in capital, etc.), the Company also discloses a series of material information in the Annual Report which includes:

1. Company Objective and Strategy to the extent that no damage to the corporate interest is caused;
2. Company Assessment by the Audit Committee, External Auditor, Occupational Health Achievement, KPI;

3. Riwayat hidup anggota Komisaris, Direksi, serta gaji dan tunjangan mereka;
4. Jumlah rapat Komisaris dan Direksi beserta tingkat kehadirannya;
5. Sistem pemberian honorarium Auditor Eksternal;
6. Sistem penggajian dan pemberian tunjangan bagi anggota Komisaris, Direksi;
7. Faktor risiko yang material yang dapat diantisipasi, termasuk penilaian manajemen atas iklim berusaha dan faktor risiko;
8. Informasi material mengenai pegawai dan pihak yang berkepentingan
9. Klaim menyangkut nilai yang material yang diajukan oleh Perseroan atau terhadap Perseroan, serta perkara yang substansial yang ada di badan peradilan atau badan arbitrase yang melibatkan Perseroan.
10. Benturan kepentingan yang mungkin akan terjadi dan atau yang sedang berlangsung; dan
11. Pelaksanaan good corporate governance.

S. PENYELEWENGAN

Perseroan menetapkan kebijakan untuk melarang setiap bentuk penyelewengan dan senantiasa menerapkan prosedur yang wajib diikuti berkaitan dengan temuan, pengakuan, pelaporan, penyelidikan dan penyidikan terhadap kecurigaan adanya penyelewengan.

Menurut Perseroan yang termasuk dengan penyelewengan adalah :

1. Ketidakjujuran;
2. Penggelapan;
3. Pemalsuan atau perubahan surat berharga seperti cek Perseroan;

3. Curriculum vitae of the Board of Commissioners, the Board of Directors, including their remunerations and benefits;
4. Number of meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors and their attendance rates;
5. Remuneration scheme for External Auditor;
6. Payroll and benefit system for the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors;
7. Material risk factors that can be anticipated, including management assessment of business climate and risk factors;
8. Material information with respect to the employees and concerned parties.
9. Claims regarding the material value proposed by the Company or to the Company, as well as any substantial case in certain judicial or arbitration body involving the Company.
10. Conflict of interest likely to occur and/or ongoing, and implementation of Good corporate Governance.

S. MANIPULATION

The Company defines a policy prohibiting any form of manipulation and at all time applies the procedures to be followed in relation to the discovery, recognition, reporting, inquiry and investigation on any suspicion of the manipulation.

According to the Company, any act categorized as the manipulation includes as follows:

1. Dishonesty;
2. Embezzlement;
3. Forgery or alteration of securities such as company checks;

4. Penyalahgunaan asset yang dimiliki oleh Perseroan, Pegawai, Mitra Usaha atau Rekanan;
5. Pengalihan kas, surat berharga atau asset Perseroan lain untuk penggunaan pribadi;
6. Penanganan dan pelaporan transaksi Perseroan yang dilakukan tidak sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku;
7. Pemalsuan atas catatan akuntansi Perseroan atau laporan keuangan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lain yang merugikan Perseroan.

T. SOSIALISASI, IMPLEMENTASI DAN EVALUASI

Perseroan melakukan sosialisasi, implementasi dan evaluasi terhadap Panduan ini. Perseroan membentuk Tim yang diketuai oleh Sekretaris Korporat yang bertanggungjawab terhadap program sosialisasi, implementasi dan evaluasi Panduan Good Corporate Governance.

U. PELAPORAN PELANGGARAN PANDUAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Setiap anggota Komisaris, Direksi, Komite-Komite yang ada serta Pegawai dapat menyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran terhadap Panduan Good Corporate Governance ini kepada Perseroan secara pribadi, melalui surat. Tim sebagai mana disebut butir T di atas akan menindaklanjuti informasi pelanggaran kode ini. Tim tersebut akan menyediakan Kotak Pengaduan untuk keperluan tersebut.

Beberapa hal penting yang harus diperhatikan :

1. Secara Umum, pada prinsipnya semua Pelapor harus mengungkapkan identitasnya dengan jelas.
2. Penggunaan surat yang tidak beridentitas (surat kaleng) akan diperlakukan sebatas sebagai informasi awal dimana tindak-lanjutnya tergantung kepada tingkat keyakinan Tim atas kebenaran substansi masalah yang dilaporkan
3. Tidak ada hukuman yang dijatuhkan kepada pihak pelapor manakala pelanggaran tersebut benar terjadi, kecuali apabila yang bersangkutan juga terlibat dalam

4. Misuse of assets owned by the Company, Employee, Business Partner or Partner;
5. Transfer of cash, securities or other company assets for personal use;
6. Handling and reporting of the company transactions conducted not according to procedures and applicable rules;
7. Forgery of company accounting records or financial statements for personal gain or other interests causing the company loss.

T. SOCIALIZATION, IMPLEMENTATION AND EVALUATION

The Company conducts socialization, implementation and evaluation of this Code. The Company forms a team chaired by Corporate Secretary responsible for the socialization, implementation and evaluation of the Good Corporate Governance guidelines.

U. REPORTING VIOLATION TO THE GOOD CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES

Any member of the Board of Commissioners, the Board of Directors, Committees and Employees may submit a report on any alleged violation of the Good Corporate Governance guidelines to the Company either in person or by mail. The team as referred to in point T must follow up the information as to violation of this Code. The team must make available a Complaint Desk for this purpose.

Points of attention:

1. As a rule, the Complainants must clearly disclose their identities.
2. The use of anonymous letter is treated merely as initial information whereby the follow-up depends on the level of confidence of the team in substantial correctness of the reported issues
3. No punishment should be sentenced to the complainant when a breach actually occurs, unless the concerned complainant is also involved in

pelanggaran Panduan Good Corporate Governance ini. Dalam hal ini pengungkapan hal tersebut dapat merupakan faktor yang meringankan. Apabila pelanggaran tersebut benar terjadi dan pihak pelapor tidak terlibat di dalamnya, maka kepada pihak pelapor akan diberikan penghargaan yang sesuai.

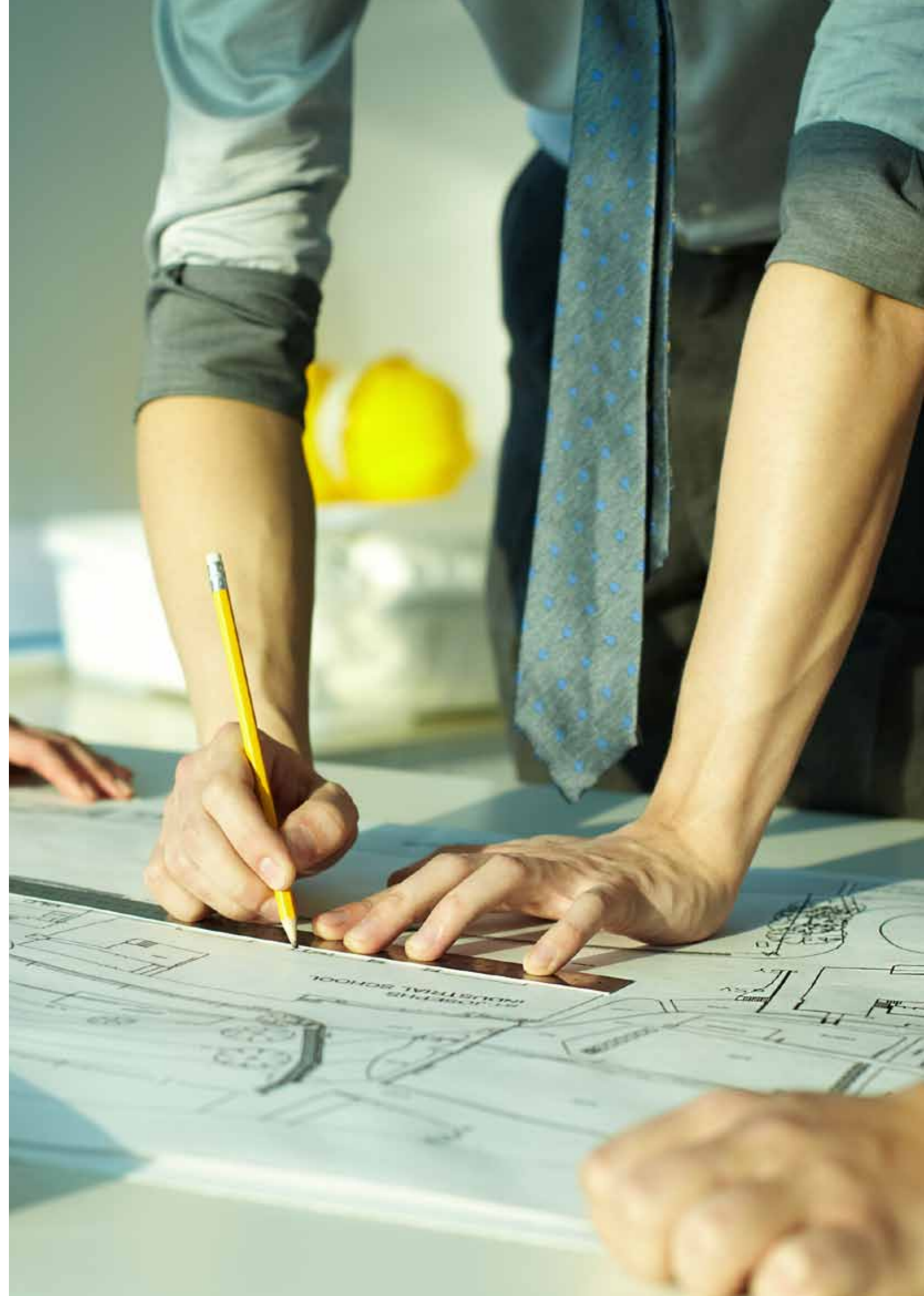
4. Tim tersebut akan berpegang teguh pada azas praduga tak bersalah.
5. Kerahasiaan tetap dijaga kecuali apabila pengungkapan tersebut :
 - a. Diperlukan dalam kaitan dengan laporan atau penyidikan yang dilakukan oleh Pemerintah,
 - b. Sejalan dengan kepentingan Perseroan dan sejalan dengan tujuan Panduan Good Corporate Governance ini,
 - c. Diperlukan oleh Bagian Hukum untuk mempertahankan posisi Perseroan di depan Hukum.

Kotak Panduan tersebut tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk menyampaikan keluhan pribadi.

such violation to this Good Corporate Governance Guidelines. In this case, such disclosure may become an easing factor. If violation really occurred and the complainant was found not guilty, he/she must, thus, be given appropriate award.

4. The team must steadfastly hold the principle of presumption of innocence.
5. Confidentiality must be kept except where any disclosure is:
 - a. Required in connection with a report or investigation by the Government,
 - b. In line with the company interests and in accordance with the purpose of this Good Corporate Governance Guidelines,
 - c. Required by Legal Division to defend the company position before the law.

The Complaint Desk is not intended as a mechanism for personal grievances.



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Corporate Sosial Responsibility



Tanggung Jawab

- Memenuhi komitmen kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan Perseroan.
- Memenuhi semua rencana kerja dan target-target yang ditetapkan dengan memberdayakan seluruh aset Perseroan secara efektif dan efisien.
- Disiplin menjalankan semua aturan dan memegang teguh rahasia Perseroan.

Responsibility

- To fulfill commitment to the concerned parties in relation to the company activities.
- To realize the agreed work plans and targets by empowering all of the company assets in an effective and efficient manner.
- To be strict in applying the rules and keeping the company secret.



PT. Brantas Abipraya (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di sektor konstruksi umum. Bidang usaha Perusahaan ini tidak hanya menangani proyek-proyek irigasi, tetapi juga telah melaksanakan proyek bergengsi yang terletak di dalam dan di luar negeri. Proyek tersebut, antara lain bendungan, terowongan, jalan dan jembatan, bandara, bangunan, pembangkit listrik, dan banyak lagi.

Sebagai entitas bisnis yang dikelola profesional, Perusahaan dituntut untuk mampu menjalankan seluruh kegiatan bisnis dan operasionalnya secara berkelanjutan. Karenanya menjadi penting bagi Perusahaan untuk tidak semata-mata mendapatkan keuntungan (profit), tetapi juga memberikan perhatian kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat (people) dan kelestarian lingkungan (planet).

Untuk itulah, konsep CSR yang diterapkan oleh Brantas didasari oleh tiga prinsip yang dikenal dengan istilah Triple Bottom Lines, atau dikenal dengan 3P (People, Profit, Planet) yaitu kepedulian perusahaan yang menyisihkan sebagian keuntungannya (profit) bagi kepentingan pembangunan manusia (people) dan lingkungan (planet). Ini dilakukan agar keberadaan perusahaan dapat tumbuh dan berkelanjutan. Hal ini merupakan suatu konsep bahwa organisasi Brantas memiliki suatu tanggung jawab sosial terhadap pemegang saham, karyawan, konsumen, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan. Selain itu, juga memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat ataupun masyarakat luas, bersamaan dengan peningkatan taraf hidup pekerjaannya beserta seluruh keluarganya.

Aspek Ekonomi

Keberadaan proyek Brantas yang tersebar di berbagai wilayah di Tanah Air, secara langsung maupun tidak langsung memberikan manfaat terhadap perekonomian daerah dan masyarakat setempat. Manfaat secara langsung, antara lain diwujudkan melalui:

- Rekrutmen masyarakat setempat sebagai pekerja, sehingga mengurangi tingkat pengangguran di daerah masing-masing.
- Pembangunan infrastruktur yang ditujukan untuk perbaikan kualitas hidup masyarakat.

PT. Brantas Abipraya (Persero) is a State-Owned Enterprise (SOE) specialized in the general construction sector. The corporate business field deals with not only irrigation, but also other prestigious projects located inside and outside the country. The project covers among others dams, tunnels, roads and bridges, airports, buildings, power plants, and many more.

As a professionally managed business entity, the Company is required running the entire business activities and operations in a sustainable manner. Therefore, it becomes important for the company to achieve not only profit, but also improvement of social welfare (people) and natural conservation (planet).

For this reason, the CSR is applied by Brantas based on three principles known as Triple Bottom Lines, or also known as 3P (People, Profit, Planet), i.e. the corporate responsibility to set aside part of its profits for the benefit of human development (people) and environment (planet). This is done in order for the corporate existence to develop and progress. It constitutes a concept that Brantas organization has social responsibility to the shareholders, employees, customers, communities and the environment in all aspects of the company operations. In addition thereto, it also contributes to the economic development of the local community or society at large, along with the improvement of living standards of its employees as well as their families.

The Economics

The existence of Brantas projects in various regions in the country whether directly or not, provides benefits to the local economy and communities. The direct benefit, among others, was realized through:

- Recruitment of indigenous people as workers, that unemployment rate can be reduced in respective area.
- Infrastructure development is aimed at improving the quality of public livelihood.



- Pemberian berbagai bantuan kepada masyarakat sekitar yang ditujukan untuk perbaikan kesejahteraan masyarakat setempat.

1. Prioritaskan Pemasok Lokal

Kontribusi terhadap perekonomian di masing-masing daerah yang menjadi lokasi keberadaan proyek Brantas Abipraya juga diwujudkan Perusahaan melalui penyertaan perusahaan-perusahaan lokal sebagai pemasok. Baik untuk pengadaan barang maupun pelayanan jasa. Kebijakan Perusahaan ini membuka peluang tumbuhnya lapangan kerja guna menyuplai kebutuhan proyek yang sedang dikerjakan.

2. Utamakan Pekerja Lokal

Kebijakan dalam proses penerimaan tenaga kerja, Brantas tetap memberikan kesempatan kepada masyarakat di sekitar lokasi proyek yang sedang dikerjakan untuk dapat bekerja membantu pembangunan proyek tersebut. Hal ini secara langsung membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar dan tentu saja juga menambah pengalaman masyarakat untuk bekerja dalam satu tim besar mengerjakan proyek yang berskala besar juga. Namun demikian, berkaitan tuntutan yang tinggi atas semua pekerja yang terlibat dalam proyek yang sedang dikerjakan, Perusahaan tetap melakukan seleksi ketat terhadap calon pekerja.

- Provision of a variety of assistance to the local communities is aimed at improving their welfare.

1. Prioritizing Local Suppliers

Contribution to economy in each region in which Brantas Abipraya projects are located, it is also realized through a participation of local companies as suppliers for the procurement of both goods and services. The company policy opens opportunities of the employment growth to supply the needs of the ongoing projects.

2. Prioritizing Local Workers

As for the company policy on recruitment process, Brantas continues giving opportunity to local members of the community to work for the ongoing projects in their respective areas in supporting the project development. This is created an open labor market for the local community and of course added to their experiences to be part of a large team dealing with some large-scale projects. However, as for a high demand of the workers to be involved in the ongoing projects, the Company conducts a high profile of selection process for prospective employees.

Secara tidak langsung masyarakat yang terlibat dalam pekerjaan ini akan dilatih untuk bekerja secara profesional dan disiplin, yang menjadi tuntutan dasar dari Brantas. Dampak ke depan, masyarakat akan terinternalisasi bagaimana harus bekerja dengan standar disiplin yang tinggi dan dapat menjadi bekal dalam hidup mereka selanjutnya.

Secara terbatas Perusahaan memberikan kewenangan kepada pimpinan proyek, untuk melakukan rekrutmen tenaga kerja terutama yang bersifat untuk dukungan operasional lapangan. Di antaranya adalah tenaga pengamanan (security), tenaga tukang dan pembantu tukang. Tentu saja dalam pelaksanaan rekrutmen, tetap harus memperhatikan kebijakan penerimaan pegawai secara umum, proses seleksi dan monitoring tetap dijalankan oleh Kantor Pusat.

Adapun untuk proses rekrutmen terhadap tenaga kerja berkeahlian, dengan latar belakang pendidikan Sarjana (S1) dan Diploma (D III), dilakukan sepenuhnya oleh Kantor Pusat di Jakarta. Sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, proses penerimaan pegawai dilaksanakan secara terbuka dan sejak pendaftaran penerimaan telah dipublikasikan secara nasional.

Kesempatan kerja bagi masyarakat di sekitar lokasi proyek-proyek yang sedang dikerjakan, juga dilaksanakan melalui kebijakan Perusahaan yang mengharuskan mitra kerja maupun perusahaan pemasok lokal untuk menggunakan tenaga kerja lokal. Melalui kebijakan ini maka jumlah masyarakat lokal di sekitar proyek yang bisa merasakan manfaat langsung dengan menjadi tenaga kerja di masing-masing proyek juga bertambah banyak.

Dengan menjadi tenaga kerja, baik di proyek Brantas maupun pada perusahaan mitra kerja dan pemasok, maka warga setempat memperoleh imbal jasa pekerjaan atau upah. Selanjutnya upah yang didapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan

Indirectly, the people involved in the project will be trained to work in such a professional and disciplined manner, which is of the basic company requirements. To the future, they will become internalized on how to deal with high standard of discipline at work, which can be an added value for their further lives.

To a limited scope, the Company gives authority to the project leaders to recruit the workers particularly in support of the field operations. They are posted as security personnel, construction workers and helper. Obviously, during the selection process, the company policies for general recruitment should be considered while the monitoring is conducted by Head Office.

On the other hand, the recruitment of qualified staff with educational backgrounds of Bachelor (S1) and Diploma (D III) is entirely conducted by the Head Office in Jakarta. With reference to the principles of the good corporate governance, the hiring process is carried out in a transparent manner and was published throughout the nation since the registration phase.

The job opportunities for indigenous people in the surroundings of the ongoing projects are also given by taking into account the corporate policy that requires its partners and local suppliers to use local workforce. Given this policy, number of the local communities around projects which directly benefit from the projects also highly increase.

Given their involvement, both at Brantas project and under local partners' payroll, the local people gain their compensation or wage. Furthermore, such earned wages are utilized to satisfy their daily needs, so that their welfare becomes increasingly

hidup sehari-hari, sehingga kesejahteraan mereka menjadi lebih baik. Khusus untuk tenaga kerja di Brantas, pemberian imbal jasa pekerjaan didasarkan pada sistem remunerasi yang berlaku sesuai dengan Keputusan Direksi. Kebijakan itu dengan mempertimbangkan besaran upah minimum provinsi (UMP) yang ditetapkan Dewan Pengupahan setempat.

Adapun besaran upah yang diterima karyawan Perusahaan pada golongan terendah, baik di kantor pusat maupun yang bertugas di proyek, masih lebih besar dibanding dengan UMP 2011 yang ditetapkan Dewan Pengupahan setempat. Brantas Abipraya juga mewajibkan perusahaan penyedia tenaga kerja alihdaya (outsourcing) di lingkungan Perusahaan, untuk memberlakukan hal yang sama kepada para karyawannya. Dengan demikian dapat dipastikan, besaran upah yang diterima oleh mereka selama tahun 2011, minimal telah sama dengan UMP yang ditetapkan Dewan Pengupahan setempat.

3. Penyaluran Dana Kemitraan dan Program Bina Lingkungan

Landasan hukum dalam menjalankan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan :

1. Peraturan Menteri BUMN nomor : Per-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.
2. Keputusan Menteri Negara BUMN No.KEP-100/MBU/2002 tanggal 04 Juni 2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara.
3. Rencana Kerja Anggaran (RKA) Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun 2011 dan 2010.
Mitra Binaan yang dibina oleh Brantas adalah usaha kecil yang berbentuk usaha perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi dan

better. For those under the company payroll of Brantas, the compensation is based on the applicable remuneration system in accordance with the Decision of the Board of Directors. This policy takes into account the provincial minimum wage (UMP) established by the local remuneration council.

The amount of wages received by the employees of the lowest rank, both at head office and those assigned to a project, remains greater than 2011 UMP established by the local remuneration council. Brantas Abipraya also requires the outsourcing providers within the Company to apply the same to their employees. Thus, it can be ascertained that the amount of wage they earned during the year 2011 was at least equal to the minimum wage set forth by the local remuneration council.

3. Distribution of Partnership Fund and Environmental Development Program

The legal basis for the Partnership by SOE with Small Business and Community Development Program:

1. Ministerial Decree of SOE Number: Per-05/MBU/2007 dated April 27, 2007 on the Partnership by SOE with Small Business and Community Development Program.
2. Ministerial Decree of SOE No. KEP-100/MBU/2002 dated June 4, 2002 on Assessment of Soundness of State-Owned Enterprise.
3. Work Plan and Budget (RKA) for Partnership and Environmental Development Program of 2011 and 2010.
The partners developed by Brantas cover small business of individual persons, informal or formal business entities, including cooperation having adequate legality/permits that meets one of the administrative requirements. The

mempunyai legalitas/surat ijin sebagai salah satu persyaratan administrasi. Tugas pokok dan fungsi Unit Pelaksana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Brantas, sesuai dengan Keputusan Menteri Negara BUMN No : PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 antara lain sebagai berikut :

1. Membentuk unit Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan
2. Menyusun Standar Operating Procedure (SOP) untuk pelaksanaan PKBL
3. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PKBL
4. Melakukan evaluasi, seleksi dan penetapan calon Mitra Binaan
5. Menyiapkan dan menyalurkan dana Program Kemitraan kepada Mitra Binaan dan dana Program Bina Lingkungan kepada masyarakat
6. Melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap Mitra Binaan
7. Mengadministrasikan kegiatan pembinaan
8. Melakukan pembukuan atas program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan
9. Menyampaikan laporan pelaksanaan PKBL yang meliputi laporan berkala baik triwulanan maupun tahunan kepada Menteri BUMN.

Tugas pokok Bagian Bina Lingkungan adalah memberdayakan kondisi sosial masyarakat melalui bantuan :

1. Korban bencana alam
2. Pendidikan dan /pelatihan
3. Peningkatan kesehatan
4. Pengembangan sarana dan prasarana umum
5. Bantuan sarana peribadatan
6. Bantuan Pelestarian alam

main tasks and functions of the Partnership and Environmental Development Program Unit at Brantas, according to the Ministerial Decree of SOE Number: PER-05/MBU/2007 dated April 27, 2007 are as follows:

1. To establish Partnership and Environmental Development Program Unit
2. To prepare Standard Operating Procedure (SOP) for PKBL implementation
3. To prepare Work Plan and Budget (RKA) for PKBL
4. To conduct evaluation, selection, and award of development partner
5. To prepare and distribute the Partnership fund to the development partners and Environmental Development Program fund to the community
6. To provide monitoring and assistance to the development partner
7. To administer the development activities
8. To conduct bookkeeping of the Partnership and Environment Development Program
9. To submit the PKBL implementation report which includes periodic reports, either quarterly or annually to the Minister of SOE.

The main tasks of the Environmental Development Division include strengthening the social condition through donations:

1. Natural disaster victims
2. Education and/or training
3. Health Improvement
4. Development of public facility and infrastructure
5. Religious facility donation
6. Natural conservation donation

Keberadaan Brantas Abipraya juga membawa manfaat tidak langsung bagi masyarakat sekitar. Manfaat tersebut diwujudkan Perusahaan melalui pelaksanaan Program Kemitraan. Program Kemitraan adalah program pemberdayaan dan peningkatan ekonomi masyarakat, melalui pemberian pinjaman kemitraan untuk modal kerja dan investasi. Selain itu melalui Program Kemitraan, Perusahaan juga memberikan bantuan pembinaan berupa bantuan pelatihan manajemen usaha, bantuan pemasaran (promosi/pameran) dan lain-lain.

Program ini juga bertujuan untuk meningkatkan kompetensi usaha kecil yang dijalankan masyarakat, sehingga menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Melalui program ini maka setiap usaha kecil yang telah berkembang diharapkan juga bisa menyerap tenaga kerja dari masyarakat lokal, sehingga mereka mendapatkan penghasilan. Dengan demikian masyarakat sekitar yang tidak bisa bekerja di proyek Brantas Abipraya, tetap bisa merasakan manfaat dari kehadiran Perusahaan.

Pinjaman kemitraan kepada usaha kecil yang diberikan Perusahaan sifatnya non-komersial. Mekanisme penyalurannya dilakukan berdasarkan evaluasi atas persyaratan serta angsuran yang disesuaikan dengan kemampuan usaha. Efektivitas penyaluran dana kemitraan pada tahun 2011 sebesar Rp 210 juta atau sebesar 100% dari RKA 2011. Jumlah penyaluran dana kemitraan berdasarkan unit usaha dalam tahun 2011 sebanyak 6 unit, sesuai dengan RKA 2011.

Perkembangan mitra binaan dalam tahun 2011 mengalami kenaikan dalam pengembalian angsuran pinjaman. Total angsuran yang diterima sebesar Rp 203.691.795, sedangkan dalam tahun 2010 adalah sebesar Rp 162.546.760. Penerimaan angsuran di tahun 2011 sebesar 92,80 % dari total penerimaan RKA tahun 2011.

The existence of Brantas Abipraya also brings indirect benefit to the surrounding community. Such benefit is actualized by the Company through the implementation of Partnership Program. The Partnership Program aims at empowering and improving the public economy through partnership loans for working capital and investment. In addition thereto, through this program, the Company also gives assistance of business management coaching, marketing (promotion/exhibition) and others.

It also aims at improving the competence of small businesses, making them stronger and more independent. Through this program, each of them which have grown is also expected to absorb labor force from the local community for their own earnings. Thus, any member of the surrounding community not able to work in Brantas project remains to acquire benefit from the presence of the Company.

The Partnership loan to small business granted by the Company is non-commercial in nature. The channeling mechanism is based on an evaluation of eligibility and repayment terms tailored to the business ability. The effectiveness of the partnership funds in 2011 reached USD 210 million or 100% of the RKA 2011. As many as 6 units of the partnership funds by business unit in 2011 were reached according to the RKA 2011.

The progress made with respect to the development partners in 2011 comprised an increase of the loan repayment. A total installments of Rp 203,691,795, was received while in the year 2010 it reached as much as USD 162,546,760. Receivable installments in 2011 reached 92.80% of total revenue in RKA 2011.

Besaran Dana Program Kemitraan yang disalurkan untuk kegiatan Program Kemitraan beserta jumlah PUKK selama tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut :

The amount of funds distributed to the Partnership Program activities and the amount PUKK over the last three years are as follows:

TAHUN	Jumlah Dana disalurkan (Rupiah)	Jumlah PUKK
2009	Rp 130 Juta	6 Perusahaan
2010	Rp 160 Juta	5 Perusahaan
2011	Rp 210 Juta	6 Perusahaan

Aspek Sosial

Komitmen Perusahaan dalam pemenuhan aspek sosial terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial adalah keterlibatan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat di sekitar lokasi proyek konstruksi. Hal tersebut diwujudkan Perusahaan dalam bentuk pelaksanaan Program Bina Lingkungan, yakni program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat dan peningkatan kualitas hidup, yakni bantuan pendidikan berupa beasiswa, sunatan massal, bantuan kepada korban bencana.

Social Aspects

The company commitment in fulfilling the social aspects in relation to the social responsibility comprises its involvement in improving the community welfare, especially those in construction project surroundings. It is realized through an implementation of Environmental Development Program, i.e. a community empowerment, and improving life quality, i.e. educational aid of scholarships, mass circumcision and donations to disaster victims.



Pelaksanaan Program Bina Lingkungan sudah dijalankan cukup lama. Kegiatan yang dilaksanakan dalam kurun waktu tersebut mencakup kegiatan-kegiatan yang dapat dikategorikan dalam program strategis dan program responsif dalam bentuk pemberian bantuan yang sifatnya insidental, memenuhi kebutuhan sesaat, ataupun tanggap darurat.

Khusus untuk tahun 2011, dari semua objek bantuan Program Bina Lingkungan, Perusahaan memprioritaskan pemberian bantuan di bidang pendidikan. Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat menjadi perhatian utama Perusahaan dalam pelaksanaan kegiatan Program Bina Lingkungan. Hal ini didasarkan pada pertimbangan pendidikan merupakan salah satu pondasi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sepanjang tahun 2011, Perusahaan telah menyalurkan dana untuk bidang pendidikan dan pelatihan sebesar Rp 195 juta.

Beasiswa tersebut diberikan kepada siswa berprestasi yang kurang mampu. Dari jumlah beasiswa sebanyak Rp 195 juta tersebut, dengan perincian untuk tingkat SD sebanyak Rp 50 juta, SMP sebanyak Rp 50 juta, SMA sebanyak Rp 40 juta, SMK sebanyak Rp 25 juta, dan untuk perguruan tinggi sebanyak Rp 30 juta. Anak-anak Asuh yang dibina seluruhnya berjumlah 303 anak dari tingkat SD sampai dengan Mahasiswa yang tersebar diseluruh Indonesia.

The Environmental Development Program has run quite for long. Activities conducted during this time include those categorized as strategic and responsive programs in the form of incidental aid to meet immediate needs, or emergency response.

Especially for the year 2011, of all the Environmental Development Program objects, the Company prioritized the provision of education aid. Improving the public education quality becomes a major concern during the Environmental Development Program implementation. This is based on the consideration that education is one of foundations to improve public welfare. During the year 2011, the Company distributed funds for education and training worth Rp 195 million.

The scholarship was awarded to the outstanding students from vulnerable households. The scholarship fund was allocated Rp 195 million, with the details as follows: Rp 50 million for primary school, Rp 50 million for junior high school, Rp 40 million for senior high school, Rp 25 million for vocational school, and Rp 30 million for university students. Foster children assisted by the Company were 303 children from primary school up to university students throughout Indonesia.

Bidang	Tahun 2011		Tahun 2010		Tahun 2009		Description
	Jumlah Dana	Jumlah Anak	Jumlah Dana	Jumlah Anak	Jumlah Dana	Jumlah Anak	
1. Pendidikan (Anak Asuh)	359.180.700	303					1. Education (Foster Children)
2. Kesehatan (Sunatan Massal)							2. Health (Mass Circumcision)
3. Bantuan Social - Bencana - Sembako - Santunan							3. Social Aids - Disaster - Health - Contribution